



Katalog: 9199017

LAPORAN BULANAN

# DATA SOSIAL EKONOMI

EDISI

**91**

DESEMBER  
2017



**BADAN PUSAT STATISTIK**

LAPORAN BULANAN

# DATA SOSIAL EKONOMI

EDISI

**91**

DESEMBER  
2017

# Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi

**Desember 2017**

**ISSN:** 2087-930X

**Katalog:** 9199017

**No. Publikasi:** 03220.1717

**Ukuran Buku:** 18,2 cm x 25,7 cm

**Jumlah Halaman:** xxii + 219 halaman

**Naskah:**

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan  
Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan  
Direktorat Statistik Distribusi  
Direktorat Neraca Produksi  
Direktorat Statistik Harga  
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata  
Direktorat Neraca Pengeluaran  
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial  
Direktorat Statistik Industri  
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

**Penyunting:**

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

**Gambar Kulit:**

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

**Dicetak dan Diterbitkan Oleh:**

©Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# HEADLINES

## 1. Inflasi

Pada November 2017 terjadi inflasi sebesar 0,20 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 2,87 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2017 terhadap November 2016) sebesar 3,30 persen.

## 2. Pertumbuhan PDB

- Ekonomi Indonesia triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 (*y-on-y*) tumbuh 5,06 persen meningkat dibandingkan capaian triwulan III-2016 sebesar 5,01 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan III-2017 dibanding triwulan II-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 3,18 persen (*q-to-q*).

## 3. Ekspor

- Nilai ekspor Oktober 2017 sebesar US\$15,09 miliar, naik 3,62 persen jika dibanding ekspor September 2017 dan naik 18,39 persen dibanding ekspor Oktober 2016.
- Nilai ekspor nonmigas Oktober 2017 mencapai US\$13,67 miliar yang terdiri dari produk hasil pertanian US\$0,35 miliar, hasil industri pengolahan US\$10,88 miliar, serta hasil tambang dan lainnya US\$2,45 miliar.

## 4. Impor

- Nilai impor Oktober 2017 sebesar US\$14,19 miliar, naik 11,04 persen dibanding impor September 2017 dan naik 23,33 persen jika dibanding impor Oktober 2016.
- Nilai impor menurut golongan penggunaan barang Oktober 2017 mencakup barang konsumsi sebesar US\$1,25 miliar, bahan baku/penolong US\$10,77 miliar, dan barang modal US\$2,17 miliar.

## 5. Upah Buruh

- Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Oktober 2017 naik masing-masing sebesar 0,25 persen dan 0,05 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya.
- Upah riil harian buruh tani Oktober 2017 naik sebesar 0,40 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, upah riil harian buruh bangunan Oktober 2017 naik 0,04 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya.

## 6. Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Perdesaan dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- NTP November 2017 naik 0,28 persen dibanding Oktober 2017.
- Pada November 2017, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,36 persen.
- NTUP November 2017 naik 0,42 persen dibanding Oktober 2017.

## 7. Harga Pangan

- Rata-rata harga beras November 2017 sebesar Rp 13.429,00 per kg, naik 0,62 persen dari bulan sebelumnya.
- Harga cabai merah naik 8,90 persen; telur ayam ras naik 1,85 persen; sedangkan harga cabai rawit turun 1,50 persen.

## 8. a. Indeks Harga Produsen

Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) pada Indeks Harga Produsen (IHP) triwulan III-2017 naik 0,68 persen terhadap triwulan II-2017 ( $q$ -to- $q$ ) dan naik 3,28 persen terhadap triwulan III-2016 ( $y$ -on- $y$ ).

## b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

- IHPB Umum Nonmigas November 2017 naik sebesar 0,39 persen dibanding bulan sebelumnya.
- Pada Oktober 2017 IHPB Umum naik sebesar 0,66 persen dibanding bulan sebelumnya.

## 9. Indeks Tendensi Bisnis dan Konsumen

- Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan III-2017 sebesar 112,39. Hal ini menunjukkan kondisi bisnis meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme pelaku bisnis pada triwulan III-2017 juga meningkat jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan II-2017 (nilai ITB sebesar 111,63).
- Nilai ITB pada triwulan IV-2017 diprediksi sebesar 109,70. Dengan demikian, kondisi bisnis diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, tingkat optimisme pelaku bisnis diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan III-2017.
- Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada triwulan III-2017 sebesar 109,42. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi konsumen meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, tingkat optimisme konsumen pada triwulan III-2017 lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan II-2017. Kondisi ini tercermin dari nilai ITK triwulan III-2017 yang lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai ITK triwulan II-2017 (nilai ITK sebesar 115,92).

- ITK nasional pada triwulan IV-2017 diperkirakan sebesar 105,49. Dengan demikian, kondisi ekonomi konsumen diperkirakan meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, tingkat optimisme konsumen diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan triwulan III-2017.

#### 10. Industri

- Pertumbuhan produksi industri pengolahan/manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan III-2017 naik 5,51 persen dibanding triwulan III-2016 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 2,27 persen dari triwulan II-2017 (*q-to-q*).
- Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan III-2017 naik 5,34 persen dibanding triwulan III-2016 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 0,66 persen dari triwulan II-2017 (*q-to-q*).

#### 11. Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman selama Januari–Oktober 2017 mencapai 11,62 juta kunjungan atau naik 23,55 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2016.
- TPK Hotel Berbintang pada bulan Oktober 2017 mencapai 56,93 persen atau naik 0,80 poin dibanding TPK Oktober 2016, sementara itu mengalami penurunan 1,49 poin dibandingkan TPK September 2017.

#### 12. Transportasi

- Jumlah penumpang angkutan udara domestik Oktober 2017 turun 0,38 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang angkutan udara internasional Oktober 2017 turun 5,64 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Oktober 2017 naik 1,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang kereta api Oktober 2017 naik 7,91 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

#### 13. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Oktober 2017

- Rupiah terdepresiasi 1,27 persen terhadap dolar Amerika.
- Rupiah terapresiasi 0,28 persen terhadap dolar Australia.
- Rupiah terdepresiasi 0,05 persen terhadap yen Jepang.
- Rupiah terdepresiasi 0,97 persen terhadap euro.

#### 14. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, menunjukkan 1 dari 3 atau 33,4 persen perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 atau 9,4 persen perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.

#### 15. Ketenagakerjaan

- Pada Agustus 2017, jumlah penganggur sebanyak 7,04 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50 persen.
- Dalam setahun terakhir (Agustus 2016–Agustus 2017), jumlah penganggur naik sebanyak 10 ribu orang.

#### 16. a. Kemiskinan Maret 2017

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang (10,64 persen), naik 6,90 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang (10,70 persen).

#### b. Ketimpangan Pengeluaran Maret 2017

Pada Maret 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,393. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,394 dan *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,397.

#### 17. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2016, IPM Indonesia telah mencapai 70,18, memasuki IPM kategori “Tinggi”. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,91 persen dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2015 yang sebesar 69,55.

#### 18. Indeks Perilaku Anti Korupsi

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2017 sebesar 3,71 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 3,59.
- Indeks Persepsi meningkat dari tahun 2015 ke 2017, dari 3,73 menjadi 3,81 Sementara indeks pengalaman juga meningkat dari 3,39 pada tahun 2015 menjadi 3,60 pada tahun 2017.
- IPAK 2017 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (3,86) lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan (3,53).

- Pendidikan kemungkinan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK, atau semakin tinggi pendidikan semakin anti korupsi. IPAK 2017 untuk masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,58, SLTA sebesar 3,99, dan di atas SLTA sebesar 4,09.
- IPAK masyarakat dengan usia 40 sampai 59 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun atau lebih dari 60 tahun. IPAK masyarakat usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,74, IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,71, sedangkan IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas sebesar 3,62.

#### 19. Sensus Ekonomi 2016

- Hasil pendaftaran (*Listing*) Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) tercatat sebanyak 26,71 juta usaha/perusahaan, meningkat 17,51 persen dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 22,73 juta usaha/perusahaan.
- Bila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta usaha/perusahaan (98,33 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 0,45 juta usaha/perusahaan (1,67 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB).
- Jumlah tenaga kerja hasil SE2016 tercatat sebanyak 70,32 juta, yang didominasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,37 juta tenaga kerja atau 31,81 persen dari tenaga kerja yang ada di Indonesia.

#### 20. Kependudukan

- Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 261.890,9 ribu orang.
- Piramida Penduduk Indonesia tahun 2017 termasuk tipe *expansive* dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.

#### 21. Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 sebesar 70,69 pada skala 0–100.

## 22. Indeks Demokrasi Indonesia 2016

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mencapai angka 70,09 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2015 yang sebesar 72,82. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori: yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
- Perubahan dari 2015–2016 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang turun 3,85 poin (dari 80,30 menjadi 76,45), (2) Hak-Hak Politik yang turun 0,52 poin (dari 70,63 menjadi 70,11), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi yang turun 4,82 poin (dari 66,87 menjadi 62,05).

<https://www.bps.go.id>

# KATA PENGANTAR

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap awal bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi Desember 2017 ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan inflasi (s.d. November 2017), perkembangan triwulanan pertumbuhan ekonomi (s.d. triwulan III-2017), ekspor-impor (s.d. Oktober 2017), upah buruh (s.d. Oktober 2017), nilai tukar petani dan harga pangan (s.d. November 2017), harga produsen (s.d. triwulan III-2017) dan harga perdagangan besar (s.d. November 2017), perkembangan triwulanan indeks tendensi bisnis dan konsumen (s.d. triwulan III-2017), perkembangan triwulanan indeks produksi industri (s.d. triwulan III-2017), pariwisata (s.d. Oktober 2017), transportasi (s.d. Oktober 2017), nilai tukar eceran rupiah Oktober 2017, prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (hasil SPHPN 2016), ketenagakerjaan (s.d. Agustus 2017), data kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia Maret 2017, indeks pembangunan manusia 2016, indeks perilaku anti korupsi Indonesia (IPAK) 2017, Sensus Ekonomi 2016, kependudukan Juni 2017, indeks kebahagiaan Indonesia 2017, indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2016, perdagangan komoditas strategis 2017, serta indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) 2012-2016.

Lebih lanjut, keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (*official statistics*) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Apabila masih diperlukan data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, dipersilahkan melihat publikasi BPS lainnya atau melalui *website* BPS: <http://www.bps.go.id>.

Jakarta, 5 Desember 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Republik Indonesia



Dr. Suhariyanto



# DAFTAR ISI

HEADLINES.....	iii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GRAFIK .....	xix
GLOSARIUM .....	1
FOKUS PERHATIAN .....	17
I. INFLASI NOVEMBER 2017.....	29
II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III-2017 .....	35
III. EKSPOR OKTOBER 2017.....	51
IV. IMPOR OKTOBER 2017 .....	57
V. UPAH BURUH OKTOBER 2017 .....	65
VI. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN NOVEMBER 2017 .....	69
VII. HARGA PANGAN NOVEMBER 2017 .....	77
VIII. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN III-2017 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR NOVEMBER 2017 .....	87
IX. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULAN III-2017 .....	99
X. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN III- 2017.....	109
XI. PARIWISATA OKTOBER 2017 .....	115
XII. TRANSPORTASI NASIONAL OKTOBER 2017 .....	121
XIII. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH OKTOBER 2017 ....	125
XIV. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA ..	131
XV. KETENAGAKERJAAN AGUSTUS 2017 .....	139
XVI. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN MARET 2017 ....	147
XVII. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016 .....	159
XVIII. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2017.....	165
XIX. SENSUS EKONOMI 2016 .....	177

XX.	KEPENDUDUKAN JUNI 2017 .....	183
XXI.	INDEKS KEBAHAGIAAN 2017 .....	191
XXII.	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2017 .....	203
XXIII.	LAMPIRAN .....	211

<https://www.bps.go.id>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota November 2017 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)...	32
Tabel 1.2	Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi November 2017 Menurut Komponen Perubahan Harga (2012=100) .....	32
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen) ...	33
Tabel 1.4	Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen) .....	33
Tabel 1.5	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, September 2017–Oktober 2017 (persen) .....	34
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen) .....	37
Tabel 2.2	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah) .....	39
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran (persen) .....	42
Tabel 2.4	Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran .....	42
Tabel 2.5	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen) .....	43
Tabel 2.6	Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan III-2017 (persen) .....	44
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (persen) .....	46
Tabel 2.8	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (triliun rupiah) .....	47
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (persen) .....	48
Tabel 2.10	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (triliun rupiah) .....	49
Tabel 2.11	PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2011–2016 .....	49
Tabel 3.1	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ( $\Delta\%$ ) .....	53

Tabel 3.2	Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$) Triwulanan 2016–2017 .....	54
Tabel 3.3	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya ( $\Delta$ ) .....	54
Tabel 3.4	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya ( $\Delta$ ).....	55
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2015–2017 (FOB:juta US\$) .....	55
Tabel 3.6	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang dan Pelabuhan Muat, Januari–Oktober 2017 .....	56
Tabel 4.1	Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya Januari–Oktober 2016 dan 2017.....	60
Tabel 4.2	Perkembangan Impor Indonesia Oktober 2016–Oktober 2017... ..	60
Tabel 4.3	Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya Januari–Oktober 2016 dan 2017.....	61
Tabel 4.4	Impor Nonmigas Negara Asal Utama Menurut Golongan Penggunaan Barang Januari–Oktober 2017.....	61
Tabel 4.5	Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang Januari–Oktober 2016 dan 2017.....	62
Tabel 4.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2016–Oktober 2017 (Nilai CIF: Juta US\$).....	62
Tabel 4.7	Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari–Oktober 2017 (juta US\$) .....	63
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Indonesia, Oktober 2016– Oktober 2017 ..	63
Tabel 4.9	Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2014–Oktober 2017 ..	64
Tabel 5.1	Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah) Oktober 2015–Oktober 2017 .....	67
Tabel 6.1	Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100) .....	72
Tabel 6.2	Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran November 2015–November 2017 .....	75

Tabel 6.3	Tingkat Inflasi Perdesaan November 2017, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 2017 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) .....	76
Tabel 6.4	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya, (2012=100) .....	76
Tabel 7.1	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, November 2016–November 2017 .....	79
Tabel 7.2	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, November 2016–November 2017 .....	81
Tabel 7.3	Rata-rata Harga Beras di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah ( <i>Broken</i> ), November 2016–November 2017 .....	82
Tabel 7.4	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok November 2016–November 2017 (rupiah).....	84
Tabel 8.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor Triwulan III-2017.....	89
Tabel 8.2	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor Triwulan III-2017 .....	93
Tabel 8.3	Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia September–November 2017, (2010=100) .....	95
Tabel 8.4	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar November 2017 (2010=100) .	95
Tabel 8.5	Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia November 2017 Menurut Jenis Bangunan (2010=100).....	97
Tabel 9.1	Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan III-2017 Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha.....	101
Tabel 9.2	Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan IV-2017 Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk .....	102
Tabel 9.3	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2017 dan Triwulan III-2017 Menurut Variabel Pembentuk.....	104
Tabel 9.4	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2017 Menurut Variabel Pembentuk .....	106

Tabel 9.5	Indeks Tendensi Konsumen <sup>1)</sup> Triwulan III-2016 – Triwulan IV-2017 <sup>2)</sup> Tingkat Nasional dan Provinsi .....	107
Tabel 10.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2015–2017 (persen) 2010=100 .....	111
Tabel 10.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2015–2017 (persen) 2010=100 .....	111
Tabel 10.3	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan III-2017 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen) .....	112
Tabel 10.4	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan Triwulan I-2015–Triwulan III-2017 (persen) .....	114
Tabel 10.5	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan III-2017 menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen) .....	114
Tabel 11.1	Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia .....	116
Tabel 11.2	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi Bintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Januari 2016–September 2017 .....	119
Tabel 12.1	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi Oktober 2016–Oktober 2017 .....	124
Tabel 15.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2015–2017 (juta orang) .....	140
Tabel 15.2	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2015–2017 (juta orang) .....	142
Tabel 15.3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2015–2017 (juta orang) .....	143
Tabel 15.4	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2015–2017 (juta orang) .....	143
Tabel 15.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2015–2017 (persen) .....	144
Tabel 15.6	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi 2016–2017 .....	145

Tabel 16.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2016–Maret 2017 .....	149
Tabel 16.2	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) Menurut Daerah, Maret 2017 .....	150
Tabel 16.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) di Indonesia Menurut Daerah, September 2016–Maret 2017.....	152
Tabel 16.4	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2017 .....	153
Tabel 16.5	<i>Gini Ratio</i> menurut Provinsi, Maret 2016–Maret 2017 .....	157
Tabel 17.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2015–2016 .....	163
Tabel 18.1	Nilai IPAK Tahun 2012–2017 .....	166
Tabel 18.2	Indeks Menurut Dimensi, 2012–2017 .....	167
Tabel 18.3	IPAK Menurut Wilayah, 2012–2017 .....	168
Tabel 18.4	IPAK Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012–2017 .....	168
Tabel 18.5	IPAK Menurut Umur, 2012–2017 .....	169
Tabel 18.6	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Keluarga merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017 .....	170
Tabel 18.7	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Komunitas merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017 .....	171
Tabel 18.8	Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Tingkat Publik merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017 .....	172
Tabel 18.9	Cara Mengetahui harus Membayar Melebihi Ketentuan, 2012–2017 .....	174
Tabel 18.10	Alasan Masyarakat Membayar Melebihi Ketentuan, 2012–2017 .....	175
Tabel 19.1	Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2016 .....	180

Tabel 19.2	Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha dan Pulau 2016 .....	181
Tabel 19.3	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha 2016.....	181
Tabel 19.4	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Pulau 2016 .....	182
Tabel 20.1	Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017 (ribu orang) .....	184
Tabel 20.2	Demografi Penduduk Indonesia, 2017 .....	190
Tabel 21.1	Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Penyusunnya Menurut Provinsi, 2017 .....	200
Tabel 21.2	Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik, 2017 .....	201
Tabel 22.1	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi , 2015 - 2016.....	209

<https://www.bps.go.id>

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 82 Kota, 2015–2017 .....	30
Grafik 1.2	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2016–2017.....	34
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2016 s.d Triwulan III-2017 (persen) .....	36
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan III-2017 (persen) .....	37
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan III-2017 (persen) .....	41
Grafik 2.4	Peranan Wilayah/Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan III-2017 (persen) .....	43
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2014–2016 (persen) .....	45
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB) Oktober 2015–Oktober 2017 .....	52
Grafik 4.1	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF) Oktober 2016–Oktober 2017 .....	58
Grafik 4.2	Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF) Januari–Oktober 2016 dan 2017.....	59
Grafik 5.1	Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan Oktober 2015–Oktober 2017 .....	66
Grafik 6.1	Nilai Tukar Petani (NTP), November 2016–November 2017 (2012=100) .....	70
Grafik 6.2	Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) November 2016–November 2017 (2012=100) .....	71
Grafik 6.3	Inflasi Perdesaan, November 2015–November 2017.....	74
Grafik 7.1	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas November 2016–November 2017 .....	78
Grafik 7.2	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas November 2016–November 2017 .....	80

Grafik 7.3	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok September 2016–November 2017 (Rupiah) .....	85
Grafik 8.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor Triwulan III-2014 s.d. Triwulan III-2017 .....	89
Grafik 8.2	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia November 2014–November 2017 .....	96
Grafik 8.3	Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan, November 2016–November 2017 .....	98
Grafik 9.1	Indeks Tendensi Bisnis <sup>1)</sup> Triwulan III-2012–Triwulan IV-2017 <sup>2</sup> ...	103
Grafik 9.2	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2017 Tingkat Nasional dan Provinsi .....	105
Grafik 9.3	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2017 Tingkat Nasional dan Provinsi .....	106
Grafik 10.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan ( <i>y-on-y</i> ) Triwulan III-2015–Triwulan III-2017 .....	110
Grafik 10.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan ( <i>y-on-y</i> ) Triwulan III-2015–Triwulan III-2017 .....	113
Grafik 11.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman menurut Pintu Masuk Januari 2015–September 2017 .....	117
Grafik 11.2	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Klasifikasi Bintang di Indonesia, Januari 2015–September 2017 .....	118
Grafik 12.1	Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Oktober 2016–Oktober 2017 .....	122
Grafik 13.1	Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Oktober 2017 dibanding September 2017 M.V) .....	130
Grafik 13.2	Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Minggu Terakhir) .....	130
Grafik 14.1	Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Usia 15–64 tahun oleh Pasangan dan Selain Pasangan .....	132
Grafik 14.2	Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Daerah Tempat Tinggal .....	133
Grafik 14.3	Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual oleh Pasangan .....	133

Grafik 14.4 Prevalensi Kekerasan Fisik oleh Pasangan Menurut Jenis Tindakan .....	133
Grafik 14.5 Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual oleh Selain Pasangan .....	134
Grafik 14.6 Prevalensi Kekerasan Seksual oleh Selain Pasangan Menurut Jenis Tindakan .....	134
Grafik 14.7 Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Pendidikan .....	135
Grafik 14.8 Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Status Pekerjaan.....	136
Grafik 14.9 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Pernah/Sedang Menikah yang Dilakukan oleh Pasangan .....	137
Grafik 14.10 Prevalensi Pembatasan Aktivitas oleh Pasangan .....	137
Grafik 15.1 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur 2015–2017 (juta orang).....	141
Grafik 16.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah September 2016–Maret 2017 .....	148
Grafik 16.2 Perkembangan <i>Gini Ratio</i> , 2010–Maret 2017 .....	154
Grafik 16.3 Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah Maret 2016–Maret 2017.....	155
Grafik 17.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010–2016 .....	160
Grafik 17.2 Tren Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2011–2016.....	161
Grafik 17.3 Indeks Komponen IPM Indonesia, 2015–2016.....	162
Grafik 19.1 Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016.....	178
Grafik 19.2 Persentase Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha 2016.....	182
Grafik 20.1 Piramida Penduduk Indonesia, 2017.....	185
Grafik 20.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2017 .....	186
Grafik 20.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971–2017 .....	187
Grafik 21.1 Perkembangan Indeks Kebahagiaan Indonesia, 2014 dan 2017 .	192

Grafik 21.2	Indeks Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2017.....	194
Grafik 21.3	Indeks Kebahagiaan Indonesia Menurut Klasifikasi Wilayah, 2017.....	195
Grafik 21.4	Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial Menurut Klasifikasi Wilayah, 2017 .....	195
Grafik 21.5	Indeks Kebahagiaan Indonesia Menurut Jenis Kelamin, 2017 ....	196
Grafik 21.6	Indeks Kebahagiaan Indonesia Menurut Status Perkawinan, 2017.....	197
Grafik 21.7	Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial Menurut Status Perkawinan, 2017 .....	197
Grafik 21.8	Indeks Kebahagiaan Indonesia Menurut Kelompok Umur, 2017	198
Grafik 21.9	Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial Menurut Kelompok Umur, 2017.....	198
Grafik 21.10	Indeks Kebahagiaan Penduduk Menurut Provinsi, 2017.....	199
Grafik 22.1	Perkembangan IDI Nasional Tahun 2009 - 2016 .....	204
Grafik 22.2	Perkembangan Indeks Aspek, 2009-2016 .....	205
Grafik 22.4	Perkembangan IDI Provinsi, 2015-2016 .....	208

# GLOSARIUM

## 1. Inflasi

**Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK).** Sebaliknya, perubahan negatif IHK disebut deflasi. IHK tersebut dihitung dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres*. Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

### **Inflasi umum (*headline inflation*)**

Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

#### **a. Inflasi inti (*core inflation*)**

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasa inti sebanyak 751, antara lain: kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

#### **b. Inflasi yang harganya diatur pemerintah (*administered prices inflation*)**

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya secara umum diatur oleh pemerintah. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasanya sebanyak 23, antara lain: bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

#### **c. Inflasi bergejolak (*volatile goods*)**

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2012, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditas sebanyak 85, antara lain : beras, minyak goreng, cabai, daging ayam ras, dan sebagainya.

## 2. Produk Domestik Bruto (PDB)

**PDB** merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (produk) akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

**PDB atas dasar harga berlaku** menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun

**PDB atas dasar harga konstan** menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

**PDB atas dasar harga berlaku** digunakan untuk melihat struktur ekonomi.

**PDB atas dasar harga konstan** digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

**Pendekatan yang digunakan untuk menghitung PDB** adalah (1) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari proses produksi setiap kategori/aktivitas ekonomi, (2) pendekatan pendapatan, menghitung semua komponen nilai tambah, dan (3) pendekatan pengeluaran, menghitung semua komponen pengeluaran PDB. Secara teoritis, ketiga pendekatan ini akan menghasilkan nilai PDB yang sama.

**Pertumbuhan ekonomi (*y-on-y*)** adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

**Pertumbuhan ekonomi (*q-to-q*)** adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

**Pertumbuhan ekonomi (*c-to-c*)** adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya.

**Sumber pertumbuhan (*source of growth*)** menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Sumber pertumbuhan diperoleh dengan cara mengalikan laju pertumbuhan ekonomi sektor atau komponen pengeluaran dengan *share* perubahan sektor atau komponen pengeluaran terhadap perubahan PDB.

**PDB Perkapita** adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

### 3. Ekspor-Impor

**Total nilai ekspor** adalah jumlah nilai *Free on Board* (FOB) seluruh barang-barang ekspor yang keluar dari daerah pabean Indonesia.

**Free on Board (FOB)** adalah nilai barang sampai di pelabuhan muat setelah barang dimuat ke kapal.

**Total nilai impor** adalah jumlah nilai *Cost Insurance Freight* (CIF) seluruh barang-barang ekspor yang masuk ke daerah pabean Indonesia.

**Cost Insurance Freight (CIF)** adalah nilai barang ketika sampai di pelabuhan bongkar (Indonesia), termasuk harga barang, ongkos angkut (*freight*) dan asuransi (*insurance*).  $CIF = FOB + Insurance + Freight$ .

### 4. Upah Buruh

**Upah Nominal** adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

**Upah Riil** menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh, upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK),

Penghitungan upah nominal buruh tani menggunakan rata-rata tertimbang, sedangkan upah nominal buruh bangunan menggunakan rata-rata hitung biasa. Pengumpulan data upah buruh tani dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dengan responden petani. Data upah buruh bangunan diperoleh dari Survei Harga Konsumen Perkotaan dengan responden buruh bangunan. Survei Harga Perdesaan dilaksanakan di 33 provinsi, sedangkan Survei Harga Konsumen Perkotaan dilaksanakan di 82 kota.

### 5. Nilai Tukar Petani (NTP) 2012=100

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Indeks harga yang diterima petani (It) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

NTP dihitung dengan menggunakan formula:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Formula atau rumus yang digunakan dalam penghitungan  $I_t$  dan  $I_b$  adalah formula Indeks Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres Indices*). Pengumpulan data harga untuk penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dan Survei Konsumen Perdesaan dengan cakupan 33 provinsi di Indonesia yang meliputi lima subsektor, yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Responden Survei Harga Perdesaan adalah petani produsen, sedangkan responden Survei Harga Konsumen Perdesaan adalah pedagang di pasar perdesaan.

**NTUP** diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) terhadap indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ), dimana komponen  $I_b$  hanya terdiri dari BPPBM. Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

## 6. Harga Produsen Gabah dan Beras di Penggilingan

**Harga Produsen Gabah di Tingkat Petani** adalah harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen.

**Harga Produsen Gabah di Tingkat Penggilingan** adalah harga produsen gabah di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat.

**Harga Pembelian Pemerintah (HPP)** adalah harga gabah dalam negeri minimal yang harus dibayarkan pemerintah melalui Bulog kepada petani dan penggilingan sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Inpres. Tujuan kebijakan penerapan HPP, selain untuk pengamanan cadangan pemerintah, adalah sebagai insentif yang diberikan pemerintah kepada petani padi dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan.

**Gabah Kering Panen (GKP)** adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 10,0 persen.

**Gabah Kering Giling (GKG)** adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen.

**Gabah Kualitas Rendah** adalah gabah yang mengandung kadar air minimum 25,0 persen dan hampa/kotoran minimum 10,0 persen.

**Kadar Air (KA)** adalah jumlah kandungan air dalam butir gabah yang dinyatakan dalam persentase dari berat basah.

**Kadar Hampa (KH)** adalah jumlah kandungan selain air, yang umumnya terdiri atas butiran hampa dan kotoran, seperti butir gabah yang tidak berkembang, pasir, kerikil, biji dan lainnya. Kadar Hampa dinyatakan dalam persentase dari berat sampel gabah.

Survei Monitoring Harga Produsen Gabah dilaksanakan di 27 propinsi di Indonesia. Responden adalah petani produsen yang melakukan transaksi penjualan gabah. Pencatatan harga dilaksanakan setiap bulan, tetapi saat panen raya (biasanya pada bulan Maret s.d. Mei dan Agustus) pencatatan harga dilakukan setiap minggu. Panen dengan sistem tebasan tidak termasuk dalam pencatatan ini.

**Beras Kualitas Premium** adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) maksimum 10 persen.

**Beras Kualitas Medium** adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 10,1-20 persen.

**Beras Kualitas Rendah** adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 20,1 - 25 persen.

**Butir Beras Patah/Pecah (*Broken*)** adalah butir beras baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih besar dari 0,25 bagian sampai dengan lebih kecil 0,75 bagian dari butir beras utuh.

Pengumpulan data harga produsen beras di penggilingan dilakukan secara bulanan di 28 provinsi di Indonesia. Responden adalah penggilingan besar di wilayahnya.

## 7. A. Indeks Harga Produsen (IHP)

**Indeks Harga Produsen (IHP)** adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi (PDB/PDRB), distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya. Sesuai dengan *Manual Producer Price Index* (PPI), harga yang dikumpulkan adalah *basic price* (harga dasar), yaitu harga yang diterima produsen tidak termasuk pajak. IHP dihitung menggunakan formula *Laspeyres* yang dimodifikasi, dengan tahun dasar 2010=100.

Pengumpulan harga dilakukan setiap bulan di 34 Provinsi. Responden yang dipilih adalah produsen dengan penerimaan perusahaan yang cukup besar, sedangkan komoditas yang dipilih adalah komoditas yang memberikan *share* besar terhadap PDB nasional. Pengelompokan komoditas dalam IHP didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI).

## **B. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)**

**IHPB** adalah angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor.

**IHPB Konstruksi** adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi dan digunakan sebagai dasar untuk penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No. 8 Tahun 2003, dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005. Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IHPB Konstruksi diambil dari data *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan konstruksi.

## **8. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen**

**Indeks Tendensi Bisnis (ITB)** dihitung berdasarkan data dari Survei Tendensi Bisnis (STB). Tujuan dari ITB adalah untuk menghasilkan suatu indikator dini yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang dari sisi pelaku usaha.

**Indeks Tendensi Konsumen (ITK)** adalah indikator perkembangan ekonomi konsumen terkini yang dihasilkan melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). ITK menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang.

## **9. Industri**

**Industri** yang dimaksudkan adalah industri manufaktur (*manufacturing industry*) dengan cakupan perusahaan industri berskala besar, sedang, kecil, dan mikro. Perusahaan industri berskala besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, perusahaan industri berskala sedang adalah perusahaan

industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang, perusahaan industri berskala kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 orang, sedangkan perusahaan industri berskala mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang.

## 10. Pariwisata

**Data kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)** diperoleh setiap bulan dari laporan Ditjen Imigrasi berupa laporan kedatangan dari luar negeri, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia. Jumlah kunjungan wisman dihitung berdasar jenis paspor untuk WNI dan jenis visa untuk WNA. Pada tahun 2015 dilakukan penyempurnaan penghitungan kunjungan wisman terkait WNA pemegang KITAS yang sejak akhir 2014 sesuai peraturan Ditjen Imigrasi tidak hanya diberikan kepada WNA yang bekerja di Indonesia, tetapi juga dapat diberikan kepada mereka yang berkunjung ke Indonesia dengan kategori wisatawan lanjut usia, berkunjung untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, melakukan penelitian, sebagai rohaniwan, dan lain-lain. Selain itu pada tahun 2016 juga dilakukan pendataan di pos-pos lintas batas (PLB) yang sifatnya tradisional yang biasanya tidak ada pos imigrasi atau jika ada namun tidak secara rutin dan berkesinambungan mencatat keluar masuk orang yang melewati pos-pos perbatasan tersebut. Selanjutnya pada bulan Oktober 2016 mulai digunakan *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk memperluas cakupan pendataan wisman mengingat kondisi geografis dan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia. Namun MPD yang digunakan baru berasal dari satu penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia yaitu Telkomsel.

**Wisatawan mancanegara (wisman)** ialah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup 2 (dua) kategori wisatawan mancanegara, yaitu:

- a. **Wisatawan (tourist)** adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:
  - Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga, keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.

- Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.
- b. **Pelancong (Excursionist)** adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal **kurang** dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

**Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK)** Hotel diperoleh dari hasil Survei Hotel yang dilakukan setiap bulan terhadap seluruh hotel berklasifikasi bintang dan sebagian (sampel) hotel non bintang di seluruh Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kamar tersedia, jumlah kamar terpakai, jumlah tamu yang datang (menginap) serta jumlah tamu yang keluar dari hotel setiap harinya.

**TPK Hotel** adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni/terpakai terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia.

**Rata-rata lamanya tamu menginap** adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya.

## 11. Transportasi Nasional

**Data transportasi** diperoleh setiap bulan dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II, Kantor Bandara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara, PT (Persero) KAI (Kantor Pusat dan Divisi Jabodetabek), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I s.d, IV, dan Kantor Pelabuhan yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut. Data yang disajikan mencakup jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang dimuat dalam negeri. Khusus untuk transportasi udara disajikan jumlah penumpang berangkat baik domestik maupun internasional.

## 12. Nilai Tukar Eceran Rupiah

Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata uang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor, *swap*, *derivative*, dan lain-lain, dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, transaksi eceran penukaran mata uang melalui *money changer* (tempat penukaran mata uang) yang tersebar di seluruh Indonesia menggambarkan tingkat retail *spot rate* suatu mata uang.

BPS melaporkan informasi nilai tukar eceran rupiah secara periodik. Statistik yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat pengaruh nilai tukar transaksi besar

terhadap nilai tukar transaksi eceran, perkembangan nilai tukar rupiah transaksi eceran, melengkapi informasi *real-time* yang beredar di internet, dan sebagainya.

Mata uang asing yang dimonitor mencakup empat jenis, yaitu dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR) dengan alasan merupakan mata uang yang hampir selalu diperdagangkan di 34 provinsi di Indonesia, sehingga dapat dimonitor transaksinya.

**Nilai Tukar (Kurs)** adalah harga mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain.

**Nilai Tukar Eceran Rupiah** adalah nilai mata uang rupiah yang diukur dalam mata uang negara lain yang ditransaksikan melalui *money changer*.

**Kurs Tengah** adalah kurs rata-rata antara kurs beli dan kurs jual.

**Money Changer** adalah tempat pertukaran atau tempat jual beli mata uang asing.

**Spot rate** adalah harga yang diberikan untuk suatu mata uang yang akan dibayar dan diserahkan segera, dalam 1-2 hari kerja.

**Swap** adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka.

### 13. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

- a. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah perbandingan perempuan usia 15–64 tahun yang mengalami kekerasan baik itu kekerasan fisik, seksual, psikis, maupun ekonomi yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan terhadap total perempuan usia 15–64 tahun.
- b. Sumber data yang digunakan dalam menghitung prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah hasil dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016. SPHPN merupakan survei khusus pertama di Indonesia yang ditujukan khusus untuk mendapatkan data kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia.
- c. Kuesioner SPHPN mengadopsi Kuesioner WHO “*Women’s health and life experiences*”, yang didisain khusus untuk mengali informasi kekerasan terhadap perempuan.
- d. Jenis kekerasan yang dicakup pada SPHPN 2016 dibedakan menurut pelaku kekerasan yaitu pasangan dan selain pasangan. Kekerasan yang dilakukan pasangan meliputi: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, dan pembatasan aktivitas. Sedangkan kekerasan yang

dilakukan selain pasangan meliputi: kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pasangan yang dimaksud adalah suami, pasangan hidup bersama, dan pasangan seksual yang tinggal terpisah. Sedangkan yang dimaksud selain pasangan adalah orang tua/mertua, kakek, paman, sepupu, teman, tetangga, guru/pendidik, orang tak dikenal, dan lain-lain.

- e. Responden adalah perempuan usia 15–64 tahun yang dipilih satu orang dari setiap rumah tangga sampel dengan menggunakan Tabel Kish. Responden terpilih diwawancarai secara *private*/tidak boleh didampingi siapapun agar responden dapat terbuka dan nyaman memberikan informasi yang sifatnya sensitif.
- f. Petugas/pewawancara SPHPN adalah perempuan yang dilatih secara khusus mengenai materi dan metode wawancara, etika, dan *safety* wawancara, dan juga diberikan wawasan terkait gender dan kekerasan.

#### 14. Ketenagakerjaan

Data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pengumpulan data berbasis sampel, dengan pendekatan rumah tangga. Estimasi ketenagakerjaan mulai Februari 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035.

Definisi yang digunakan antara lain:

**Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

**Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran.

**Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

**Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

**Pekerja Tidak Penuh** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

**Setengah Penganggur (*Underemployment*)** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

**Pekerja Paruh Waktu (*Part time worker*)** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

**Pengangguran Terbuka (*Unemployment*)**, adalah mereka yang tidak bekerja tetapi berharap mendapatkan pekerjaan, yang terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah rasio antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

## 15. Kemiskinan

- a. **Penduduk miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- b. **Garis Kemiskinan (GK)** adalah total nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan. GK terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM).
- c. **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- d. **Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM)** adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
- e. **Persentase Penduduk miskin (*Head Count Index-Po*)** adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

- f. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P<sub>1</sub>*)** adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- g. **Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P<sub>2</sub>*)** adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

## 16. Ketimpangan Pengeluaran

- a. ***Gini Ratio*** adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *Gini Ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
- b. **Ukuran Bank Dunia** adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada besarnya jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) pada kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut :
  - Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
  - Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.
  - Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

## 17. Indeks Pembangunan Manusia

**Pembangunan manusia** didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir, pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup yang layak digambarkan

oleh pengeluaran per kapita disesuaikan (*purchasing power parity*)

**Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)** adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

**Harapan Lama Sekolah (HLS)** didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

**Pengeluaran per kapita disesuaikan** ditentukan dari Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100 dan paritas daya beli.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM.

$$\diamond I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

$$\bullet I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$\bullet I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$\diamond I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\diamond I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

**IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik** dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

## 18. Indeks Perilaku Anti Korupsi

- a. **Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)** adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh BPS. SPAK merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan di seluruh provinsi yang terdiri dari 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga.
- b. Analisis mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya untuk representasi level nasional.
- c. IPAK disusun berdasarkan dua substansi utama, yakni **persepsi atau penilaian** masyarakat terhadap kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai yang dipahami maupun sikap diri terhadap korupsi dan **pengalaman langsung** pada jenis layanan publik tertentu yang biasa diakses, menyangkut perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), nepotisme (*nepotism*).
- d. Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK 2017 menggunakan *explanatory factor analysis*.
- e. Responden adalah kepala rumah tangga atau pasangannya yang dipilih dengan acak (Tabel *Kish*) dan diwawancarai secara langsung (tatap muka) dengan menggunakan metode CAPI (*Computer Assisted Personal Interview*).

## 19. Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Data dasar perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 adalah data penduduk hasil SP2010. Penghitungan proyeksi penduduk ini dilakukan dengan menggunakan program RUP (*Rural Urban Projection*).

Penghitungan proyeksi penduduk mempertimbangkan perapihan umur, dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan yang ada dalam data. Penentuan asumsi merupakan proses yang paling penting, mencakup asumsi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Asumsi kelahiran dibuat berdasarkan tren tingkat kelahiran di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan berhubungan dengan tingkat kelahiran di masa mendatang. Asumsi tingkat kematian dibuat berdasarkan tren tingkat kematian di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan terkait dengan kesehatan. Asumsi migrasi, untuk proyeksi nasional menyangkut migrasi internasional (melintasi batas negara) masih dianggap nol yaitu seimbang antara yang keluar dan masuk. Sedangkan untuk proyeksi provinsi diperhitungkan migrasi

internal yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi. royeksi penduduk Indonesia dibangun dengan dasar berbagai pengetahuan dari berbagai pihak baik kementerian/lembaga terkait, akademisi dan pakar kependudukan. Hasil proyeksi ini digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi dari kinerja pemerintah.

## 20. Indeks Kebahagiaan Indonesia

**Indeks Kebahagiaan Indonesia 2017** diukur menggunakan data hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2017 yang dilaksanakan di 487 kabupaten/kota terpilih yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah sampel sebesar 75.000 rumah tangga dengan respon sebesar 96,42 persen (72.317 rumah tangga) untuk estimasi level nasional dan provinsi. Responden pada survei ini adalah kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah tangga (istri/suami). Oleh sebab itu, yang dimaksud sebagai penduduk adalah kepala rumah tangga atau pasangannya.

**Indeks Kebahagiaan** merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0–100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin tidak bahagia.

**Dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan** terdiri dari 3 dimensi, yakni Dimensi Kepuasan Hidup, Dimensi Perasaan (*Affect*), dan Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*).

**Indikator penyusun Indeks Kebahagiaan** terdiri dari 19 indikator, yakni 10 indikator pada Dimensi Kepuasan Hidup yang terbagi lagi kedalam 2 subdimensi, yakni Subdimensi Kepuasan Hidup Personal (Pendidikan dan Keterampilan, Pekerjaan/Usaha/Kegiatan Utama, Pendapatan Rumah Tangga, Kesehatan, dan Kondisi Rumah dan Fasilitas Rumah) serta Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial (Keharmonisan Keluarga, Ketersediaan Waktu Luang, Hubungan Sosial, Keadaan Lingkungan, dan Kondisi Keamanan), 3 indikator pada Dimensi Perasaan (Perasaan Senang/Riang/Gembira, Perasaan Tidak Khawatir/Cemas, dan Perasaan Tidak Tertekan), dan 6 indikator pada Dimensi Makna Hidup (Kemandirian, Penguasaan Lingkungan, Pengembangan Diri, Hubungan Positif dengan Orang Lain, Tujuan Hidup, dan Penerimaan Diri).

## 21. Indeks Demokrasi Indonesia

**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)** adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Aspek demokrasi tersebut adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

Dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa : (1) review surat kabar lokal), (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator, variabel, dan aspek; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Demokrasi Indonesia.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 1 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 1 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 1 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

# FOKUS PERHATIAN

## 1. Pada November 2017 terjadi inflasi sebesar 0,20 persen

Pada November 2017 terjadi inflasi sebesar 0,20 persen. Dari 82 kota, 68 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Singaraja sebesar 1,80 persen dengan IHK 138,11 dan inflasi terendah terjadi di Bekasi dan Palopo masing-masing sebesar 0,02 persen dengan IHK 126,24 dan 127,49. Inflasi November 2017 sebesar 0,20 persen lebih rendah dibanding kondisi November 2016 yang mengalami inflasi sebesar 0,47 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 2,87 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2017 terhadap November 2016) sebesar 3,30 persen.

## 2. Triwulan III-2017 perekonomian Indonesia tumbuh 5,06 persen

Ekonomi Indonesia triwulan III-2017 dibanding triwulan III-2016 (*y-on-y*) tumbuh 5,06 persen, meningkat dibanding capaian triwulan III-2016 sebesar 5,01 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi, dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,45 persen. Diikuti oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi dan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan yang tumbuh masing-masing sebesar 9,35 persen dan 9,24 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 17,27 persen.

Sementara bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia triwulan III-2017 (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan sebesar 3,18 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,32 persen. Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2017 terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,07 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,29 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,25 persen. Sementara itu, pertumbuhan Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 8,99 persen sebagai pengurang dalam perekonomian Indonesia.

Sampai dengan triwulan III-2016 (Januari–September), ekonomi Indonesia (*c-to-c*) tumbuh sebesar 5,03 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 9,79 persen.

**3. Nilai ekspor Indonesia Oktober 2017 mencapai US\$15,09 miliar, naik 18,39 persen (*year-on-year*)**

Nilai ekspor Indonesia Oktober 2017 mencapai US\$15,09 miliar, naik 18,39 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), demikian juga jika dibanding ekspor September 2017 naik 3,62 persen. Nilai ekspor nonmigas Oktober 2017 mencapai US\$13,67 miliar atau naik 17,00 persen dibanding ekspor nonmigas Oktober 2016. Demikian juga ekspor migas pada Oktober 2017 naik 33,77 persen dibanding Oktober tahun sebelumnya. Ditinjau menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Oktober 2017 naik sebesar 14,32 persen dibanding ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2016, demikian juga ekspor nonmigas hasil pertanian naik 14,55 persen dan ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya naik 36,42 persen.

**4. Nilai impor Indonesia Oktober 2017 sebesar US\$14,19 miliar, naik sebesar 23,33 persen (*year-on-year*)**

Nilai impor Indonesia Oktober 2017 sebesar US\$14,19 miliar, atau naik 11,04 persen dibanding impor September 2017, dan naik 23,33 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor nonmigas Oktober 2017 sebesar US\$11,99 miliar atau naik 10,52 persen dibanding September 2017. Sementara impor migas Oktober 2017 tercatat sebesar

US\$2,20 miliar, naik 13,96 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Oktober 2017 adalah golongan besi dan baja sebesar US\$182,9 juta, atau naik 28,68 persen dibanding September 2017 (US\$637,8 juta). Negara asal barang impor nonmigas terbesar Januari–Oktober 2017 ditempati oleh Tiongkok (US\$27,98 miliar) dengan pangsa 26,12 persen.

**5. Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Oktober 2017 masing-masing sebesar Rp50.339,00 dan Rp84.421,00**

Rata-rata upah nominal buruh tani pada Oktober 2017 sebesar Rp50.339,00, naik 0,25 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, dan upah riil naik sebesar 0,40 persen. Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Oktober 2017 tercatat Rp84.421,00, naik 0,05 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, sedangkan upah riil naik sebesar 0,04 persen.

**6. Nilai Tukar Petani (NTP) November 2017 tercatat 103,07, naik 0,28 persen dibanding Oktober 2017, inflasi perdesaan sebesar 0,36 persen, dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) naik sebesar 0,42 persen dibanding Oktober 2017.**

NTP November 2017 tercatat 103,07 atau naik sebesar 0,28 persen dibanding NTP Oktober 2017 sebesar 102,78. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di tiga subsektor penyusun NTP, yaitu Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Perikanan masing-masing sebesar 0,97 persen, 0,25 persen, dan 0,17 persen. Sebaliknya, Subsektor Tanaman Hortikultura dan Peternakan turun masing-masing 0,08 persen dan 0,32 persen.

Pada November 2017 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,36 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 133,44. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 23 provinsi dan deflasi perdesaan di 10 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,83 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,01 persen. Deflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,58 persen dan

deflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,09 persen.

Pada November 2017 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,42 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It (0,57 persen) lebih tinggi dari kenaikan indeks BPPBM (0,16 persen). Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya NTUP di empat subsektor penyusun NTUP, yaitu NTUP Tanaman Pangan (1,16 persen), Tanaman Hortikultura (0,06 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,34 persen), dan Perikanan (0,33 persen), sedangkan NTUP Peternakan mengalami penurunan sebesar 0,23 persen.

**7. Rata-rata harga beras pada November 2017 sebesar Rp 13.429,00 per kg, naik 0,62 persen**

Rata-rata harga beras pada November 2017 sebesar Rp 13.429,00 per kg, naik 0,62 persen dari bulan sebelumnya. Dibandingkan November 2016, harga beras naik 1,85 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 3,30 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah cabai merah naik 8,90 persen; telur ayam ras naik 1,85 persen; sedangkan harga cabai rawit turun 1,50 persen.

**8. a. Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) pada Indeks Harga Produsen (IHP) triwulan III-2017 naik 0,68 persen terhadap triwulan II-2017 (*q-to-q*) dan naik 3,28 persen terhadap triwulan III-2016 (*y-on-y*).**

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) mengalami kenaikan sebesar 0,68 persen pada triwulan III-2017 (*q-to-q*). Kenaikan terjadi pada IHP Sektor Pertanian (0,77 persen), Sektor Pertambangan dan Penggalian (1,67 persen), dan Sektor Industri Pengolahan (0,52 persen).

Dibandingkan terhadap triwulan III-2016 (*y-on-y*), IHP naik 3,28 persen. IHP Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,60 persen, 10,33 persen, dan 2,57 persen.

**b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nonmigas November 2017 naik sebesar 0,39 persen dari bulan sebelumnya**

IHPB Umum Nonmigas November 2017 naik sebesar 0,39 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Barang Ekspor Nonmigas sebesar 1,06 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian naik sebesar 0,59 persen dan Sektor Industri naik sebesar 0,44 persen. Sedangkan Sektor Pertanian dan Kelompok Barang Impor Nonmigas turun masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,05 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, IHPB Umum Oktober 2017 naik 0,66 persen. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Kelompok Barang Ekspor sebesar 1,81 persen. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi November 2017 naik sebesar 0,28 persen. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada jenis Bangunan Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan sebesar 0,37 persen.

**9. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan III-2017 sebesar 112,39 dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2017 sebesar 109,42.**

Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan III-2017 meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan III-2017 sebesar 112,39. Optimisme pelaku bisnis di Indonesia pada triwulan ini juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II-2017 (nilai ITB sebesar 111,63). Kondisi bisnis yang membaik pada triwulan III-2017 ini disebabkan oleh peningkatan pada tiga komponen pembentuk indeks, yaitu pendapatan usaha dengan nilai indeks sebesar 115,62, penggunaan kapasitas produksi/usaha dengan nilai indeks sebesar 114,25, dan rata-rata jam kerja dengan nilai indeks sebesar 107,29.

Nilai ITB triwulan IV-2017 diperkirakan sebesar 109,70. Dengan demikian, secara umum kondisi bisnis pada triwulan IV-2017 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan III-2017. Namun, tingkat optimisme pelaku bisnis dalam melihat potensi bisnis pada triwulan IV-2017 diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan III-2017. Perkiraan penurunan tingkat optimisme pelaku bisnis ini ditunjukkan oleh perkiraan angka ITB triwulan IV-2017 yang lebih

rendah dari triwulan III-2017. Pada triwulan IV-2017 kondisi bisnis di seluruh kategori lapangan usaha diperkirakan mengalami peningkatan.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada triwulan III-2017 sebesar 109,42 menunjukkan kondisi ekonomi konsumen meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Namun, tingkat optimisme konsumen pada triwulan III-2017 lebih rendah jika dibandingkan triwulan II-2017. Kondisi ini tercermin dari nilai ITK triwulan III-2017 yang lebih rendah dibandingkan triwulan II-2017 (nilai ITK sebesar 115,92). Membaiknya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan III-2017 didorong oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga (nilai indeks sebesar 110,40), inflasi yang terjadi tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rumah tangga (nilai indeks sebesar 108,72), dan meningkatnya volume konsumsi rumah tangga (nilai indeks sebesar 107,96).

Nilai ITK nasional pada triwulan IV-2017 diperkirakan sebesar 105,49. Dengan demikian, kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, tingkat optimisme konsumen diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan III-2017. Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan IV-2017 disebabkan oleh meningkatnya perkiraan pendapatan rumah tangga mendatang (nilai indeks sebesar 108,15). Sementara itu, rencana pembelian barang tahan lama, rekreasi, dan pesta/hajatan diperkirakan relatif sama dengan kondisi triwulan sebelumnya ( nilai indeks sebesar 100,84 ).

#### **10. Pertumbuhan produksi IBS naik 5,51 persen dan IMK naik 5,34 persen pada triwulan III-2017 (*year-on-year*)**

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan III-2017 naik 5,51 persen dibanding triwulan III-2016 (*year-on-year*) dan mengalami kenaikan 2,27 persen dari triwulan II-2017 (*q-to-q*). Pertumbuhan bulanan produksi IBS pada Juli 2017 naik 3,79 persen dari Juli 2016, Agustus 2017 naik 4,96 persen dari Agustus 2016, dan September 2017 naik 7,84 persen dari September 2016. Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan

III-2017 naik 5,34 persen dibanding triwulan III-2016 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 0,66 persen dari triwulan II-2017 (*q-to-q*).

#### **11. Jumlah kunjungan wisman September 2017 mencapai 1,21 juta kunjungan**

Kunjungan wisman ke Indonesia selama September 2017 sebanyak 1,21 juta kunjungan, yang terdiri atas 1,06 juta kunjungan wisman melalui 19 pintu utama dan 150,01 ribu kunjungan wisman selain dari 19 pintu utama.

Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia pada September 2017 mencapai 58,42 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 4,26 poin dibandingkan TPK September 2016.

#### **12. Jumlah penumpang angkutan udara domestik Oktober 2017 mencapai 7,5 juta orang, naik 11,71 persen (*year-on-year*)**

Pada Oktober 2017, jumlah penumpang angkutan udara domestik mencapai 7,5 juta orang atau naik 11,71 persen (*year-on-year*), angkutan udara internasional naik 10,23 persen, penumpang pelayaran dalam negeri naik 36,74 persen, dan penumpang kereta api naik 15,88 persen. Dibandingkan dengan September 2017, angkutan udara domestik turun 0,38 persen, angkutan udara internasional turun 5,64 persen, penumpang pelayaran dalam negeri naik 1,36 persen, dan penumpang kereta api naik 7,91 persen.

#### **13. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Oktober 2017**

##### **a. Rupiah terdepresiasi 1,27 persen terhadap dolar Amerika.**

Rupiah terdepresiasi 1,27 persen terhadap dolar Amerika pada Oktober 2017. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Amerika terjadi pada minggu keempat Oktober 2017 yang mencapai Rp13.523,07 per dolar Amerika.

##### **b. Rupiah terapresiasi 0,28 persen terhadap dolar Australia.**

Rupiah terapresiasi 0,28 persen terhadap dolar Australia pada Oktober 2017. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Australia terjadi pada minggu keempat Oktober 2017 yang mencapai Rp10.474,96 per dolar Australia.

**c. Rupiah terdepresiasi 0,05 persen terhadap yen Jepang.**

Rupiah terdepresiasi 0,05 persen terhadap yen Jepang pada Oktober 2017. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap yen Jepang terjadi pada minggu ketiga Oktober 2017 yang mencapai Rp119,88 per yen Jepang.

**d. Rupiah terdepresiasi 0,97 persen terhadap euro.**

Rupiah terdepresiasi 0,97 persen terhadap euro pada Oktober 2017. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap euro terjadi pada minggu keempat Oktober 2017 yang mencapai Rp15.898,83 per euro.

**14. Satu dari tiga atau 33,4 Persen Perempuan Usia 15–64 Tahun di Indonesia Mengalami Kekerasan Fisik dan atau Seksual yang Dilakukan oleh Pasangan dan Selain Pasangan Selama Hidup Mereka**

Prevalensi kekerasan fisik dan atau seksual cenderung lebih tinggi pada perempuan usia 15–64 tahun yang tinggal di daerah perkotaan (36,3 persen), daripada perempuan di daerah pedesaan (29,8 persen). Sementara, kekerasan fisik dan/atau seksual lebih banyak dialami perempuan usia 15–64 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas (39,4 persen) dan status pekerjaan tidak bekerja (35,1 persen).

**15. Pada Agustus 2017, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 2,61 juta orang jika dibandingkan Agustus 2016**

Ketenagakerjaan Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah persoalan diantaranya sekitar 33,33 persen tenaga kerja tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, penyediaan lapangan kerja bagi 7,04 juta penganggur dan 9,14 juta setengah penganggur, serta masih sekitar 69,02 juta penduduk bekerja pada kegiatan informal.

**16. a. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang (10,64 persen)**

Dibandingkan dengan penduduk miskin September 2016 yang sebanyak 27,76 juta orang (10,70 persen), penduduk miskin Maret 2017 naik sebanyak

6,90 ribu orang menjadi 27,77 juta orang (10,64 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang (dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017).

**b. Pada Maret 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,393**

*Gini Ratio* Maret 2017 tercatat sebesar 0,393, turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,394 dan turun 0,004 poin dibanding Maret 2016 yang sebesar 0,397. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 0,407, turun dibanding *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,409 dan turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,410. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 0,320, naik dibanding *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,316 dan turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,327.

**17. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 mencapai kategori “Tinggi”**

Pada tahun 2016, IPM Indonesia telah mencapai 70,18. Angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,91 persen dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2015. Pada tahun 2016, status pembangunan manusia di Indonesia telah beranjak dari “sedang” menjadi berstatus “tinggi”. Jika dilihat menurut provinsi, 12 provinsi telah mencapai status pembangunan manusia “tinggi” atau berada pada selang 70 hingga 80, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat diantaranya dialami oleh Provinsi Papua (1,40%), Provinsi Sumatera Selatan (1,16%), dan Provinsi Jawa Timur (1,15%).

**18. Hasil pendaftaran (*Listing*) Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) tercatat sebanyak 26,71 juta usaha/perusahaan, meningkat 17,51 persen dibandingkan dengan**

**hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 22,73 juta usaha/perusahaan**

Hasil pendaftaran (*listing*) Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) tercatat sebanyak 26,71 juta usaha/perusahaan nonpertanian yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015, meningkat 17,51 persen dibandingkan dengan hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang berjumlah 22,73 juta usaha/perusahaan. Bila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta usaha/perusahaan (98,33 persen) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 0,45 juta usaha/perusahaan (1,67 persen) berskala Usaha Menengah Besar (UMB). Dilihat menurut lapangan usaha, jumlah usaha/perusahaan perdagangan besar dan eceran mendominasi sebesar 46,17 persen dari total usaha. Jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha sejalan dengan jumlah usaha/perusahaan, yaitu didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,37 juta tenaga kerja atau 31,81 persen dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sebaran jumlah usaha/perusahaan antarkawasan dan antarpulau secara umum menunjukkan bahwa sebanyak 16,2 juta usaha/perusahaan berada di Pulau Jawa atau 60,74 persen terhadap jumlah usaha/perusahaan di Indonesia.

**19. Jumlah penduduk Indonesia Juni 2017 sebanyak 261.890,9 ribu orang**

Hasil proyeksi penduduk Indonesia keadaan Juni 2017 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 261.890,9 ribu orang terdiri dari 131.579,2 ribu orang laki-laki dan 130.311,7 ribu orang perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010–2017 sekitar 1,34 persen per tahun.

**20. Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2017 sebesar 70,69**

Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) sebesar 70,69 pada skala 0–100. Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi yang memiliki besaran kontribusi yang berbeda-beda, yaitu Kepuasan Hidup (*Life Satisfaction*) dengan besaran kontribusi sebesar 34,80 persen, Perasaan (*Affect*) dengan besaran kontribusi sebesar 31,18 persen, dan

Makna Hidup (Eudaimonia) dengan besaran kontribusi sebesar 34,02 persen. Nilai indeks masing-masing dimensi Indeks Kebahagiaan adalah sebagai berikut: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 71,07; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 68,59; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 72,23. Seluruh indeks dimensi diukur pada skala 0–100.

**21. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat nasional 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI nasional 2015.**

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional tahun 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 72,82. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Jika dilihat menurut provinsi, terdapat empat provinsi yang berada di level kinerja demokrasi kategori “baik”. Posisi pertama ditempati oleh DI Yogyakarta yang naik dari 83,19 pada 2015 menjadi 85,58 pada 2016. Tiga provinsi lainnya adalah Kepulauan Bangka-Belitung naik dari 72,31 pada 2015 menjadi 83,00 pada 2016, Nusa Tenggara Timur naik dari 78,47 pada 2015 menjadi 82,49 pada 2016, dan Sumatera Selatan yang naik dari 79,81 pada 2015 menjadi 80,95 pada 2016. Sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang” dan pada 2016 hanya terdapat satu provinsi yakni Sumatera Barat yang masuk dalam kategori “buruk”.





1

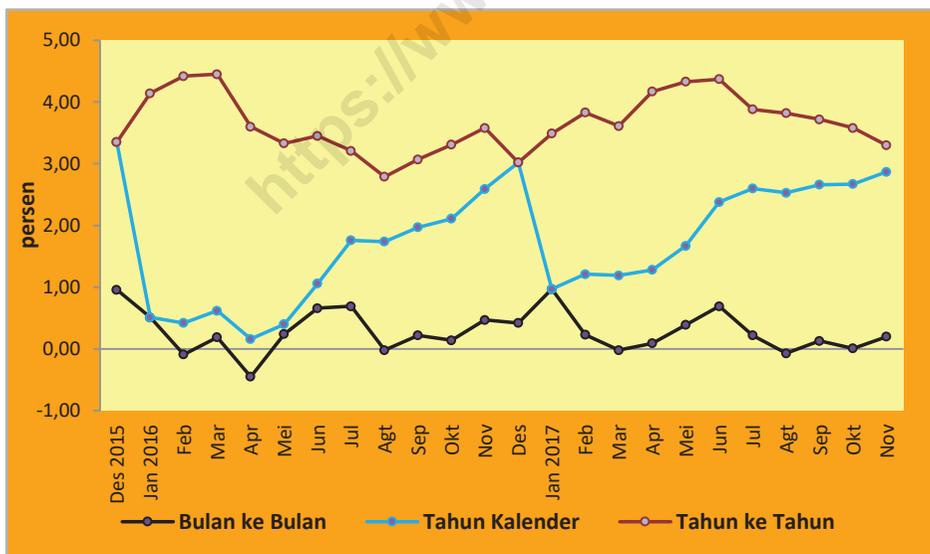
INFLASI  
NOVEMBER  
2017

# I. INFLASI NOVEMBER 2017

1. Pada November 2017 terjadi inflasi sebesar 0,20 persen. Dari 82 kota, 68 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Singaraja sebesar 1,80 persen dengan IHK 138,11 dan inflasi terendah terjadi di Bekasi dan Palopo masing-masing sebesar 0,02 persen dengan IHK 126,24 dan 127,49. Inflasi November 2017 sebesar 0,20 persen lebih rendah dibanding kondisi November 2016 yang mengalami inflasi sebesar 0,47 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 2,87 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2017 terhadap November 2016) sebesar 3,30 persen.

**Pada November 2017 terjadi inflasi sebesar 0,20 persen**

**Grafik 1.1**  
Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun  
Gabungan 82 Kota, 2015–2017



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga, inflasi umum (*headline inflation*) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok: bahan makanan 0,37 persen; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,22 persen; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,13 persen; sandang 0,12

- persen; kesehatan 0,27 persen; pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,10 persen; transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,09 persen.
3. Dari inflasi 0,20 persen, andil cabai merah 0,06 persen; beras 0,03 persen; bawang merah 0,02 persen; daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, mie, rokok kretek filter, dan bensin masing-masing 0,01 persen.
  4. Inflasi November 2017 sebesar 0,20 persen, angka tersebut lebih rendah dibanding kondisi November 2016 yang mengalami inflasi 0,47 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 2,87 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2017 terhadap November 2016) sebesar 3,30 persen.
  5. Menurut karakteristik perubahan harga, inflasi November 2017 sebesar 0,20 persen dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada komponen inti (core) 0,13 persen; kenaikan indeks pada komponen yang harganya diatur pemerintah (administered prices) 0,21 persen; dan kenaikan indeks pada komponen bergejolak (volatile) 0,38 persen.
  6. Inflasi November 2017 sebesar 0,20 persen berasal dari sumbangan inflasi komponen inti 0,08 persen, sumbangan inflasi dari komponen barang/jasa yang harganya diatur pemerintah 0,04 persen, dan sumbangan inflasi komponen bergejolak sebesar 0,08 persen.
  7. Inflasi komponen inti November 2017 sebesar 0,13 persen, inflasi tahun kalender 2017 sebesar 2,82 persen, dan inflasi tahun ke tahun (November 2017 terhadap November 2016) sebesar 3,05 persen.
  8. Pada Oktober 2017 Pakistan menjadi negara yang mengalami Inflasi tertinggi dibandingkan beberapa negara lain, yaitu 0,70 persen.

**Tabel 1.1**  
**Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota November 2017**  
**Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**(2012=100)**

Kelompok Pengeluaran	IHK November 2016	IHK Desember 2016	IHK November 2017	Inflasi November 2017 <sup>1)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2017 <sup>2)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun <sup>3)</sup> (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Umum (Headline)</b>	<b>126,18</b>	<b>126,71</b>	<b>130,35</b>	<b>0,20</b>	<b>2,87</b>	<b>3,30</b>	<b>0,20</b>
1 Bahan Makanan	139,88	140,58	139,20	0,37	-0,98	-0,49	0,09
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	132,67	133,27	138,32	0,22	3,79	4,26	0,04
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	121,46	121,68	127,71	0,13	4,96	5,15	0,03
4 Sandang	114,03	113,50	117,80	0,12	3,79	3,31	0,01
5 Kesehatan	121,09	121,48	124,89	0,27	2,81	3,14	0,01
6 Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	117,82	117,88	121,72	0,10	3,26	3,31	0,01
7 Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	123,04	124,42	128,72	0,09	3,46	4,62	0,01

<sup>1)</sup> Persentase perubahan IHK November 2017 terhadap IHK bulan sebelumnya.

<sup>2)</sup> Persentase perubahan IHK November 2017 terhadap IHK Desember 2016.

<sup>3)</sup> Persentase perubahan IHK November 2017 terhadap IHK November 2016.

**Tabel 1.2**  
**Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi November 2017**  
**Menurut Komponen Perubahan Harga (2012=100)**

Komponen	IHK November 2016	IHK Desember 2016	IHK November 2017	Inflasi November 2017 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2017 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Umum</b>	<b>126,18</b>	<b>126,71</b>	<b>130,35</b>	<b>0,20</b>	<b>2,87</b>	<b>3,30</b>	<b>0,20</b>
Inti	118,96	119,23	122,59	0,13	2,82	3,05	0,08
Harga Diatur Pemerintah	138,76	140,11	150,92	0,21	7,72	8,76	0,04
Bergejolak	141,48	142,15	139,72	0,38	-1,71	-1,24	0,08

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)**

Bulan	Tingkat Inflasi Nasional (bulan ke bulan)						Tingkat Inflasi Nasional (kalender)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Januari	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51	0,97	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51	0,97
Februari	0,05	0,75	0,26	-0,36	-0,09	0,23	0,81	1,79	1,33	-0,61	0,42	1,21
Maret	0,07	0,63	0,08	0,17	0,19	-0,02	0,88	2,43	1,41	-0,44	0,62	1,19
April	0,21	-0,10	-0,02	0,36	-0,45	0,09	1,09	2,32	1,39	-0,08	0,16	1,28
Mei	0,07	-0,03	0,16	0,50	0,24	0,39	1,15	2,30	1,56	0,42	0,40	1,67
Juni	0,62	1,03	0,43	0,54	0,66	0,69	1,79	3,35	1,99	0,96	1,06	2,38
Juli	0,70	3,29	0,93	0,93	0,69	0,22	2,50	6,75	2,94	1,90	1,76	2,60
Agustus	0,95	1,12	0,47	0,39	-0,02	-0,07	3,48	7,94	3,42	2,29	1,74	2,53
September	0,01	-0,35	0,27	-0,05	0,22	0,13	3,49	7,57	3,71	2,24	1,97	2,66
Oktober	0,16	0,09	0,47	-0,08	0,14	0,01	3,66	7,66	4,19	2,16	2,11	2,67
November	0,07	0,12	1,50	0,21	0,47	0,20	3,73	7,79	5,75	2,37	2,59	2,87
Desember	0,54	0,55	2,46	0,96	0,42		4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	

**Tabel 1.4**  
**Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)**

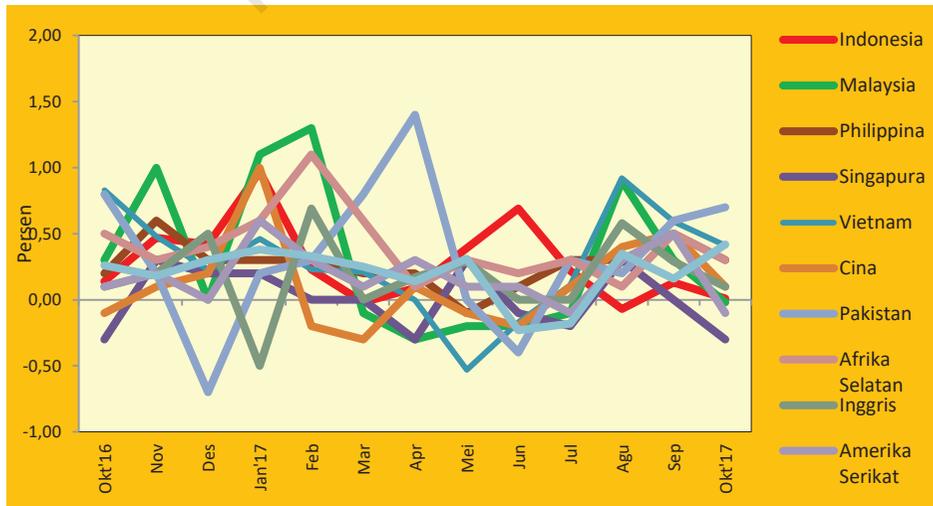
Bulan	2012:2011	2013:2012	2014:2013	2015:2014	2016:2015	2017:2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	3,65	4,57	8,22	6,96	4,14	3,49
Februari	3,56	5,31	7,75	6,29	4,42	3,83
Maret	3,97	5,90	7,32	6,38	4,45	3,61
April	4,50	5,57	7,25	6,79	3,60	4,17
Mei	4,45	5,47	7,32	7,15	3,33	4,33
Juni	4,53	5,90	6,70	7,26	3,45	4,37
Juli	4,56	8,61	4,53	7,26	3,21	3,88
Agustus	4,58	8,79	3,99	7,18	2,79	3,82
September	4,31	8,40	4,53		3,07	3,72
Oktober	4,61	8,32	4,83	6,83	3,31	3,58
November	4,32	8,37	6,23	6,25	3,58	3,30
Desember	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	

**Tabel 1.5**  
**Tingkat Inflasi Beberapa Negara, September 2017–Oktober 2017 (persen)**

Negara	Bulan ke Bulan		Tahun ke Tahun (Y-on-Y)	
	September 2017	Oktober 2017	September 2017	Oktober 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Indonesia	0,13	0,01	3,72	3,58
2. Malaysia	0,30	-0,02	4,30	3,70
3. Pilipina	0,50	0,30	3,40	3,50
4. Singapura	0,00	-0,30	0,40	0,40
5. Vietnam	0,59	0,41	3,40	2,98
6. Cina	0,50	0,10	1,60	1,90
7. Pakistan	0,60	0,70	3,90	3,80
8. Afrika Selatan	0,50	0,30	5,10	4,80
9. Inggris	0,29	0,10	3,00	3,00
10. Amerika Serikat	0,50	-0,10	2,20	2,00
11. Brazil	0,16	0,42	2,54	2,70

Sumber: <http://www.stats.gov.cn>, <http://www.dosm.gov.my>, <http://www.pbs.gov.pk>, <http://www.census.gov.ph>, <http://www.singstat.gov.sg>, <http://www.gso.gov.vn>, <http://www.bls.gov>, <http://www.ibge.gov.br>, <https://www.ons.gov.uk>, <http://www.statssa.gov.za>, dan [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com)

**Grafik 1.2**  
**Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2016–2017**





2

PDB DAN  
PERTUMBUHAN  
EKONOMI  
TRIWULAN III-2017

## II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN III-2017

1. Ekonomi Indonesia triwulan III-2017 dibandingkan triwulan III-2016 (*y-on-y*) tumbuh 5,06 persen dan dibandingkan triwulan II-2017 (*q-to-q*) tumbuh sebesar 3,18 persen.

**Triwulan III-2017,  
perekonomian  
Indonesia  
tumbuh 5,06 persen**

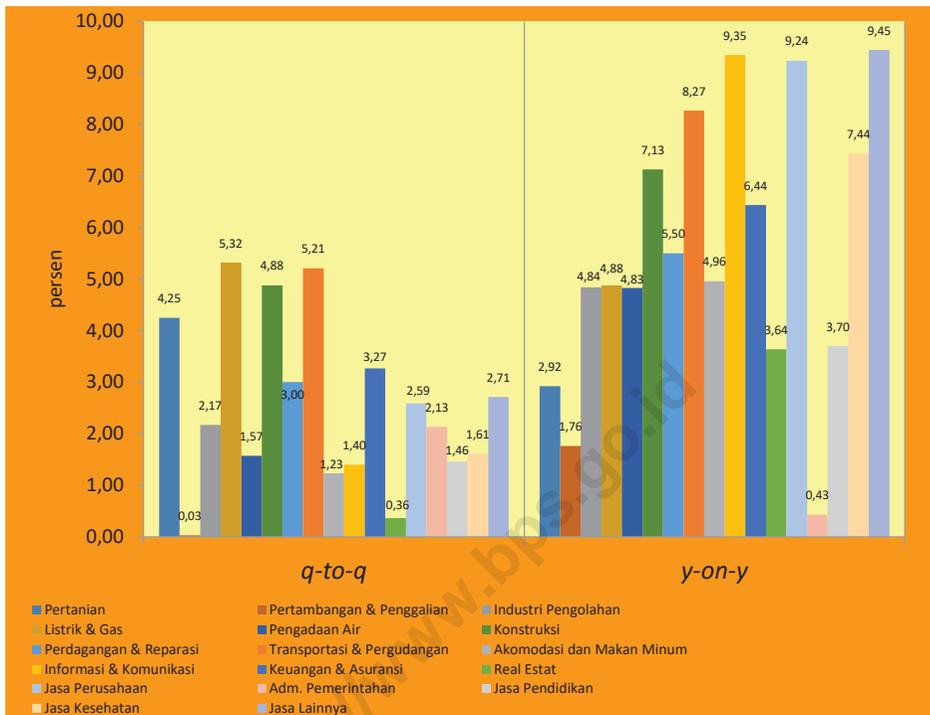
2. Dari sisi produksi pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,45 persen. Diikuti oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi dan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan yang tumbuh masing-masing sebesar 9,35 persen dan 9,24 persen.

3. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, selain itu adanya masa liburan Idul Fitri, libur sekolah, libur Idul Adha, dan Tahun Baru Islam turut mendorong pertumbuhan beberapa lapangan usaha, seperti Transportasi-Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa lainnya.

**Grafik 2.1**  
Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2016 s.d Triwulan III-2017 (persen)



**Grafik 2.2**  
**Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha**  
**Triwulan III-2017 (persen)**



**Tabel 2.1**  
**Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)**

Lapangan Usaha	Triw II-2017 Terhadap Triw I-2017 (q-to-q)	Triw III-2017 Terhadap Triw II-2017 (q-to-q)	Triw II-2017 Terhadap Triw II-2016 (y-on-y)	Triw III-2017 Terhadap Triw III-2016 (y-on-y)	Triw I s/d III-2017 Terhadap Triw I s/d III-2016 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Triw III-2017 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,49	4,25	3,33	2,92	4,31	0,40
2. Pertambangan dan Penggalian	0,43	0,03	2,31	1,76	1,15	0,14
3. Industri Pengolahan	2,76	2,17	3,47	4,84	4,18	1,02
4. Pengadaan Listrik dan Gas	-0,99	5,32	-2,53	4,88	1,29	0,05
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,26	1,57	3,67	4,83	4,30	0,00

Lapangan Usaha	Triw II-2017 Terhadap Triw I-2017 (q-to-q)	Triw III- 2017 Terhadap Triw II- 2017 (q-to-q)	Triw II- 2017 Terhadap Triw II- 2016 (y-on-y)	Triw III- 2017 Terhadap Triw III- 2016 (y-on-y)	Triw I s/d III-2017 Terhadap Triw I s/d III-2016 (c- to-c)	Sumber Pertumbuhan Triw III-2017 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Konstruksi	2,52	4,88	6,96	7,13	6,69	0,69
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,86	3,00	3,85	5,50	4,78	0,72
8. Transportasi dan Pergudangan	3,00	5,21	8,45	8,27	8,25	0,33
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,46	1,23	5,07	4,96	4,90	0,14
10. Informasi dan Komunikasi	5,67	1,40	10,91	9,35	9,80	0,45
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,96	3,27	5,94	6,44	6,13	0,26
12. Real Estat	1,04	0,36	3,74	3,64	3,68	0,10
13. Jasa Perusahaan	2,52	2,59	8,14	9,24	8,07	0,15
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,11	2,13	-0,03	0,43	0,21	0,01
15. Jasa Pendidikan	2,99	1,46	0,90	3,70	2,87	0,11
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	1,61	6,40	7,44	6,98	0,08
17. Jasa lainnya	2,56	2,71	8,63	9,45	8,71	0,15
<b>NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR</b>	3,19	2,74	4,41	5,03	4,78	4,82
<b>PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	30,45	14,61	23,27	5,82	12,23	0,24
	4,00	3,18	5,01	5,06	5,03	5,06

4. Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2017 mencapai Rp3.502,3 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.551,5 triliun.

5. Struktur ekonomi Indonesia triwulan III-2017 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan; diikuti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dengan peran masing-masing sebesar 19,93 persen, 13,96 persen, dan 12,98 persen. Selanjutnya Lapangan Usaha Konstruksi dan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar 10,26 persen dan 7,15 persen.

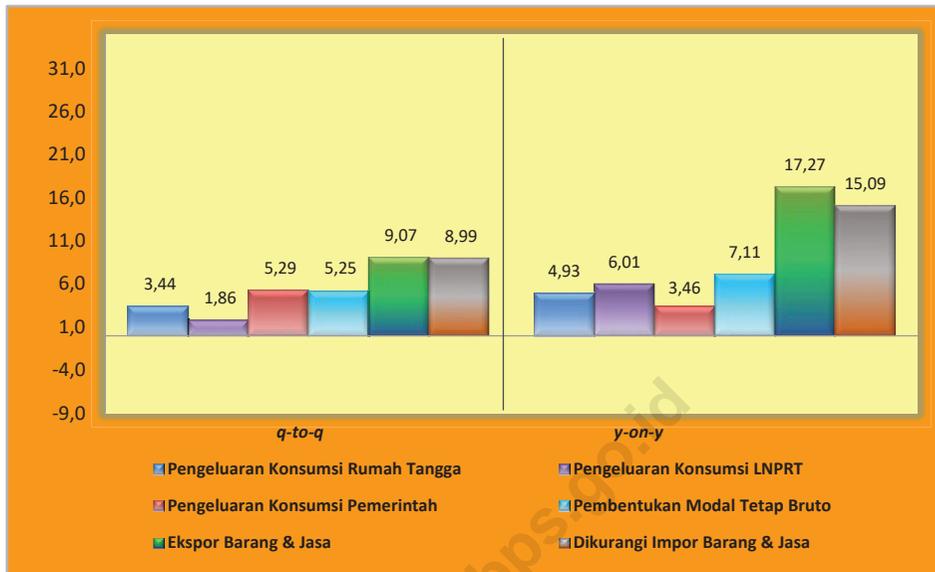
**Tabel 2.2**  
**PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010=100		Distribusi (persen)	
	Triw II-	Triw III-	Triw II-	Triw III-	Triw II-	Triw III-
	2017	2017	2017	2017	2017	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	468,4	489,0	332,4	346,5	13,92	13,96
2. Pertambangan dan Penggalian	246,8	250,3	195,5	195,6	7,33	7,15
3. Industri Pengolahan	681,7	698,2	525,1	536,5	20,25	19,93
4. Pengadaan Listrik dan Gas	39,4	41,9	24,6	25,9	1,17	1,20
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,4	2,5	2,0	2,0	0,07	0,07
6. Konstruksi	340,4	359,4	239,8	251,5	10,12	10,26
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	438,9	454,4	327,1	336,9	13,04	12,98
8. Transportasi dan Pergudangan	177,7	195,0	99,5	104,7	5,28	5,57
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95,2	96,7	73,5	74,4	2,83	2,76
10. Informasi dan Komunikasi	128,9	130,9	126,2	127,9	3,83	3,74
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	141,8	147,7	99,5	102,7	4,21	4,22
12. Real Estat	94,2	95,3	72,1	72,4	2,80	2,72
13. Jasa Perusahaan	58,7	60,7	42,7	43,8	1,74	1,73
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	122,3	126,1	78,0	79,7	3,63	3,60

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010=100		Distribusi (persen)	
	Triw II-	Triw III-	Triw II-	Triw III-	Triw II-	Triw III-
	2017	2017	2017	2017	2017	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. Jasa Pendidikan	108,6	111,7	73,7	74,8	3,23	3,19
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	35,5	36,4	26,7	27,2	1,05	1,04
17. Jasa lainnya	58,8	60,9	42,0	43,1	1,75	1,74
<b>NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	3 239,7	3 357,0	2 380,4	2 445,6	96,27	95,85
	125,7	145,3	92,4	105,9	3,73	4,15
	3 365,4	3 502,3	2 472,8	2 551,5	100,00	100,00

6. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2017 dibandingkan dengan triwulan III-2016 (*y-on-y*) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 17,27 persen yang terutama didukung oleh pertumbuhan ekspor barang nonmigas sebesar 20,51 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,11 persen yang didorong oleh pertumbuhan pada barang modal jenis peralatan lainnya, Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,01 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,93 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,46 persen serta Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 15,09 persen.

**Grafik 2.3**  
**Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan III-2017 (persen)**



7. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran didukung oleh semua komponen. Pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,07 persen yang terutama didukung oleh pertumbuhan ekspor jasa sebesar 16,08 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,29 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 5,25 persen yang didorong oleh pertumbuhan pada barang modal jenis mesin dan perlengkapan, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,44 persen yang terutama didorong oleh pengeluaran untuk kelompok transportasi dan komunikasi, Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,86 persen. Sementara itu, pertumbuhan Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 8,99 persen sebagai pengurang dalam perekonomian Indonesia.

**Tabel 2.3**  
**Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran (persen)**

Jenis Pengeluaran	Triw II- 2017	Triw III- 2017	Triw II- 2017	Triw III- 2017	Triw I s/d III-2017	Sumber Pertumbuhan Triw III-2017 (y-on-y)
	Terhadap Triw I- 2017 (q-to-q)	Terhadap Triw II- 2017 (q-to-q)	Terhadap Triw II- 2016 (y-on-y)	Terhadap Triw III- 2016 (y-on-y)	Terhadap Triw I s/d III-2016 (c-to-c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,31	3,44	4,95	4,93	4,94	2,65
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,95	1,86	8,51	6,01	7,49	0,07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	29,38	5,29	-1,93	3,46	1,28	0,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,95	5,25	5,35	7,11	5,77	2,25
5. Perubahan Inventori Diskrepansi Statistik	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang & Jasa	-2,33	9,07	3,60	17,27	9,79	3,38
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang & Jasa	-1,86	8,99	0,22	15,09	6,68	2,69
<b>PDB</b>	<b>4,00</b>	<b>3,18</b>	<b>5,01</b>	<b>5,06</b>	<b>5,03</b>	<b>5,06</b>

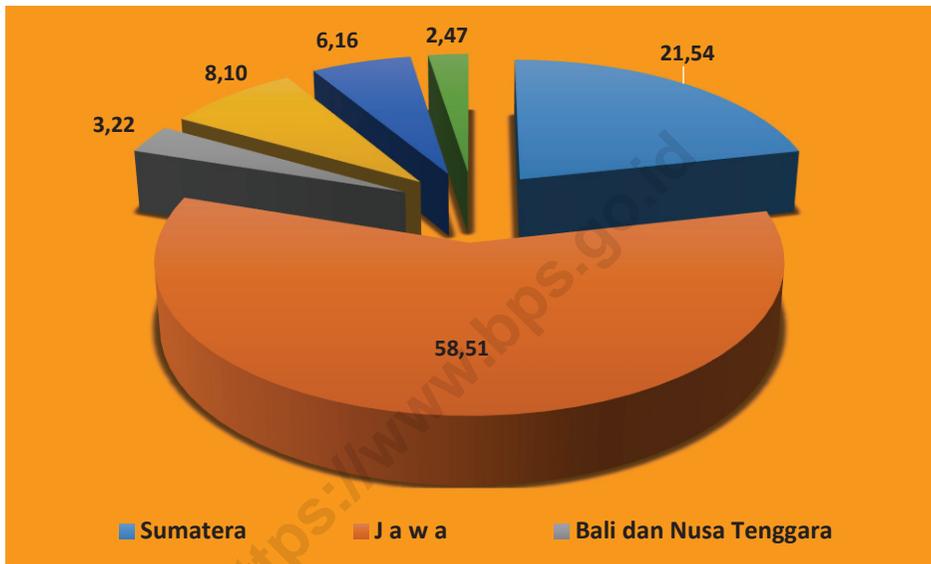
8. Struktur perekonomian Indonesia dari sisi pengeluaran pada triwulan III-2017 didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 55,68 persen. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor, dan Impor Barang dan Jasa memberikan kontribusi masing-masing sebesar 31,87 persen, 20,49 persen, dan 18,82 persen.

**Tabel 2.4**  
**Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran**

Jenis Pengeluaran	Harga Berlaku (Triliun Rupiah)		Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah)		Distribusi <sup>1)</sup> (Persen)	
	Triw II- 2017	Triw III- 2017	Triw II- 2017	Triw III- 2017	Triw II- 2017	Triw III- 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 874,2	1 950,2	1 326,5	1 372,1	55,69	55,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	39,7	40,7	28,0	28,5	1,18	1,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	290,2	308,3	183,9	193,7	8,62	8,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 055,8	1 116,3	782,7	823,8	31,37	31,87
5. Perubahan Inventori Diskrepansi Statistik	95,9	50,5	56,6	29,4	2,85	1,44
	-38,7	-22,2	40,1	43,7	-1,15	-0,63
6. Ekspor Barang & Jasa	644,9	717,7	511,6	558,0	19,16	20,49
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang & Jasa	596,5	659,3	456,5	497,6	17,72	18,82
<b>PDB</b>	<b>3 365,4</b>	<b>3 502,3</b>	<b>2 472,8</b>	<b>2 551,5</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

9. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan III-2017 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,51 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,54 persen, Pulau Kalimantan 8,10 persen, dan Pulau Sulawesi 6,16 persen, dan sisanya 5,69 persen di pulau-pulau lainnya.

**Grafik 2.4**  
Peranan Wilayah/Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan III-2017 (persen)



**Tabel 2.5**  
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)

Wilayah/Pulau	2015	2016	2017	
			Trw II	Trw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumatera	22,18	22,03	21,68	21,54
2. Jawa	58,34	58,49	58,66	58,51
3. Bali dan Nusa Tenggara	3,06	3,13	3,11	3,22
4. Kalimantan	8,15	7,85	8,14	8,10
5. Sulawesi	5,91	6,04	6,12	6,16
6. Maluku dan Papua	2,36	2,46	2,30	2,47
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Catatan: atas dasar harga berlaku

10. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan III-2017 menurut kelompok provinsi dipengaruhi oleh empat provinsi dengan total kontribusi sebesar 53,60 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dengan pertumbuhan *y-on-y* masing-masing sebesar 6,29 persen; 5,16 persen; 5,33 persen; dan 5,13 persen.

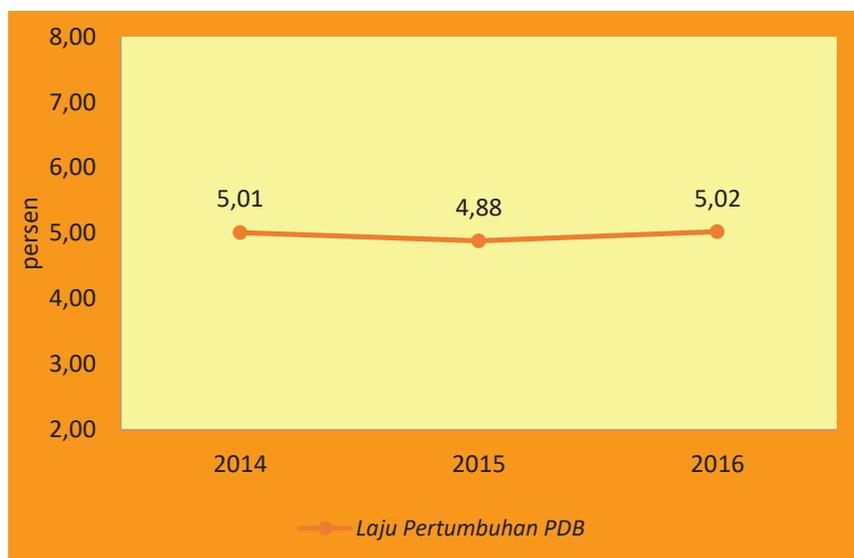
**Tabel 2.6**  
**Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan III-2017 (persen)**

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	Q	Y	C	Terhadap Pulau	Terhadap 34 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Sumatera</b>	<b>3,15</b>	<b>4,43</b>	<b>4,21</b>	<b>100,00</b>	<b>21,54</b>
01. Aceh	4,00	4,78	4,10	4,88	1,05
02. Sumatra Utara	3,10	5,21	4,95	22,80	4,91
03. Sumatra Barat	2,13	5,38	5,23	7,14	1,54
04. Riau	3,64	2,85	2,70	23,19	4,99
05. Jambi	1,69	4,76	4,45	6,28	1,35
06. Sumatra Selatan	4,08	5,56	5,32	13,07	2,82
07. Bengkulu	1,50	4,83	5,06	2,00	0,43
08. Lampung	3,52	5,21	5,13	10,75	2,32
09. Kep. Bangka Belitung	-0,11	3,69	5,11	2,29	0,49
10. Kepulauan Riau	2,83	2,41	1,82	7,58	1,63
<b>Jawa</b>	<b>2,77</b>	<b>5,54</b>	<b>5,55</b>	<b>100,00</b>	<b>58,51</b>
11. DKI Jakarta	2,55	6,29	6,24	29,74	17,40
12. Jawa Barat	1,98	5,33	5,30	22,11	12,94
13. Jawa Tengah	2,63	5,13	5,20	14,72	8,61
14. DI Yogyakarta	5,55	5,41	5,23	1,49	0,87
15. Jawa Timur	3,74	5,16	5,21	25,04	14,65
16. Banten	2,48	5,62	5,66	6,90	4,03
<b>Bali dan Nusa Tenggara</b>	<b>6,90</b>	<b>5,24</b>	<b>3,69</b>	<b>100,00</b>	<b>3,22</b>
17. Bali	3,34	6,22	6,00	48,82	1,57
18. Nusa Tenggara Barat	13,60	4,09	-0,43	30,46	0,98
19. Nusa Tenggara Timur	5,18	4,91	5,01	20,71	0,67
<b>Kalimantan</b>	<b>2,23</b>	<b>4,67</b>	<b>4,68</b>	<b>100,00</b>	<b>8,10</b>
20. Kalimantan Barat	6,36	5,13	4,91	15,86	1,28
21. Kalimantan Tengah	3,14	6,13	7,23	11,13	0,90
22. Kalimantan Selatan	5,08	6,44	5,60	14,59	1,18
23. Kalimantan Timur	0,23	3,54	3,68	51,59	4,18
24. Kalimantan Utara	1,94	6,62	6,44	6,83	0,55

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	Q	Y	C	Terhadap Pulau	Terhadap 34 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Sulawesi</b>	<b>4,14</b>	<b>6,69</b>	<b>6,67</b>	<b>100,00</b>	<b>6,16</b>
25. Sulawesi Utara	5,36	6,49	6,24	12,91	0,80
26. Sulawesi Tengah	0,34	8,68	6,42	15,55	0,96
27. Sulawesi Selatan	5,28	6,25	6,78	50,19	3,09
28. Sulawesi Tenggara	2,65	6,54	7,15	12,64	0,78
29. Gorontalo	5,95	5,29	6,40	4,10	0,25
30. Sulawesi Barat	5,28	6,94	6,43	4,62	0,28
<b>Maluku dan Papua</b>	<b>13,30</b>	<b>3,98</b>	<b>4,15</b>	<b>100,00</b>	<b>2,47</b>
31. Maluku	1,68	5,26	5,74	11,39	0,28
32. Maluku Utara	3,32	7,78	7,46	9,40	0,23
33. Papua Barat	8,11	3,48	3,05	20,70	0,51
34. Papua	19,44	3,40	3,75	58,51	1,45

11. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2016 meningkat sebesar 5,02 persen terjadi pada semua lapangan usaha ekonomi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 8,90 persen, diikuti oleh Informasi-Komunikasi, dan Jasa Lainnya yang tumbuh masing-masing sebesar 8,87 persen dan 7,80 persen.

Grafik 2.5  
Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2014–2016 (persen)



12. Tahun 2016, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 20,51 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,45 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,19 persen.

**Tabel 2.7**  
**Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (persen)**

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan <sup>1</sup>			Distribusi <sup>2</sup>		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,24	3,77	3,25	13,34	13,49	13,45
B Pertambangan dan Penggalian	0,43	-3,42	1,06	9,83	7,65	7,20
C Industri Pengolahan	4,64	4,33	4,29	21,07	20,97	20,51
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,90	0,90	5,39	1,09	1,14	1,15
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,24	7,07	3,60	0,07	0,07	0,07
F Konstruksi	6,97	6,36	5,22	9,86	10,21	10,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,18	2,59	3,93	13,43	13,31	13,19
H Transportasi dan Pergudangan	7,36	6,68	7,74	4,42	5,02	5,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	4,31	4,94	3,04	2,96	2,92
J Informasi dan Komunikasi	10,12	9,69	8,87	3,50	3,52	3,62
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	8,59	8,90	3,86	4,03	4,20
L Real Estat	5,00	4,11	4,30	2,79	2,84	2,81
M,N Jasa Perusahaan	9,81	7,69	7,36	1,57	1,65	1,70
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,38	4,63	3,19	3,83	3,91	3,86
P Jasa Pendidikan	5,47	7,33	3,84	3,23	3,37	3,37
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	6,68	5,00	1,03	1,07	1,07
R,S,T,U Jasa Lainnya	8,93	8,08	7,80	1,55	1,65	1,71
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	5,00	4,18	4,55	97,51	96,86	96,43
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	5,08	32,24	19,31	2,49	3,14	3,57
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,01	4,88	5,02	100	100	100

<sup>1)</sup> Atas dasar harga konstan 2010

<sup>2)</sup> Atas dasar harga berlaku

13. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2016 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2010) mencapai Rp 9.433,0 triliun.

**Tabel 2.8**  
**PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2014–2016 (triliun rupiah)**

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 409,7	1 555,7	1 669,0	1 129,1	1 171,6	1 209,7
B Pertambangan dan Penggalian	1 039,4	881,7	893,9	794,5	767,3	775,5
C Industri Pengolahan	2 227,6	2 418,4	2 544,6	1 854,3	1 934,5	2 017,6
D Pengadaan Listrik dan Gas	114,9	131,3	142,8	94,0	94,9	100,0
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,8	8,5	9,0	6,9	7,4	7,6
F Konstruksi	1 042,0	1 177,1	1 287,7	826,6	879,2	925,1
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 419,2	1 535,3	1 636,0	1 177,3	1 207,7	1 255,2
H Transportasi dan Pergudangan	467,0	579,1	647,2	326,9	348,8	375,8
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	321,1	341,6	362,2	257,8	268,9	282,2
J Informasi dan Komunikasi	369,5	406,0	449,1	384,5	421,7	459,2
K Jasa Keuangan dan Asuransi	408,4	465,0	520,9	319,8	347,3	378,2
L Real Estat	294,6	327,6	348,3	256,4	267,0	278,5
M,N Jasa Perusahaan	166,0	190,3	211,6	137,8	148,4	159,3
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	404,6	450,2	478,6	296,3	310,1	319,9
P Jasa Pendidikan	341,8	388,0	418,3	263,7	283,0	293,9
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,1	122,9	132,4	91,4	97,5	102,3
R,S,T,U Jasa Lainnya	163,5	190,6	212,2	134,1	144,9	156,2
<b>NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR</b>	<b>10 306,2</b>	<b>11 169,3</b>	<b>11 963,8</b>	<b>8 351,4</b>	<b>8 700,2</b>	<b>9 096,2</b>
<b>PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK</b>	<b>263,5</b>	<b>362,4</b>	<b>443,0</b>	<b>213,5</b>	<b>282,3</b>	<b>336,8</b>
<b>PRODUK DOMESTIK BRUTO</b>	<b>10 569,7</b>	<b>11 531,7</b>	<b>12 406,8</b>	<b>8 564,9</b>	<b>8 982,5</b>	<b>9 433,0</b>

14. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,02 persen ditopang oleh hampir semua Komponen, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen dan 0,15 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 6,62 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, masing-masing tumbuh sebesar 5,01 persen, dan 4,48 persen.

**Tabel 2.9**  
**Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (persen)**

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan <sup>1</sup>			Distribusi <sup>2</sup>		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,15	4,96	5,01	55,96	56,17	56,50
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12,19	-0,62	6,62	1,18	1,14	1,16
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,16	5,32	-0,15	9,43	9,75	9,45
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4,45	5,01	4,48	32,52	32,80	32,57
5 Perubahan Inventori	-	-	-	2,08	1,38	1,73
6 Ekspor Barang dan Jasa	1,07	-2,12	-1,74	23,67	21,15	19,08
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2,12	-6,41	-2,27	24,41	20,72	18,31
<b>PDB</b>	<b>5,01</b>	<b>4,88</b>	<b>5,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>) Atas dasar harga konstan 2010

<sup>2</sup>) Atas dasar harga berlaku

15. Tahun 2016, Komponen Konsumsi Rumah Tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 56,50 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 32,57 persen, Ekspor Barang dan Jasa sebesar 19,08 persen, Impor Barang dan Jasa sebesar 18,31 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 9,45 persen, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 1,16 persen.

**Tabel 2.10**  
**PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran**  
**Tahun 2014–2016 (triliun rupiah)**

Jenis Pengeluaran (1)	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 915,2	6 477,6	7 009,6	4 651,0	4 881,9	5 126,5
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	124,3	130,9	144,5	99,4	98,8	105,3
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	996,2	1 124,8	1 172,4	736,3	775,4	774,3
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3 436,9	3 782,1	4 040,5	2 772,5	2 911,5	3 041,8
5 Perubahan Inventori	220,2	158,8	214,1	163,6	112,8	139,6
6 Ekspor Barang dan Jasa	2 501,4	2 439,1	2 367,3	2 047,9	2 004,4	1 969,6
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 580,5	2 389,6	2 271,2	1 987,1	1 859,7	1 817,5
Diskrepani Statistik	-44,0	-192,0	-270,4	81,3	57,4	93,4
<b>PDB</b>	<b>10 569,7</b>	<b>11 531,7</b>	<b>12 406,8</b>	<b>8 564,9</b>	<b>8 982,5</b>	<b>9 433,0</b>

16. Dalam kurun waktu 2011–2016, PDB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp32,4 juta (tahun 2011), sebesar Rp35,1 juta (tahun 2012), sebesar Rp38,4 juta (tahun 2013), sebesar Rp41,9 juta (tahun 2014), sebesar Rp45,1 juta (tahun 2015), dan sebesar Rp48,0 juta (tahun 2016).

**Tabel 2.11**  
**PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2011–2016**

Uraian (1)	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)
PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku						
a. Nilai (juta rupiah)	32,4	35,1	38,4	41,9	45,1	48,0
b. Indeks Peningkatan (persen)	12,46	8,47	9,29	9,25	7,69	6,24
c. Nilai (US\$)	3 691,9	3 740,9	3 666,8	3 532,3	3 374,5	3 605,1





3

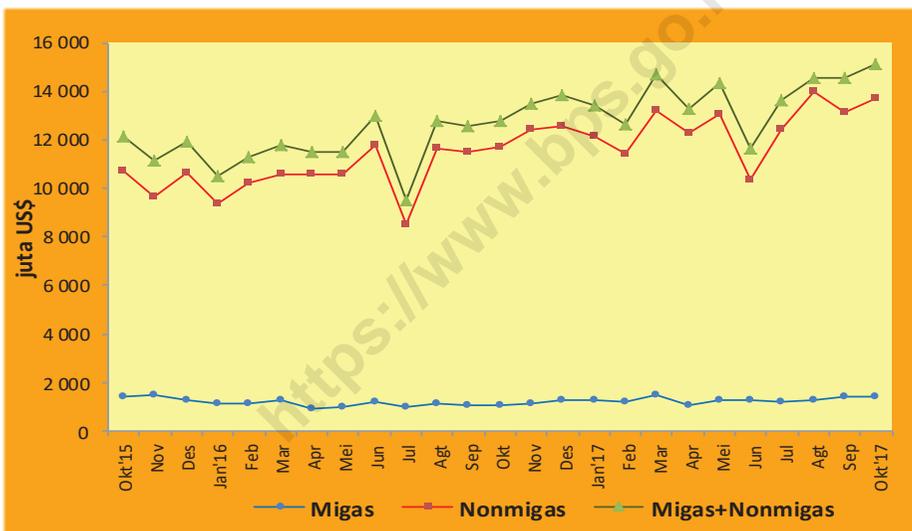
EKSPOR  
OKTOBER  
2017

### III. EKSPOR OKTOBER 2017

1. Nilai ekspor Indonesia Indonesia Oktober 2017 mencapai US\$15,09 miliar, atau naik 3,62 persen dibanding ekspor September 2017. Demikian juga jika dibanding Oktober 2016, ekspor naik 18,39 persen.

**Nilai ekspor Oktober 2017 mencapai US\$15,09 miliar, naik 18,39persen**

**Grafik 3.1**  
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB)  
Oktober 2015– Oktober 2017



2. Ekspor nonmigas Oktober 2017 mencapai US\$13,67 miliar, naik 4,22 persen dibanding ekspor nonmigas September 2017, sementara dibanding ekspor Oktober 2016, naik 17,00 persen.
3. Secara kumulatif nilai ekspor Januari–Oktober 2017 mencapai US\$138,46 miliar atau naik 17,49 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2016. Sementara itu ekspor nonmigas mencapai US\$125,58 miliar atau naik 17,26 persen.
4. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Oktober 2017 terhadap September 2017 terjadi pada bijih, kerak, dan abu logam sebesar US\$120,1 juta (34,56 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada perhiasan/permata sebesar US\$131,3 juta (22,74 persen).

5. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Oktober 2017 naik sebesar 14,32 persen dibanding ekspor hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2016, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 14,55 persen serta ekspor hasil tambang dan lainnya naik 36,42 persen.
6. Ekspor nonmigas Oktober 2017 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu US\$2,34 miliar, disusul Amerika Serikat US\$1,39 miliar dan Jepang US\$1,29 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 36,74 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US\$1,43 miliar.
7. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada periode Januari–Oktober 2017 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US\$24,15 miliar (17,44 persen), diikuti Jawa Timur sebesar US\$15,32 miliar (11,07 persen) dan Kalimantan Timur sebesar US\$14,49 miliar (10,46 persen).

**Tabel 3.1**  
**Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ( $\Delta$ %)**

Uraian	2016		2017			$\Delta$ (%)			Peran (%) Jan–Okt 2017
	Oktober	Jan–Okt	September	Oktober	Jan–Okt	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan–Okt	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Total Ekspor</b>	<b>12 743,7</b>	<b>117 850,9</b>	<b>14 559,8</b>	<b>15 087,1</b>	<b>138 462,0</b>	<b>18,39</b>	<b>3,62</b>	<b>17,49</b>	<b>100,00</b>
<b>Migas</b>	<b>1 055,9</b>	<b>10 752,3</b>	<b>1 439,2</b>	<b>1 412,4</b>	<b>12 880,0</b>	<b>33,77</b>	<b>-1,86</b>	<b>19,79</b>	<b>9,30</b>
Industri pengolahan hasil minyak	76,5	692,2	196,7	102,1	1 352,5	33,55	-48,08	95,40	0,98
Pengadaan gas	10,3	20,5	10,9	13,7	67,9	32,52	26,07	231,76	0,05
Pertambangan	969,1	10 039,6	1 231,6	1 296,6	11 459,6	33,80	5,28	14,14	8,27
- Minyak mentah	309,5	4 351,7	521,2	499,4	4 282,3	61,35	-4,19	-1,60	3,09
- Gas	659,6	5 687,9	710,4	797,2	7 177,3	20,87	12,22	26,19	5,18
<b>Nonmigas</b>	<b>11 687,8</b>	<b>107 098,6</b>	<b>13 120,6</b>	<b>13 674,7</b>	<b>125 582,0</b>	<b>17,00</b>	<b>4,22</b>	<b>17,26</b>	<b>90,70</b>
Pertanian	381,4	2 688,9	314,9	349,2	3 080,3	-8,45	10,89	14,55	2,23
Industri pengolahan	9 665,6	90 210,6	10 619,1	10 877,7	103 131,5	12,54	2,44	14,32	74,48
Pertambangan dan lainnya	1 640,8	14 199,1	2 186,6	2 447,8	19 370,2	49,18	11,95	36,42	13,99

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$)**  
**Triwulanan 2016–2017**

Uraian	2016		2017			Perubahan Triwulan (%)				
	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	IV'16	I'17	II'17	III'17	III'17
						thd	thd	thd	thd	thd
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	III'16	IV'16	I'17	II'17	III'16
<b>Total Ekspor</b>	<b>34 983,2</b>	<b>40 079,0</b>	<b>40 694,0</b>	<b>39 280,5</b>	<b>43 400,4</b>	<b>14,57</b>	<b>1,53</b>	<b>-3,47</b>	<b>10,49</b>	<b>24,06</b>
<b>Migas</b>	<b>3 198,7</b>	<b>3 409,0</b>	<b>3 980,9</b>	<b>3 605,6</b>	<b>3 881,0</b>	<b>6,57</b>	<b>16,78</b>	<b>-9,43</b>	<b>7,64</b>	<b>21,33</b>
Industri pengolahan hasil minyak	211,2	256,3	438,8	396,3	415,3	21,35	71,23	-9,69	4,80	96,65
Pengadaan gas	3,5	34,3	26,7	11,8	15,6	887,06	-22,21	-55,62	32,33	350,87
Pertambangan	2 984,1	3 118,5	3 515,4	3 197,5	3 450,1	4,50	12,73	-9,05	7,90	15,62
-Minyak mentah	1 323,9	1 154,5	1 401,0	1 157,2	1 224,8	-12,80	21,36	-17,41	5,84	-7,49
-Gas	1 660,2	1 964,0	2 114,4	2 040,3	2 225,3	18,30	7,66	-3,51	9,07	34,04
<b>Nonmigas</b>	<b>31 784,4</b>	<b>36 670,0</b>	<b>36 713,1</b>	<b>35 674,9</b>	<b>39 519,4</b>	<b>15,36</b>	<b>0,13</b>	<b>-2,83</b>	<b>10,78</b>	<b>24,34</b>
Pertanian	918,4	1 099,5	854,3	860,6	1 016,2	19,71	-22,30	0,73	18,08	10,64
Industri pengolahan	26 220,1	29 959,1	30 625,2	29 185,8	32 442,9	14,26	2,22	-4,70	11,16	23,73
Pertambangan dan lainnya	4 645,9	5 611,4	5 233,6	5 628,5	6 060,3	20,78	-6,73	7,55	7,67	30,44

**Tabel 3.3**  
**Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)**

Golongan Barang (HS)	September 2017	Oktober 2017	Δ	Δ%	Januari-Oktober			
					2016	2017	Δ%	Peran (%) 2017
					(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Bahan bakar mineral (27)	1 896,7	1 988,1	91,4	4,82	11 524,0	17 125,6	48,61	13,64
2. Mesin/peralatan listrik (85)	756,1	732,1	-24,0	-3,17	6 788,7	7 074,5	4,21	5,63
3. Kendaraan dan bagiannya (87)	575,7	627,8	52,1	9,05	4 830,1	5 703,7	18,09	4,54
4. Perhiasan/permata (71)	577,5	446,2	-131,3	-22,74	5 675,7	4 756,0	-16,20	3,79
5. Alas kaki (64)	360,2	433,3	73,1	20,27	3 773,6	4 008,2	6,22	3,19
6. Barang-barang rajutan (61)	322,9	290,6	-32,3	-10,00	2 710,4	3 092,7	14,10	2,46
7. Bijih, kerak, dan abu logam (26)	347,3	467,4	120,1	34,56	2 786,9	2 680,9	-3,80	2,14
8. Ikan dan udang (03)	270,5	328,5	58,0	21,46	2 370,4	2 607,9	10,02	2,08
9. Nikel (75)	62,1	47,3	-14,8	-23,84	471,2	508,2	7,84	0,40
10. Aluminium (76)	64,8	44,6	-20,2	-31,13	329,6	445,3	35,11	0,35
<b>Total 10 Golongan Barang</b>	<b>5 233,8</b>	<b>5 405,9</b>	<b>172,1</b>	<b>3,29</b>	<b>41 260,6</b>	<b>48 003,0</b>	<b>16,34</b>	<b>38,22</b>
<b>Lainnya</b>	<b>7 886,8</b>	<b>8 268,8</b>	<b>382,0</b>	<b>4,84</b>	<b>65 838,0</b>	<b>77 579,0</b>	<b>17,83</b>	<b>61,78</b>
<b>Total Ekspor Nonmigas</b>	<b>13 120,6</b>	<b>13 674,7</b>	<b>554,1</b>	<b>4,22</b>	<b>107 098,6</b>	<b>125 582,0</b>	<b>17,26</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.4**  
**Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya ( $\Delta$ )**

Negara Tujuan	September 2017	Oktober 2017	$\Delta$	$\Delta\%$	Januari-Oktober			Peran (%) 2017
					2016	2017	$\Delta\%$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>ASEAN</b>	<b>2 949,8</b>	<b>2 937,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>-0,41</b>	<b>24 057,6</b>	<b>27 123,2</b>	<b>12,74</b>	<b>21,60</b>
1 Singapura	871,6	740,5	-131,1	-15,03	7 929,9	7 453,5	-6,01	5,94
2 Malaysia	600,2	623,9	23,7	3,96	4 826,8	5 792,9	20,02	4,61
3 Thailand	454,3	474,8	20,5	4,50	3 803,2	4 521,0	18,87	3,60
ASEAN Lainnya	1 023,7	1 098,6	74,9	7,31	7 497,7	9 355,8	24,78	7,45
<b>Uni Eropa</b>	<b>1 311,6</b>	<b>1 429,1</b>	<b>117,5</b>	<b>8,96</b>	<b>11 647,8</b>	<b>13 582,8</b>	<b>16,61</b>	<b>10,82</b>
4 Jerman	225,6	228,7	3,1	1,38	2 168,0	2 216,5	2,24	1,76
5 Belanda	321,5	345,4	23,9	7,45	2 500,4	3 299,8	31,97	2,63
6 Italia	148,5	171,8	23,3	15,67	1 297,8	1 605,7	23,72	1,28
Uni Eropa Lainnya	616,0	683,2	67,2	10,91	5 681,6	6 460,8	13,71	5,15
<b>Negara Utama Lainnya</b>	<b>6 738,1</b>	<b>7 286,0</b>	<b>547,9</b>	<b>8,13</b>	<b>51 630,5</b>	<b>63 698,9</b>	<b>23,37</b>	<b>50,72</b>
7 Tiongkok	1 893,6	2 341,2	447,6	23,64	11 426,6	16 913,2	48,02	13,47
8 Jepang	1 312,1	1 294,1	-18,0	-1,37	10 671,0	11 894,2	11,46	9,47
9 Amerika Serikat	1 456,4	1 388,6	-67,8	-4,66	12 889,8	14 213,0	10,27	11,32
10 India	1 149,5	1 246,5	97,0	8,44	7 943,0	11 472,4	44,43	9,13
11 Australia	164,3	168,6	4,3	2,59	2 297,1	1 629,8	-29,05	1,30
12 Korea Selatan	519,2	609,8	90,6	17,47	4 295,1	5 300,2	23,40	4,22
13 Taiwan	243,0	237,2	-5,8	-2,40	2 107,9	2 276,1	7,98	1,81
<b>Total 13 Negara Tujuan</b>	<b>9 359,8</b>	<b>9 871,1</b>	<b>511,3</b>	<b>5,46</b>	<b>74 156,6</b>	<b>88 588,3</b>	<b>19,46</b>	<b>70,54</b>
<b>Lainnya</b>	<b>3 760,8</b>	<b>3 803,6</b>	<b>42,8</b>	<b>1,14</b>	<b>32 942,0</b>	<b>36 993,7</b>	<b>12,30</b>	<b>29,46</b>
<b>Total Ekspor Nonmigas</b>	<b>13 120,6</b>	<b>13 674,7</b>	<b>554,1</b>	<b>4,22</b>	<b>107 098,6</b>	<b>125 582,0</b>	<b>17,26</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.5**  
**Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2015–2017**  
**(FOB:juta US\$)**

Bulan	2015			2016 <sup>r</sup>			2017		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan	1 959,0	11 285,9	13 244,9	1 108,0	9 473,9	10 581,9	1 271,6	12 130,1	13 401,7
Feb	1 753,4	10 419,4	12 172,8	1 113,3	10 203,4	11 316,7	1 198,1	11 415,4	12 613,5
Mar	1 988,9	11 645,1	13 634,0	1 239,3	10 572,8	11 812,1	1 511,2	13 167,6	14 678,8
Apr	1 458,2	11 646,4	13 104,6	891,7	10 798,0	11 689,7	1 035,8	12 243,4	13 279,2
Mei	1 392,8	11 361,9	12 754,7	957,9	11 559,5	11 517,4	1 296,0	13 049,4	14 345,4
Jun	1 439,9	12 074,2	13 514,1	1 187,4	12 018,8	13 206,1	1 273,8	10 382,1	11 655,9
Jul	1 421,8	10 044,0	11 465,8	998,6	8 650,9	9 649,5	1 165,0	12 446,2	13 611,2
Agt	1 530,9	11 195,2	12 726,0	1 138,6	11 615,3	12 753,9	1 276,9	13 952,5	15 229,4
Sep	1 453,6	11 134,8	12 588,4	1 061,5	11 518,3	12 579,8	1 439,2	13 120,6	14 559,8
Okt	1 379,5	10 742,2	12 121,7	1 055,9	11 687,8	12 743,7	1 412,4	13 674,7	15 087,1
Nov	1 497,0	9 625,1	11 122,2	1 103,0	12 399,9	13 502,9			
Des	1 299,5	10 617,6	11 917,1	1 250,1	12 582,2	13 832,4			
<b>Total</b>	<b>18 574,4</b>	<b>131 791,9</b>	<b>150 366,3</b>	<b>13 105,5</b>	<b>132 080,8</b>	<b>145 186,2</b>	<b>12 880,0</b>	<b>125 582,0</b>	<b>138 462,0</b>

**Tabel 3.6**  
**Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang**  
**dan Pelabuhan Muat, Januari–Oktober 2017**

No Urut	Provinsi Asal Barang	Pelabuhan Muat						Total Ekspor		
		Prov Asal Barang			Prov Lain			Nilai	% Kolom	% Baris
		Nilai	% Kolom	% Baris	Nilai	% Kolom	% Baris			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	61,2	0,06	50,72	59,5	0,15	49,28	120,7	0,09	100,00
2	Sumatera Utara	7 329,9	7,43	99,45	40,9	0,10	0,55	7 370,8	5,32	100,00
3	Sumatera Barat	1 414,6	1,43	88,51	183,7	0,46	11,49	1 598,3	1,15	100,00
4	Riau	13 119,0	13,31	98,08	256,3	0,64	1,92	13 375,3	9,66	100,00
5	Kepulauan Riau	9 208,1	9,34	99,94	5,6	0,01	0,06	9 213,7	6,65	100,00
6	Jambi	966,6	0,98	45,79	1 144,2	2,87	54,21	2 110,8	1,52	100,00
7	Sumatera Selatan	2 642,3	2,68	80,25	650,2	1,63	19,75	3 292,5	2,38	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	1 434,0	1,45	95,63	65,5	0,16	4,37	1 499,5	1,08	100,00
9	Bengkulu	81,6	0,08	34,73	153,4	0,38	65,27	235,0	0,17	100,00
10	Lampung	3 106,9	3,15	94,44	183,1	0,46	5,56	3 290,0	2,38	100,00
11	DKI Jakarta	7 541,8	7,65	97,62	184,1	0,46	2,38	7 725,9	5,58	100,00
12	Jawa Barat	226,9	0,23	0,94	23 926,2	60,01	99,06	24 153,0	17,44	100,00
13	Banten	1 663,6	1,69	17,89	7 638,1	19,16	82,11	9 301,7	6,72	100,00
14	Jawa Tengah	4 706,6	4,77	76,69	1 430,4	3,59	23,31	6 137,0	4,43	100,00
15	DI Yogyakarta	6,5	0,01	2,06	308,9	0,77	97,94	315,4	0,23	100,00
16	Jawa Timur	15 019,5	15,23	98,03	301,7	0,76	1,97	15 321,2	11,07	100,00
17	Bali	189,8	0,19	42,80	253,6	0,64	57,20	443,4	0,32	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	880,4	0,89	98,87	10,1	0,03	1,13	890,4	0,64	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	18,4	0,02	36,35	32,2	0,08	63,65	50,6	0,04	100,00
20	Kalimantan Barat	681,1	0,69	58,67	479,8	1,20	41,33	1 160,9	0,84	100,00
21	Kalimantan Tengah	475,3	0,48	31,12	1 052,1	2,64	68,88	1 527,4	1,10	100,00
22	Kalimantan Selatan	5 599,6	5,68	94,16	347,2	0,87	5,84	5 946,9	4,29	100,00
23	Kalimantan Timur	14 348,6	14,55	99,03	139,8	0,35	0,97	14 488,4	10,46	100,00
24	Kalimantan Utara	723,0	0,73	90,25	78,1	0,20	9,75	801,0	0,58	100,00
25	Sulawesi Utara	655,0	0,66	81,99	143,9	0,36	18,01	799,0	0,58	100,00
26	Gorontalo	1,1	0,00	57,14	0,8	0,00	42,86	1,8	0,00	100,00
27	Sulawesi Tengah	2 159,0	2,19	98,89	24,1	0,06	1,11	2 183,1	1,58	100,00
28	Sulawesi Selatan	770,9	0,78	82,25	166,3	0,42	17,75	937,2	0,68	100,00
29	Sulawesi Barat	0,2	0,00	0,05	336,8	0,84	99,95	337,0	0,24	100,00
30	Sulawesi Tenggara	139,1	0,14	48,67	146,7	0,37	51,33	285,9	0,21	100,00
31	Maluku	33,3	0,03	46,92	37,7	0,09	53,08	71,0	0,05	100,00
32	Maluku Utara	181,4	0,18	99,80	0,4	0,00	0,20	181,8	0,13	100,00
33	Papua	1 671,4	1,70	96,02	69,4	0,17	3,98	1 740,8	1,26	100,00
34	Papua Barat	1 533,6	1,56	98,66	20,9	0,05	1,34	1 554,5	1,12	100,00
<b>Total Ekspor</b>		<b>98 509,3</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>39 871,7</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>138 462,0</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>



4

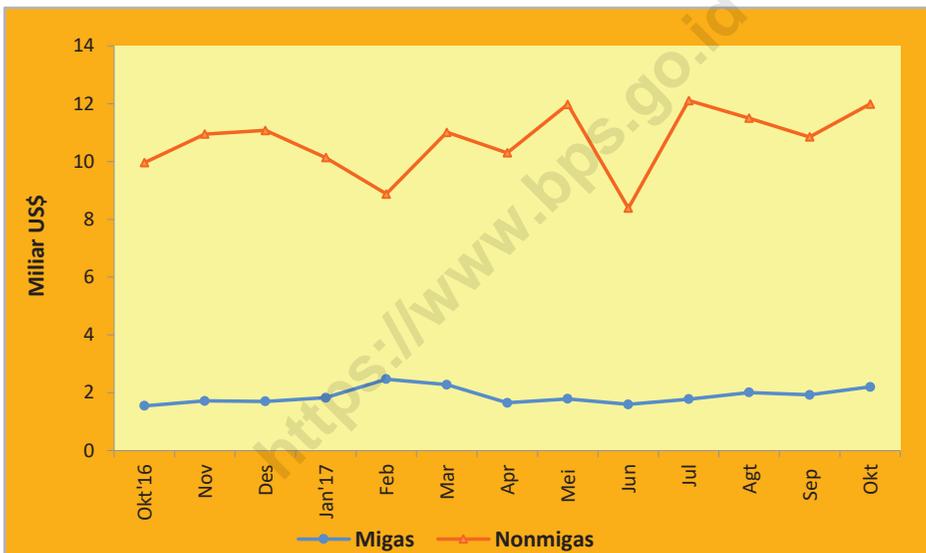
IMPOR  
OKTOBER  
2017

## IV. IMPOR OKTOBER 2017

1. Nilai impor Indonesia Oktober 2017 sebesar US\$14,19 miliar atau naik 11,04 persen dibanding impor September 2017. Dibanding impor Oktober 2016 naik 23,33 persen.

**Impor Oktober 2017 sebesar US\$14,19 miliar atau naik 23,33 persen (y-o-y)**

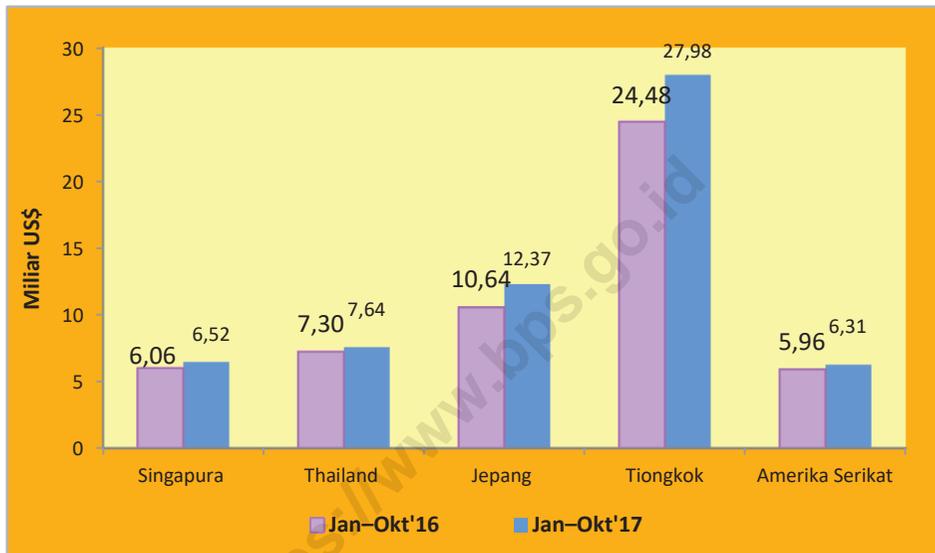
**Grafik 4.1**  
**Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)**  
**Oktober 2016–Oktober 2017**



2. Impor nonmigas Oktober 2017 sebesar US\$11,99 miliar, naik 10,52 persen dibanding September 2017 (US\$10,85 miliar). Selama Januari–Oktober 2017 impor nonmigas naik 12,90 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$94,89 miliar).
3. Impor migas Oktober 2017 sebesar US\$2,20 miliar, naik 13,96 persen dibanding September 2017 (US\$1,93 miliar). Selama Januari–Oktober 2017 impor migas naik 27,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$15,31 miliar).
4. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Oktober 2017 adalah golongan besi dan baja sebesar US\$182,9 juta, atau naik 28,68 persen dibanding September 2017 (US\$637,8 juta). Impor golongan barang tersebut pada Januari–Oktober 2017 mencapai US\$6.269,7 juta, naik 25,93 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

5. Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar periode Januari–Oktober 2017 ditempati Tiongkok 26,12 persen, Jepang 11,55 persen, dan Thailand 7,13 persen. Impor nonmigas dari ASEAN dan Uni Eropa masing-masing 20,50 persen dan 9,34 persen.

**Grafik 4.2**  
**Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF)**  
**Januari–Oktober 2016 dan 2017**



6. Nilai impor golongan barang konsumsi, bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari–Oktober 2017 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 13,48 persen, 16,32 persen dan 9,54 persen.
7. Neraca perdagangan Indonesia Oktober 2017 surplus sebesar US\$895,0 juta

**Tabel 4.1**  
**Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya**  
**Januari–Oktober 2016 dan 2017**

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Jan-Okt 2017 (%)
	Sep 2017	Okt 2017	Jan-Okt 2016	Jan-Okt 2017	Okt'17 thd Sep'17	Jan-Okt'17 thd Jan-Okt'16	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Total</b>	<b>12 780,8</b>	<b>14 192,1</b>	<b>110 200,9</b>	<b>126 678,0</b>	<b>11 04</b>	<b>14,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Migas</b>	<b>1 934,6</b>	<b>2 204,6</b>	<b>15 313,8</b>	<b>19 546,3</b>	<b>13,96</b>	<b>27,64</b>	<b>15,43</b>
-Minyak Mentah	541,0	776,0	5 624,0	5 725,4	43,44	1,80	4,52
- Hasil Minyak	1 121,6	1 188,9	8 376,4	11 665,0	6,00	39,26	9,21
- Gas	272,0	239,7	1 313,4	2 155,9	-11,88	64,15	1,70
<b>Nonmigas</b>	<b>10 846,2</b>	<b>11 987,5</b>	<b>94 887,1</b>	<b>107 131,7</b>	<b>10,52</b>	<b>12,90</b>	<b>84,57</b>

**Tabel 4.2**  
**Perkembangan Impor Indonesia**  
**Oktober 2016–Oktober 2017**

Periode	Nilai CIF (Juta US\$)			Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya (%)		
	Migas	Nonmigas	Total Impor	Migas	Nonmigas	Total Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2016</b>						
Triwulan I	3 896,8	28 047,5	31 944,3	-25,08	-4,94	-7,96
Triwulan II	4 802,8	29 246,7	34 049,5	23,25	4,28	6,59
Triwulan III	5 068,7	27 631,2	32 699,9	5,54	-5,52	-3,96
Oktober	1 545,1	9 962,1	11 507,2	-12,53	4,52	1,86
November	1 724,1	10 945,4	12 669,5	11,59	9,87	10,10
Desember	1 701,9	11 080,6	12 782,5	-1,28	1,24	0,89
Triwulan IV	4 971,1	31 988,1	36 959,2	-1,92	15,77	13,03
Jan-Des	18 739,8	116 913,0	135 652,8	-23,86	-0,99	-4,94
<b>2017</b>						
Januari	1 828,1	10 140,3	11 968,4	7,41	-8,49	-6,37
Februari	2 473,1	8 880,9	11 354,0	35,28	-12,42	-5,13
Maret	2 277,0	11 066,4	13 283,4	-7,93	23,93	16,99
Triwulan I	6 578,2	30 027,6	36 605,8	32,32	-6,13	-0,96
April	1 646,8	10 298,4	11 945,2	-27,68	-6,43	-10,07
Mei	1 791,6	11 975,5	13 767,1	8,79	16,29	15,25
Juni	1 600,6	8 391,2	9 991,8	-10,66	-29,93	-27,42
Triwulan II	5 039,0	30 665,1	35 704,1	-23,40	2,12	-2,46
Juli	1 778,7	12 106,9	13 885,6	11,13	44,28	38,97
Agustus	2 011,2	11 498,3	13 509,5	13,06	-5,03	-2,70
September	1 934,6	10 846,2	12 780,8	-3,81	-5,67	-5,39
Triwulan III	5 724,5	34 451,4	40 175,9	13,60	12,35	12,52
Oktober	2 204,6	11 987,5	14 192,1	13,96	10,52	11,04

**Tabel 4.3**  
**Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya**  
**Januari–Oktober 2016 dan 2017**

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Okt'17 (%)
	Sep 2017	Okt 2017	Jan-Okt 2016	Jan-Okt 2017	Okt'17 thd Sep'17	Jan-Okt'17 thd Jan-Okt'16	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Mesin dan peralatan mekanik (84)	1 801,8	1 961,8	17 103,2	17 295,2	8,88	1,12	16,14
2. Plastik dan barang dari plastik (39)	637,4	700,2	5 778,0	6 362,9	9,85	10,12	5,94
3. Besi dan baja (72)	637,8	820,7	4 978,7	6 269,7	28,68	25,93	5,85
4. Kendaraan dan bagiannya (87)	515,9	595,0	4 465,1	5 499,7	15,33	23,17	5,13
5. Bahan kimia organik (29)	445,6	542,2	3 994,6	4 891,3	21,68	22,45	4,57
6. Sisa industri makanan (23)	259,8	203,3	2 065,9	2 219,5	-21,75	7,44	2,07
7. Bahan bakar mineral (27)	109,4	52,4	401,8	794,4	-52,10	97,71	0,74
8. Kapal terbang dan bagiannya (88)	59,3	51,8	640,8	644,1	-12,65	0,51	0,60
9. Kakao/coklat (18)	84,0	50,3	278,5	532,4	-40,12	91,17	0,50
10. Binatang hidup (01)	50,4	39,9	456,5	451,5	-20,983	-1,10	0,42
<b>Total 10 Golongan Barang</b>	<b>4 601,4</b>	<b>5 017,6</b>	<b>40 163,1</b>	<b>44 960,7</b>	<b>9,05</b>	<b>11,95</b>	<b>41,97</b>
<b>Barang Lainnya</b>	<b>6 244,8</b>	<b>6 969,9</b>	<b>54 724,0</b>	<b>62 171,0</b>	<b>11,61</b>	<b>13,61</b>	<b>58,03</b>
<b>Total Impor Nonmigas</b>	<b>10 846,2</b>	<b>11 987,5</b>	<b>94 887,1</b>	<b>107 131,7</b>	<b>10,52</b>	<b>12,90</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.4**  
**Impor Nonmigas Negara Asal Utama Menurut Golongan Penggunaan Barang**  
**Januari–Oktober 2017**

Negara	Nilai CIF (Juta US\$)				Persentase thd Total (%)			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (2 s.d. 4)	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (6 s.d. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Tiongkok	3 371,4	17 716,2	6 896,6	27 984,2	30,81	23,16	35,01	26,12
2 Jepang	462,9	8 747,4	3 164,1	12 374,4	4,23	11,44	16,06	11,55
3 Thailand	829,9	5 559,7	1 251,8	7 641,1	7,58	7,27	6,36	7,13
4 Singapura	430,9	5 089,2	999,8	6 519,9	3,94	6,65	5,08	6,09
5 Amerika Serikat	571,3	5 034,3	703,8	6 309,5	5,22	6,58	3,57	5,89
6 Korea Selatan	514,2	4 691,1	815,8	6 021,1	4,70	6,13	4,14	5,62
7 Australia	472,5	3 716,3	109,6	4 298,4	4,32	4,86	0,56	4,01
8 Malaysia	508,2	3 196,5	538,6	4 243,4	4,64	4,18	2,73	3,96
9 India	455,7	2 145,4	409,9	3 011,1	4,16	2,80	2,08	2,81
10 Lainnya	3 325,9	20 595,4	4 807,3	28 728,6	30,40	26,93	24,41	26,82
<b>Total Impor</b>	<b>10 942,9</b>	<b>76 491,5</b>	<b>19 697,3</b>	<b>107 131,7</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.5**  
**Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang**  
**Januari–Oktober 2016 dan 2017**

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Okt'17 (%)
	Sep 2017	Okt 2017	Jan-Okt 2016	Jan-Okt 2017	Okt'17 thd Sep'17	Jan-Okt'17 thd Jan-Okt'16	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>ASEAN</b>	<b>2 311,6</b>	<b>2 351,6</b>	<b>20 654,7</b>	<b>21 966,9</b>	<b>1,73</b>	<b>6,35</b>	<b>20,50</b>
1 Singapura	719,3	717,1	6 063,5	6 519,9	-0,31	7,53	6,09
2 Thailand	761,4	752,0	7 299,1	7 641,4	-1,23	4,69	7,13
3 Malaysia	468,6	474,2	3 923,7	4 243,4	1,20	8,15	3,96
<b>ASEAN Lainnya</b>	<b>362,3</b>	<b>408,3</b>	<b>3 368,4</b>	<b>3 562,2</b>	<b>12,70</b>	<b>5,75</b>	<b>3,32</b>
<b>Uni Eropa</b>	<b>1 035,4</b>	<b>1 033,0</b>	<b>8 710,8</b>	<b>10 001,5</b>	<b>-0,23</b>	<b>14,82</b>	<b>9,34</b>
4 Jerman	311,6	331,7	2 567,7	2 853,1	6,45	11,12	2,66
5 Belanda	114,7	74,5	590,8	715,0	-35,05	21,02	0,67
6 Italia	128,6	107,5	1 132,1	1 277,1	-16,41	12,81	1,19
<b>Uni Eropa Lainnya</b>	<b>480,5</b>	<b>519,3</b>	<b>4 420,2</b>	<b>5 156,3</b>	<b>8,07</b>	<b>16,65</b>	<b>4,81</b>
<b>Negara Utama Lainnya</b>	<b>6 219,7</b>	<b>7 033,5</b>	<b>54 125,5</b>	<b>62 652,6</b>	<b>13,08</b>	<b>15,75</b>	<b>58,48</b>
7 Tiongkok	2 932,2	3 178,0	24 480,3	27 984,3	8,38	14,31	26,12
8 Jepang	1 216,5	1 474,3	10 641,0	12 374,4	21,19	16,29	11,55
9 Amerika Serikat	606,2	656,2	5 962,9	6 309,5	8,25	5,81	5,89
10 Korea Selatan	532,4	634,5	4 828,7	6 021,1	19,18	24,69	5,62
11 Australia	404,8	455,0	3 618,6	4 298,4	12,40	18,79	4,01
12 Taiwan	265,5	287,0	2 363,8	2 653,8	8,10	12,27	2,48
13 India	262,1	348,5	2 230,2	3 011,1	32,96	35,01	2,81
<b>Total 13 Negara Utama</b>	<b>8 723,9</b>	<b>9 490,5</b>	<b>75 702,4</b>	<b>85 902,5</b>	<b>8,79</b>	<b>13,47</b>	<b>80,18</b>
<b>Negara Lainnya</b>	<b>2 122,3</b>	<b>2 497,0</b>	<b>19 184,7</b>	<b>21 229,2</b>	<b>17,66</b>	<b>10,66</b>	<b>19,82</b>
<b>Total Impor Nonmigas</b>	<b>10 846,2</b>	<b>11 987,5</b>	<b>94 887,1</b>	<b>107 131,7</b>	<b>10,52</b>	<b>12,90</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.6**  
**Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2016–Oktober 2017**  
**(Nilai CIF: Juta US\$)**

Bulan	2016				2017			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	1 160,8	7 496,8	1 809,4	10 467,0	1 006,4	9 045,7	1 916,3	11 968,4
Februari	1 005,2	7 376,4	1 794,0	10 175,6	889,4	8 761,4	1 703,2	11 354,0
Maret	986,8	8 614,9	1 700,0	11 301,7	1 343,3	9 921,8	2 018,3	13 283,4
April	865,5	8 177,6	1 770,5	10 813,6	1 107,1	8 976,5	1 861,6	11 945,1
Mei	999,3	8 496,8	1 644,6	11 140,7	1 298,7	10 510,5	1 957,9	13 767,1
Juni	1 141,6	8 957,1	1 996,5	12 095,2	1 127,6	7 411,5	1 452,7	9 991,8
Juli	729,3	6 825,2	1 462,7	9 017,2	1 093,5	10 429,3	2 362,8	13 885,6
Agustus	1 174,8	9 145,0	2 065,3	12 385,1	1 194,8	10 102,8	2 211,9	13 509,5
September	995,7	8 481,1	1 820,7	11 297,5	1 121,3	9 605,0	2 045,5	12 780,8
Oktober	960,1	8 565,0	1 982,1	11 507,2	1 252,3	10 770,3	2 169,5	14 192,1
November	1 025,5	9 568,7	2 075,2	12 669,4				
Desember	1 307,1	9 241,0	2 234,4	12 782,5				
<b>Total</b>	<b>12 351,7</b>	<b>100 945,9</b>	<b>22 355,3</b>	<b>135 652,9</b>	<b>11 445,0</b>	<b>95 535,7</b>	<b>19 697,3</b>	<b>126 678,0</b>
<b>Persentase thd Total (%)</b>	<b>9,11</b>	<b>74,41</b>	<b>16,48</b>	<b>100,00</b>	<b>9,03</b>	<b>75,42</b>	<b>15,55</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 4.7**  
**Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari–Oktober 2017**  
 (juta US\$)

	Negara Asal Barang	Agustus 2017	September 2017	Oktober 2017	Jan-Okt 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tiongkok	3 095,7	2 936,3	3 181,2	28 233,3
2	Singapura	1 407,1	1 365,1	1 347,8	13 488,7
3	Jepang	1 378,7	1 221,1	1 477,5	12 399,8
4	Thailand	812,9	765,3	756,9	7 692,0
5	Malaysia	650,7	720,0	734,2	7 082,2
6	Korea Selatan	697,2	616,0	723,1	6 674,6
7	Amerika Serikat	682,1	639,2	705,7	6 553,4
8	Australia	638,5	521,6	563,1	5 145,9
9	India	323,3	298,8	382,7	3 289,3
10	Jerman	324,3	312,3	332,4	2 866,8
11	Taiwan	248,2	285,6	312,3	2 685,4
12	Vietnam	325,9	267,5	287,9	2 666,2
13	Saudi Arabia	310,2	212,2	368,9	2 621,9
14	Uni Emirat Arab	141,1	175,8	135,3	1 721,9
15	Hongkong	181,6	155,2	170,0	1 482,0
	<b>Total 15 Negara</b>	<b>11 217,5</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>104</b>
	<b>Negara Lainnya</b>	<b>2 292,0</b>	<b>2 288,8</b>	<b>2 713,1</b>	<b>22 074,6</b>
	<b>Total Impor</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>126</b>
	<b>Total 15 Negara (%)</b>	<b>83,03</b>	<b>82,09</b>	<b>80,88</b>	<b>82,57</b>
	<b>Negara Lainnya (%)</b>	<b>16,97</b>	<b>17,91</b>	<b>19,12</b>	<b>17,43</b>

**Tabel 4.8**  
**Neraca Perdagangan Indonesia, Oktober 2016– Oktober 2017**  
 (miliar US\$)

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>2016</b>									
Oktober	1,05	11,69	12,74	1,55	9,96	11,51	-0,49	1,72	1,23
November	1,10	12,40	13,50	1,72	10,95	12,67	-0,62	1,45	0,83
Desember	1,25	12,58	13,83	1,70	11,08	12,78	-0,45	1,50	1,05
<b>Jan-Okt</b>	<b>10,75</b>	<b>107,10</b>	<b>117,85</b>	<b>15,31</b>	<b>94,89</b>	<b>110,20</b>	<b>-4,56</b>	<b>12,21</b>	<b>7,65</b>
<b>Jan-Des</b>	<b>13,11</b>	<b>132,08</b>	<b>145,19</b>	<b>18,74</b>	<b>116,91</b>	<b>135,65</b>	<b>-5,63</b>	<b>15,17</b>	<b>9,53</b>
<b>2017</b>									
Januari	1,27	12,13	13,40	1,83	10,14	11,97	-0,56	1,99	1,43
Februari	1,20	11,42	12,62	2,47	8,88	11,35	-1,27	2,53	1,26
Maret	1,51	13,17	14,68	2,28	11,01	13,29	-0,77	2,16	1,39
April	1,03	12,24	13,28	1,65	10,30	11,95	-0,61	1,94	1,33
Mei	1,30	13,05	14,34	1,79	11,98	13,77	-0,49	1,07	0,58
Juni	1,27	10,38	11,66	1,60	8,39	9,99	-0,33	1,99	1,66
Juli	1,17	12,44	13,61	1,78	12,11	13,89	-0,60	0,33	-0,27
Agustus	1,28	13,95	15,23	2,01	11,50	13,51	-0,73	2,45	1,72
September	1,44	13,12	14,56	1,93	10,85	12,78	-0,49	2,27	1,78
Oktober	1,41	13,67	15,09	2,20	11,99	14,19	-0,79	1,69	0,89
<b>Jan-Okt</b>	<b>12,88</b>	<b>125,58</b>	<b>138,46</b>	<b>19,55</b>	<b>107,13</b>	<b>126,68</b>	<b>-6,66</b>	<b>18,45</b>	<b>11,78</b>

**Tabel 4.9**  
**Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2014–Oktober 2017**

Periode	Ekspor		Impor	
	Berat Bersih (kg)	Nilai FOB (US\$)	Berat Bersih (kg)	Nilai CIF (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>2014</b>	<b>516 069</b>	<b>759 928</b>	<b>844 163 741</b>	<b>388 178 457</b>
Triwulan I	85 560	169 269	60 796 853	26 870 252
Triwulan II	161 455	264 660	115 480 643	49 336 490
Triwulan III	82 694	123 665	164 561 686	72 532 308
Triwulan IV	186 360	202 334	503 324 559	239 439 407
<b>2015</b>	<b>519 497</b>	<b>630 391</b>	<b>861 601 001</b>	<b>351 602 090</b>
Triwulan I	39 985	51 936	66 562 915	29 213 209
Triwulan II	160 770	206 334	127 866 410	55 705 088
Triwulan III	152 844	195 941	35 181 781	14 964 060
Triwulan IV	165 898	176 180	631 989 895	251 719 733
<b>2016</b>	<b>999 167</b>	<b>864 261</b>	<b>1 283 178 527</b>	<b>531 841 557</b>
Triwulan I	627 653	261 673	981 992 734	401 346 706
Triwulan II	257 429	438 457	91 720 535	40 012 930
Triwulan III	83 825	105 468	72 605 748	31 181 924
Triwulan IV	30 260	58 663	136 859 510	59 299 997
<b>2017</b>	<b>3 531 222</b>	<b>3 521 639</b>	<b>216 760 676</b>	<b>102 435 401</b>
Triwulan I	70 826	154 641	45 898 090	26 097 625
Triwulan II	1 334 664	999 879	85 094 509	39 476 397
Juli	50 825	110 180	56 967 420	25 197 465
Agustus	10 064	18 136	2 500 008	737 689
September	2 024 477	1 915 809	8 100 563	3 398 292
Triwulan III	2 085 366	2 044 125	67 567 991	29 333 446
Oktober	40 366	52 994	18 200 086	7 527 933



5

UPAH  
BURUH  
OKTOBER  
2017

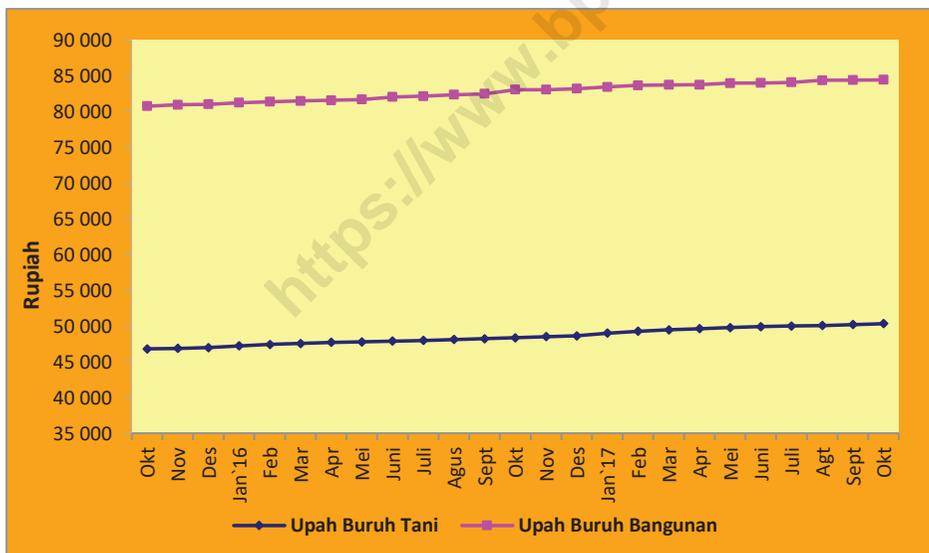
## V. UPAH BURUH OKTOBER 2017

### 1. Upah Harian Buruh Tani

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Oktober 2017 naik sebesar 0,25 persen dibanding upah buruh tani bulan sebelumnya, yaitu dari Rp50.213,00 menjadi Rp50.339,00. Secara riil naik sebesar 0,40 persen, yaitu dari Rp37.711,00 menjadi Rp37.860,00.

**Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Oktober 2017 sebesar Rp50.339,00, naik 0,25 persen**

**Grafik 5.1**  
Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan  
Oktober 2015–Oktober 2017



## 2. Upah Buruh Bangunan

Pada Oktober 2017, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) naik sebesar 0,05 persen dibanding upah nominal September 2017, yaitu dari Rp84.378,00 menjadi Rp84.421,00, sedangkan upah riil naik sebesar 0,04 persen, yaitu dari Rp64.867,00 menjadi Rp64.894,00.

**Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan pada periode Oktober 2017 sebesar Rp84.421,00, naik 0,05 persen**

**Tabel 5.1**  
**Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah)**  
**Oktober 2015–Oktober 2017**

Bulan	Upah Buruh Tani (harian)		Upah Buruh Bangunan (harian)	
	Nominal	Riil <sup>1)</sup>	Nominal	Riil <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Oktober 2015	46 800	37 918	80 744	66 418
November	46 881	37 822	80 946	66 447
Desember	46 995	37 486	81 002	65 861
Januari 2016	47 241	37 372	81 221	65 702
Februari	47 437	37 494	81 367	65 879
Maret	47 559	37 236	81 481	65 843
April	47 731	37 559	81 554	66 202
Mei	47 796	37 563	81 677	66 146
Juni	47 898	37 421	82 028	65 997
Juli	47 985	37 208	82 143	65 636
Agustus	48 120	37 290	82 348	65 810
September	48 235	37 259	82 480	65 768
Oktober	48 368	37 349	83 057	66 134
November	48 517	37 142	83 082	65 844
Desember	48 627	37 072	83 190	65 654
Januari 2017	49 000	37 064	83 432	65 211
Februari	49 268	37 125	83 657	65 235
Maret	49 473	37 318	83 724	65 297
April	49 638	37 549	83 740	65 254
Mei	49 782	37 380	83 958	65 170
Juni	49 912	37 396	83 975	64 736
Juli	50 003	37 408	84 076	64 674
Agustus	50 079	37 508	84 362	64 939
September	50 213	37 711	84 378	64 867
Oktober	50 339	37 860	84 421	64 894

Catatan: <sup>1)</sup> Upah riil = upah nominal/indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, mulai Desember 2013 menggunakan tahun dasar (2012=100)

<sup>2)</sup> Upah riil = upah nominal/IHK umum perkotaan menggunakan tahun dasar (2012=100)





# 6

NILAI TUKAR  
PETANI, INFLASI  
PERDESAAN, DAN  
NILAI TUKAR  
USAHA RUMAH  
TANGGA  
PERTANIAN  
NOVEMBER 2017

## VI. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN NOVEMBER 2017

### A. Nilai Tukar Petani (NTP)

1. NTP November 2017 tercatat 103,07 atau naik sebesar 0,28 persen dibanding NTP Oktober 2017 sebesar 102,78. Kenaikan NTP bulan ini disebabkan naiknya NTP di tiga subsektor penyusun NTP, yaitu Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Perikanan masing-masing sebesar 0,97 persen, 0,25 persen, dan 0,17 persen. Sebaliknya, Subsektor Tanaman Hortikultura dan Peternakan turun masing-masing 0,08 persen dan 0,32 persen.

**NTP November 2017  
naik sebesar 0,28**

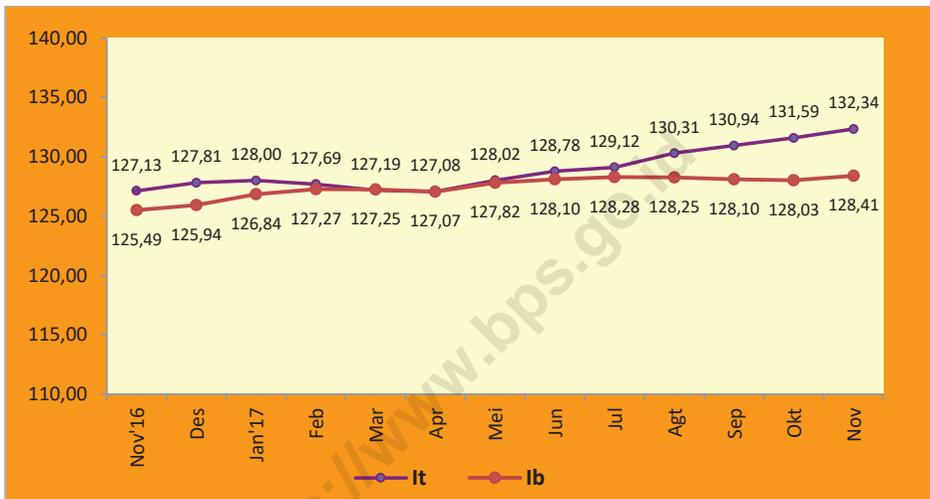
**Grafik 6.1**  
Nilai Tukar Petani (NTP), November 2016–November 2017 (2012=100)



2. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada November 2017 naik 0,57 persen bila dibanding It pada Oktober 2017, yaitu dari 131,59 menjadi 132,34. Kenaikan indeks tersebut disebabkan naiknya It di empat subsektor, yaitu Tanaman Pangan (1,29 persen), Tanaman Hortikultura (0,23 persen), Perkebunan Rakyat (0,51 persen), dan Perikanan (0,42 persen), sedangkan Subsektor Peternakan turun sebesar 0,04 persen.

3. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) pada November 2017 naik sebesar 0,29 persen dibanding Ib Oktober 2017. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya Indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,36 persen, dan naiknya Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal sebesar 0,16 persen.

**Grafik 6.2**  
**Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)**  
**November 2016–November 2017 (2012=100)**



4. NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada November 2017 naik sebesar 0,97 persen dibanding NTPP Oktober 2017. Hal ini disebabkan It Tanaman Pangan naik (1,29 persen) lebih besar dari kenaikan Ib Tanaman Pangan (0,32 persen). NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) turun sebesar 0,08 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Hortikultura (0,23 persen) lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Hortikultura sebesar (0,31 persen). NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) naik sebesar 0,25 persen disebabkan kenaikan It Tanaman Perkebunan Rakyat (0,51 persen) lebih besar dari kenaikan Ib Tanaman Perkebunan Rakyat (0,25 persen). NTP Peternakan (NTPT) turun sebesar 0,32 persen disebabkan It Peternakan turun sebesar 0,04 persen, sebaliknya Ib Peternakan naik sebesar 0,28 persen. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) naik sebesar 0,17 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Perikanan (0,42 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Perikanan (0,25 persen).

**Tabel 6.1**  
**Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)**

Subsektor	Oktober 2017	November 2017	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Gabungan/Nasional</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	<b>102,78</b>	<b>103,07</b>	<b>0,28</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>131,59</b>	<b>132,34</b>	<b>0,57</b>
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>128,03</b>	<b>128,41</b>	<b>0,29</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,96	133,44	0,36
- Indeks BPPBM	118,27	118,46	0,16
<b>Gabungan/Nasional tanpa Perikanan</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	<b>102,66</b>	<b>102,96</b>	<b>0,29</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>131,50</b>	<b>132,26</b>	<b>0,58</b>
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>128,09</b>	<b>128,47</b>	<b>0,29</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,94	133,41	0,36
- Indeks BPPBM	118,39	118,58	0,16
<b>1. Tanaman Pangan</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	<b>101,50</b>	<b>102,48</b>	<b>0,97</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>133,05</b>	<b>134,76</b>	<b>1,29</b>
- Padi	130,12	132,33	1,70
- Palawija	141,43	141,76	0,24
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>131,08</b>	<b>131,50</b>	<b>0,32</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	133,45	133,97	0,39
- Indeks BPPBM	123,48	123,65	0,13
<b>2. Tanaman Hortikultura</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTPH)	<b>101,38</b>	<b>101,30</b>	<b>-0,08</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>131,02</b>	<b>131,32</b>	<b>0,23</b>
- Sayur-sayuran	127,51	128,86	1,06
- Buah-buahan	134,67	134,13	-0,39
- Tanaman Obat	122,97	123,29	0,26
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>129,24</b>	<b>129,64</b>	<b>0,31</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,97	133,45	0,36
- Indeks BPPBM	117,52	117,72	0,17
<b>3. Tanaman Perkebunan Rakyat</b>			
a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	<b>100,87</b>	<b>101,13</b>	<b>0,25</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	<b>129,83</b>	<b>130,48</b>	<b>0,51</b>
- Tanaman Perkebunan Rakyat	129,83	130,48	0,51
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	<b>128,70</b>	<b>129,03</b>	<b>0,25</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,16	132,54	0,29
- Indeks BPPBM	117,63	117,82	0,16
Subsektor	Oktober 2017	November 2017	Persentase Perubahan

	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>4. Peternakan</b>				
a. Nilai Tukar Petani (NTPT)		<b>107,52</b>	<b>107,17</b>	<b>-0,32</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)		<b>131,71</b>	<b>131,66</b>	<b>-0,04</b>
- Ternak Besar		135,35	135,30	-0,03
- Ternak Kecil		124,90	124,57	-0,27
- Unggas		129,75	129,58	-0,13
- Hasil Ternak		123,77	123,69	-0,07
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)		<b>122,50</b>	<b>122,85</b>	<b>0,28</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga		133,01	133,53	0,39
- Indeks BPPBM		113,07	113,28	0,18
<b>5. Perikanan</b>				
a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)		<b>104,61</b>	<b>104,79</b>	<b>0,17</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan pembudidaya ikan (It)		<b>132,07</b>	<b>132,63</b>	<b>0,42</b>
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)		<b>126,25</b>	<b>126,56</b>	<b>0,25</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga		133,49	133,93	0,34
- Indeks BPPBM		114,06	114,16	0,09
<b>5.1. Perikanan Tangkap</b>				
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)		<b>111,77</b>	<b>112,18</b>	<b>0,37</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)		<b>140,11</b>	<b>140,88</b>	<b>0,55</b>
- Penangkapan Perairan Umum		134,17	134,69	0,38
- Penangkapan Laut		140,08	140,79	0,51
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)		<b>125,35</b>	<b>125,58</b>	<b>0,18</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga		132,88	133,20	0,24
- Indeks BPPBM		113,41	113,53	0,10
<b>5.2. Perikanan Budidaya</b>				
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		<b>99,52</b>	<b>99,53</b>	<b>0,01</b>
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)		<b>126,30</b>	<b>126,70</b>	<b>0,31</b>
- Budidaya Air Tawar		126,64	127,12	0,37
- Budidaya Laut		115,15	115,94	0,69
- Budidaya Air Payau		123,72	123,72	0,00
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)		<b>126,91</b>	<b>127,30</b>	<b>0,30</b>
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga		133,95	134,50	0,41
- Indeks BPPBM		114,56	114,65	0,07

BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

## B. Inflasi Perdesaan

1. Pada November 2017 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,36 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 133,44. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 23 provinsi dan deflasi perdesaan di 10 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,83 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,01 persen. Deflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,58 persen dan deflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,09 persen.

**Pada November 2017  
terjadi inflasi perdesaan  
sebesar 0,36 persen**

**Grafik 6.3**  
**Inflasi Perdesaan, November 2015–November 2017**



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga pada November 2017, terjadi kenaikan indeks harga di semua kelompok pengeluaran yaitu Bahan Makanan 0,60 persen; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 0,21 persen; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0,20 persen; Sandang 0,16 persen; Kesehatan 0,27 persen; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,06 persen; serta Transportasi dan Komunikasi 0,22 persen.
3. Inflasi perdesaan November 2017 sebesar 0,36 persen dipicu oleh naiknya harga komoditas beras, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, dan tomat sayur.

**Tabel 6.2**  
**Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**November 2015–November 2017**

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
November 2015	0,62	0,47	0,28	0,18	0,21	0,18	0,13	0,43
Desember	2,22	0,61	0,26	0,21	0,22	0,13	0,14	1,14
Januari 2016	1,60	0,93	0,40	0,39	0,53	0,33	-1,28	0,83
Februari	-0,10	0,50	0,10	0,29	0,28	0,13	-0,16	0,09
Maret	1,88	0,48	0,18	0,25	0,29	0,09	0,03	0,95
April	-0,83	0,38	0,14	0,17	0,25	0,10	-2,28	-0,50
Mei	-0,22	0,90	0,21	0,24	0,23	0,14	-0,15	0,13
Juni	0,63	1,05	0,28	0,92	0,26	0,17	0,14	0,59
Juli	1,24	0,63	0,23	0,48	0,26	0,47	0,12	0,76
Agustus	-0,10	0,14	0,21	0,21	0,29	0,35	0,04	0,06
September	0,44	0,34	0,16	0,23	0,33	0,10	0,09	0,32
Oktober	-0,25	0,37	0,28	0,17	0,27	0,24	0,09	0,04
November	1,65	0,35	0,27	0,21	0,29	0,07	0,19	0,87
Desember	0,62	0,35	0,20	0,24	0,27	0,14	0,16	0,42
Januari 2017	0,75	0,90	0,95	0,51	0,88	0,41	0,70	0,79
Februari	0,37	0,45	0,44	0,22	0,36	0,18	0,47	0,38
Maret	-0,69	0,34	0,81	0,25	0,38	0,09	-0,06	-0,10
April	-1,02	0,26	0,38	0,26	0,28	0,07	0,29	-0,29
Mei	1,43	0,33	0,36	0,45	0,30	0,13	-0,09	0,74
Juni	-0,35	0,28	1,50	1,29	0,33	0,45	0,28	0,22
Juli	0,05	0,25	0,11	0,04	0,30	0,60	0,13	0,15
Agustus	-0,55	0,19	0,20	0,15	0,27	0,24	0,20	-0,12
September	-0,83	0,10	0,18	0,12	0,18	0,09	0,16	-0,27
Oktober	-0,58	0,20	0,27	0,17	0,16	0,12	0,14	-0,14
November	0,60	0,21	0,20	0,16	0,27	0,06	0,22	0,36

4. Tingkat inflasi perdesaan tahun kalender 2017 (November 2017 terhadap Desember 2016) adalah sebesar 1,73 persen dan tingkat inflasi perdesaan tahun ke tahun (November 2017 terhadap November 2016) adalah sebesar 2,16 persen.

**Tabel 6.3**  
**Tingkat Inflasi Perdesaan November 2017, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 2017**  
**Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**(2012=100)**

Kelompok Pengeluaran	Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)			Inflasi Perdesaan November 2017 (%)	Tingkat Inflasi Perdesaan November 2017 (%)	
	November 2016	Desember 2016	November 2017		Tahun Kalender	Tahun ke Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Umum</b>	<b>130,63</b>	<b>131,17</b>	<b>133,44</b>	<b>0,36</b>	<b>1,73</b>	<b>2,16</b>
1. Bahan Makanan	142,02	142,89	141,71	0,60	-0,83	0,22
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	127,79	128,23	132,82	0,21	3,58	3,94
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	121,88	122,13	128,87	0,20	5,52	5,73
4. Sandang	123,27	123,57	128,12	0,16	3,69	3,94
5. Kesehatan	119,05	119,36	123,86	0,27	3,77	4,04
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	115,35	115,51	118,36	0,06	2,46	2,61
7. Transportasi dan Komunikasi	120,39	120,58	123,56	0,22	2,47	2,64

### C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

1. Pada November 2017 terjadi kenaikan NTUP sebesar 0,42 persen. Hal ini terjadi karena kenaikan It (0,57 persen) lebih tinggi dari kenaikan indeks BPPBM (0,16 persen). Kenaikan NTUP disebabkan oleh naiknya NTUP di empat subsektor penyusun NTUP, yaitu NTUP Tanaman Pangan (1,16 persen), Tanaman Hortikultura (0,06 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,34 persen), dan Perikanan (0,33 persen), sedangkan NTUP Peternakan mengalami penurunan sebesar 0,23 persen.
2. Dari 33 provinsi yang dihitung NTUP-nya, 25 provinsi mengalami kenaikan dan 8 provinsi mengalami penurunan. Kenaikan NTUP tertinggi terjadi di Provinsi Riau, yaitu sebesar 2,03 persen. Sebaliknya, penurunan NTUP terbesar pada November 2017 terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 1,70 persen.

**Tabel 6.4**  
**Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya,**  
**(2012=100)**

Subsektor	Oktober 2017	November 2017	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	107,74	108,99	1,16
2. Tanaman Hortikultura	111,49	111,55	0,06
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	110,37	110,75	0,34
4. Peternakan	116,49	116,22	-0,23
5. Perikanan	115,79	116,18	0,33
a. Tangkap	123,54	124,09	0,45
b. Budidaya	110,25	110,51	0,24
<b>Nasional</b>	<b>111,26</b>	<b>111,72</b>	<b>0,42</b>



7

HARGA  
PANGAN  
NOVEMBER  
2017

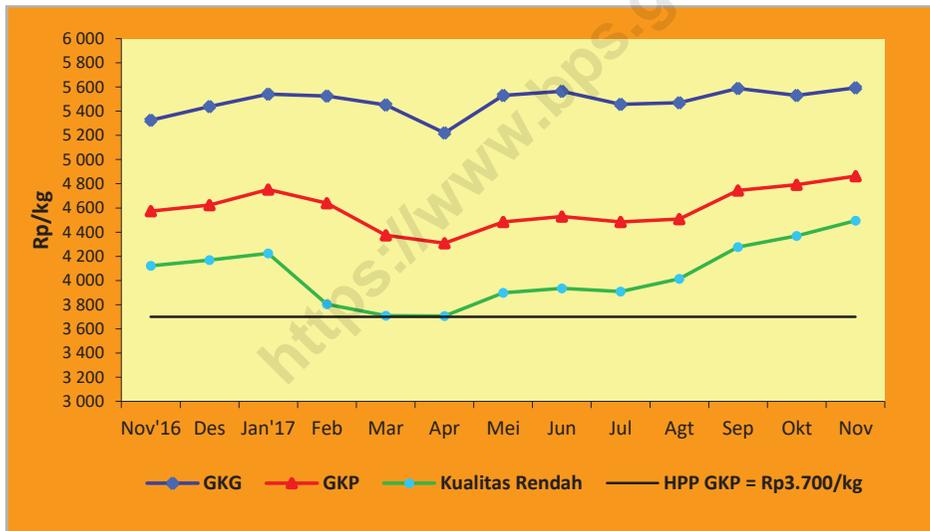
## VII. HARGA PANGAN NOVEMBER 2017

### A. Harga Gabah dan Beras di Penggilingan

1. Selama November 2017, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik 1,52 persen menjadi Rp4.864,00 per kg dan di tingkat penggilingan naik 1,36 persen menjadi Rp4.951,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKP di tingkat petani November 2017 sebesar Rp4.864,00 per kg naik 1,52 persen

Grafik 7.1  
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas  
November 2016–November 2017



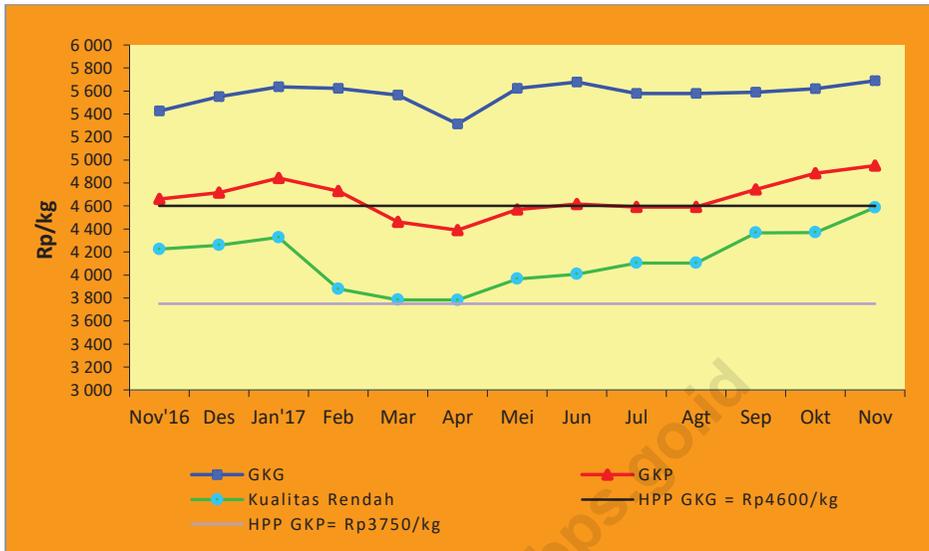
2. Pada bulan yang sama, harga tertinggi di tingkat petani Rp6.818,00 per kg dan di tingkat penggilingan Rp6.943,00 per kg. Sementara harga terendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan masing-masing Rp3.571,00 per kg dan Rp3.671,00 per kg. Harga tertinggi di tingkat petani dan tingkat penggilingan berasal dari kualitas GKP varietas Siam Mayang yang terjadi di Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan). Sementara itu, harga terendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan berasal dari gabah kualitas rendah varietas Ciharang yang terjadi di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor (Jawa Barat).

**Tabel 7.1**  
**Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air**  
**serta Perubahannya, November 2016–November 2017**

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2016									
Nov	19,33	4 574	0,41	12,95	5 325	0,26	25,86	4 122	0,28
Des	18,75	4 623	1,07	12,88	5 438	2,12	26,52	4 168	1,11
2017									
Jan	18,29	4 754	2,83	12,82	5 542	1,91	26,64	4 225	1,36
Feb	18,82	4 639	-2,41	12,89	5 525	-0,32	25,79	3 803	-9,98
Mar	18,83	4 373	-5,74	12,60	5 452	-1,32	26,12	3 709	-2,47
Apr	18,33	4 308	-1,49	12,82	5 220	-4,25	25,90	3 705	-0,10
Mei	18,49	4 485	4,10	12,83	5 531	5,96	24,41	3 897	5,17
Jun	18,04	4 528	0,97	13,03	5 564	0,60	25,50	3 934	0,96
Jul	18,85	4 483	-0,99	12,63	5 457	-1,92	25,84	3 908	-0,67
Agt	18,57	4 509	0,58	12,87	5 471	0,24	24,82	4 013	2,67
Sep	17,79	4 655	3,22	12,65	5 502	0,58	26,06	4 276	6,57
Okt	17,99	4 791	2,92	12,71	5 532	0,53	25,69	4 370	2,19
Nov	19,00	4 864	1,52	12,78	5 593	1,11	25,19	4 494	2,86
<b>Perubahan (%)</b>			<b>6,34</b>			<b>5,03</b>			<b>9,02</b>
<b>Nov'17 thd Nov'16</b>									

- Rata-rata harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani selama November 2017 naik 1,11 persen menjadi Rp5.593,00 per kg, sedangkan di tingkat penggilingan naik 1,20 persen menjadi Rp5.688,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama bulan lalu. Untuk harga gabah kualitas rendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan juga mengalami kenaikan masing-masing 2,86 persen menjadi Rp4.494,00 per kg dan 2,65 persen menjadi Rp4.587,00 per kg.
- Selama periode November 2016–November 2017, rata-rata harga tertinggi di tingkat petani untuk GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.864,00 per kg, Rp5.593,00 per kg, dan Rp4.494,00 terjadi pada November 2017. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.308,00 per kg, Rp5.220,00 per kg, dan Rp3.705,00 per kg terjadi pada April 2017.

**Grafik 7.2**  
**Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas**  
**November 2016–November 2017**



5. Pada periode November 2016–November 2017, rata-rata harga tertinggi di tingkat penggilingan untuk GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.951,00 per kg, Rp5.688,00 per kg, dan Rp4.587,00 terjadi pada November 2017. Untuk rata-rata harga terendah pada GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.391,00 per kg, Rp5.313,00 per kg, dan Rp3.782,00 per kg terjadi pada April 2017.
6. Dibandingkan November 2016, rata-rata harga di tingkat petani pada November 2017 untuk semua kualitas GKP, GKG, gabah kualitas rendah mengalami kenaikan, yaitu sebesar 6,34 persen, 5,03 persen, dan 9,02 persen. Begitu pula di tingkat penggilingan pada November 2017 untuk semua kualitas GKP, GKG, gabah kualitas rendah juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 6,24 persen, 4,83 persen, dan 8,57 persen.
7. Berdasarkan komposisinya, jumlah 1.661 observasi harga gabah masih didominasi transaksi penjualan GKP sebanyak 1.100 observasi (66,22 persen), diikuti oleh gabah kualitas rendah sebanyak 327 observasi (19,69 persen), dan GKG sebanyak 2343 observasi (14,09 persen). Dari jumlah observasi tersebut, tidak terdapat kasus harga di bawah HPP baik di tingkat Petani maupun di tingkat Penggilingan.

**Tabel 7.2**  
**Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air**  
**serta Perubahannya, November 2016–November 2017**

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- -an (%)	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- -an (%)	Kadar Air (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- -an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2016									
Nov	19,33	4 660	0,37	12,95	5 426	0,23	25,86	4 225	0,31
Des	18,75	4 717	1,23	12,88	5 551	2,31	26,52	4 260	0,83
2017									
Jan	18,29	4 844	2,69	12,82	5 636	1,53	26,64	4 326	1,56
Feb	18,82	4 731	-2,34	12,89	5 621	-0,27	25,79	3 880	-10,33
Mar	18,83	4 460	-5,71	12,60	5 564	-1,01	26,12	3 783	-2,48
Apr	18,33	4 391	-1,56	12,82	5 313	-4,52	25,90	3 782	-0,03
Mei	18,49	4 570	4,09	12,83	5 622	5,82	24,41	3 966	4,87
Jun	18,04	4 615	0,98	13,03	5 677	0,99	25,50	4 008	1,05
Jul	18,85	4 570	-0,98	12,63	5 549	-2,26	25,84	3 989	-0,48
Agt	18,57	4 591	0,48	12,87	5 579	0,52	24,82	4 104	2,88
Sep	17,79	4 744	3,31	12,65	5 590	0,21	26,06	4 368	6,43
Okt	17,99	4 885	2,98	12,71	5 621	0,55	25,69	4 468	2,31
Nov	19,00	4 951	1,36	12,78	5 688	1,20	25,19	4 587	2,65
<b>Perubahan (%)</b>									
<b>Nov'17 thd Nov'16</b>			<b>6,24</b>			<b>4,83</b>			<b>8,57</b>

8. Pada November 2017, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.539,00 per kg naik sebesar 0,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.280,00 per kg naik sebesar 1,79 persen. Rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp9.039,00 per kg naik sebesar 2,33 persen.

**Pada November 2017,  
rata-rata harga beras  
medium di Penggilingan  
Rp9.280,00 per kg, naik  
1,79 persen**

9. Dibandingkan November 2016, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada November 2017 untuk semua kualitas mengalami kenaikan, yaitu Premium sebesar 3,05 persen, Medium sebesar 2,54 persen, dan Rendah sebesar 4,72 persen.

**Tabel 7.3**  
**Rata-rata Harga Beras di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah**  
**(Broken), November 2016–November 2017**

Tahun/ Bulan	Premium			Medium			Rendah			
	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2016										
Nov	9 257	1,37	7,20	9 050	0,77	15,66	8 632	0,40	22,87	
Des	9 342	0,91	7,21	9 069	0,21	15,55	8 658	0,30	22,83	
2017										
Jan	9 431	0,96	7,32	9 100	0,34	15,72	8 669	0,13	22,90	
Feb	9 408	-0,24	7,33	9 048	-0,57	15,24	8 584	-0,99	23,17	
Mar	9 389	-0,21	7,26	8 705	-3,78	16,01	8 339	-2,85	23,06	
Apr	9 325	-0,68	7,41	8 654	-0,59	15,70	8 306	-0,39	23,14	
Mei	9 436	1,20	7,34	8 790	1,58	15,28	8 374	0,82	23,15	
Jun	9 444	0,09	7,21	8 794	0,05	15,39	8 380	0,07	22,71	
Jul	9 384	-0,64	7,20	8 744	-0,58	15,44	8 358	-0,27	22,80	
Agt	9 437	0,57	6,84	8 823	0,91	15,40	8 436	0,94	22,83	
Sep	9 471	0,36	6,81	8 935	1,27	15,14	8 672	2,80	23,05	
Okt	9 503	0,34	6,78	9 117	2,03	15,58	8 834	1,86	23,23	
Nov	9 539	0,38	7,06	9 280	1,79	15,44	9 039	2,33	23,16	
<b>Perubahan (%)</b>		<b>3,05</b>			<b>2,54</b>			<b>4,72</b>		
<b>Nov'17 thd Nov'16</b>										

Keterangan: Premium: Maksimum beras patah (*Broken*) s.d. 10%  
Medium: Beras patah (*Broken*) 10,1%–20%  
Rendah: Beras patah (*Broken*) 20,1%–25%

## B. Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok

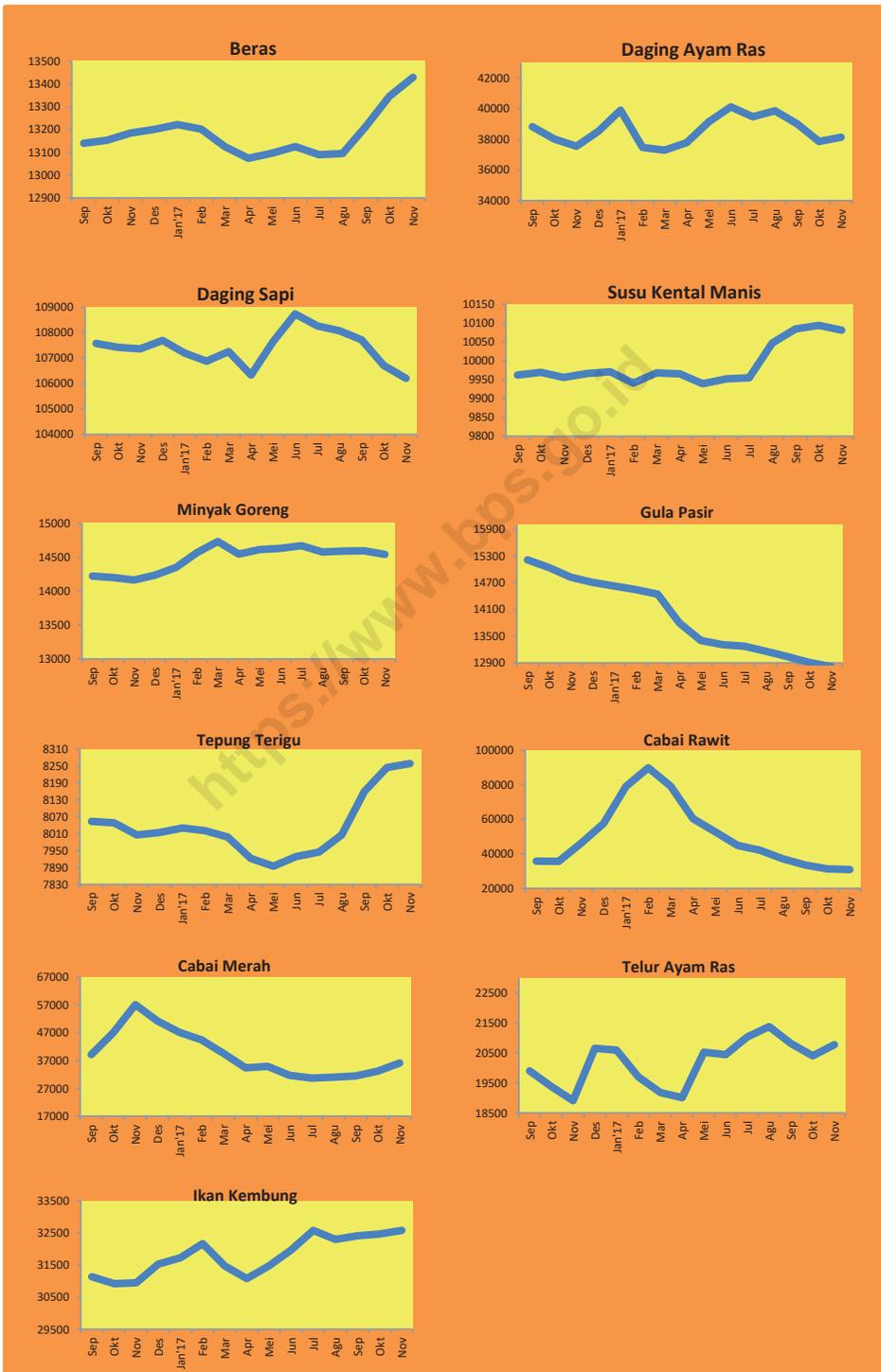
1. Secara nasional, rata-rata harga beras pada November 2017 naik 0,62 persen dibanding Oktober 2017. Dibandingkan November 2016, harga beras naik 1,85 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 3,30 persen. Artinya pemilik beras (pedagang, petani, konsumen, BULOG, dan industri berbahan baku beras) mengalami penurunan nilai riil sebesar 1,45 persen. Kenaikan tertinggi terjadi di Lubuklinggau dan Bungo (masing-masing 5 persen), Bau-bau dan Bulukumba (masing-masing 4 persen).
 

**Rata-rata harga beras November 2017 sebesar Rp 13.429 per kg, naik 0,62 persen.**
2. Harga cabai merah naik 8,90 persen dibanding bulan Oktober 2017 atau turun 36,68 persen dibanding November 2016. Kenaikan tertinggi terjadi Sumenep (52 persen) dan Probolinggo (43 persen). Harga telur ayam ras naik 1,85 persen dibanding bulan Oktober 2017 atau naik 9,85 persen dibanding November 2016. Kenaikan tertinggi terjadi di Semarang dan Kudus (masing-masing 7 persen), Probolinggo dan Surakarta (masing-masing 6 persen). Sedangkan harga cabai rawit turun 1,50 persen dibanding Oktober 2017 atau turun 33,01 persen dibanding November 2016. Penurunan tertinggi terjadi di Bandar Lampung (20 persen) dan Samarinda (13 persen).
3. Komoditas lain seperti daging ayam ras, daging sapi, susu kental manis, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu dan ikan kembung perubahannya relatif rendah

**Tabel 7.4**  
**Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok**  
**November 2016–November 2017 (rupiah)**

Bulan	Beras (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Daging Sapi (kg)	Susu Kental Manis (385 gram)	Minyak Goreng (liter)	Gula Pasir (kg)	Tepung Terigu (kg)	Cabai Rawit (kg)	Cabai Merah (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Ikan Kembung (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
November'16	13 185	37 547	107 361	9 956	14 164	14 822	8 006	46 083	57 079	18 909	30 952
Desember	13 201	38 538	107 694	9 966	14 232	14 709	8 014	57 479	51 291	20 654	31 534
Januari'17	13 222	39 906	107 199	9 971	14 349	14 628	8 030	78 947	47 172	20 590	31 730
Februari	13 202	37 480	106 877	9 941	14 567	14 546	8 020	89 763	44 464	19 703	32 168
Maret	13 125	37 285	107 251	9 968	14 730	14 441	7 998	79 117	39 551	19 181	31 476
April	13 074	37 777	106 329	9 965	14 546	13 791	7 922	60 335	34 429	19 008	31 079
Mei	13 096	39 133	107 647	9 939	14 610	13 402	7 895	52 636	34 973	20 515	31 474
Juni	13 125	40 123	108 734	9 952	14 629	13 306	7 929	44 893	31 731	20 439	31 971
Juli	13 090	39 477	108 256	9 955	14 670	13 277	7 945	42 114	30 725	21 034	32 582
Agustus	13 095	39 868	108 072	10 047	14 575	13 160	8 005	37 208	31 008	21 375	32 295
September	13 215	39 031	107 715	10 084	14 588	13 034	8 159	33 472	31 433	20 811	32 414
Oktober	13 346	37 856	106 713	10 094	14 595	12 910	8 244	31 340	33 190	20 395	32 466
November	13 429	38 132	106 201	10 081	14 542	12 814	8 258	30 870	36 144	20 772	32 583
<b>November'17 thd</b>	<b>0,62</b>	<b>0,73</b>	<b>-0,48</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,36</b>	<b>-0,74</b>	<b>0,17</b>	<b>-1,50</b>	<b>8,90</b>	<b>1,85</b>	<b>0,36</b>
<b>Oktober'17</b>											
<b>November'17 thd</b>	<b>1,85</b>	<b>1,56</b>	<b>-1,08</b>	<b>1,26</b>	<b>2,67</b>	<b>-13,55</b>	<b>3,15</b>	<b>-33,01</b>	<b>-36,68</b>	<b>9,85</b>	<b>5,27</b>
<b>November'16 (dalam persen)</b>											

**Grafik 7.3**  
**Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok**  
**September 2016–November 2017 (Rupiah)**







8

INDEKS HARGA  
PRODUSEN  
TRIWULAN III-2017  
DAN INDEKS HARGA  
PERDAGANGAN BESAR  
NOVEMBER 2017

# VIII. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN III–2017 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR NOVEMBER 2017

## A. INDEKS HARGA PRODUSEN

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan dari Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan pada triwulan III-2017 sebesar 134,32. Pada triwulan III-2017, IHP gabungan tersebut mengalami kenaikan sebesar

**Pada triwulan III-2017 terjadi inflasi harga produsen sebesar 0,68 persen**

0,68 persen dibandingkan IHP triwulan II-2017 sebesar 133,41 (*q-to-q*). Hal ini dipengaruhi oleh IHP Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri Pengolahan yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,77 persen, 1,67 persen, dan 0,52 persen. IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas triwulan III-2017 sebesar 132,39 turun 0,31 persen dibandingkan dengan IHP triwulan II-2017 sebesar 132,80 (*q-to-q*). Sementara itu, IHP Sektor Pengelolaan Air triwulan III-2017 sebesar 119,80 naik sebesar 0,21 persen dibandingkan dengan IHP triwulan II-2017 sebesar 119,55 (*q-to-q*). Adapun IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan III-2017 sebesar 126,54 naik 0,26 persen dibandingkan IHP triwulan II-2017 sebesar 126,21 (*q-to-q*). Sedangkan IHP Sektor Angkutan Penumpang triwulan III-2017 sebesar 213,15 turun 0,56 persen dibandingkan dengan IHP triwulan II-2017 sebesar 214,34 (*q-to-q*).

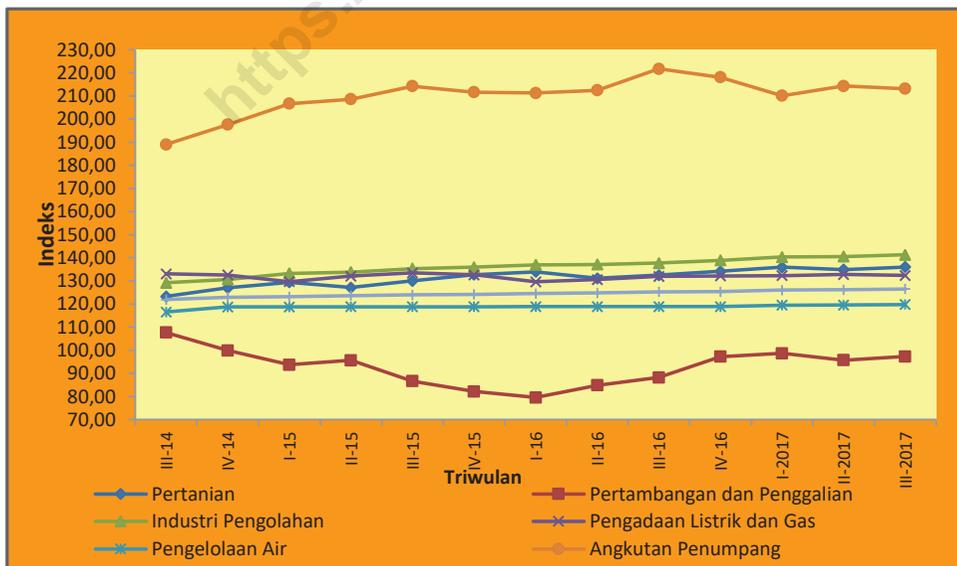
Perubahan IHP gabungan triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 (*y-on-y*) sebesar 3,28 persen, yaitu dari 130,05 pada triwulan III-2016 menjadi 134,32 pada triwulan III-2017. Kenaikan indeks tersebut disebabkan oleh naiknya indeks atau inflasi harga produsen pada semua sektor, yaitu Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan, masing-masing sebesar 2,60 persen, 10,33 persen, dan 2,57 persen. IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 (*y-on-y*) mengalami kenaikan sebesar 0,35 persen, yaitu dari 131,93 pada triwulan III-2016 menjadi 132,39 pada triwulan III-2017. Sedangkan IHP Sektor Pengelolaan Air naik sebesar 0,75 persen, yaitu dari 118,91 pada triwulan III-2016 (*y-on-y*) menjadi 119,80 pada triwulan III-2017. Sektor Angkutan Penumpang mengalami penurunan 3,88 persen, yaitu dari 221,75 pada triwulan III-2016 (*y-on-y*) menjadi 213,15 pada triwulan III-2017. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 (*y-on-y*) mengalami kenaikan sebesar 1,02 persen, yaitu dari 125,26 pada triwulan III-2016 menjadi 126,54 pada triwulan III-2017.

**Tabel 8.1**  
**Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor**  
**Triwulan III-2017**

Sektor	IHP Triw III- 2016	IHP Triw II- 2017	IHP Triw III- 2017	Inflasi Harga Produsen ( <i>q-to-q</i> ) <sup>1)</sup> (%)		Inflasi Harga Produsen ( <i>y-on-y</i> ) <sup>2)</sup> (%)	
				Triw II- 2017	Triw III- 2017	Triw III- 2016	Triw III- 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Gabungan (1+2+3)</b>	<b>130,05</b>	<b>133,41</b>	<b>134,32</b>	<b>-0,33</b>	<b>0,68</b>	<b>1,84</b>	<b>3,28</b>
1. Pertanian	132,54	134,94	135,99	-0,72	0,77	1,94	2,60
2. Pertambangan dan Penggalian	88,20	95,72	97,31	-3,02	1,67	1,83	10,33
3. Industri Pengolahan	137,76	140,58	141,30	0,17	0,52	1,81	2,57
4. Pengadaan Listrik dan Gas	131,93	132,80	132,39	0,38	-0,31	-1,15	0,35
5. Pengelolaan Air	118,91	119,55	119,80	0,04	0,21	0,09	0,75
6. Angkutan Penumpang	221,75	214,34	213,15	2,01	-0,56	3,50	-3,88
7. Akomodasi, Makanan dan Minuman	125,26	126,21	126,54	0,14	0,26	1,03	1,02

Keterangan: 1). Inflasi Produsen (*q-to-q*) adalah persentase perubahan IHP triwulan t terhadap triwulan t-1  
2). Inflasi Produsen (*y-on-y*) adalah persentase perubahan IHP triwulan t-2017 terhadap triwulan t-2016

**Grafik 8.1**  
**Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor**  
**Triwulan III-2014 s.d. Triwulan III-2017**



### 1. Sektor Pertanian

IHP Sektor Pertanian pada triwulan III-2017 naik 0,77 persen (*q-to-q*), yaitu dari 134,94 pada triwulan II-2017 menjadi 135,99 pada triwulan III-2017. Inflasi harga

produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh naiknya IHP di Subsektor Tanaman Bahan Makanan (1,29 persen), Subsektor Peternakan (1,16 persen), Perikanan (1,20 persen), dan Subsektor Kehutanan (0,78 persen). Sementara itu, deflasi terjadi di Subsektor Perkebunan (1,26 persen). Apabila dibandingkan dengan triwulan III-2016, Sektor Pertanian pada triwulan III-2017 mengalami inflasi harga produsen (*y-on-y*) sebesar 2,60 persen, yaitu dari 132,54 pada triwulan III-2016 menjadi 135,99 pada triwulan III-2017. Subsektor Perkebunan merupakan penyebab utama kenaikan IHP pada periode tersebut yaitu sebesar 4,96 persen, diikuti oleh Subsektor Perikanan sebesar 4,26 persen dan Subsektor Peternakan sebesar 1,72 persen.

## 2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan III-2017 sebesar 97,31 mengalami kenaikan sebesar 1,67 persen dibandingkan IHP pada triwulan II-2017 sebesar 95,72 (*q-to-q*). Inflasi harga produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh naiknya IHP Subsektor Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar 2,10 persen dan 0,08 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Terhadap triwulan III-2016 (*y-on-y*), IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian triwulan III-2017 mengalami kenaikan sebesar 10,33 persen, yaitu dari 88,20 pada triwulan III-2016 menjadi 97,31 pada triwulan III-2017. Inflasi harga produsen (*y-on-y*) pada Sektor Pertambangan dan Penggalian dipengaruhi oleh naiknya IHP Subsektor Pertambangan sebesar 15,26 persen.

## 3. Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan III-2017, IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan sebesar 0,52 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 140,58 pada triwulan II-2017 menjadi 141,30 pada triwulan III-2017 (*q-to-q*). Tiga subsektor pada Sektor Industri Pengolahan yang mengalami inflasi tinggi adalah Subsektor Industri Logam Dasar (1,65 persen); Subsektor Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan (1,46 persen); dan Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, dan Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (0,94 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi antara lain Subsektor Industri Pupuk (2,98 persen), Industri Karet, Plastik, dan Hasil-hasilnya (1,27 persen), dan Subsektor Industri Alat Angkutan (0,07 persen).

Dibandingkan triwulan III-2016, IHP Sektor Industri Pengolahan pada triwulan III-2017 (*y-on-y*) mengalami kenaikan (2,57 persen) dari 137,76 menjadi 141,30. Penyebab kenaikan IHP tersebut terutama terjadi pada Subsektor Industri Kertas,

Barang dari Kertas dan Cetakan (7,61 persen); Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, dan Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (5,30 persen); dan Subsektor Industri Karet, Plastik, dan Hasil-hasilnya (4,88 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi adalah Subsektor Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki (0,53 persen) dan Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung, dan Pakan Ternak (0,17 persen).

#### 4. Sektor Pengadaan listrik dan Gas

IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada triwulan III-2017 (*q-to-q*) sebesar 132,39 mengalami penurunan sebesar 0,31 persen terhadap triwulan II-2017 yang sebesar 132,80. Deflasi Harga Produsen pada sektor ini disebabkan oleh turunnya IHP Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 0,35 persen.

Sedangkan terhadap triwulan III-2016, IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami inflasi sebesar 0,35 persen, yaitu dari 131,93 pada triwulan III-2016 menjadi 132,39 pada triwulan III-2017 (*y-on-y*). Inflasi Harga Produsen terjadi di Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 0,42 persen.

#### 5. Sektor Pengelolaan Air

IHP Sektor Pengelolaan Air pada Triwulan III-2017 sebesar 119,80 mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen terhadap triwulan II-2017 yaitu sebesar 119,55 (*q-to-q*). Demikian juga terhadap triwulan III-2016 naik 0,75 persen yaitu dari 118,91 di triwulan III-2016 menjadi 119,80 di triwulan III-2017 (*y-on-y*).

#### 6. Sektor Angkutan Penumpang

IHP Sektor Angkutan Penumpang pada triwulan III-2017 sebesar 213,15 mengalami deflasi sebesar 0,56 persen dibandingkan IHP triwulan sebelumnya yang sebesar 214,34 (*q-to-q*). Deflasi Harga Produsen pada sektor ini disebabkan oleh turunnya IHP pada semua subsektor, yaitu Subsektor Angkutan Kereta Api Penumpang (4,87 persen), Subsektor Angkutan Laut Penumpang (1,17 persen), Subsektor Angkutan Darat Penumpang (0,53 persen), Subsektor Angkutan Udara Penumpang (0,45 persen), dan Subsektor Sungai Danau dan Penyeberangan Penumpang (0,36 persen).

IHP Sektor Angkutan Penumpang triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 (*y-on-y*) turun sebesar 3,88 persen, yaitu dari 221,75 menjadi 213,15. Hal ini diakibatkan oleh deflasi Harga Produsen semua subsektor, yaitu Subsektor Angkutan Udara Penumpang (5,12 persen), Subsektor Angkutan Kereta Api Penumpang (4,25 persen), Subsektor Angkutan Laut Penumpang (3,42 persen),

Subsektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Penumpang (2,31 persen), dan Subsektor Angkutan Darat Penumpang (1,91 persen).

#### **7. Sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan, dan Minuman**

IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman pada triwulan III-2017 sebesar 126,54 mengalami kenaikan 0,26 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya yang sebesar 126,21 (*q-to-q*). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan IHP Subsektor Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar 0,26 persen dan Subsektor Penyediaan Akomodasi sebesar 0,23 persen.

IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan III-2017 terhadap triwulan III-2016 (*y-on-y*) naik sebesar 1,02 persen, yaitu dari 125,26 menjadi 126,54. Hal ini diakibatkan oleh inflasi Harga Produsen Subsektor Akomodasi dan Subsektor Makanan dan Minuman masing-masing sebesar 0,82 persen dan 1,05 persen.

<https://www.bps.go.id>

**Tabel 8.2**  
**Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor**  
**Triwulan III-2017**

Sektor/Subsektor	IHP Triw III- 2016	IHP Triw II- 2017	IHP Triw III- 2017	Inflasi Harga Produsen ( $q-to-q$ ) <sup>1)</sup> (%)		Inflasi Harga Produsen ( $y-on-y$ ) <sup>2)</sup> (%)	
				Triw II- 2017	Triw III- 2017	Triw III- 2016	Triw III- 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Pertanian</b>	<b>132,54</b>	<b>134,94</b>	<b>135,99</b>	<b>-0,72</b>	<b>0,77</b>	<b>1,94</b>	<b>2,60</b>
1. Tanaman Bahan Makanan	138,68	138,94	140,73	-1,47	1,29	1,05	1,48
2. Perkebunan	120,33	127,90	126,29	-1,84	-1,26	1,86	4,96
3. Peternakan	131,36	132,08	133,61	0,37	1,16	4,26	1,72
4. Perikanan	128,86	132,76	134,35	1,03	1,20	1,87	4,26
5. Kehutanan	144,93	145,62	146,75	0,55	0,78	3,48	1,25
<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>88,20</b>	<b>95,72</b>	<b>97,31</b>	<b>-3,02</b>	<b>1,67</b>	<b>1,83</b>	<b>10,33</b>
1. Pertambangan	79,17	89,37	91,25	-3,26	2,10	1,90	15,26
2. Penggalian	136,44	129,62	129,73	-2,12	0,08	1,60	-4,92
<b>Industri Pengolahan</b>	<b>137,76</b>	<b>140,58</b>	<b>141,30</b>	<b>0,17</b>	<b>0,52</b>	<b>1,81</b>	<b>2,57</b>
1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-Buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak	151,37	157,92	159,40	0,12	0,94	8,00	5,30
2. Industri Susu dan Makanan Dari Susu	116,58	118,41	118,66	0,41	0,21	0,45	1,78
3. Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak	150,56	149,28	150,30	-0,77	0,69	3,26	-0,17
4. Industri Makanan Lainnya	134,72	138,16	138,93	0,89	0,55	4,06	3,13
5. Industri Minuman dan Rokok	143,41	149,16	150,10	1,45	0,63	5,21	4,66
6. Industri Pemintalan dan Pertenunan Tekstil	134,73	138,30	138,74	1,06	0,32	3,95	2,98
7. Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki	156,27	154,84	155,44	0,60	0,39	2,58	-0,53
8. Industri Kayu Gergajian dan Olahan	157,83	160,38	160,68	0,28	0,19	-0,21	1,81
9. Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan	131,86	139,86	141,90	1,99	1,46	0,23	7,61
10. Industri Pupuk	119,93	124,73	121,01	0,11	-2,98	-9,39	0,90
11. Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	143,77	143,85	144,90	0,78	0,72	-0,99	0,78
12. Pengilangan Minyak Bumi dan Gas	123,62	126,72	127,37	0,48	0,52	-3,63	3,04
13. Industri Karet, Plastik, dan Hasil-Hasilnya	114,78	121,92	120,37	-2,20	-1,27	-1,19	4,88
14. Industri Barang Mineral Bukan Logam	141,99	144,16	144,68	-0,37	0,36	1,04	1,89
15. Industri Logam Dasar	110,41	113,75	115,63	0,58	1,65	-1,14	4,73
16. Industri Barang-Barang dari Logam	119,07	123,77	124,76	1,09	0,80	-0,11	4,78
17. Industri Mesin, Listrik, Elektronik, dan Perlengkapannya	138,80	140,13	141,33	-0,64	0,86	0,95	1,82
18. Industri Alat Angkutan	133,02	133,44	133,34	0,15	-0,07	2,46	0,24
19. Industri Perabot Rumah Tangga dan Barang Lainnya	148,81	150,94	151,97	0,78	0,68	1,44	2,12
<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>131,93</b>	<b>132,80</b>	<b>132,39</b>	<b>0,38</b>	<b>-0,31</b>	<b>-1,15</b>	<b>0,35</b>
1. Ketenagalistrikan	126,75	127,74	127,29	0,46	-0,35	-1,24	0,42
2. Pengadaan Gas	191,96	191,49	191,49	-0,25	0,00	-0,46	-0,25
<b>Pengelolaan Air</b>	<b>118,91</b>	<b>119,55</b>	<b>119,80</b>	<b>0,04</b>	<b>0,21</b>	<b>0,09</b>	<b>0,75</b>

Sektor/Subsektor	IHP Triw III- 2016	IHP Triw II- 2017	IHP Triw III- 2017	Inflasi Harga Produsen ( <i>q-to-q</i> ) <sup>1)</sup> (%)		Inflasi Harga Produsen ( <i>y-on-y</i> ) <sup>2)</sup> (%)	
				Triw II- 2017	Triw III- 2017	Triw III- 2016	Triw III- 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Angkutan Penumpang</b>	<b>221,75</b>	<b>214,34</b>	<b>213,15</b>	<b>2,01</b>	<b>-0,56</b>	<b>3,50</b>	<b>-3,88</b>
1. Angkutan Kereta Api Penumpang	192,52	193,76	184,33	4,02	-4,87	6,31	-4,25
2. Angkutan Darat Penumpang	154,95	152,79	151,99	0,33	-0,53	1,05	-1,91
3. Angkutan Laut Penumpang	112,58	110,02	108,73	0,28	-1,17	2,88	-3,42
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Penumpang	164,19	160,97	160,39	2,58	-0,36	2,78	-2,31
5. Angkutan Udara Penumpang	319,36	304,36	303,00	3,06	-0,45	5,00	-5,12
<b>Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman</b>	<b>125,26</b>	<b>126,21</b>	<b>126,54</b>	<b>0,14</b>	<b>0,26</b>	<b>1,03</b>	<b>1,02</b>
1. Akomodasi	140,41	141,25	141,57	-0,01	0,23	1,10	0,82
2. Makanan dan Minuman	123,04	124,00	124,33	0,16	0,26	1,02	1,05

Keterangan: 1) Inflasi Produsen (*q-to-q*) adalah persentase perubahan IHP triwulan t terhadap triwulan t-1

2) Inflasi Produsen (*y-on-y*) adalah persentase perubahan IHP triwulan t-2017 terhadap triwulan t-2016

## B. INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR (IHPB)

- IHPB Umum Nonmigas November 2017 naik sebesar 0,39 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Barang Ekspor Nonmigas sebesar 1,06 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalan naik sebesar 0,59 persen dan Sektor Industri naik sebesar 0,44 persen. Sedangkan Sektor Pertanian dan Kelompok Barang Impor Nonmigas turun masing-masing sebesar 0,06 persen dan 0,05 persen.

**Pada November 2017 IHPB tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 0,39 persen**

Pada Oktober 2017 IHPB Umum naik sebesar 0,66 persen dibandingkan IHPB Umum bulan sebelumnya. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Kelompok Barang Ekspor sebesar 1,81 persen. Kelompok Barang Impor naik sebesar 1,18 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalan naik sebesar 0,90 persen, dan Sektor Industri naik sebesar 0,30 persen. Sedangkan Sektor Pertanian turun sebesar 0,18 persen.

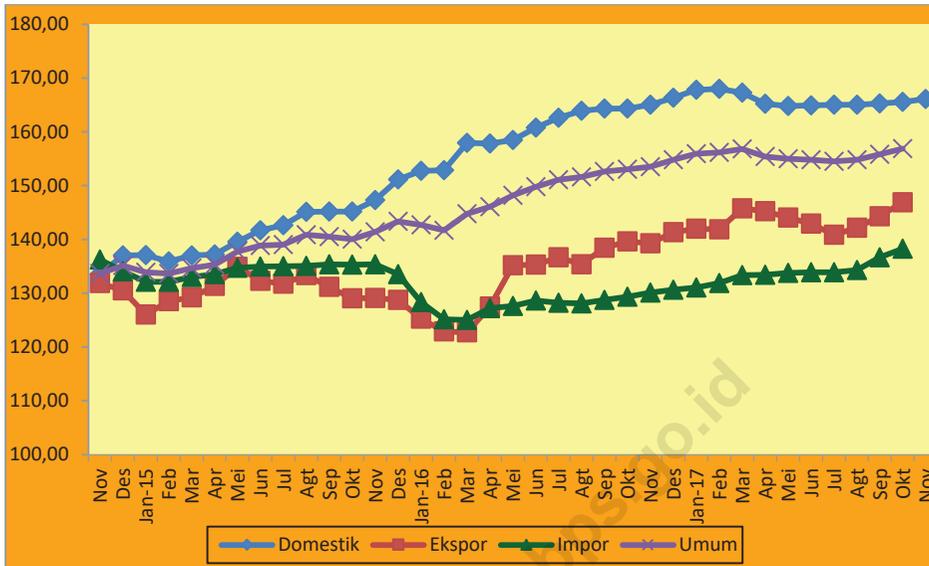
**Tabel 8.3**  
**Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia**  
**September–November 2017, (2010=100)**

Sektor/Kelompok	September	Oktober	November	Perubahan	
				Oktober terhadap September (%)	November terhadap Oktober (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	362,75	362,11	361,90	-0,18	-0,06
2. Pertambangan dan Pengalihan	120,69	121,77	122,49	0,90	0,59
3. Industri	138,79	139,21	139,82	0,30	0,44
Domestik	165,25	165,57	166,09	0,20	0,31
4. Impor Nonmigas	139,77	139,96	139,89	0,14	-0,05
Impor	136,65	138,26		1,18	
5. Ekspor Nonmigas	149,68	152,40	154,02	1,81	1,06
Ekspor	144,29	146,90		1,81	
<b>Umum Nonmigas</b>	<b>158,65</b>	<b>159,37</b>	<b>159,99</b>	<b>0,45</b>	<b>0,39</b>
<b>Umum</b>	<b>155,83</b>	<b>156,86</b>		<b>0,66</b>	

**Tabel 8.4**  
**Tingkat Inflasi Perdagangan Besar November 2017 (2010=100)**

Sektor/Kelompok	IHPB				Perubahan November terhadap Oktober	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar	
	November 2016	Desember 2016	Oktober 2017	November 2017		Tahun Kalender	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	380,68	383,96	362,11	361,90	-0,06	-5,75	-4,93
2. Pertambangan dan Pengalihan	119,16	120,32	121,77	122,49	0,59	1,81	2,80
3. Industri	135,98	136,93	139,21	139,82	0,44	2,11	2,82
4. Impor Nonmigas	136,61	136,82	139,96	139,89	-0,05	2,25	2,41
5. Ekspor Nonmigas	148,87	148,94	152,40	154,02	1,06	3,41	3,46
<b>Umum Nonmigas</b>	<b>157,90</b>	<b>158,78</b>	<b>159,37</b>	<b>159,99</b>	<b>0,39</b>	<b>0,76</b>	<b>1,32</b>

**Grafik 8.2**  
**Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia**  
**November 2014–November 2017**



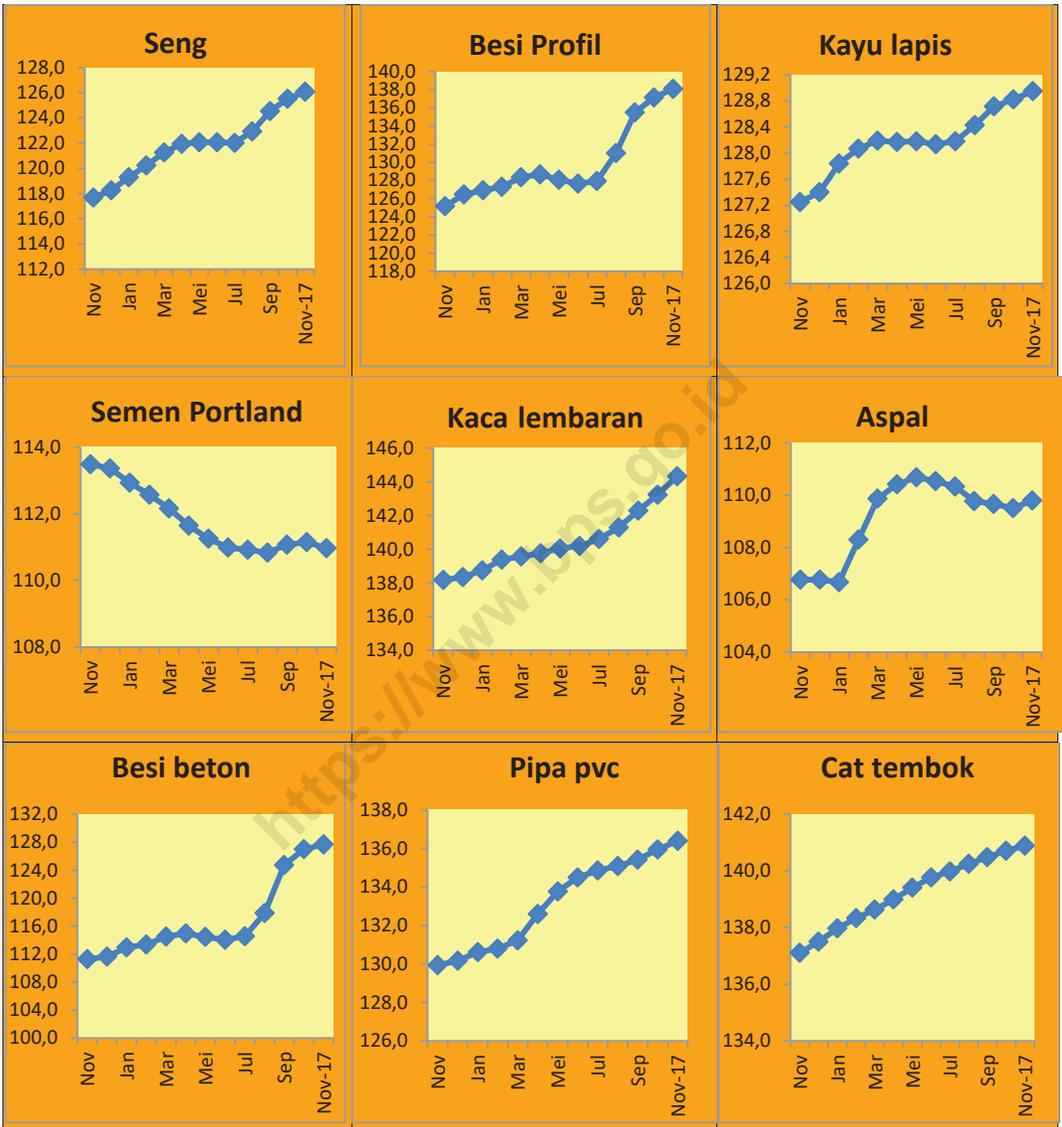
- IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi yang terdiri dari lima jenis bangunan/konstruksi pada November 2017 naik sebesar 0,28 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada jenis Bangunan Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan sebesar 0,37 persen.

**Tabel 8.5**  
**Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia November 2017**  
**Menurut Jenis Bangunan (2010=100)**

Jenis Bangunan	November 2016	Desember 2016	Oktober 2017	November 2017	Perubahan November terhadap Oktober	Tingkat Inflasi	
						Tahun Kalender 2017	Year- on- Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal	132,86	132,97	136,83	137,19	0,26	3,17	3,26
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian	129,86	130,11	134,79	135,13	0,25	3,86	4,05
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan	125,58	125,95	131,07	131,55	0,37	4,45	4,75
Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi	130,87	131,11	134,98	135,34	0,27	3,23	3,42
Bangunan Lainnya	128,64	128,78	131,37	131,71	0,26	2,28	2,39
<b>Konstruksi Indonesia</b>	<b>130,44</b>	<b>130,64</b>	<b>134,75</b>	<b>135,13</b>	<b>0,28</b>	<b>3,44</b>	<b>3,59</b>

3. IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi (besi beton, besi profil, seng lembaran, kaca lembaran, pipa pvc, kayu lapis, semen, dan cat tembok) pada November 2017 naik dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada kaca lembaran sebesar 0,77 persen dan terkecil terjadi pada kayu lapis sebesar 0,10 persen. Besi profil naik sebesar 0,70 persen, besi beton naik sebesar 0,53 persen, seng lembaran naik sebesar 0,44 persen, pipa pvc naik sebesar 0,33 persen, aspal naik sebesar 0,27 persen, dan cat tembok naik sebesar 0,13 persen. Semen turun sebesar 0,17 persen.

**Grafik 8.3**  
**Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan, November 2016–November 2017**



ATIK  
AR SARI  
B.I.21 - 22  
1 PS KLEWER SOLO

MA  
641733

WIBU



# 9

## INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULAN III- 2017

# IX. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULAN III-2017

## A. INDEKS TENDENSI BISNIS (ITB)

### A.1. ITB TRIWULAN III-2017

1. Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan III-2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan III-2017 sebesar 112,39. Optimisme pelaku bisnis di Indonesia pada triwulan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada triwulan II-2017 (nilai ITB sebesar 111,63).
2. Pada triwulan III-2017, seluruh kategori lapangan usaha mengalami peningkatan kondisi bisnis, kecuali untuk kategori lapangan usaha Real Estat yang mengalami penurunan (nilai ITB sebesar 98,00). Peningkatan kondisi bisnis tertinggi terjadi pada kategori lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi dengan nilai ITB sebesar 134,25.
3. Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan III-2017 disebabkan oleh meningkatnya tiga komponen pembentuk indeks, yaitu pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 115,62), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 114,25), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 107,29).

**Kondisi bisnis dan optimisme pelaku bisnis pada triwulan III-2017 meningkat dibandingkan triwulan II-2017**

**Tabel 9.1**  
**Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan III-2017**  
**Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk ITB Triwulan III-2017			ITB Triwulan III-2017
	Pendapatan Usaha	Penggunaan Kapasitas Produksi/ Usaha	Rata-Rata Jumlah Jam Kerja <sup>1)</sup>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111,71	109,34	-	110,52
2. Pertambangan dan Penggalian	107,32	106,83	101,95	105,37
3. Industri Pengolahan	109,65	110,70	103,51	107,95
4. Pengadaan Listrik dan Gas	136,04	127,03	106,31	123,12
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	118,75	111,25	101,25	110,42
6. Konstruksi	110,47	105,24	105,24	106,98
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	119,02	119,14	115,21	117,79
8. Transportasi dan Pergudangan	128,57	122,98	121,74	124,43
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	109,15	107,41	107,63	108,06
10. Informasi dan Komunikasi	115,56	121,67	101,67	112,96
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	148,62	140,61	113,54	134,25
12. Real Estat	94,00	101,00	99,00	98,00
13. Jasa Perusahaan	117,83	114,78	110,00	114,20
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	132,65	138,78	118,37	129,93
15. Jasa Pendidikan	99,41	100,59	101,78	100,59
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,92	106,87	105,34	107,38
17. Jasa Lainnya	108,59	112,27	105,52	108,79
<b>Indeks Tendensi Bisnis (ITB)</b>	<b>115,62</b>	<b>114,25</b>	<b>107,29</b>	<b>112,39</b>

Keterangan:

1): "-" Komponen tidak ditanyakan.

**A.2. PERKIRAAN ITB TRIWULAN IV-2017**

1. Nilai ITB triwulan IV-2017 diperkirakan sebesar 109,70. Dengan demikian, secara umum kondisi bisnis pada triwulan IV-2017 diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2017. Namun, optimisme pelaku bisnis diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan III-2017 (nilai ITB sebesar 112,39).
2. Pada triwulan IV-2017 kondisi bisnis seluruh kategori lapangan usaha diperkirakan mengalami peningkatan. Peningkatan kondisi bisnis tertinggi diperkirakan terjadi pada kategori lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (nilai ITB sebesar 129,59). Sementara itu, optimisme terendah diperkirakan terjadi pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan (nilai ITB sebesar 103,84).

**Kondisi bisnis pada triwulan IV-2017 diprediksi meningkat. Namun, optimisme pelaku bisnis diperkirakan lebih rendah dibanding triwulan III-2017**

**Tabel 9.2**  
**Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan IV-2017**  
**Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk**

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk Perkiraan ITB Triwulan IV-2017				Perkiraan ITB Triwulan IV-2017
	Order dari Dalam Negeri	Order dari Luar Negeri <sup>1)</sup>	Harga Jual Produk	Order Barang Input <sup>1)</sup>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	119,30	100,16	113,61	-	111,02
2. Pertambangan dan Penggalan	106,34	101,46	102,93	104,63	103,84
3. Industri Pengolahan	113,07	102,19	113,60	111,01	109,97
4. Pengadaan Listrik dan Gas	134,23	-	117,12	120,27	123,87
5. Pengadaan Air	137,50	-	105,00	110,00	117,50
6. Konstruksi	109,69	-	113,35	102,36	108,46
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	110,31	100,98	120,37	113,25	111,23
8. Transportasi dan Pergudangan	131,37	-	112,73	-	122,05
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	130,50	-	114,60	-	122,55
10. Informasi dan Komunikasi	132,78	-	110,56	-	121,67
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	153,59	-	96,96	-	125,28
12. Real Estat	117,00	-	109,00	-	113,00
13. Jasa Perusahaan	123,48	-	105,65	-	114,57
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	142,86	-	116,33	-	129,59
15. Jasa Pendidikan	117,75	-	105,92	-	111,83
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126,72	-	106,11	-	116,41
17. Jasa Lainnya	130,06	-	101,23	-	115,64
<b>Indeks Tendensi Bisnis (ITB)</b>	<b>121,21</b>	<b>100,67</b>	<b>111,81</b>	<b>105,11</b>	<b>109,70</b>

Keterangan:

1): "-" Komponen tidak ditanyakan.

**Grafik 9.1**  
**Indeks Tendensi Bisnis<sup>1)</sup> Triwulan III-2012–Triwulan IV-2017<sup>2)</sup>**



**Keterangan:**

- <sup>1)</sup> ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:
  - a. Nilai ITB < 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
  - b. Nilai ITB = 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
  - c. Nilai ITB > 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.
- <sup>2)</sup> Angka perkiraan ITB triwulan IV-2017.

## B. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)

### B.1. ITK TRIWULAN III-2017

1. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional pada triwulan III-2017 sebesar 109,42 menunjukkan kondisi ekonomi konsumen meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Namun, tingkat optimisme konsumen pada triwulan III-2017 lebih rendah jika dibandingkan

**Kondisi ekonomi konsumen triwulan III-2017 meningkat, namun optimisme konsumen lebih rendah dibandingkan triwulan II-2017**

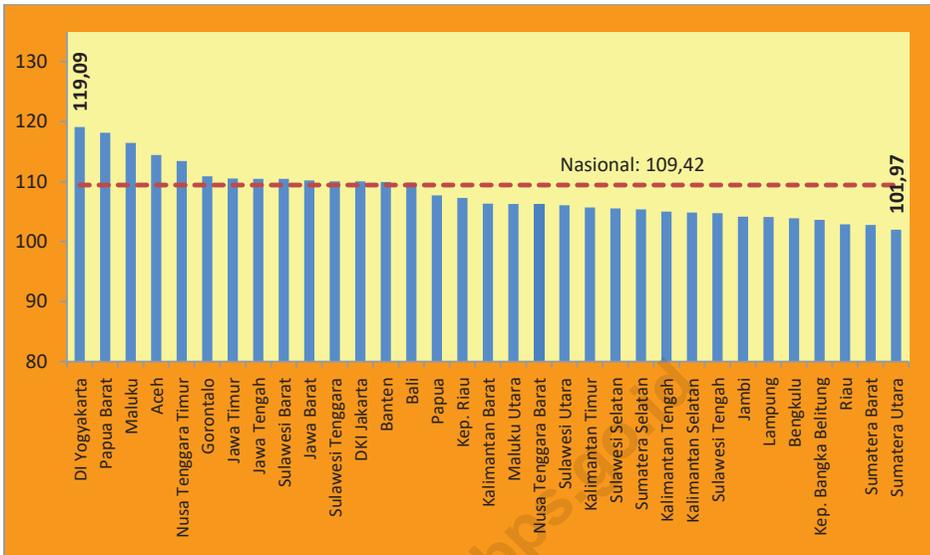
dengan triwulan II-2017 (nilai indeks 115,92). Membaiknya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan III-2017 didorong oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga (nilai indeks sebesar 110,40), inflasi yang terjadi tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rumah tangga (nilai indeks sebesar 108,72), dan meningkatnya volume konsumsi rumah tangga (nilai indeks sebesar 107,96).

2. Peningkatan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan III-2017 terjadi di seluruh provinsi. Nilai ITK tertinggi terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta (nilai ITK 119,09) dan terendah di Provinsi Sumatera Utara (101,97).

**Tabel 9.3**  
**Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2017 dan Triwulan III-2017**  
**Menurut Variabel Pembentuk**

Variabel Pembentuk	ITK Triw II-2017	ITK Triw III-2017
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumah tangga	116,49	110,40
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	109,07	108,72
Volume konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan rekreasi)	123,24	107,96
<b>Indeks Tendensi Konsumen</b>	<b>115,92</b>	<b>109,42</b>

**Grafik 9.2**  
**Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2017**  
**Tingkat Nasional dan Provinsi**



**B.2. PERKIRAAN ITK TRIWULAN IV-2017**

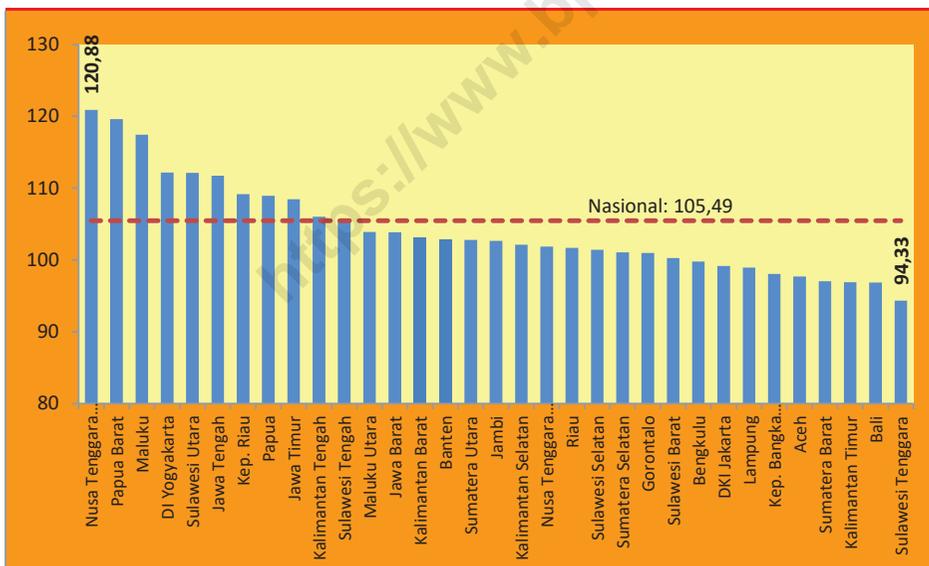
1. Nilai ITK nasional pada triwulan IV-2017 diperkirakan sebesar 105,49. Dengan demikian, kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2017 diperkirakan meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, tingkat optimisme konsumen diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan triwulan III-2017. Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan IV-2017 disebabkan oleh meningkatnya perkiraan pendapatan rumah tangga mendatang (nilai indeks sebesar 108,15). Sementara itu, rencana pembelian barang tahan lama, rekreasi, dan pesta/hajatan diperkirakan relatif sama dengan kondisi triwulan sebelumnya (nilai indeks sebesar 100,84).
2. Peningkatan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan IV-2017 diperkirakan terjadi pada 23 provinsi di Indonesia. Perkiraan nilai ITK triwulan IV-2017 tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nilai ITK sebesar 120,88. Sementara itu, perkiraan nilai ITK triwulan IV-2017 terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai ITK sebesar 94,33.

**Kondisi ekonomi konsumen triwulan III-2017 diprediksi meningkat. Namun, optimisme konsumen diperkirakan lebih rendah dibanding triwulan II-2017**

**Tabel 9.4**  
**Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2017**  
**Menurut Variabel Pembentuk**

Variabel Pembentuk	Perkiraan ITK Triw IV-2017
(1)	(2)
Perkiraan pendapatan rumah tangga	108,15
Rencana pembelian barang-barang tahan lama (elektronik, perhiasan, perangkat komunikasi, meubelair, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, tanah, rumah), rekreasi, dan pesta/hajatan	100,84
<b>Indeks Tendensi Konsumen</b>	<b>105,49</b>

**Grafik 9.3**  
**Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2017**  
**Tingkat Nasional dan Provinsi**



**Tabel 9.5**  
**Indeks Tendensi Konsumen<sup>1)</sup> Triwulan III-2016 – Triwulan IV-2017<sup>2)</sup>**  
**Tingkat Nasional dan Provinsi**

No	Provinsi	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		III-2016	IV-2016	I-2017	II-2017	III-2017	IV-2017 <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	106,73	103,65	101,68	108,18	114,40	97,69
2	Sumatera Utara	106,36	102,83	101,24	104,18	101,97	102,79
3	Sumatera Barat	109,53	103,73	99,93	109,67	102,76	97,03
4	R i a u	106,03	102,61	101,99	109,36	102,86	101,70
5	J a m b i	114,22	100,83	105,37	108,74	104,13	102,66
6	Sumatera Selatan	110,85	100,40	101,62	114,67	105,35	101,08
7	Bengkulu	109,22	100,30	103,93	111,05	103,88	99,78
8	Lampung	102,12	102,29	101,81	104,10	104,08	98,96
9	Kep. Bangka Belitung	112,38	104,59	98,34	108,25	103,60	98,07
10	Kep. R i a u	104,32	100,86	96,88	106,02	107,25	109,19
11	DKI Jakarta	108,79	104,28	100,84	116,97	110,01	99,15
12	Jawa Barat	108,27	101,59	104,50	118,59	110,19	103,87
13	Jawa Tengah	109,16	99,93	102,05	114,74	110,47	111,73
14	D.I. Yogyakarta	115,02	103,15	104,13	122,35	119,09	112,18
15	Jawa Timur	108,23	103,34	104,30	123,21	110,52	108,46
16	Banten	110,01	104,65	108,42	112,85	109,93	102,82
17	B a l i	109,98	100,57	103,91	110,81	109,83	96,85
18	Nusa Tenggara Barat	114,81	103,16	97,93	109,06	106,27	101,85
19	Nusa Tenggara Timur	106,14	109,62	97,03	107,83	113,40	120,88
20	Kalimantan Barat	103,71	95,07	99,82	107,23	106,31	103,13
21	Kalimantan Tengah	101,13	101,92	103,81	107,44	104,99	106,04
22	Kalimantan Selatan	100,21	99,09	101,45	105,40	104,85	102,15
23	Kalimantan Timur	105,79	101,23	100,35	106,68	105,69	96,89
24	Sulawesi Utara	103,46	106,15	89,89	106,62	106,05	112,15
25	Sulawesi Tengah	104,50	103,06	97,96	106,42	104,75	105,64
26	Sulawesi Selatan	107,09	102,43	101,02	112,27	105,53	101,44
27	Sulawesi Tenggara	109,25	98,54	98,57	111,59	110,03	94,33
28	Gorontalo	107,89	100,60	104,71	115,75	110,89	100,98
29	Sulawesi Barat	111,00	104,44	100,58	113,15	110,44	100,27
30	Maluku	110,89	111,57	98,26	109,24	116,46	117,47
31	Maluku Utara	100,87	103,05	101,71	115,17	106,27	103,89
32	Papua Barat	110,17	106,88	98,57	106,35	118,14	119,64
33	Papua	112,09	112,47	92,84	108,83	107,72	109,01
	<b>Indonesia</b>	<b>108,22</b>	<b>102,46</b>	<b>102,27</b>	<b>115,92</b>	<b>109,42</b>	<b>105,49</b>

Keterangan:

- 1) ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:
  - a. Nilai ITK < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
  - b. Nilai ITK = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
  - c. Nilai ITK > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.
- 2) Angka perkiraan ITK triwulan IV-2017.





10

PERTUMBUHAN  
PRODUKSI  
INDUSTRI  
MANUFAKTUR  
TRIWULAN III-  
2017

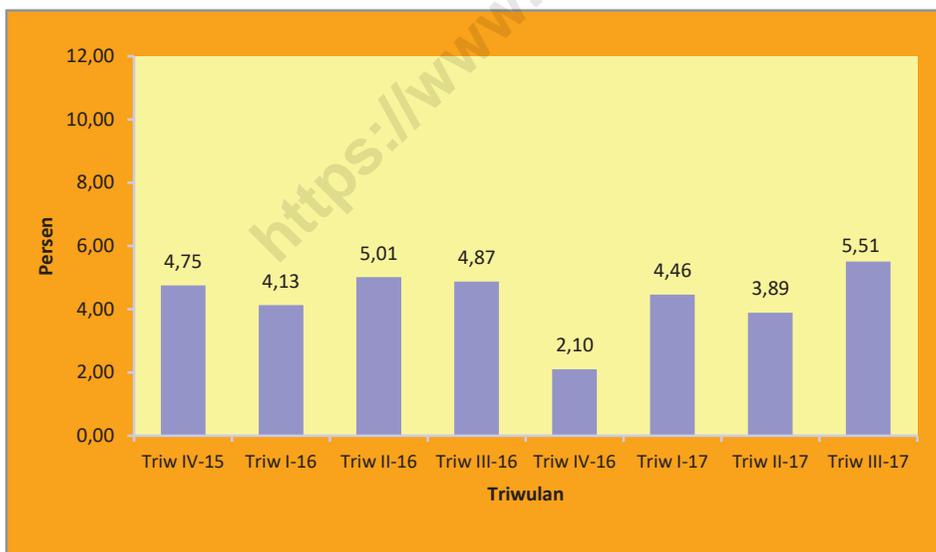
# X. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN III-2017

## A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS)

1. Pertumbuhan IBS triwulan III-2017 naik sebesar 5,51 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2016, triwulan II-2017 naik sebesar 3,89 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2016, triwulan I-2017 naik sebesar 4,46 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2016, triwulan IV-2016 naik sebesar 2,10 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2015, triwulan III-2016 naik sebesar 4,87 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2015.

**Pertumbuhan produksi IBS triwulan III-2017 naik sebesar 5,51 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2016**

**Grafik 10.1**  
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (*y-on-y*)  
Triwulan III-2015–Triwulan III-2017



2. Pertumbuhan produksi IBS triwulan III-2017 naik 2,27 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2017, triwulan II-2017 naik 2,46 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2016, triwulan I-2017 naik 0,99 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2016, triwulan IV-2016 turun sebesar 0,30 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2016, triwulan III-2016 naik sebesar 0,70 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2016, triwulan II-2016 naik sebesar 3,02 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2016, triwulan I-2016 turun sebesar 1,29 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2015, dan triwulan IV-2015 naik sebesar 2,41 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2015.

- Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan III-2017 (*y-on-y*) adalah industri logam dasar naik sebesar 11,97 persen, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia naik 9,30 persen, serta industri makanan naik 9,24 persen.
- Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan III-2017 (*q-to-q*) adalah industri minuman naik 7,70 persen, industri barang galian bukan logam naik 7,13 persen, dan industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer naik 5,59 persen.
- Pertumbuhan produksi IBS *m-to-m* Juli mengalami kenaikan sebesar 2,36 persen dan Agustus 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,49 persen. Sementara pada September 2017 mengalami penurunan sebesar -0,57 persen.

**Tabel 10.1**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2015–2017**  
**(persen) 2010=100**

Tahun	<i>q-to-q</i>				<i>y-on-y</i>				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015	-0,70	2,16	0,83	2,41	5,06	5,25	4,00	4,75	4,76
2016	-1,29	3,02	0,70	-0,30	4,13	5,01	4,87	2,10	4,01
2017	0,99	2,46	2,27		4,46	3,89	5,51		

**Tabel 10.2**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2015–2017 (persen)**  
**2010=100**

Bulan	<i>y-on-y</i>			<i>m-to-m</i>		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	5,12	2,57	3,45	-1,29	-0,27	-1,06
Februari	2,63	7,38	3,77	-2,97	1,58	1,90
Maret	7,42	2,55	6,14	4,84	0,13	2,42
April	8,41	0,13	6,41	1,31	-1,08	-0,83
Mei	2,39	7,04	6,63	-3,21	3,47	3,69
Juni	5,02	7,96	-1,12	2,62	3,50	-4,02
Juli	4,41	8,77	3,79 <sup>*)</sup>	-3,20	-2,47	2,36 <sup>*)</sup>
Agustus	5,73	6,07	4,96 <sup>**)</sup>	3,93	1,35	2,49 <sup>**)</sup>
September	2,01	0,05	7,84 <sup>***)</sup>	2,60	-3,23	-0,57 <sup>***)</sup>
Oktober	6,20	0,06		1,35	1,37	
November	6,60	2,04		-1,74	0,20	
Desember	1,52	4,28		-2,26	-0,12	

Catatan:

\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

\*\*\*\*) Angka Sangat Sangat Sementara

**Tabel 10.3**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan III-2017**  
**Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)**

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	4,99	9,24
11	Minuman	7,70	3,64
12	Pengolahan Tembakau	1,79	2,36
13	Tekstil	3,58	4,63
14	Pakaian Jadi	-0,04	6,98
15	Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	-0,51	4,50
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	-0,35	-1,06
17	Kertas dan Barang dari Kertas	2,61	-2,73
18	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1,80	7,01
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1,33	9,30
21	Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	-1,12	4,64
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,93	4,46
23	Barang Galian Bukan Logam	7,13	-1,42
24	Logam Dasar	0,48	11,97
25	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2,09	8,82
26	Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	4,18	-1,78
27	Peralatan Listrik	4,82	2,16
28	Mesin dan Perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya	1,11	3,98
29	Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	5,59	3,37
30	Alat Angkutan Lainnya	4,70	6,03
31	Furnitur	2,04	4,46
32	Pengolahan Lainnya	0,56	-4,88
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	2,73	3,66
Industri Manufaktur Besar dan Sedang		2,27	5,51

**B. Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)**

1. Pertumbuhan produksi IMK triwulan III-2017 naik sebesar 5,34 (*y-on-y*) dari triwulan III-2016, triwulan II-2017 naik sebesar 2,50 dari triwulan II-2016, triwulan I-2017 naik sebesar 6,63 persen dari triwulan I-2016, triwulan IV-2016 naik sebesar 4,88 persen dari triwulan IV-2015.

**Pertumbuhan produksi IMK triwulan III-2017 naik sebesar 5,34 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2016**

**Grafik 10.2**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*)**  
**Triwulan III-2015–Triwulan III-2017**



2. Pertumbuhan Produksi IMK triwulan III-2017 naik 0,66 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2017, triwulan II-2017 naik 1,64 persen dari triwulan I-2017, triwulan I-2017 naik 2,44 persen dari triwulan IV-2016, dan triwulan IV-2016 naik 0,51 persen dari triwulan III-2016.
3. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan III-2017 (*y-on-y*) adalah industri komputer, barang elektronik dan optik naik 35,99 persen, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia naik 24,56 persen, dan industri kertas dan barang dari kertas naik 19,97 persen.
4. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan III-2017 (*q-to-q*) adalah industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia naik 16,67 persen, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan naik 10,77 persen, dan industri percetakan dan reproduksi media rekaman naik 8,12 persen.

**Tabel 10.4**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan**  
**Triwulan I-2015–Triwulan III-2017 (persen)**

Tahun	q-to-q				y-on-y				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2015	0,64	5,09	-1,31	1,35	5,65	4,57	6,87	5,79	5,71
2016	0,76	5,74	-2,06	0,51	5,91	6,56	5,75	4,88	5,78
2017	2,44	1,64	0,66		6,63	2,50	5,34		

**Tabel 10.5**  
**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan III-2017**  
**menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)**

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	3,96	10,30
11	Minuman	-0,21	2,39
12	Pengolahan tembakau	2,40	-21,92
13	Tekstil	-1,40	0,00
14	Pakaian jadi	-3,29	6,96
15	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	-14,21	-0,18
16	Kayu, barang dari kayu dan gabus (kecuali furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya)	2,93	1,76
17	Kertas dan barang dari kertas	-4,03	19,97
18	Percetakan dan reproduksi media rekaman	8,12	14,48
20	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	16,67	24,56
21	Farmasi, obat kimia dan obat tradisional	0,03	-11,55
22	Karet, barang dari karet dan plastik	-7,66	-10,68
23	Barang galian bukan logam	3,70	0,47
24	Logam dasar	3,77	3,51
25	Barang logam, bukan mesin & peralatannya	-1,89	-0,31
26	Komputer, barang elektronik dan optik	6,51	35,99
27	Peralatan listrik	6,55	8,25
28	Mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya)	-26,05	-14,93
29	Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	-1,94	-0,33
30	Alat angkutan lainnya	-2,42	0,59
31	Furnitur	-1,68	4,67
32	Pengolahan lainnya	0,53	12,84
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	10,77	11,93
<b>Industri Manufaktur Mikro dan Kecil</b>		<b>0,66</b>	<b>5,34</b>



11

PARIWISATA  
OKTOBER 2017

## XI. PARIWISATA OKTOBER 2017

### A. Kunjungan Wisman

- Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari–September 2017 mencapai 10,46 juta kunjungan atau naik 25,05 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2016, yang tercatat sebanyak 8,36 juta kunjungan.

**Jumlah kunjungan wisman selama Januari–September 2017 mencapai 10,46 juta kunjungan atau naik 25,05 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2016**

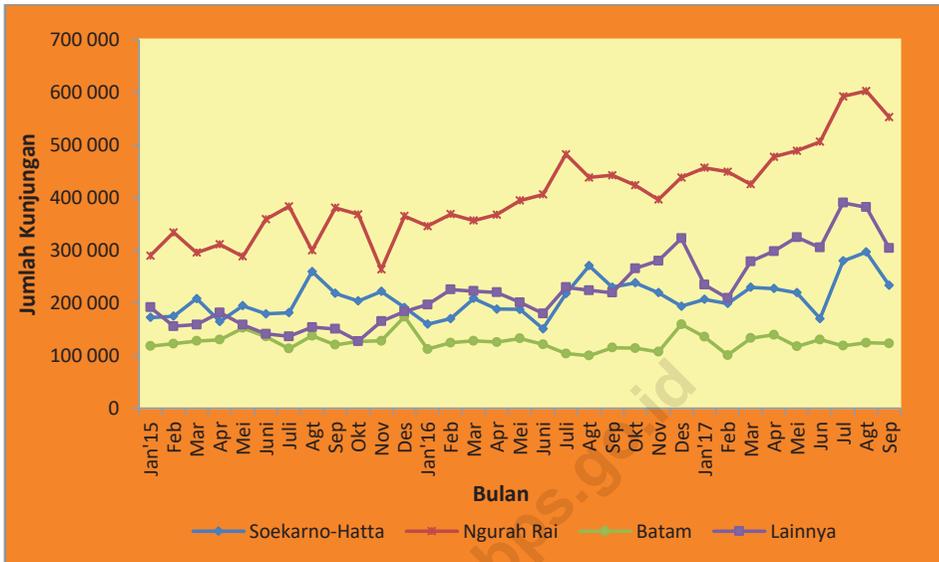
**Tabel 11.1**  
**Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia**

Jenis Pengunjung	Jumlah Kunjungan					Perubahan Sep 2017 thd 2016 (%)	Perubahan Sep 2017 thd Agt 2017 (%)	Perubahan Jan–Sep 2017 thd 2016 (%)
	Sep 2016	Agt 2017	Sep 2017*	Jan–Sep 2016	Jan–Sep 2017			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. <b>Wisman melalui 19 Pintu Utama</b>	<b>946 437</b>	<b>1 203 910</b>	<b>1 062 702</b>	<b>7 772 872</b>	<b>9 040 590</b>	<b>12,28</b>	<b>-11,73</b>	<b>16,31</b>
a. Wisman Reguler	922 608	1 178 407	1 039 776	7 508 161	8 820 377	12,70	-11,76	17,48
b. Wisman Khusus (wisman lansia, rohaniawan, diklat, riset, dll)	23 829	25 503	22 926	264 711	220 213	-3,79	-10,10	-16,81
2. <b>Wisman Diluar 19 Pintu Utama</b>	<b>60 216</b>	<b>200 794</b>	<b>150 008</b>	<b>590 091</b>	<b>1 417 709</b>	<b>149,12</b>	<b>-25,28</b>	<b>140,25</b>
a. Pos Lintas Batas (PLB)	21 752	159 357	109 445	234 736	1 015 609	403,15	-31,32	332,66
b. Pintu Lainnya	38 464	41 397	40 563	355 355	402 100	5,46	-2,01	13,15
<b>Jumlah</b>	<b>1 006 653</b>	<b>1 404 664</b>	<b>1 212 710</b>	<b>8 362 963</b>	<b>10 458 299</b>	<b>20,47</b>	<b>-13,67</b>	<b>25,05</b>

\*)Angka sementara

- Jumlah kunjungan wisman selama September 2017 mencapai 1,21 juta kunjungan atau naik 20,47 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan selama September 2016, yang tercatat sebanyak 1,01 juta kunjungan. Sementara itu, jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman bulan September 2017 mengalami penurunan sebesar 13,67 persen.

**Grafik 11.1**  
**Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman menurut Pintu Masuk**  
**Januari 2015–September 2017**



3. Jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada September 2017 mengalami kenaikan sebesar 24,40 persen dibandingkan September 2016, yaitu dari 442,30 ribu kunjungan menjadi 550,24 ribu kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman ke Bali mengalami penurunan sebesar 8,27 persen.
4. Dari sekitar 1,21 juta kunjungan wisman yang datang ke Indonesia pada September 2017, sebanyak 15,04 persen diantaranya dilakukan oleh wisman berkebangsaan Tionghoa, diikuti oleh wisman Singapura (10,13 persen), Australia (9,77 persen), Malaysia (8,80 persen), dan Jepang (4,64 persen).

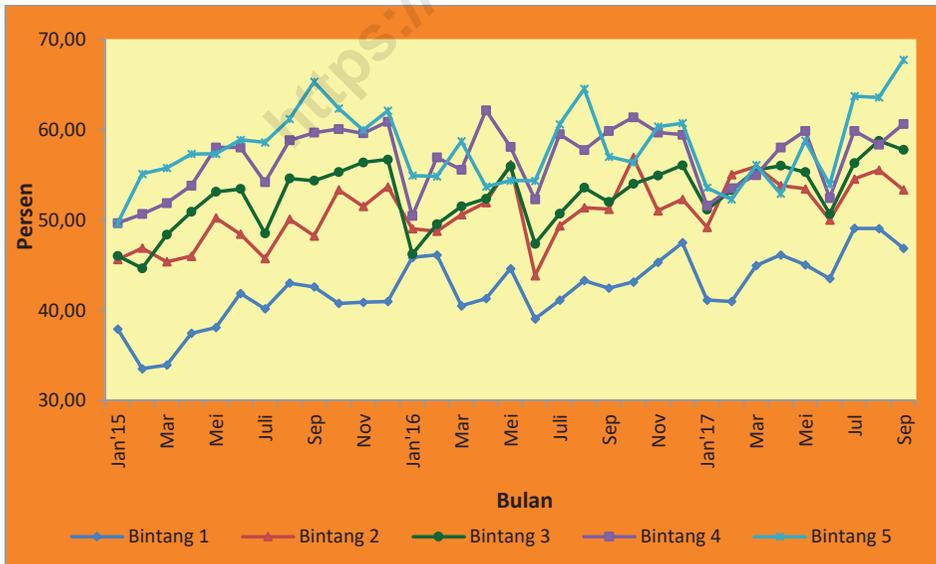
**B. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang**

1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia selama September 2017 mencapai 58,42 persen, yang berarti terjadi kenaikan 4,26 poin dibandingkan rata-rata TPK hotel berbintang pada bulan yang sama tahun 2016. Begitu pula jika dibandingkan bulan sebelumnya, TPK September 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,42 poin.

**TPK hotel berbintang September 2017 mencapai 58,42 persen atau naik 4,26 poin dibanding TPK September 2016**

2. Angka TPK menggambarkan rata-rata tingkat hunian di masing-masing hotel tanpa memperhatikan adanya perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel. Naik turunnya angka TPK tidak selalu mencerminkan kinerja di sektor perhotelan. Selain TPK, kinerja sektor perhotelan juga harus memperhatikan perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel yang siap dijual atau dipasarkan.

**Grafik 11.2**  
**Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Klasifikasi Bintang di Indonesia, Januari 2015–September 2017**



3. TPK hotel berbintang di Bali pada September 2017 sebesar 72,64 persen, atau naik sebesar 4,38 poin dibandingkan TPK September 2016. Sementara itu jika dibandingkan dengan Agustus 2017, TPK September 2017 di Bali mengalami penurunan sebesar 2,22 poin.
4. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang selama September 2017 mencapai 1,97 hari, atau mengalami kenaikan 0,17 hari dibandingkan rata-rata lama menginap selama September 2016. Sedangkan, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada September 2017 tidak mengalami perubahan.

**Tabel 11.2**  
**Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi Bintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Januari 2016–September 2017**

Bulan/ Tahun	Wisman		Wisman Bali (Ngurah Rai)		TPK*)		TPK Bali		Lama Menginap Tamu (hari)	
	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata	Peru- bahan (poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>2016</b>	<b>11 519 275</b>	<b>10,69</b>	<b>4 852 634</b>	<b>23,29</b>	<b>53,74</b>	<b>0,70</b>	<b>61,63</b>	<b>1,08</b>	<b>1,80</b>	<b>-0,18</b>
Jan-Sep	8 362 963	8,51	3 595 398	22,66	52,90	-0,14	61,97	1,42	1,83	-0,15
September	1 006 653	-2,45	442 304	1,00	54,16	-1,05	68,26	-4,14	1,90	0,10
Oktober	1 040 651	3,38	423 140	-4,33	56,13	1,97	62,19	-6,07	1,81	-0,09
November	1 002 333	-3,68	396 150	-6,38	55,76	-0,37	59,71	-2,48	1,72	-0,09
Desember	1 113 328	11,07	437 946	10,55	56,50	0,74	60,08	0,37	1,70	-0,02
<b>2017</b>	<b>10 458 299</b>	<b>25,05</b>	<b>4 529 352</b>	<b>25,98</b>	<b>55,02</b>	<b>2,12</b>	<b>64,85</b>	<b>2,88</b>	<b>1,92</b>	<b>0,09</b>
Januari	1 032 930	-7,22	452 660	3,36	50,66	-5,84	59,61	-0,47	1,94	0,24
Februari	957 583	-7,29	447 762	-1,08	52,57	1,91	60,82	0,66	1,91	-0,03
Maret	1 066 588	11,38	422 757	-5,58	54,70	2,13	56,58	-4,24	1,89	-0,02
April	1 142 180	7,09	474 610	12,27	55,14	0,44	58,79	1,96	1,84	-0,05
Mei	1 150 067	0,69	486 637	2,53	56,07	0,93	61,91	3,37	1,99	0,15
Juni	1 111 616	-3,34	503 617	3,49	51,02	-5,05	66,72	4,81	1,92	-0,07
Juli	1 379 961	24,14	591 234	17,40	57,52	6,50	72,32	5,60	1,89	-0,03
Agustus	1 404 664	1,79	599 827	1,45	58,00	0,48	74,86	2,54	1,97	0,08
September	1 212 710	-13,67	550 238	-8,27	58,42	0,42	72,64	-2,22	1,97	0

\*) TPK 2016: angka 27 Provinsi, TPK 2017: angka 34 Provinsi





12

TRANSPORTASI  
NASIONAL  
OKTOBER 2017

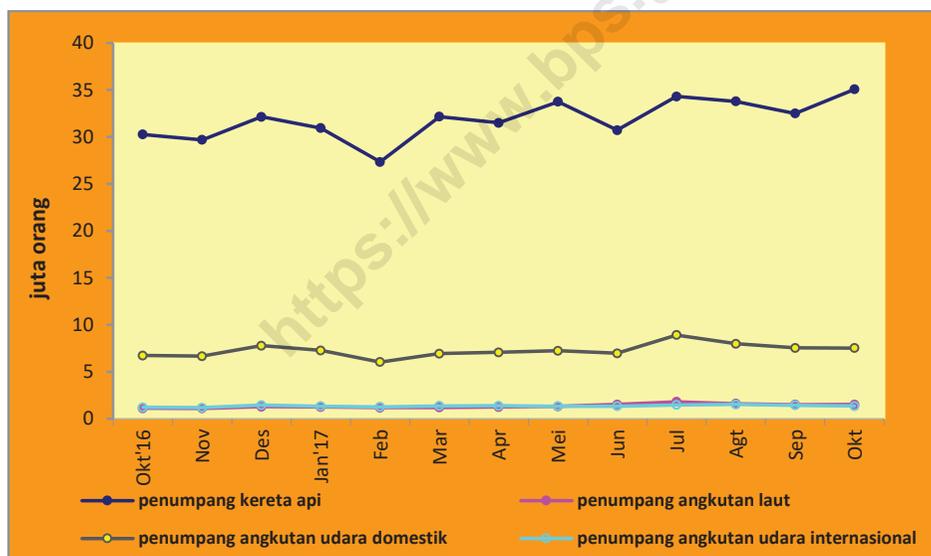
## XII. TRANSPORTASI NASIONAL OKTOBER 2017

### A. Angkutan Udara

1. Jumlah penumpang angkutan udara tujuan dalam negeri (domestik) Oktober 2017 mencapai 7,5 juta orang atau turun 0,38 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 11,71 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

**Jumlah penumpang angkutan udara domestik Oktober 2017 mencapai 7,5 juta orang, turun 0,38 persen**

**Grafik 12.1**  
Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi  
Oktober 2016–Oktober 2017



2. Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) September 2017 mencapai 1,4 juta orang atau turun 5,87 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 17,33 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

**B. Angkutan Laut Dalam Negeri**

1. Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Oktober 2017 mencapai 1,5 juta orang atau naik 1,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 36,74 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.
2. Jumlah barang yang diangkut pelayaran dalam negeri Oktober 2017 mencapai 22,8 juta ton atau naik 1,76 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 2,79 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

**Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Oktober 2017 mencapai 1,5 juta orang, naik 1,36 persen**

**C. Angkutan Kereta Api**

1. Jumlah penumpang kereta api Oktober 2017 mencapai 35,1 juta orang atau naik 7,91 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 15,88 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.
2. Jumlah barang yang diangkut kereta api Oktober 2017 mencapai 4,1 juta ton atau naik 7,30 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 21,81 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

**Jumlah penumpang kereta api Oktober 2017 mencapai 35,1 juta orang, naik 7,91 persen**

**Tabel 12.1**  
**Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi**  
**Oktober 2016–Oktober 2017**

Tahun/ Bulan	Angkutan Udara				Angkutan Laut				Angkutan Kereta Api			
	Domestik		Internasional		Penumpang		Barang		Penumpang		Barang	
	(ribu org)	Perubahan (%)	(ribu org)	Perubahan (%)	(ribu org)	Perubahan (%)	(ribu ton)	Perubahan (%)	(ribu org)	Perubahan (%)	(ribu ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>2016</b>	<b>80 449,9</b>	<b>-</b>	<b>14 772,4</b>	<b>-</b>	<b>14 907,8</b>	<b>-</b>	<b>258 245,2</b>	<b>-</b>	<b>351 819</b>	<b>-</b>	<b>35 306</b>	<b>-</b>
Oktober	6 734,4	1,49	1 224,9	0,43	1 119,6	4,79	22 187,6	2,92	30 263	2,53	3 329	13,54
November	6 659,7	-1,11	1 178,7	-3,77	1 108,7	-0,97	22 820,1	2,85	29 690	-1,89	3 175	-4,63
Desember	7 790,3	16,98	1 462,9	24,11	1 285,6	15,96	22 407,1	-1,81	32 150	8,29	3 314	4,38
<b>2017</b>	<b>73 518,7</b>	<b>-</b>	<b>13 833,7</b>	<b>-</b>	<b>14 193,8</b>	<b>-</b>	<b>215 745,1</b>	<b>-</b>	<b>322 101</b>	<b>-</b>	<b>35 644</b>	<b>-</b>
Januari	7 273,7	-6,63	1 343,8	-8,14	1 251,0	-2,69	21 350,3	-4,72	30 949	-3,74	3 304	-0,30
Februari	6 040,7	-16,95	1 265,0	-5,86	1 178,3	-5,81	19 388,3	-9,19	27 343	-11,65	2 905	-12,08
Maret	6 933,4	14,78	1 371,3	8,40	1 208,2	2,54	20 941,6	8,01	32 170	17,65	3 507	20,72
April	7 064,8	1,90	1 395,5	1,76	1 253,1	3,72	20 928,3	-0,06	31 502	-2,08	3 448	-1,68
Mei	7 239,3	2,47	1 342,1	-3,83	1 317,8	-5,16	22 693,6	8,43	33 745	7,12	3 652	5,92
Juni	6 976,3	-3,63	1 336,8	-0,39	1 525,7	15,78	21 557,9	-5,00	30 723	-8,96	3 182	-12,87
Juli	8 922,3	27,89	1 478,0	10,56	1 811,5	18,73	21 039,5	-2,40	34 310	11,68	3 800	19,42
Agustus	7 993,6	-10,41	1 520,1	2,85	1 606,9	-11,29	22 626,4	7,54	33 791	-1,51	4 012	5,58
September	7 551,5	-5,53	1 430,9	-5,87	1 510,4	-6,01	22 412,7	-0,94	32 498	-3,83	3 779	-5,81
Oktober	7 523,1	-0,38	1 350,2	-5,64	1 530,9	1,36	22 806,5	1,76	35 070	7,91	4 055	7,30



13

PERKEMBANGAN  
NILAI TUKAR  
ECERAN RUPIAH  
OKTOBER 2017

# XIII. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH OKTOBER 2017

## A. Dolar Amerika (USD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Amerika pada Oktober 2017 cenderung terdepresiasi dibanding minggu terakhir September 2017. Level terendah nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah pada minggu terakhir September 2017 tercatat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp13.430,50 per dolar AS, sementara pada minggu terakhir Oktober 2017 terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Rp13.594,00 per dolar AS. Sedangkan untuk level tertinggi, nilai tukar pada minggu terakhir September 2017 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp13.185,00 per dolar AS dan pada minggu terakhir Oktober 2017 terjadi di Provinsi Papua dengan nilai tengah Rp13.393,00 per dolar AS.
2. Pada minggu pertama Oktober 2017, jika dibanding minggu terakhir September 2017, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata nasional melemah 111,99 poin atau 0,84 persen. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 260,00 poin atau melemah sebesar 1,96 persen.
3. Pada minggu terakhir Oktober 2017, rata-rata nasional nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah 170,15 poin atau 1,27 persen dibanding kurs pada minggu terakhir September 2017. Depresiasi rupiah terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, melemah sebesar 290,00 poin atau 2,19 persen.

**Rupiah terdepresiasi 170,15 poin atau 1,27 persen terhadap dolar Amerika pada Oktober 2017. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan.**

## B. Dolar Australia (AUD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Australia pada minggu pertama dan ketiga Oktober 2017 cenderung melemah, sementara pada minggu kedua dan keempat Oktober 2017 cenderung menguat dibanding minggu terakhir September 2017. Rata-rata nasional kurs eceran rupiah terdepresiasi sebesar 53,95 poin pada minggu pertama Oktober 2017 atau melemah sebesar 0,51 persen. Depresiasi rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 369,69 poin atau melemah sebesar 3,51 persen dibanding minggu terakhir September 2017.
2. Pada minggu terakhir Oktober 2017 rata-rata nasional kurs eceran rupiah terhadap dolar Australia mengalami apresiasi sebesar 29,51 poin atau 0,28 persen dibanding minggu terakhir September 2017. Apresiasi rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu menguat sebesar 100,00 poin atau 0,95 persen dibanding minggu terakhir September 2017.
3. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada minggu terakhir September 2017 terjadi di Provinsi Papua sebesar Rp10.218,13 per dolar Australia, sementara pada minggu terakhir Oktober 2017 juga terjadi di Provinsi Papua sebesar Rp10.192,88 per dolar Australia. Di sisi lain, level terendah nilai tukar terhadap dolar Australia pada minggu terakhir September 2017 tercatat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp10.641,25 per dolar Australia, dan pada minggu terakhir Oktober 2017 tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar Rp10.636,00 per dolar Australia.

**Rupiah terapresiasi 29,51 poin atau 0,28 persen terhadap dolar Australia pada Oktober 2017. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.**

### C. Yen Jepang (JPY)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap yen Jepang pada minggu pertama Oktober 2017 secara rata-rata nasional melemah 0,55 poin atau 0,46 persen dibanding minggu terakhir September 2017. Pelemahan terbesar terjadi di Provinsi Maluku, yaitu 2,36 poin atau 2,00 persen.
2. Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada minggu terakhir Oktober 2017 secara rata-rata nasional tercatat melemah 0,06 poin atau 0,05 persen dibanding minggu terakhir September 2017. Pelemahan terbesar tercatat di Provinsi Jawa Timur, yaitu 1,30 poin atau melemah 1,09 persen.
3. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap mata uang yen Jepang pada minggu terakhir September 2017 tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp112,50 per yen Jepang, sedangkan level terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp120,18 per yen Jepang. Sementara pada minggu terakhir Oktober 2017, level tertinggi tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp112,50 per yen Jepang, sedangkan level terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp120,53 per yen Jepang.

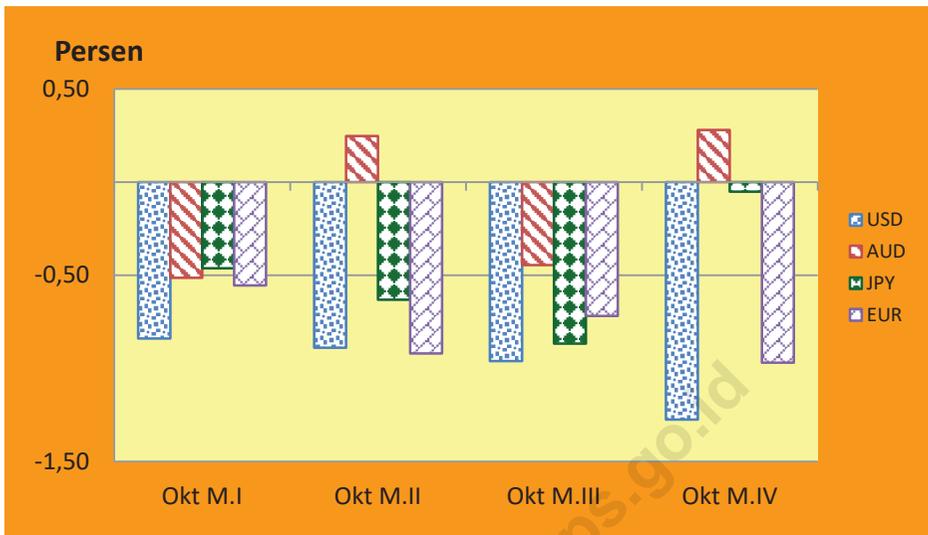
**Rupiah terdepresiasi 0,06 poin atau 0,05 persen terhadap yen Jepang pada Oktober 2017. Depresiasi terbesar terjadi di**

#### D. Euro (EUR)

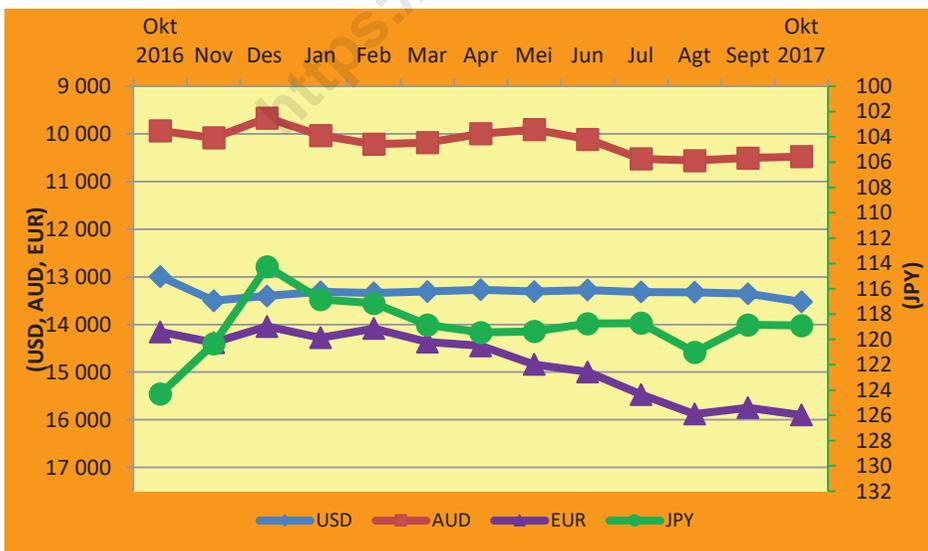
1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap euro pada Oktober 2017 cenderung terdepresiasi dibanding minggu terakhir September 2017. Secara rata-rata nasional, rupiah terdepresiasi sebesar 87,32 poin pada minggu pertama Oktober 2017 atau melemah sebesar 0,55 persen dan kembali terdepresiasi sebesar 152,44 poin pada minggu terakhir Oktober 2017 atau melemah sebesar 0,97 persen dibanding minggu terakhir September 2017.
2. Pada minggu pertama Oktober 2017, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi terbesar di Provinsi Aceh yang mencapai 160,00 poin atau melemah sebesar 1,03 persen. Pada minggu terakhir Oktober 2017, depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 284,38 poin atau melemah sebesar 1,83 persen.
3. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap euro tercatat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp15.925,00 per euro pada minggu terakhir September 2017 dan di Provinsi Riau sebesar Rp16.000,00 per euro pada minggu terakhir Oktober 2017. Sementara itu, level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap euro (kurs tengah) pada minggu terakhir September 2017 terjadi di Provinsi Papua, yaitu Rp15.415,25 per euro dan pada minggu terakhir Oktober 2017 juga terjadi di Provinsi Papua, yaitu Rp15.383,00 per euro.

**Rupiah terdepresiasi 152,44 poin atau 0,97 persen terhadap euro pada Oktober 2017. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Sumatera Barat.**

**Grafik 13.1**  
**Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR**  
 (Oktober 2017 dibanding September 2017 M.V)



**Grafik 13.2**  
**Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR**  
 (Minggu Terakhir)





14

PREVALENSI  
KEKERASAN  
TERHADAP  
PEREMPUAN DI  
INDONESIA

# XIV. PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

## A. Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Usia 15–64 Tahun oleh Pasangan dan Selain Pasangan

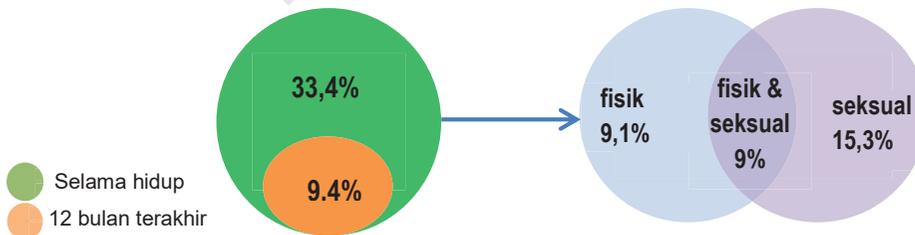
Pelaku kekerasan dalam SPHPN dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pasangan (suami, pasangan hidup bersama, dan pasangan seksual tinggal terpisah), dan selain pasangan (orang tua, mertua, kakek, paman, sepupu, tetangga, teman, guru, orang tak dikenal, dll).

Kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan dialami oleh 33,4 persen (1 dari 3) perempuan usia 15–64 tahun dalam periode selama hidupnya, dan sekitar 9,4 persen (1 dari 10) perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (Grafik 15.1).

**1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam periode selama hidupnya**

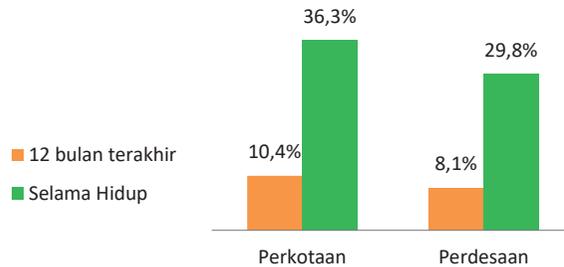
Grafik 14.1

Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Terhadap Perempuan Usia 15–64 tahun oleh Pasangan dan Selain Pasangan



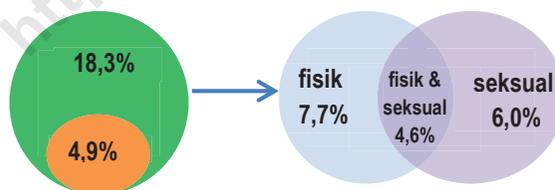
Bila dilihat daerah tempat tinggalnya, perempuan usia 15–64 tahun yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami kekerasan daripada perempuan usia 15–64 tahun yang tinggal di daerah pedesaan, baik dalam periode selama hidup maupun 12 bulan terakhir, yaitu 36,3 persen di perkotaan dan 29,8 persen di pedesaan dalam periode selama hidup, serta 10,4 persen di perkotaan dan 8,1 persen di pedesaan dalam periode 12 bulan terakhir (Grafik 15.2).

**Grafik 14.2**  
**Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Daerah Tempat Tinggal**

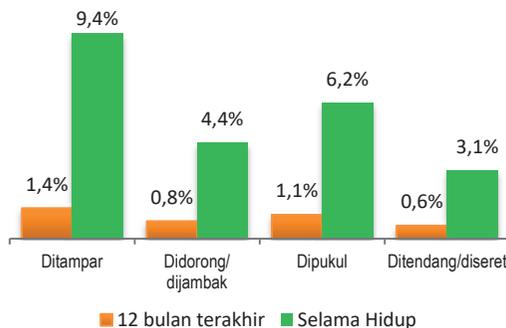


Prevalensi kekerasan fisik dan atau seksual yang dilakukan pasangan dan dialami oleh perempuan usia 15–64 tahun yang pernah/sedang menikah tercatat sebesar 18,3 persen dalam periode selama hidupnya, dan sebesar 4,9 persen dalam periode 12 bulan terakhir (Grafik 15.3). Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilakukan oleh suami/pasangan pada istrinya/pasangan perempuan. Jika dilihat jenisnya, tindakan kekerasan fisik yang paling banyak dilakukan suami/pasangan adalah menampar (9,4 persen), memukul (6,2 persen), mendorong/menjambak rambut (4,4 persen), menendang dan menghajar (3,1 persen) (Grafik 15.4).

**Grafik 14.3**  
**Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual oleh Pasangan**



**Grafik 14.4**  
**Prevalensi Kekerasan Fisik oleh Pasangan Menurut Jenis Tindakan**

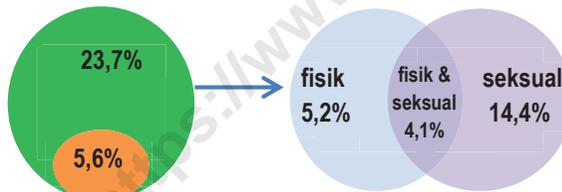


Sementara prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh selain/bukan pasangan tercatat sebesar 23,7 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15–64 tahun dalam periode selama hidupnya, dan sebesar 5,6 persen perempuan usia 15–64 tahun mengalami dalam 12

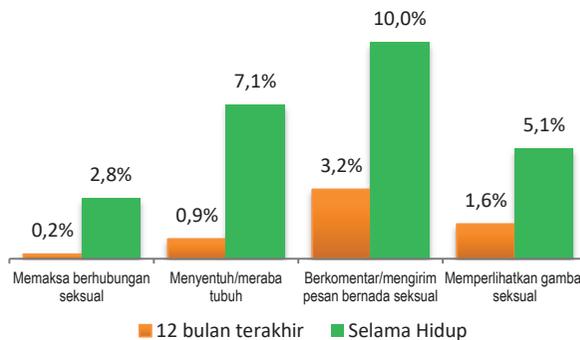
**1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan dalam periode selama hidupnya**

bulan terakhir (Grafik 15.5). Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilakukan selain/bukan pasangan. Jenis kekerasan seksual yang paling banyak dilakukan oleh selain/bukan pasangan adalah berkomentar/mengirim pesan bernada seksual (10,0 persen), menyentuh/meraba tubuh (7,1 persen), pelaku memperlihatkan gambar seksual (5,1 persen), dan memaksa berhubungan seksual (2,8 persen) (Grafik 15.6).

**Grafik 14.5**  
Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual oleh Selain Pasangan



**Grafik 14.6**  
Prevalensi Kekerasan Seksual oleh Selain Pasangan Menurut Jenis Tindakan



## B. Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Latar Belakang Pendidikan dan Status Pekerjaan

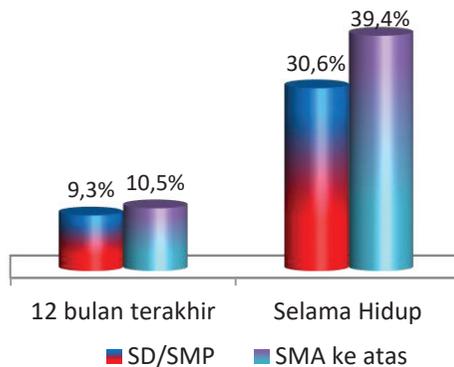
Kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih rentan dialami perempuan berpendidikan tinggi (SMA ke atas). Sekitar 4 dari 10 (39,4 persen) perempuan berpendidikan tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya. Sedangkan pada perempuan berpendidikan rendah

**Kekerasan fisik dan/atau seksual lebih banyak dialami perempuan usia 15–64 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas dan status pekerjaan tidak bekerja**

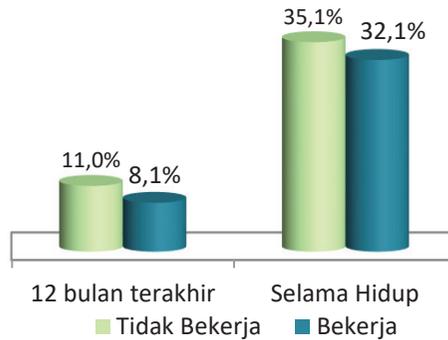
(SD dan SMP) angka prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidup lebih rendah yaitu 30,6 persen (3 dari 10). Demikian juga pada periode 12 bulan terakhir perempuan usia 15–64 tahun dengan latar belakang pendidikan tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dengan tingkat prevalensi yang lebih tinggi (10,5 persen) daripada perempuan usia 15–64 tahun dengan latar belakang pendidikan rendah (9,3 persen) (Grafik 15.7).

Bila dilihat dari status pekerjaan, angka prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual pada perempuan yang tidak bekerja lebih tinggi dibandingkan pada perempuan yang bekerja, baik pada periode selama hidup maupun 12 bulan terakhir. Sekitar 35,1 persen perempuan yang tidak bekerja mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya, sedangkan pada perempuan yang bekerja prevalensi kekerasannya sekitar 32,1 persen (Grafik 15.8).

**Grafik 14.7**  
Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Pendidikan



**Grafik 14.8**  
Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual Menurut Status Pekerjaan

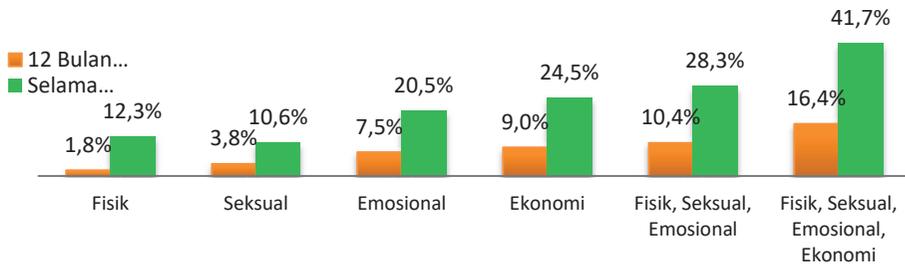


**C. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Usia 15–64 Tahun Pernah/Sedang Menikah yang dilakukan oleh Pasangan**

Selain jenis kekerasan fisik dan seksual, pada perempuan usia 15–64 tahun yang pernah/sedang menikah dicakup juga dua kekerasan lainnya yaitu kekerasan emosional (psikis), dan kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh pasangan/suami. Sekitar 1 dari 4 (24,5 persen) perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan ekonomi dari pasangannya selama hidupnya. Sementara 1 dari 5 (20,5 persen) perempuan yang pernah/sedang menikah mengalami kekerasan emosional/psikis dari pasangannya selama hidupnya

Sekitar 2 dari 5 (41,7 persen) perempuan usia 15–64 tahun yang pernah/sedang menikah mengalami sedikitnya 1 dari 4 jenis kekerasan (kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi) selama hidupnya, sedangkan sekitar 1 dari 6 (16,4 persen) perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, sekitar 1 dari 4 (28,3 persen) perempuan yang pernah/sedang menikah pernah mengalami sedikitnya 1 dari 3 jenis kekerasan (fisik, seksual, emosional) selama hidupnya dan sekitar 1 dari 10 (10,4 persen) perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (Grafik 15.9).

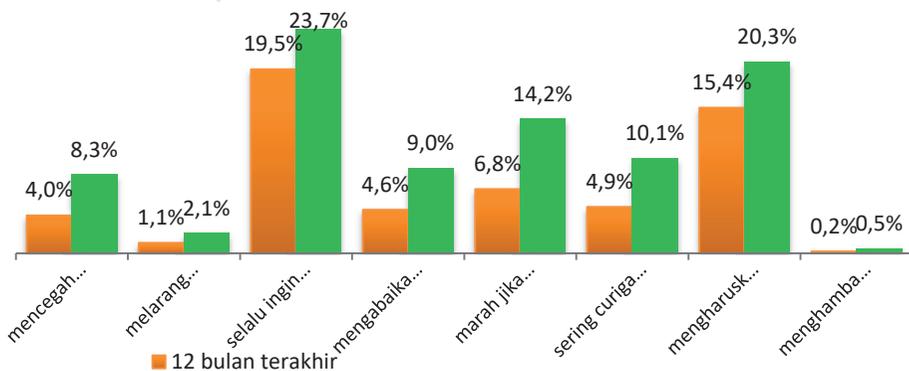
**Grafik 14.9**  
Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Pernah/Sedang Menikah yang Dilakukan oleh Pasangan



#### D. Pembatasan Aktivitas oleh Pasangan

Selain kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi, pada perempuan 15–64 tahun yang pernah/sedang menikah dicakup juga pembatasan aktivitas yang dilakukan pasangan/suaminya. Jenis tindakan pembatasan aktivitas yang dilakukan suami/pasangan terhadap istri/pasangan perempuan seperti mencegah bertemu dengan teman, melarang berhubungan dengan keluarga, selalu ingin tahu keberadaannya setiap saat, mengabaikan atau mengacuhkan, marah jika berbicara dengan lelaki lain, sering curiga tidak setia, mengharuskan meminta ijin sebelum periksa kesehatan/berobat, dan menghambat untuk beribadah. Grafik 10 menyajikan prevalensi pembatasan aktivitas oleh pasangan.

**Grafik 14.10**  
Prevalensi Pembatasan Aktivitas oleh Pasangan







15

KETENAGAKERJAAN  
AGUSTUS 2017

# XV. KETENAGAKERJAAN AGUSTUS 2017

## A. Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2017

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2017 sebesar 5,50 persen turun 0,11 poin dibanding TPT Agustus 2016 (5,61 persen).

**Jumlah penganggur Agustus 2017 sebanyak 7,04 juta orang**

**Tabel 15.1**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2015–2017**  
**(juta orang)**

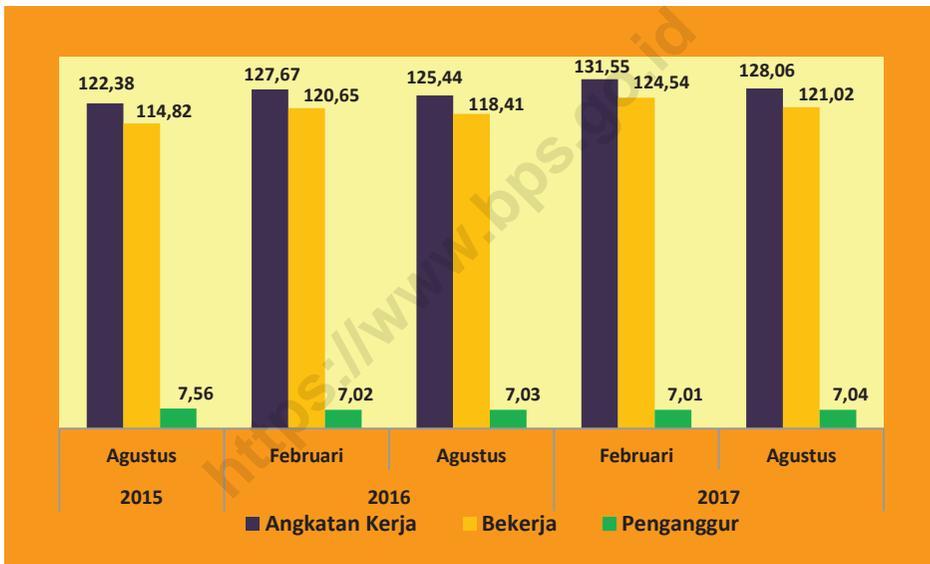
Jenis kegiatan	2015	2016		2017	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja	122,38	127,67	125,44	131,55	128,06
Bekerja	114,82	120,65	118,41	124,54	121,02
Penganggur	7,56	7,02	7,03	7,01	7,04
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,76	68,06	66,34	69,02	66,67
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,18	5,50	5,61	5,33	5,50
4. Pekerja tidak penuh	34,31	36,33	32,23	37,54	33,82
Setengah penganggur	9,74	10,46	8,97	9,49	9,14
Pekerja Paruh waktu	24,57	25,87	23,26	28,05	24,68
Bekerja di bawah 15 jam per minggu	6,46	8,54	6,74	9,99	8,33

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia pada Agustus 2017 sebesar 66,67 persen meningkat sebesar 0,33 persen poin jika dibandingkan dengan TPAK Agustus 2016.
3. Jumlah pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) pada Agustus 2017 sebanyak 33,82 juta orang (27,95 persen), naik sebanyak 1,59 juta orang dibanding Agustus 2016.
4. Penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Agustus 2017 sebanyak 8,33 juta orang (6,88 persen), naik sebanyak 1,59 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2016.
5. Pada Agustus 2017 terdapat 9,14 juta orang (7,55 persen) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

## B. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

1. Angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2017 sebanyak 128,06 juta orang, bertambah sebanyak 2,62 juta orang dibanding Agustus 2016.
2. Pada Agustus 2017, Jumlah penduduk bekerja sebanyak 121,02 juta orang, bertambah 2,61 juta orang jika dibanding Agustus 2016.
3. Jumlah penganggur mencapai 7,04 juta orang pada Agustus 2017, naik sebanyak 10 ribu orang dibanding setahun yang lalu.

**Grafik 15.1**  
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur  
2015–2017 (juta orang)



## C. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

1. Struktur lapangan pekerjaan hingga Agustus 2017 tidak mengalami perubahan. Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Masyarakat/Perorangan, dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Dalam setahun terakhir (Agustus 2016–Agustus 2017), sektor-sektor yang mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja terutama Sektor Perdagangan sebanyak 1,48 juta orang (5,55 persen), Sektor Industri sebanyak 1,47 juta orang (9,46 persen), dan Sektor Jasa Masyarakat/perorangan sebanyak 1,02 juta orang (5,24 persen). Sementara Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan mengalami penurunan tenaga kerja masing-masing sebanyak 1,84 juta orang (4,87 persen) dan 90 ribu orang (6,08 persen).

**Tabel 15.2**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama**  
**2015–2017 (juta orang)**

Lapangan Pekerjaan Utama (1)	2015	2016		2017	
	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)	Februari (5)	Agustus (6)
1. Pertanian	37,75	38,29	37,77	39,68	35,93
2. Pertambangan dan Penggalian	1,32	1,32	1,48	1,37	1,39
3. Industri	15,25	15,97	15,54	16,57	17,01
4. Listrik, Gas dan Air	0,29	0,40	0,35	0,42	0,39
5. Konstruksi	8,21	7,71	7,98	7,16	8,14
6. Perdagangan	25,68	28,50	26,69	29,11	28,17
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5,11	5,19	5,61	5,69	5,76
8. Keuangan	3,27	3,48	3,53	3,59	3,75
9. Jasa Kemasyarakatan/Perorangan	17,94	19,79	19,46	20,95	20,48
<b>Jumlah</b>	<b>114,82</b>	<b>120,65</b>	<b>118,41</b>	<b>124,54</b>	<b>121,02</b>

#### D. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

1. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, kegiatan formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk kegiatan informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2017 sebanyak 52,00 juta orang (42,97 persen) penduduk bekerja pada kegiatan formal dan 69,02 juta orang (57,03 persen) bekerja pada kegiatan informal.
2. Dalam setahun terakhir (Agustus 2016–Agustus 2017), penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar berkurang 430 ribu orang, sementara penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai bertambah sebanyak 2,22 juta orang. Keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sekitar 1,79 juta orang dan persentase pekerja formal naik dari 42,40 persen pada Agustus 2016 menjadi 42,97 persen pada Agustus 2017.
3. Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Agustus 2016–Agustus 2017), jumlah pekerja informal bertambah sebanyak 820 ribu orang, tetapi persentase pekerja informal berkurang dari 57,60 persen pada Agustus 2016 menjadi 57,03 persen pada Agustus 2017. Pekerja informal yang tidak mengalami kenaikan adalah mereka yang berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga/tak dibayar.

**Tabel 15.3**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama**  
**2015–2017 (juta orang)**

Status Pekerjaan Utama	2015		2016		2017	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Berusaha sendiri	19,53	20,39	20,01	21,85	23,15	
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	18,19	21,00	19,45	21,28	18,02	
3. Berusaha dibantu buruh tetap	4,07	4,03	4,38	4,45	3,95	
4. Buruh/karyawan/pegawai	44,43	46,30	45,83	47,42	48,05	
5. Pekerja bebas di pertanian	5,09	5,24	5,50	5,36	5,85	
6. Pekerja bebas di nonpertanian	7,45	7,00	6,97	6,02	7,16	
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	16,06	16,69	16,27	18,16	14,84	
<b>Jumlah</b>	<b>114,82</b>	<b>120,65</b>	<b>118,41</b>	<b>124,54</b>	<b>121,02</b>	

#### E. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2017 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah sebanyak 50,98 juta orang (42,13 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,72 juta orang (17,95 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 14,60 juta orang, mencakup 3,28 juta orang (2,71 persen) berpendidikan Diploma dan 11,32 juta orang (9,35 persen) berpendidikan Universitas.

**Tabel 15.4**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut**  
**Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2015–2017**  
**(juta orang)**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2015		2016		2017	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. SD ke bawah	50,83	52,43	49,97	52,59	50,98	
2. Sekolah Menengah Pertama	20,70	21,48	21,36	22,62	21,72	
3. Sekolah Menengah Atas	19,81	20,71	20,41	20,52	21,13	
4. Sekolah Menengah Kejuruan	10,84	12,34	12,17	13,54	12,59	
5. Diploma I/II/III	3,08	3,20	3,41	3,68	3,28	
6. Universitas	9,56	10,49	11,09	11,59	11,32	
<b>Jumlah</b>	<b>114,82</b>	<b>120,65</b>	<b>118,41</b>	<b>124,54</b>	<b>121,02</b>	

2. Dalam setahun terakhir, jumlah penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 14,50 juta orang pada Agustus 2016 menjadi 14,60 juta orang pada Agustus 2017, akan tetapi secara persentase menurun dari 12,25 persen (Agustus 2016) menjadi 12,06 persen (Agustus 2017).

#### F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan

1. Jumlah penganggur pada Agustus 2017 mencapai 7,04 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,61 persen pada Agustus 2016 menjadi 5,50 persen pada Agustus 2017.
2. Pada Agustus 2017, TPT Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 11,41 persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 8,29 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,62 persen.
3. Jika dibandingkan keadaan Agustus 2016, TPT yang mengalami peningkatan yaitu pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III, Universitas, dan SMK, masing-masing sebesar 0,84 poin, 0,31 poin, dan 0,30 poin.

**Tabel 15.5**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas**  
**Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2015–2017**  
**(persen)**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2015		2016		2017	
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. SD ke bawah	2,74	3,44	2,88	3,54	2,62	
2. Sekolah Menengah Pertama	6,22	5,76	5,71	5,36	5,54	
3. Sekolah Menengah Atas	10,32	6,95	8,72	7,03	8,29	
4. Sekolah Menengah Kejuruan	12,65	9,84	11,11	9,27	11,41	
5. Diploma I/II/III	7,54	7,22	6,04	6,35	6,88	
6. Universitas	6,40	6,22	4,87	4,98	5,18	
<b>Jumlah</b>	<b>6,18</b>	<b>5,50</b>	<b>5,61</b>	<b>5,33</b>	<b>5,50</b>	

#### G. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi

1. Pada Agustus 2017, TPT tertinggi terjadi di Provinsi Maluku dan Provinsi Banten masing-masing sebesar 9,29 persen dan 9,28 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi DI Yogyakarta masing-masing sebesar 1,48 persen dan 3,02 persen.
2. Dibanding Agustus 2016, TPT menurut provinsi yang penurunannya terbesar terjadi di Provinsi Riau dengan tingkat penurunan sebesar 1,21 persen poin, sedangkan yang mengalami peningkatan terbesar terjadi di Provinsi Maluku dengan peningkatan sebesar 2,24 persen poin.

**Tabel 15.6**  
**Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi 2016–2017**

Provinsi	2016		2017			
	Agustus		Februari		Agustus	
	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	170,9	7,57	172,1	7,39	150,3	6,57
Sumatera Utara	371,7	5,84	430,2	6,41	377,3	5,60
Sumatera Barat	125,9	5,09	151,9	5,80	138,7	5,58
Riau	222,0	7,43	180,2	5,76	184,6	6,22
Jambi	67,7	4,00	65,7	3,67	66,8	3,87
Sumatera Selatan	180,2	4,31	161,2	3,80	181,1	4,39
Bengkulu	32,9	3,30	29,0	2,81	36,3	3,74
Lampung	190,3	4,62	189,1	4,43	176,3	4,33
Kep. Bangka Belitung	18,3	2,60	32,5	4,46	26,4	3,78
Kepulauan Riau	71,6	7,69	67,8	6,44	69,2	7,16
DKI Jakarta	317,0	6,12	292,7	5,36	346,9	7,14
Jawa Barat	1 873,9	8,89	1 922,0	8,49	1 839,4	8,22
Jawa Tengah	801,3	4,63	755,5	4,15	823,9	4,57
DI Yogyakarta	57,0	2,72	60,1	2,84	64,0	3,02
Jawa Timur	839,3	4,21	855,7	4,10	838,5	4,00
Banten	498,6	8,92	462,3	7,75	519,6	9,28
Bali	46,5	1,89	31,6	1,28	36,1	1,48
Nusa Tenggara Barat	97,0	3,94	97,2	3,86	79,4	3,32
Nusa Tenggara Timur	76,6	3,25	80,2	3,21	78,5	3,27
Kalimantan Barat	100,9	4,23	105,7	4,22	105,1	4,36
Kalimantan Tengah	63,2	4,82	42,9	3,13	54,0	4,23
Kalimantan Selatan	113,3	5,45	75,9	3,53	99,0	4,77
Kalimantan Timur	136,7	7,95	143,6	8,55	114,3	6,91
Kalimantan Utara	15,1	5,23	16,8	5,17	18,3	5,54
Sulawesi Utara	73,2	6,18	77,1	6,12	80,5	7,18
Sulawesi Tengah	49,7	3,29	46,3	2,97	54,4	3,81
Sulawesi Selatan	186,3	4,80	190,4	4,77	213,7	5,61
Sulawesi Tenggara	34,1	2,72	39,6	3,14	39,6	3,30
Gorontalo	15,5	2,76	21,5	3,65	23,5	4,28
Sulawesi Barat	21,5	3,33	19,1	2,98	19,7	3,21
Maluku	52,4	7,05	59,7	7,77	65,7	9,29
Maluku Utara	21,0	4,01	26,8	4,82	27,5	5,33
Papua Barat	32,5	7,46	33,2	7,52	28,0	6,49
Papua	57,7	3,35	69,5	3,96	63,8	3,62
<b>Indonesia</b>	<b>7 031,8</b>	<b>5,61</b>	<b>7 005,3</b>	<b>5,33</b>	<b>7 040,3</b>	<b>5,50</b>





16

KEMISKINAN DAN  
KETIMPANGAN  
PENGELUARAN  
MARET 2017

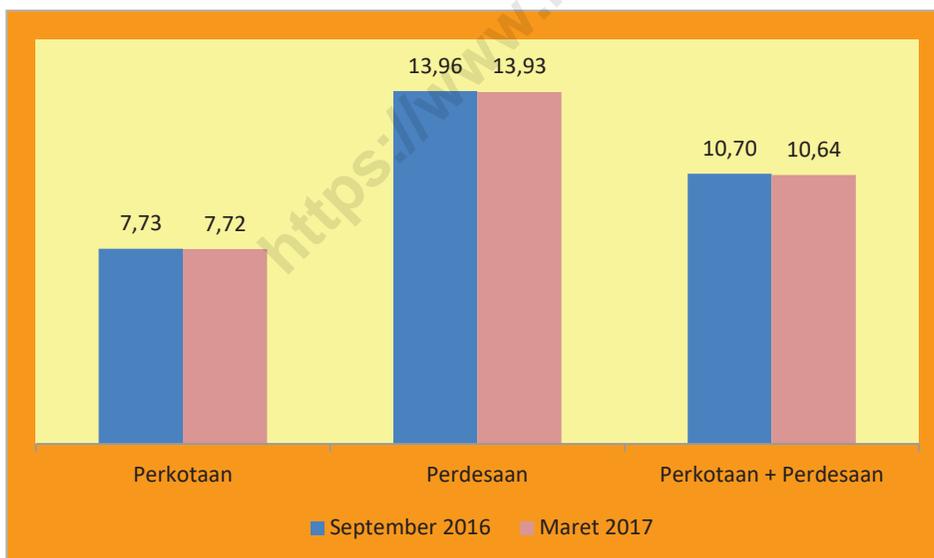
# XVI. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN MARET 2017

## A. Perkembangan Kemiskinan September 2016–Maret 2017

1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), naik 6,90 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang sebanyak 27,76 juta orang (10,70 persen). Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 16.1. dan Tabel 16.1.

**Jumlah penduduk miskin pada Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang**

**Grafik 16.1**  
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah September 2016–Maret 2017



2. Pada periode September 2016–Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 188,19 ribu orang, sebaliknya daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 181,29 ribu orang.

3. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada Maret 2017, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebanyak 61,56 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada September 2016 sebesar 62,24 persen.

**Tabel 16.1**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Menurut Daerah, September 2016–Maret 2017**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan (GKM)	Bukan Makanan (GKBM)	Total (GK)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perkotaan</b>					
September 2016	259 886	112 228	372 114	10,49	7,73
Maret 2017	270 856	114 765	385 621	10,67	7,72
<b>Perdesaan</b>					
September 2016	270 038	80 382	350 420	17,28	13,96
Maret 2017	278 278	83 218	361 496	17,10	13,93
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>					
September 2016	264 941	97 050	361 990	27,76	10,70
Maret 2017	274 544	99 933	374 478	27,77	10,64

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan Pengeluaran (Susenas KP) September 2016 dan Maret 2017

Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode September 2016–Maret 2017 antara lain adalah:

- Selama periode September 2016–Maret 2017 terjadi inflasi umum sebesar 2,24 persen. Sementara inflasi di periode Maret 2016–Maret 2017 sebesar 3,61 persen.
- Upah nominal harian buruh tani pada Maret 2017 naik sebesar 2,57 persen dibanding September 2016 (dari Rp48.235,- menjadi Rp49.473,-). Sementara itu, upah riil buruh tani per hari pada Maret 2017 naik sebesar 0,16 persen dibanding September 2016, yaitu dari Rp37.259,- menjadi Rp37.318,-.
- Upah nominal harian buruh bangunan pada Maret 2017 naik sebesar 1,51 persen dibanding September 2016, yaitu dari Rp82.480,- menjadi Rp83.724,-. Sementara itu, upah riil buruh bangunan per hari pada Maret 2017 turun sebesar 0,72 persen dibanding September 2016, yaitu dari Rp65.768,- menjadi Rp65.297,-.
- Pada periode September 2016–Maret 2017, secara nasional harga eceran beras, daging ayam ras, daging sapi, gula pasir, tepung terigu, dan telur ayam ras mengalami penurunan. Rata-rata harga beras mengalami penurunan sebesar 0,11 persen, yaitu dari Rp13.140,- per kg pada September 2016 menjadi Rp13.125,- per

kg pada Maret 2017. Harga per kg daging ayam ras turun sebesar 3,98 persen (dari Rp38.830,- per kg pada September 2016 menjadi Rp37.285,- per kg pada Maret 2017). Daging sapi turun sebesar 0,30 persen (dari Rp107.576,- per kg pada September 2016 menjadi Rp107.251,- per kg pada Maret 2017). Sementara itu, harga per kg gula pasir, tepung terigu, dan telur ayam ras mengalami penurunan harga masing-masing sebesar 5,06 persen, 0,70 persen, dan 3,60 persen. Turunnya beberapa komoditi pokok tersebut selain menekan laju kenaikan GK juga sangat membantu daya beli masyarakat.

- e. Pada awal tahun 2017, terjadi hambatan dalam distribusi beras sejahtera (rastra). Hal ini diduga menghambat penurunan kemiskinan.

## B. Perubahan Garis Kemiskinan September 2016–Maret 2017

- Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode September 2016–Maret 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,45 persen, yaitu dari Rp361.990,- per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp374.478,- per kapita per bulan pada Maret 2017. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap GK sangat dominan, yaitu mencapai 73,31 persen pada bulan Maret 2017. Dibedakan menurut wilayah, sumbangan GKM terhadap GK di perkotaan adalah 70,24 persen, sementara di perdesaan 76,98 persen.

**Tabel 16.2**  
**Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap**  
**Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) Menurut Daerah, Maret 2017**

Jenis komoditi	Perkotaan	Jenis komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Makanan:</b>	<b>70,24</b>	<b>Makanan:</b>	<b>76,98</b>
Beras	20,11	Beras	26,46
Rokok kretek filter	11,79	Rokok kretek filter	11,53
Telur ayam ras	3,69	Telur ayam ras	3,13
Daging ayam ras	3,61	Daging ayam ras	2,23
Mie instan	2,59	Mie instan	2,31
Gula pasir	2,27	Gula pasir	3,04
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,74	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,68
Tempe	1,67	Tempe	1,51
Bawang merah	1,67	Bawang merah	1,95
Tahu	1,59	Tahu	1,36

Jenis komoditi	Perkotaan	Jenis komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Cabe rawit	1,59	Cabe rawit	2,12
Roti	1,53	Roti	1,67
Lainnya	16,39	Lainnya	17,97
<b>Bukan Makanan:</b>	<b>29,76</b>	<b>Bukan Makanan:</b>	<b>23,03</b>
Perumahan	9,01	Perumahan	7,30
Bensin	3,84	Bensin	2,80
Listrik	3,26	Listrik	1,66
Pendidikan	2,41	Pendidikan	1,45
Angkutan	1,57	Angkutan	0,79
Perlengkapan mandi	1,13	Perlengkapan mandi	0,96
Kesehatan	0,90	Kesehatan	0,86
Lainnya	7,63	Lainnya	7,21

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan Pengeluaran (Susenas KP) Maret 2017

- Pada Maret 2017, komoditi makanan yang memberikan sumbangan besar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras memberi sumbangan sebesar 20,11 persen di perkotaan dan 26,46 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap GK (11,79 persen di perkotaan dan 11,53 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,69 persen di perkotaan dan 3,13 persen di perdesaan), daging ayam ras (3,61 persen di perkotaan dan 2,23 di perdesaan), mie instan (2,59 persen di perkotaan dan 2,31 di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, angkutan, perlengkapan mandi, dan kesehatan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 16.2.

### C. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

- Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
- Pada periode September 2016–Maret 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2016 adalah 1,74 dan pada Maret 2017 mengalami

kenaikan menjadi 1,83, demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,44 menjadi 0,48 pada periode yang sama.

**Tabel 16.3**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )**  
**di Indonesia Menurut Daerah, September 2016–Maret 2017**

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (<math>P_1</math>)</b>			
September 2016	1,21	2,32	1,74
Maret 2017	1,24	2,49	1,83
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (<math>P_2</math>)</b>			
September 2016	0,29	0,59	0,44
Maret 2017	0,31	0,67	0,48

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan Pengeluaran (Susenas KP) September 2016 dan Maret 2017

3. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2017, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) untuk daerah perkotaan sebesar 1,24 sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,49. Pada periode yang sama nilai Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) untuk perkotaan adalah 0,31 sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 0,67.

**Tabel 16.4**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2017**

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	P <sub>0</sub>	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	P <sub>0</sub>	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	P <sub>0</sub>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	458 011	172,35	11,11	425 730	700,26	19,37	435 454	872,61	16,89
Sumatera Utara	425 693	710,71	9,80	396 033	743,17	10,66	411 345	1 453,87	10,22
Sumatera Barat	472 614	113,01	5,14	439 220	251,50	8,10	453 612	364,51	6,87
Riau	463 248	178,58	6,79	450 581	336,03	8,43	456 493	514,62	7,78
Jambi	457 818	120,62	10,94	360 519	165,93	6,92	389 596	286,55	8,19
Sumatera Selatan	410 532	375,25	12,45	347 520	711,67	13,62	370 060	1 086,92	13,19
Bengkulu	477 801	100,84	16,33	438 342	216,14	16,51	450 648	316,98	16,45
Lampung	420 227	228,32	10,03	371 894	903,41	15,08	384 882	1 131,73	13,69
Bangka Belitung	571 229	21,47	2,89	602 942	52,61	7,74	587 530	74,09	5,20
Kepulauan Riau	516 418	91,49	5,20	492 642	33,88	10,92	513 237	125,37	6,06
DKI Jakarta	536 546	389,69	3,77	-	-	-	536 546	389,69	3,77
Jawa Barat	345 151	2 588,62	7,52	341 682	1 579,82	11,75	344 427	4 168,44	8,71
Jawa Tengah	334 522	1 889,09	11,21	331 673	2 561,63	14,77	333 224	4 450,72	13,01
DI Yogyakarta	385 308	309,03	11,72	348 061	179,51	16,11	374 009	488,53	13,02
Jawa Timur	344 164	1 574,12	7,87	339 537	3 042,89	15,82	342 092	4 617,01	11,77
Banten	396 608	391,03	4,52	363 588	284,00	7,61	386 753	675,04	5,45
Bali	370 615	96,89	3,58	345 342	83,23	5,45	361 387	180,13	4,25
Nusa Tenggara Barat	355 250	387,04	17,53	337 333	406,73	14,89	345 341	793,78	16,07
Nusa Tenggara Timur	406 973	117,40	10,32	326 320	1 033,39	25,03	343 396	1 150,79	21,85
Kalimantan Barat	379 187	76,16	4,88	375 621	311,27	9,28	377 219	387,43	7,88
Kalimantan Tengah	373 219	42,84	4,59	414 002	96,32	5,81	401 537	139,16	5,37
Kalimantan selatan	412 452	62,60	3,46	393 097	131,32	5,73	402 424	193,92	4,73
Kalimantan Timur	555 880	94,05	3,99	532 719	126,12	10,50	548 094	220,17	6,19
Kalimantan Utara	562 937	18,02	4,59	537 246	31,45	10,78	552 040	49,47	7,22
Sulawesi Utara	329 330	59,82	5,14	336 837	139,05	10,77	333 510	198,88	8,10
Sulawesi Tengah	416 453	77,98	10,16	383 097	339,88	15,54	391 763	417,87	14,14
Sulawesi Selatan	296 644	153,56	4,48	274 434	659,51	12,59	283 461	813,07	9,38
Sulawesi Tenggara	297 829	62,75	7,56	279 739	268,96	15,29	285 609	331,71	12,81
Gorontalo	298 492	23,87	5,64	295 057	181,50	24,52	296 730	205,37	17,65
Sulawesi Barat	295 178	23,50	8,53	304 849	126,26	12,03	302 852	149,76	11,30
Maluku	437 644	51,24	7,24	435 787	269,27	26,14	436 865	320,51	18,45
Maluku Utara	410 412	12,00	3,61	383 784	64,47	7,40	390 998	76,47	6,35
Papua Barat	515 849	20,70	5,83	488 564	207,69	37,44	499 778	228,38	25,10
Papua	498 368	39,17	4,46	441 287	858,51	36,20	457 541	897,69	27,62
<b>Indonesia</b>	<b>385 621</b>	<b>10 673,83</b>	<b>7,72</b>	<b>361 496</b>	<b>17 097,39</b>	<b>13,93</b>	<b>374 478</b>	<b>27 771,22</b>	<b>10,64</b>

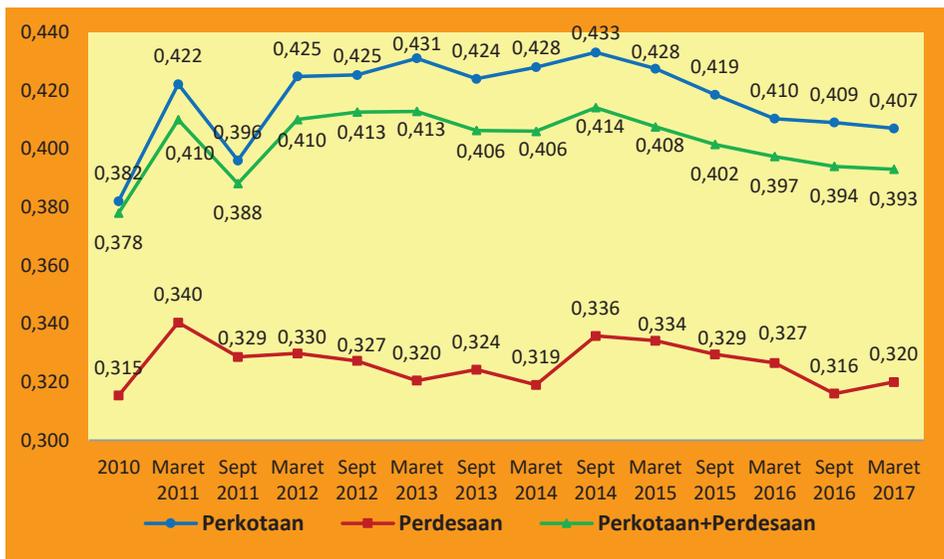
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan Pengeluaran (Susenas KP) Maret 2017

**D. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Maret 2016–Maret 2017**

1. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh.
2. Tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah *Gini Ratio* serta persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal juga dengan ukuran Bank Dunia.
3. Pada Maret 2017, *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,393, menurun dibandingkan dengan *Gini Ratio* pada September 2016 yang sebesar 0,394 dan menurun pula jika dibandingkan *Gini Ratio* pada Maret 2016 yang sebesar 0,397. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Indonesia mengalami perbaikan selama periode Maret 2016–Maret 2017.
4. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 0,407, turun dibanding *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,409 dan turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,410. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 0,320, naik dibanding *Gini Ratio* September 2016 yang sebesar 0,316 dan turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,327.

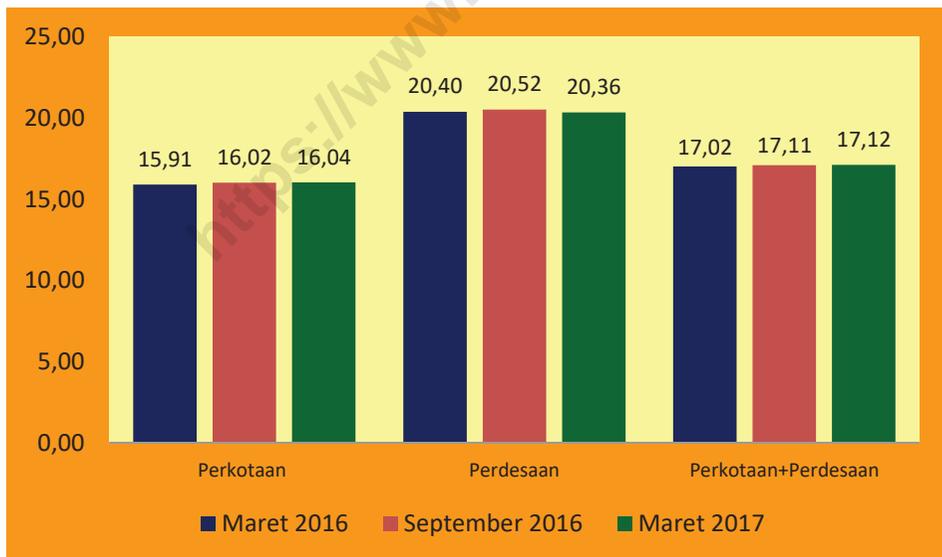
***Gini Ratio* pada pada Maret 2017 sebesar 0,393**

**Grafik 16.2**  
Perkembangan *Gini Ratio*, 2010–Maret 2017



5. Pada Maret 2017, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,12 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan Maret 2017 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 17,11 persen dan naik pula jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 17,02 persen.
6. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, ukuran ketimpangan Bank Dunia menunjukkan hal yang sama dengan ukuran *Gini Ratio*, yaitu ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Pada Maret 2017, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 16,04 persen yang berarti termasuk pada kategori ketimpangan sedang, sementara di perdesaan sebesar 20,36 persen yang berarti pada kategori ketimpangan rendah. Nilai ketimpangan pada Maret 2017 mengalami perbaikan dibanding periode Maret 2016 dan September 2016, kecuali di perdesaan.

**Grafik 16.3**  
**Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah**  
**Maret 2016–Maret 2017**



7. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode September 2016–Maret 2017 diantaranya adalah:
  - a. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah meningkat lebih cepat dibanding penduduk kelompok 20 persen teratas. Secara nasional, kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita September 2016–Maret 2017 untuk kelompok

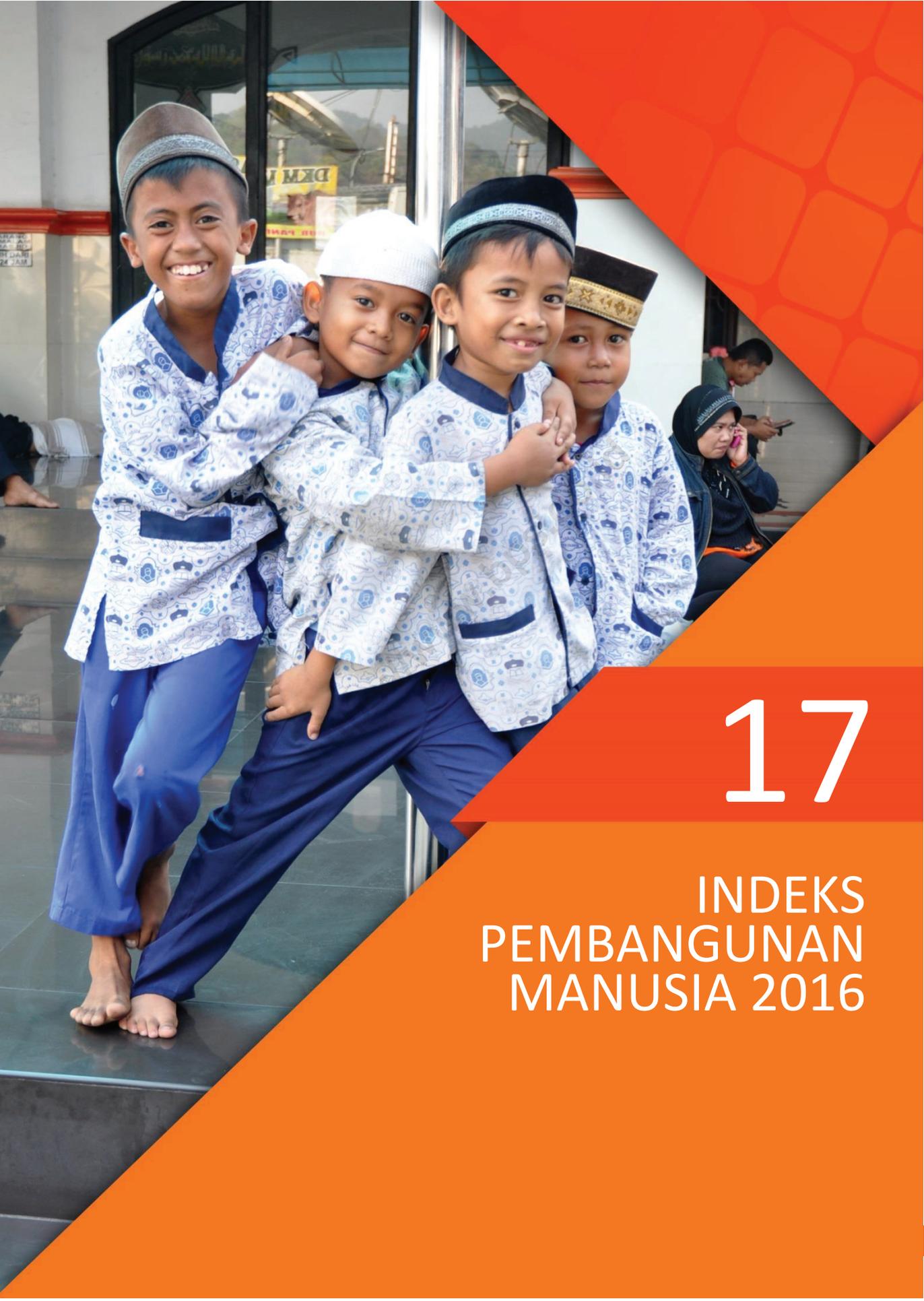
- penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas berturut-turut adalah sebesar 1,89 persen; 2,19 persen; dan 1,44 persen. Dibandingkan kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan periode Maret 2016–September 2016, kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan cenderung melambat. Hal inilah yang menyebabkan Gini Ratio relatif tetap dari poin 0,394 pada September 2016 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
- b. Di perkotaan, kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah juga meningkat lebih cepat dibanding penduduk kelompok 20 persen teratas. Kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita September 2016–Maret 2017 untuk kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas berturut-turut adalah sebesar 0,69 persen; 1,21 persen; dan 0,06 persen.
  - c. Dibandingkan kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan periode Maret 2016–September 2016, kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan diperkotaan mengalami perlambatan di semua kelompok penduduk. Salah satunya disebabkan oleh upah riil buruh bangunan yang menurun pada kelompok menengah ke bawah, sementara di kelompok atas terjadi penurunan konsumsi barang mewah.
  - d. Di perdesaan, terjadi pola yang berbeda. Kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah meningkat lebih lambat dibanding penduduk kelompok 20 persen teratas. Kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita September 2016–Maret 2017 untuk kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas berturut-turut adalah sebesar 2,27 persen; 2,62 persen; dan 3,92 persen. Lebih tingginya kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan pada kelompok 20 persen teratas dibandingkan kelompok di bawahnya diduga diakibatkan oleh adanya surplus yang diperoleh dari peningkatan produksi pertanian cenderung dinikmati oleh kelompok 20 persen teratas.
8. Berdasarkan provinsi, nilai *Gini Ratio* Maret 2017 tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sebesar 0,432, sementara yang terendah adalah Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,282. Terdapat sembilan provinsi dengan nilai *Gini Ratio* di atas angka nasional, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,432), Gorontalo (0,430), DKI Jakarta (0,413), Sulawesi Selatan (0,407), Jawa Barat (0,403), Papua (0,397), Jawa Timur (0,396), Sulawesi Utara (0,396), dan Sulawesi Tenggara (0,394).

**Tabel 16.5**  
**Gini Ratio menurut Provinsi, Maret 2016–Maret 2017**

Provinsi	Maret 2016			September 2016			Maret 2017		
	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11 Aceh	0,343	0,288	0,333	0,362	0,296	0,341	0,347	0,293	0,329
12 Sumatera Utara	0,334	0,282	0,319	0,333	0,270	0,312	0,342	0,256	0,315
13 Sumatera Barat	0,353	0,288	0,331	0,323	0,267	0,312	0,336	0,276	0,318
14 Riau	0,369	0,309	0,347	0,368	0,309	0,347	0,353	0,289	0,325
15 Jambi	0,377	0,313	0,349	0,403	0,292	0,346	0,384	0,284	0,335
16 Sumatera Selatan	0,373	0,293	0,348	0,397	0,306	0,362	0,384	0,317	0,361
17 Bengkulu	0,385	0,302	0,357	0,405	0,296	0,354	0,390	0,305	0,351
18 Lampung	0,393	0,330	0,364	0,384	0,311	0,358	0,364	0,297	0,334
19 Bangka Belitung	0,289	0,240	0,275	0,318	0,239	0,288	0,303	0,219	0,282
21 Kepulauan Riau	0,351	0,284	0,354	0,346	0,264	0,352	0,327	0,279	0,334
31 DKI Jakarta	0,411	-	0,411	0,397	-	0,397	0,413	-	0,413
32 Jawa Barat	0,423	0,317	0,413	0,412	0,310	0,402	0,412	0,324	0,403
33 Jawa Tengah	0,381	0,323	0,366	0,382	0,313	0,357	0,386	0,327	0,365
34 DI Yogyakarta	0,423	0,334	0,420	0,423	0,343	0,425	0,435	0,340	0,432
35 Jawa Timur	0,423	0,333	0,402	0,433	0,313	0,402	0,418	0,326	0,396
36 Banten	0,402	0,264	0,394	0,399	0,248	0,392	0,381	0,267	0,382
51 Bali	0,369	0,329	0,366	0,378	0,335	0,374	0,382	0,325	0,384
52 Nusa Tenggara Barat	0,391	0,317	0,359	0,410	0,306	0,365	0,413	0,314	0,371
53 Nusa Tenggara Timur	0,330	0,281	0,336	0,344	0,317	0,362	0,362	0,311	0,359
61 Kalimantan Barat	0,373	0,296	0,341	0,361	0,275	0,331	0,356	0,274	0,327
62 Kalimantan Tengah	0,359	0,296	0,330	0,364	0,326	0,347	0,370	0,310	0,343
63 Kalimantan Selatan	0,346	0,297	0,332	0,363	0,298	0,351	0,365	0,292	0,347
64 Kalimantan Timur	0,314	0,288	0,315	0,314	0,313	0,328	0,323	0,298	0,330
65 Kalimantan Utara	0,304	0,268	0,300	0,308	0,280	0,305	0,298	0,268	0,308
71 Sulawesi Utara	0,386	0,355	0,386	0,388	0,350	0,379	0,405	0,355	0,396
72 Sulawesi Tengah	0,387	0,320	0,362	0,372	0,308	0,347	0,379	0,309	0,355
73 Sulawesi Selatan	0,422	0,367	0,426	0,409	0,340	0,400	0,410	0,348	0,407
74 Sulawesi Tenggara	0,407	0,367	0,402	0,395	0,352	0,388	0,403	0,358	0,394
75 Gorontalo	0,414	0,392	0,419	0,402	0,397	0,410	0,417	0,403	0,430
76 Sulawesi Barat	0,393	0,347	0,364	0,441	0,341	0,371	0,424	0,323	0,354
81 Maluku	0,327	0,313	0,348	0,338	0,303	0,344	0,333	0,312	0,343
82 Maluku Utara	0,295	0,249	0,286	0,326	0,251	0,309	0,322	0,265	0,317
91 Papua Barat	0,326	0,376	0,373	0,357	0,394	0,401	0,349	0,392	0,390
94 Papua	0,312	0,383	0,390	0,318	0,392	0,399	0,322	0,395	0,397
<b>Indonesia</b>	<b>0,410</b>	<b>0,327</b>	<b>0,397</b>	<b>0,409</b>	<b>0,316</b>	<b>0,394</b>	<b>0,407</b>	<b>0,320</b>	<b>0,393</b>

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi dan Pengeluaran (Susenas KP) Maret 2016–2017





17

INDEKS  
PEMBANGUNAN  
MANUSIA 2016

## XVII. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2016

### A. PERKEMBANGAN IPM

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan standar hidup layak digambarkan melalui pengeluaran per kapita.
2. Badan Pusat Statistik mengukur IPM di Indonesia menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010).

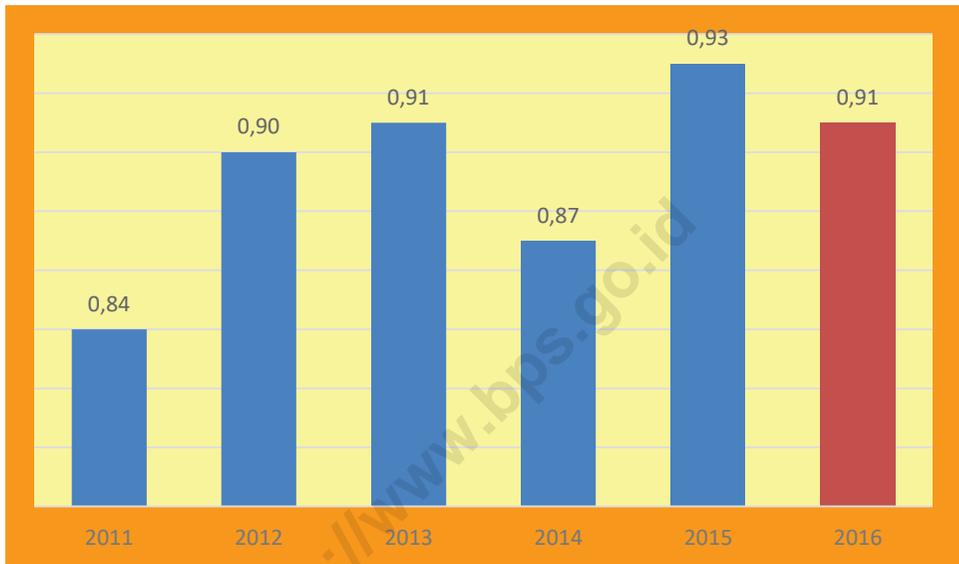
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai kategori Tinggi pada tahun 2016 (70,18)**

**Grafik 17.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010–2016**



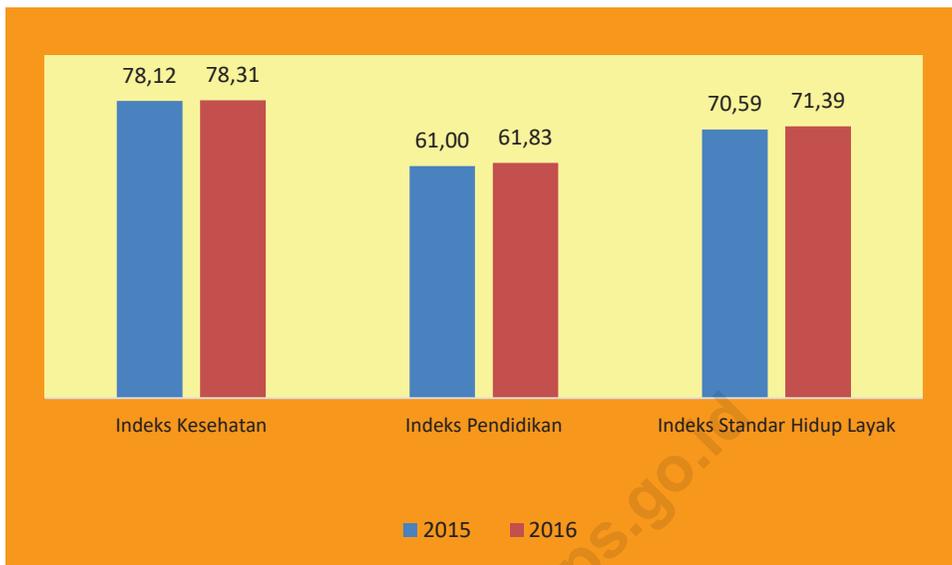
3. Pada tahun 2016, angka IPM Indonesia sebesar 70,18. IPM Indonesia tumbuh 0,91 persen atau bertambah 0,63 poin dibandingkan IPM tahun 2015. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,93 persen.

**Grafik 17.2**  
Tren Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2011–2016



4. Pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2016 dipicu oleh peningkatan semua indeks komponen pembentuknya. Indeks pendidikan merupakan komponen IPM yang mengalami akselerasi paling tinggi. Pada tahun 2016, indeks pendidikan mencapai 61,83 atau meningkat 0,83 poin dari tahun sebelumnya. Demikian halnya dengan indeks standar hidup layak yang mengalami peningkatan 0,80 poin. Sementara itu, indeks kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan.
5. Peningkatan indeks pendidikan utamanya disebabkan oleh capaian indeks harapan lama sekolah yang meningkat cukup tinggi sebesar 0,96 poin dari tahun 2015. Hal ini menggambarkan semakin tingginya peluang penduduk 7 tahun ke atas dalam mengakses pendidikan dan progresivitas angka harapan lama sekolah tersebut untuk mencapai target maksimum yang diharapkan.

**Grafik 17.3**  
**Indeks Komponen IPM Indonesia, 2015–2016**



6. Pada periode 2015–2016, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Provinsi Papua (1,40 persen), Provinsi Sumatera Selatan (1,16 persen), dan Provinsi Jawa Timur (1,15 persen). Sebaliknya, pada periode yang sama, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling lambat, yaitu Provinsi Riau (0,51 persen), Provinsi Kalimantan Barat (0,44 persen), dan Provinsi Kepulauan Riau (0,33 persen). Berdasarkan status pencapaiannya, 12 provinsi berada pada kategori pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, sejak 2010 hingga 2016, masih terdapat satu provinsi yang berstatus pembangunan manusia “rendah” atau kurang dari 60, yaitu Provinsi Papua.

**Tabel 17.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2015–2016**

Provinsi	Angka Harapan Hidup saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp 000)		IPM		
									Capaian	Pertumbuhan(%)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015–2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	69,50	69,51	13,73	13,89	8,77	8,86	8 533	8 768	69,45	70,00	0,79
Sumatera Utara	68,29	68,33	12,82	13,00	9,03	9,12	9 563	9 744	69,51	70,00	0,70
Sumatera Barat	68,66	68,73	13,60	13,79	8,42	8,59	9 804	10 126	69,98	70,73	1,07
Riau	70,93	70,97	12,74	12,86	8,49	8,59	10 364	10 465	70,84	71,20	0,51
Jambi	70,56	70,71	12,57	12,72	7,96	8,07	9 446	9 795	68,89	69,62	1,06
Sumatera Selatan	69,14	69,16	12,02	12,23	7,77	7,83	9 474	9 935	67,46	68,24	1,16
Bengkulu	68,50	68,56	13,18	13,38	8,29	8,37	9 123	9 492	68,59	69,33	1,08
Lampung	69,90	69,94	12,25	12,35	7,56	7,63	8 729	9 156	66,95	67,65	1,05
Kep. Bangka Belitung	69,88	69,92	11,60	11,71	7,46	7,62	11 781	11 960	69,05	69,55	0,72
Kepulauan Riau	69,41	69,45	12,60	12,66	9,65	9,67	13 177	13 359	73,75	73,99	0,33
DKI Jakarta	72,43	72,49	12,59	12,73	10,70	10,88	17 075	17 468	78,99	79,60	0,77
Jawa Barat	72,41	72,44	12,15	12,30	7,86	7,95	9 778	10 035	69,50	70,05	0,79
Jawa Tengah	73,96	74,02	12,38	12,45	7,03	7,15	9 930	10 153	69,49	69,98	0,71
DI Yogyakarta	74,68	74,71	15,03	15,23	9,00	9,12	12 684	13 229	77,59	78,38	1,02
Jawa Timur	70,68	70,74	12,66	12,98	7,14	7,23	10 383	10 715	68,95	69,74	1,15
Banten	69,43	69,46	12,35	12,70	8,27	8,37	11 261	11 469	70,27	70,96	0,98
Bali	71,35	71,41	12,97	13,04	8,26	8,36	13 078	13 279	73,27	73,65	0,52
Nusa Tenggara Barat	65,38	65,48	13,04	13,16	6,71	6,79	9 241	9 575	65,19	65,81	0,95
Nusa Tenggara Timur	65,96	66,04	12,84	12,97	6,93	7,02	7 003	7 122	62,67	63,13	0,73
Kalimantan Barat	69,87	69,90	12,25	12,37	6,93	6,98	8 279	8 348	65,59	65,88	0,44
Kalimantan Tengah	69,54	69,57	12,22	12,33	8,03	8,13	9 809	10 155	68,53	69,13	0,88
Kalimantan Selatan	67,80	67,92	12,21	12,29	7,76	7,89	10 891	11 307	68,38	69,05	0,98
Kalimantan Timur	73,65	73,68	13,18	13,35	9,15	9,24	11 229	11 355	74,17	74,59	0,57
Kalimantan Utara	72,16	72,43	12,54	12,59	8,36	8,49	8 354	8 434	68,76	69,20	0,64
Sulawesi Utara	70,99	71,02	12,43	12,55	8,88	8,96	9 729	10 148	70,39	71,05	0,94
Sulawesi Tengah	67,26	67,31	12,72	12,92	7,97	8,12	8 768	9 034	66,76	67,47	1,06
Sulawesi Selatan	69,80	69,82	12,99	13,16	7,64	7,75	9 992	10 281	69,15	69,76	0,88
Sulawesi Tenggara	70,44	70,46	13,07	13,24	8,18	8,32	8 697	8 871	68,75	69,31	0,81
Gorontalo	67,12	67,13	12,70	12,88	7,05	7,12	9 035	9 175	65,86	66,29	0,65
Sulawesi Barat	64,22	64,31	12,22	12,34	6,94	7,14	8 260	8 450	62,96	63,60	1,02
Maluku	65,31	65,35	13,56	13,73	9,16	9,27	8 026	8 215	67,05	67,60	0,82
Maluku Utara	67,44	67,51	13,10	13,45	8,37	8,52	7 423	7 545	65,91	66,63	1,09
Papua Barat	65,19	65,30	12,06	12,26	7,01	7,06	7 064	7 175	61,73	62,21	0,78
Papua	65,09	65,12	9,95	10,23	5,99	6,15	6 469	6 637	57,25	58,05	1,40
<b>Indonesia</b>	<b>70,78</b>	<b>70,90</b>	<b>12,55</b>	<b>12,72</b>	<b>7,84</b>	<b>7,95</b>	<b>10 150</b>	<b>10 420</b>	<b>69,55</b>	<b>70,18</b>	<b>0,91</b>



A large white banner is suspended from a building, featuring the KPK logo and the slogan 'PILIH YANG JUJUR'. The banner is set against a blue sky and a building facade. The right side of the image is overlaid with a large orange graphic containing the number 18 and the title of the report.

**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

**PILIH YANG  
JUJUR**

**18**

**INDEKS  
PERILAKU ANTI  
KORUPSI  
(IPAK) 2017**

# XVIII. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2017

## A. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2017

1. Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun mulai tahun 2012. Pada tahun 2017, SPAK dilakukan pada bulan Februari di 33 provinsi dengan sampel 10.000 rumah tangga. Analisis mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya untuk representasi level nasional.
2. SPAK ditujukan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).
3. IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia 2017 sebesar 3,71 dalam skala 0 sampai 5. Angka tersebut lebih tinggi (0,12 poin) dibandingkan dengan capaian 2015 yang besarnya 3,59. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang berarti bahwa budaya *zero tolerance* terhadap korupsi semakin melekat dan mewujud dalam perilaku masyarakat. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

**Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2017 sebesar 3,71 pada skala 0 sampai 5**

**Tabel 18.1**  
**Nilai IPAK Tahun 2012–2017**

Tahun	IPAK
(1)	(2)
2012	3,55
2013	3,63
2014	3,61
2015	3,59
2017	3,71

#### H. IPAK Berdasarkan Dimensi Utama

1. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama yakni pertama unsur persepsi yang berupa pendapat/penilaian terhadap kebiasaan perilaku koruptif di masyarakat, dan kedua adalah pengalaman (pengalaman perilaku koruptif).
2. Tabel 18.2 menunjukkan peningkatan Indeks Persepsi dari tahun 2015 ke 2017, yaitu dari 3,73 menjadi 3,81. Kemudian, pada periode yang sama Indeks Pengalaman juga mengalami peningkatan dari 3,39 menjadi 3,60. Peningkatan indeks pada dua dimensi ini memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka IPAK secara keseluruhan dari 3,59 menjadi 3,71.
3. Dari hasil pengukuran IPAK 2017, terlihat fenomena yang menarik untuk dicermati. Indeks Persepsi menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2012 ke 2017. Hal ini menggambarkan pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku korupsi semakin baik. Sebaliknya pada dimensi pengalaman terjadi perubahan dari pola tren yang menurun di tahun 2012–2015 menjadi meningkat untuk tahun 2017.

**Tabel 18.2**  
**Indeks Menurut Dimensi, 2012–2017**

<b>Dimensi</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Persepsi	3,54	3,66	3,71	3,73	3,81
Indeks Pengalaman	3,58	3,58	3,49	3,39	3,60
<b>IPAK Indonesia</b>	<b>3,55</b>	<b>3,63</b>	<b>3,61</b>	<b>3,59</b>	<b>3,71</b>

**I. IPAK Berdasarkan Karakteristik Demografi**

1. Sejak periode awal pengukuran (2012) IPAK masyarakat di wilayah perdesaan selalu lebih kecil dibanding IPAK masyarakat di wilayah perkotaan. IPAK 2017 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan relatif meningkat, yaitu sebesar 3,86, sedangkan IPAK 2017 di wilayah perdesaan sebesar 3,53, juga sedikit meningkat dibandingkan IPAK 2015.

**IPAK masyarakat di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi**

**Tabel 18.3**  
**IPAK Menurut Wilayah, 2012–2017**

Karakteristik Responden	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Klasifikasi Wilayah:</b>					
Perkotaan	3,66	3,71	3,71	3,71	3,86
Perdesaan	3,46	3,55	3,51	3,46	3,53

2. Secara konsisten (tahun 2012–2017) tampak bahwa semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka cenderung semakin anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi IPAK. IPAK 2017 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,58, SLTA sebesar 3,99 dan di atas SLTA sebesar 4,09.

**Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi IPAK**

**Tabel 18.4**  
**IPAK Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012–2017**

Karakteristik Responden	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pendidikan Tertinggi:</b>					
SLTP ke bawah	3,47	3,55	3,52	3,49	3,58
SLTA	3,78	3,82	3,85	3,80	3,99
SLTA ke atas	3,94	3,94	4,01	4,00	4,09

3. Gambaran pada tahun 2012–2017 menunjukkan IPAK penduduk dengan usia 40 hingga 60 tahun selalu menjadi yang tertinggi disusul IPAK penduduk kurang usia kurang dari 40 tahun. Pada tahun 2017, IPAK masyarakat usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,74, IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,71, sedangkan IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas sebesar 3,62. Dengan kata lain, IPAK penduduk usia lebih dari 60 tahun lebih rendah dibandingkan IPAK usia yang lebih muda.

**IPAK masyarakat usia 40-59 tahun lebih tinggi dibandingkan IPAK masyarakat usia kurang dari 40 tahun dan lebih dari 60 tahun**

**Tabel 18.5**  
**IPAK Menurut Umur, 2012–2017**

Karakteristik Responden	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Umur (Tahun):</b>					
Kurang dari 40	3,57	3,63	3,63	3,59	3,71
40 sampai 59	3,58	3,65	3,64	3,62	3,74
60 atau lebih	3,45	3,55	3,54	3,49	3,62

#### J. Indikator Tunggal IPAK 2017

Berikut ini adalah beberapa indikator yang digunakan dalam penyusunan IPAK 2017.

##### 1. Pendapat Terhadap Kebiasaan/Perilaku di Masyarakat

Persepsi terhadap kebiasaan/perilaku anti korupsi di masyarakat dikelompokkan dalam tiga lingkup yaitu lingkup keluarga, komunitas, dan publik.

**1.1 Lingkup Keluarga**

**Tabel 18.6**  
**Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Keluarga merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017**

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Istri yang menerima uang pemberian suami diluar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut	68,69	76,43	78,65	76,04	77,37
Seorang Pegawai Negeri bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi	72,95	76,16	78,11	79,05	75,58
Orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PEMILU/PILKADA demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak	80,15	82,70	86,07	85,64	87,09
Seseorang mengetahui saudaranya tanpa izin mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya	95,06	96,56	97,44	97,31	97,66

- Sekitar 77 persen masyarakat menyatakan kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut.
- Sekitar 76 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.
- Sekitar 87 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak.
- Sekitar 98 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang mengetahui saudaranya tanpa izin mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya.

## 1.2 Lingkup Komunitas

**Tabel 18.7**  
**Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Komunitas merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017**

<b>Kebiasaan/Perilaku</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Memberi Uang/Barang Kepada Tokoh Masyarakat Lainnya ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian)	30,77	36,30	37,76	36,32	50,86
Memberi Uang/Barang Kepada Tokoh Masyarakat Lainnya ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan	38,25	42,33	45,17	46,42	56,69
Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb)	52,97	57,49	60,57	60,37	56,30
Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan	65,24	68,40	71,12	72,56	68,41

1. Sekitar 51 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh masyarakat lainnya ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian).
2. Sekitar 57 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada tokoh masyarakat lainnya ketika menjelang hari raya keagamaan.
3. Sekitar 56 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada Ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian).
4. Sekitar 69 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada Ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan.

### 1.3 Lingkup Publik

**Tabel 18.8**  
**Persentase Masyarakat yang Menilai Beberapa Kebiasaan di Tingkat Publik merupakan Hal yang Tidak/Kurang Wajar, 2012–2017**

Kebiasaan/Perilaku	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan, seseorang menjamin keluarga/ saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta	53,39	61,10	67,20	68,39	65,91
Memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	81,38	84,28	87,21	87,51	88,71
Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP, KK)	55,09	57,20	58,34	62,28	65,72
Memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK	60,67	62,96	65,08	69,44	72,14
Pelanggar lalu lintas yang memberi uang damai kepada Polisi	67,58	70,99	73,80	77,20	78,45
Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah	66,95	71,80	71,57	74,76	73,89
Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar	64,45	69,69	70,95	73,32	70,17
Guru meminta uang/barang dari orangtua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor	83,16	87,93	89,00	89,49	89,15
Memberi uang/barang kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.	84,05	88,17	88,96	90,63	90,47
Membagikan uang/barang kepada calon pemilih	72,15	72,57	77,38	78,20	79,14
Mengharapkan pembagian uang/barang pada pelaksanaan PEMILU/PILKADA	72,90	72,69	76,90	77,61	78,51

- Sekitar 66 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri atau swasta demi mempererat hubungan kekeluargaan dan pertemanan.
- Sekitar 89 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku seseorang yang memberi uang/barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.
- Sekitar 66 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK).
- Sekitar 72 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM dan STNK.
- Sekitar 78 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang damai kepada polisi.
- Sekitar 74 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah.
- Sekitar 70 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku guru yang mendapatkan jaminan (jatah) agar anaknya diterima di sekolah tempatnya mengajar.
- Sekitar 89 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku guru yang meminta uang/barang ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor.
- Sekitar 90 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku memberi uang/barang kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.
- Sekitar 78-79 persen masyarakat menilai kurang wajar atau tidak wajar terhadap perilaku membagikan atau mengharapkan uang/barang pada pelaksanaan PILKADA/PEMILU.

## 2. Pengalaman Masyarakat

Pengalaman masyarakat dalam IPAK mencakup sepuluh layanan publik yakni Pengurus RT/RW, Kelurahan/Kecamatan, Kepolisian, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Layanan Kesehatan (Rumah Sakit Negeri), Sekolah Negeri, Pengadilan, Kantor Urusan Agama (KUA), Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), dan Pertanahan (BPN). Beberapa indikator yang mengalami perubahan relatif besar yaitu:

- Persentase masyarakat yang mengakses layanan publik sendiri dalam 12 bulan terakhir dan lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 76,05 persen pada tahun 2015 menjadi 80,94 persen pada tahun 2017.
- Persentase masyarakat yang mengakses layanan publik melalui perantara selama 12 bulan terakhir dan lima tahun terakhir mengalami penurunan dari 23,95 persen pada tahun 2015 menjadi 19,06 persen pada tahun 2017.
- Persentase masyarakat yang mengurus sendiri dan memberikan uang/barang melebihi ketentuan menurun dari 13,78 persen pada tahun 2015 menjadi 12,03 persen pada tahun 2017.
- Persentase masyarakat yang keberatan memberikan uang/barang melebihi ketentuan mengalami kenaikan dari 7,67 persen pada tahun 2015 menjadi 9,34 persen pada tahun 2017.

Berdasarkan pengukuran 2012–2017, terlihat sebagian besar masyarakat yang membayar melebihi ketentuan menyatakan melakukan perilaku tersebut karena tidak ada yang meminta (inisiatif sendiri) dan hal yang lumrah. Pada 2017 angkanya masing-masing sebesar 44,57 persen dan 19,56 persen.

**Tabel 18.9**  
**Cara Mengetahui harus Membayar Melebihi Ketentuan, 2012–2017**

Cara Mengetahui	2012	2013	2014	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Diminta Petugas	43,42	38,85	35,86	32,62	33,58
Diminta Pihak Ketiga	4,43	3,58	3,74	4,91	2,29
Hal yang Lumrah	30,93	27,96	29,57	32,12	19,56
Tidak Ada yang Meminta (Inisiatif Sendiri)	21,22	29,61	30,84	30,34	44,57

Berdasarkan pengukuran 2012–2017, sebagian besar masyarakat yang membayar melebihi ketentuan sebagian besar beralasan bahwa hal itu mereka lakukan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan karena ingin mempercepat proses pengurusan.

Pada 2017, masyarakat yang membayar melebihi ketentuan sebagian besar beralasan bahwa hal itu mereka lakukan sebagai bentuk ungkapan terima kasih (46,30 persen). Alasan lainnya adalah karena ingin mempercepat proses pengurusan (33,64 persen), ingin memperoleh pelayanan yang lebih baik (14,12 persen), hingga demi menjaga hubungan baik (7,91 persen).

**Tabel 18.10**  
**Alasan Masyarakat Membayar Melebihi Ketentuan, 2012–2017**

<b>Alasan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mempercepat Proses Pengurusan	46,88	47,21	41,78	43,53	31,64
Mendapatkan Pelayanan Lebih Baik	12,23	12,84	9,86	11,26	14,12
Demi Menjaga Hubungan Baik	4,93	5,36	8,47	9,52	7,93
Sebagai Tanda Terima Kasih	35,96	34,59	39,89	35,69	46,30

<https://www.bps.go.id>





19

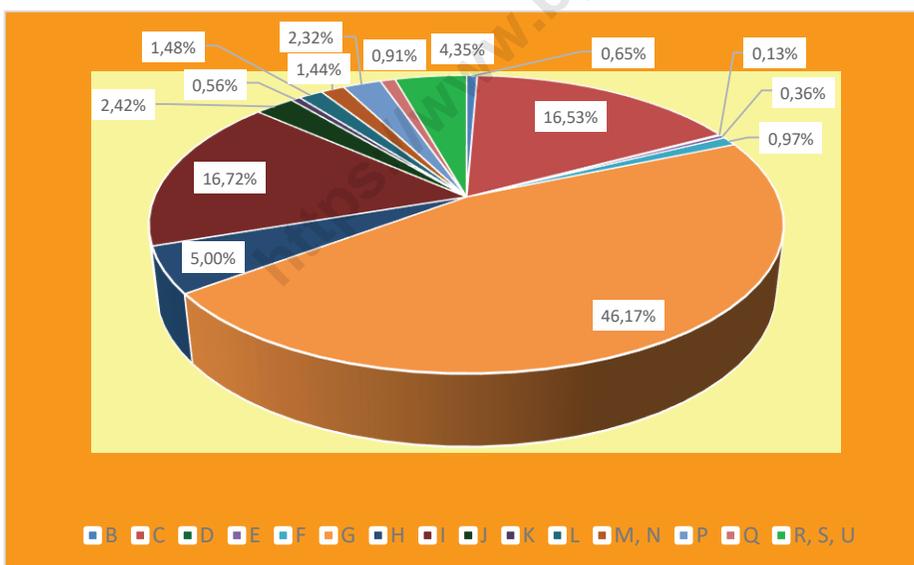
SENSUS  
EKONOMI  
2016

# XIX. SENSUS EKONOMI 2016

1. Hasil pendaftaran SE2016 tercatat sebanyak 26,71 juta usaha/perusahaan yang dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Bila dibedakan menurut skala usaha, 26,26 juta perusahaan (98,33 persen) berskala UMK dan 0,45 juta perusahaan (1,67 persen) berskala UMB. Dibandingkan dengan Sensus Ekonomi 2006 (SE06) jumlah usaha/perusahaan meningkat 17,51 persen dari 22,73 juta menjadi 26,71 juta.

**Hasil pendaftaran SE2016 tercatat 26,71 juta usaha/perusahaan, naik 17,51 persen dibanding SE2006 yang sebesar 22,73 juta usaha/perusahaan**

**Grafik 19.1**  
**Persentase Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2016**



2. Dilihat menurut lapangan usaha, usaha perdagangan besar dan eceran mencapai 12,3 juta usaha atau 46,17 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada, diikuti usaha penyedia akomodasi dan makan minum 16,72 pdan industri pengolahan 16,53 persen.
3. Sebaran usaha/perusahaan antarpulau secara umum menunjukkan 79,35 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatera dan Jawa). Sebanyak 16,2 juta usaha/perusahaan berlokasi di Pulau Jawa atau 60,74 persen terhadap

seluruh perusahaan di Indonesia, selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia (Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) dengan jumlah usaha/perusahaan terbanyak di Pulau Sulawesi (8,09 persen).

4. Hasil pendaftaran SE2016 menunjukkan bahwa distribusi tenaga kerja menurut kategori lapangan usaha didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 22,4 juta orang atau 31,81 persen dari tenaga kerja yang ada di Indonesia, kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,75 persen, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 11,97 persen, dan selebihnya sebesar 33,47 persen merupakan lapangan usaha lainnya.
5. Sebaran tenaga kerja antarkawasan dan antarpulau secara umum menunjukkan bahwa lebih dari 81 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Sebanyak 44,6 juta orang tenaga kerja berlokasi di Pulau Jawa atau 63,38 persen terhadap seluruh perusahaan di Indonesia, selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan jumlah tenaga kerja terbanyak ada di Pulau Sulawesi (6,82 persen).

**Tabel 19.1**  
**Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha**  
**dan Skala Usaha Tahun 2016**

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalian	170 150	2 532	172 682	0,65
C. Industri Pengolahan	4 373 821	42 468	4 416 289	16,53
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	30 639	3 294	33 933	0,13
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	92 391	2 439	94 830	0,36
F. Konstruksi	227 564	30 718	258 282	0,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	12 151 822	180 839	12 332 661	46,17
H. Pengangkutan dan pergudangan	1 302 162	32 123	1 334 285	5,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4 445 519	20 703	4 466 222	16,72
J. Informasi dan Komunikasi	630 448	15 250	645 698	2,42
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	94 205	56 200	150 405	0,56
L. Real Estat	386 795	7 483	394 278	1,48
M,N. Jasa Perusahaan	358 178	27 291	385 469	1,44
P. Pendidikan	607 283	12 664	619 947	2,32
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	239 236	4 680	243 916	0,91
R,S,U. Jasa Lainnya	1 153 436	8 668	1 162 104	4,35
<b>Jumlah</b>	<b>26 263 649</b>	<b>447</b> <b>352</b>	<b>26 711 001</b>	<b>100,00</b>
	<b>(98,33)</b>	<b>(1,67)</b>	<b>(100,00)</b>	

**Tabel 19.2**  
**Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha dan Pulau 2016**

Wilayah/Pulau	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Sumatera	4 897 457	74 276	4 971 733	18,61
Jawa	15 931 889	291 697	16 223 586	60,74
Bali dan Nusa Tenggara	1 495 526	22 088	1 517 614	5,68
Kalimantan	1 352 324	26 645	1 378 969	5,16
Sulawesi	2 134 579	25 110	2 159 689	8,09
Maluku dan Papua	451 874	7 536	459 410	1,72
<b>Jumlah</b>	<b>26 263 649</b>	<b>447 352</b>	<b>26 711 001</b>	<b>100,00</b>
	<b>(98,33)</b>	<b>(1,67)</b>	<b>(100,00)</b>	

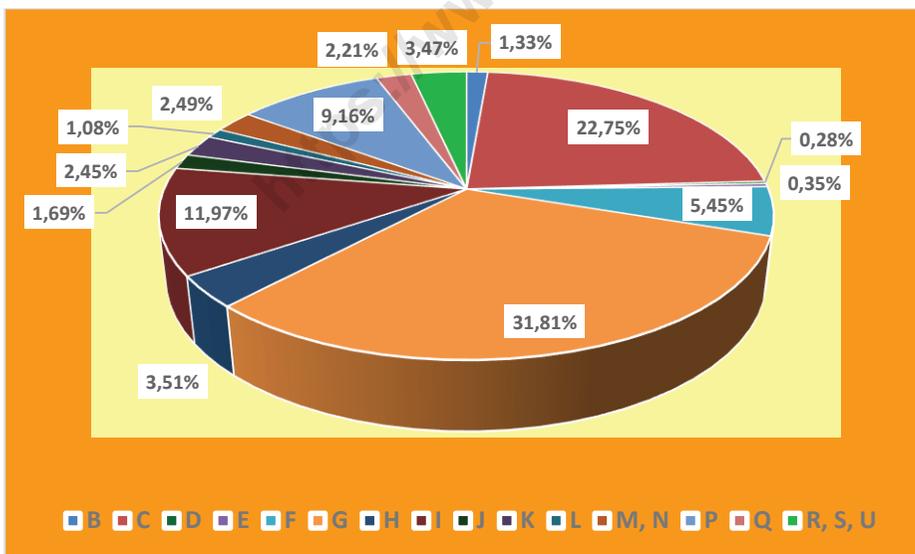
**Tabel 19.3**  
**Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha 2016**

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan penggalan	532 109	403 644	935 753	1,33
C. Industri Pengolahan	9 351 705	6 648 202	15 999 907	22,75
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	61 466	135 076	196 542	0,28
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	168 332	79 853	248 185	0,35
F. Konstruksi	2 041 813	1 790 619	3 832 432	5,45
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	20 009 990	2 359 409	22 369 399	31,81
H. Pengangkutan dan pergudangan	1 740 528	727 717	2 468 245	3,51
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7 804 667	612 937	8 417 604	11,97
J. Informasi dan Komunikasi	938 714	247 358	1 186 072	1,69
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	550 067	1 170 489	1 720 556	2,45
L. Real Estat	591 879	165 816	757 695	1,08
M,N. Jasa Perusahaan	935 307	815 973	1 751 280	2,49
P. Pendidikan	5 787 702	654 439	6 442 141	9,16
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	905 070	652 415	1 557 485	2,21
R,S,U. Jasa Lainnya	2 222 175	214 995	2 437 170	3,47
<b>Jumlah</b>	<b>53 641 524</b>	<b>16 678 942</b>	<b>70 320 466</b>	<b>100,00</b>
	<b>(76,28)</b>	<b>(23,72)</b>	<b>(100,00)</b>	

**Tabel 19.4**  
**Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Pulau 2016**

Wilayah/Pulau	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Sumatera	10 202 866	2 199 543	12 402 409	17,64
Jawa	32 356 833	12 215 111	44 571 944	63,38
Bali dan Nusa Tenggara	3 126 347	551 231	3 677 578	5,23
Kalimantan	2 771 636	872 216	3 643 852	5,18
Sulawesi	4 194 144	604 686	4 798 830	6,82
Maluku dan Papua	989 698	236 155	1 225 853	1,74
<b>Jumlah</b>	<b>53 641 524</b>	<b>16 678 942</b>	<b>70 320 466</b>	<b>100,00</b>
	<b>(76,28)</b>	<b>(23,72)</b>	<b>(100,00)</b>	

**Grafik 19.2**  
**Persentase Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha 2016**





20

KEPENDUDUKAN  
JUNI 2017

## XX. KEPENDUDUKAN JUNI 2017

1. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 261.890,9 ribu orang. Penduduk laki-laki sebanyak 131.579,2 ribu orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 130.311,7 ribu orang. Rasio Jenis Kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya di antara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

**Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 261.890,9 ribu orang**

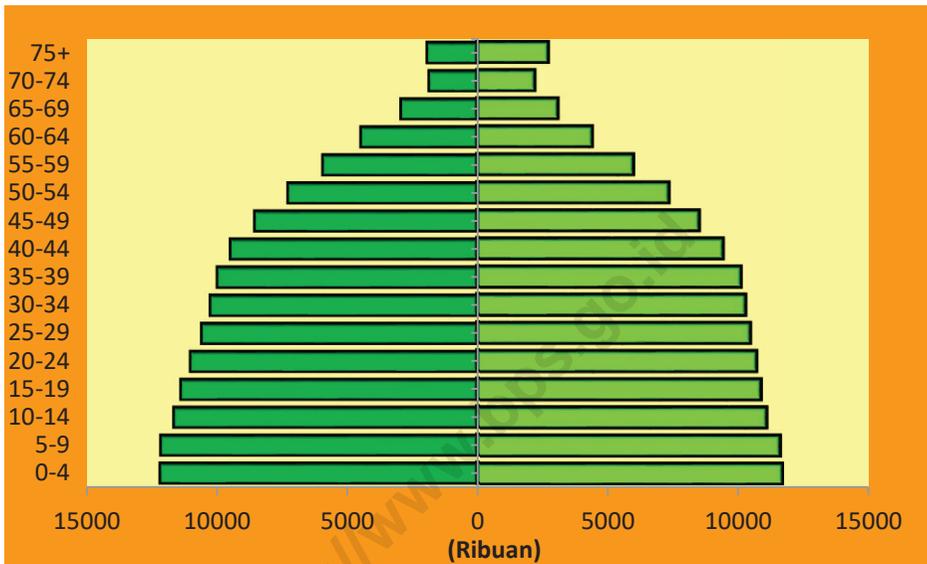
**Tabel 20.1**  
Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2017  
(ribu orang)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12 166,1	11 682,2	23 848,3
5-9	12 144,9	11 589,0	23 733,9
10-14	11 639,9	11 073,2	22 713,1
15-19	11 365,6	10 847,3	22 212,9
20-24	11 007,9	10 695,7	21 703,6
25-29	10 571,6	10 450,6	21 022,2
30-34	10 239,6	10 269,5	20 509,1
35-39	9 979,5	10 093,0	20 072,5
40-44	9 475,3	9 408,9	18 884,2
45-49	8 542,6	8 485,5	17 028,0
50-54	7 274,1	7 327,3	14 601,5
55-59	5 932,3	5 970,9	11 903,3
60-64	4 472,1	4 398,4	8 870,5
65-69	2 950,7	3 084,7	6 035,4
70-74	1 873,8	2 208,4	4 082,2
75+	1 943,2	2 726,9	4 670,1
<b>Total</b>	<b>131 579,2</b>	<b>130 311,7</b>	<b>261 890,9</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

2. Piramida Penduduk Indonesia tahun 2017 termasuk tipe expansive dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Grafik 20.1 menunjukkan piramida yang masih lebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah, sedangkan pada bagian atas meruncing.

**Grafik 20.1**  
**Piramida Penduduk Indonesia, 2017**



Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

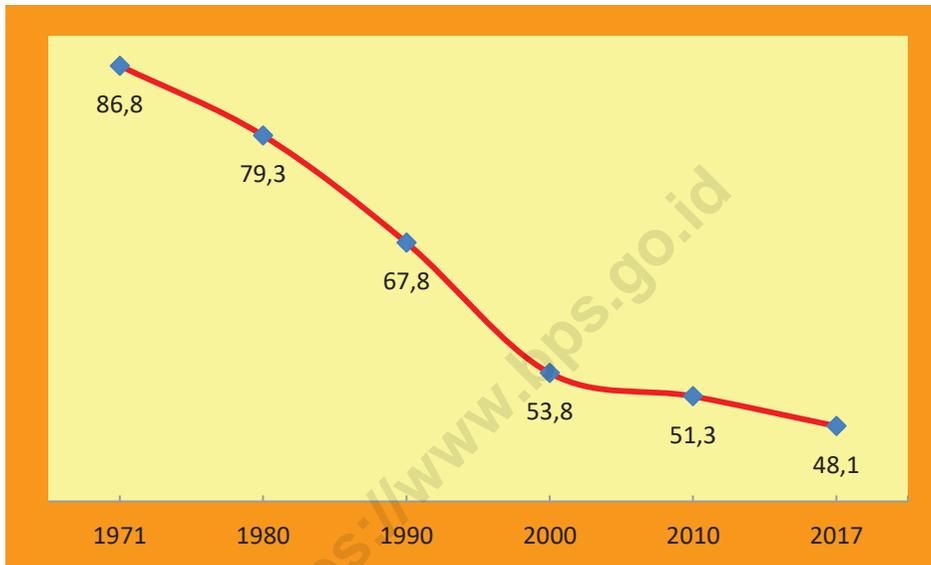
3. Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2017. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk usia nonproduktif (penduduk 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) terhadap

**Indonesia telah memasuki era bonus demografi, dengan rasio ketergantungan sebesar 48,1**

penduduk usia produktif (15–64 tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2017 sebesar 48,1. Angka ini mengandung makna bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia nonproduktif sekitar 48–49 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio ketergantungan penduduk Indonesia memiliki tren yang menurun (Grafik 5.2). Jika pada tahun 1971 rasio ketergantungan sebesar 86,8 maka pada tahun 2017 kondisinya semakin membaik. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki era bonus demografi sehingga kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Era bonus demografi akan mencapai puncaknya pada periode 2025–2030. Pulau dengan rasio

ketergantungan tertinggi adalah Bali dan Nusa Tenggara (54,6) dan yang terendah Pulau Jawa (45,7). Tiga provinsi dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (65,3), Sulawesi Tenggara (59,4), dan Maluku (58,8). Sedangkan tiga provinsi dengan rasio ketergantungan terendah adalah DKI Jakarta (40,7), Jawa Timur (43,8), dan Kalimantan Timur (44,4).

**Grafik 20.2**  
Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2017



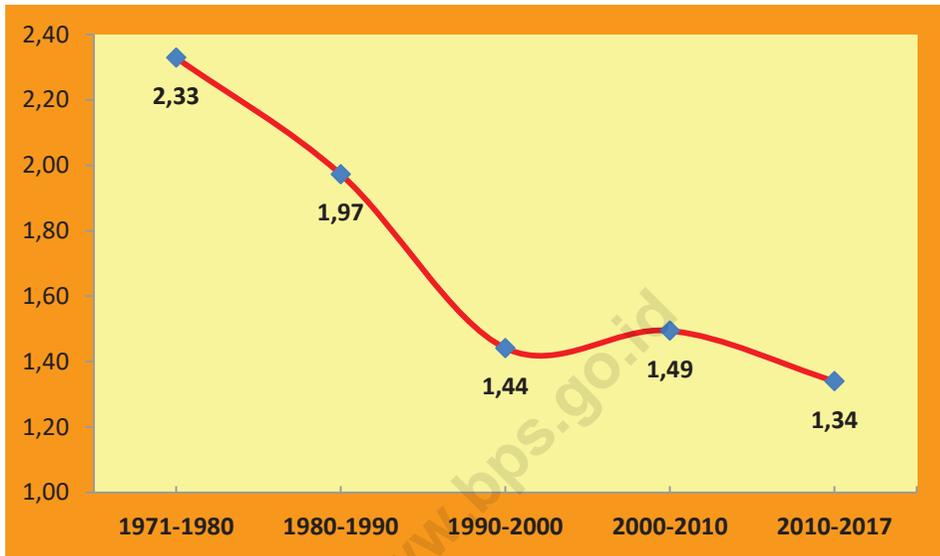
Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

4. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010–2017 sebesar 1,34 persen. Dibandingkan dengan periode 1971–1980 (2,33 persen), 1980–1990 (1,97 persen), 1990–2000 (1,44 persen), dan 2000–2010 (1,49 persen), maka laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010–2017 menunjukkan penurunan.
5. Pulau dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kalimantan, yaitu sebesar 2,01 persen. Lima pulau lainnya secara berurutan Maluku dan Papua (2,01 persen), Sumatera (1,63 persen), Bali dan Nusa Tenggara (1,42 persen), Sulawesi (1,40 persen) serta Jawa (1,12 persen). Menurut provinsi, tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Provinsi Kalimantan Utara (3,89 persen), Kepulauan Riau (3,01 persen), dan Papua Barat (2,59 persen). Tiga provinsi dengan laju

**Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010–2017 sebesar 1,34 persen**

pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Provinsi Jawa Timur (0,64 persen), Jawa Tengah (0,78 persen), dan DKI Jakarta (1,05 persen).

**Grafik 20.3**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971–2017**



Sumber : SP1971, SP1980, SP1990, SP2000, SP2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

6. Penduduk Indonesia sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56,6 persen. Kemudian, secara berturut-turut diikuti Pulau Sumatera (21,7 persen), Sulawesi (7,3 persen), Kalimantan (6,1 persen), Bali dan Nusa Tenggara (5,5 persen) serta Maluku dan Papua (2,7 persen). Menurut provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan proporsi penduduk terbesar, yaitu masing-masing 18,3 persen; 15,0 persen; dan 13,1 persen dari total penduduk Indonesia. Sebaliknya, tiga provinsi dengan proporsi penduduk terendah adalah Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Gorontalo, yaitu masing-masing 0,3 persen; 0,3 persen dan 0,4 persen.
 

**Sebagian besar penduduk Indonesia berdomisili di Pulau Jawa, yaitu 56,6**
7. Kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2017 sebesar 137 jiwa per km<sup>2</sup>. Jawa merupakan pulau yang terpadat penduduknya (1.145 per km<sup>2</sup>), kemudian secara berurutan Pulau Bali dan Nusa Tenggara (198 per km<sup>2</sup>), Sumatera (118 per km<sup>2</sup>), Sulawesi (102 per km<sup>2</sup>), Kalimantan (29 per km<sup>2</sup>), dan yang paling jarang penduduknya adalah Kepulauan Maluku dan Papua (14 per km<sup>2</sup>). Kepadatan

penduduk menurut provinsi, terpadat di DKI Jakarta (15.624 per km<sup>2</sup>), Jawa Barat (1.358 per km<sup>2</sup>), dan Banten (1.288 per km<sup>2</sup>). Sementara tiga provinsi yang terjarang penduduknya yaitu Kalimantan Utara (9 per km<sup>2</sup>), Papua Barat (9 per km<sup>2</sup>), dan Papua (10 per km<sup>2</sup>).

**Kepadatan penduduk  
Indonesia pada tahun 2017  
sebesar 137 jiwa per km<sup>2</sup>**

8. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua yaitu sebesar 107,5, sedangkan yang terendah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 97,8. Tiga provinsi dengan rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu Kalimantan Utara (113,0), Papua Barat (111,2), dan Papua (111,1), sedangkan yang terendah Nusa Tenggara Barat (94,3), Sulawesi Selatan (95,5), dan Jawa Timur (97,5).

9. Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, lansia di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 9,0 persen. Penduduk lansia terbesar terdapat di Pulau Jawa (10,3 persen), kemudian berturut-turut Bali dan Nusa Tenggara (8,7 persen), Sulawesi (8,5 persen), Sumatera (7,2 persen), Kalimantan (6,5 persen) serta Maluku dan Papua (4,7 persen). Menurut provinsi, tiga provinsi dengan penduduk lansia terbesar adalah Yogyakarta (13,8 persen), Jawa Tengah (12,6 persen), dan Jawa Timur (12,2 persen), sedangkan yang terkecil adalah Papua (3,2 persen), Papua Barat (4,3 persen), dan Kepulauan Riau (4,3 persen).

**Penduduk lanjut usia (umur  
60 tahun ke atas) tahun  
2017 sebesar 9,0 persen**

10. Umur Harapan Hidup adalah kemungkinan umur yang akan dicapai seseorang dari sejak lahir. Hasil proyeksi penduduk tahun 2017 menunjukkan umur harapan hidup waktu lahir penduduk Indonesia sebesar 71,1 tahun. Tiga provinsi dengan umur harapan hidup tertinggi adalah Yogyakarta (74,8 tahun), Jawa Tengah (73,9 tahun), dan Kalimantan Timur (73,7 tahun). Sementara tiga provinsi dengan umur harapan hidup terendah adalah Sulawesi Barat (64,3 tahun), Papua (65,4 tahun), dan Maluku (65,5 tahun).

**Hasil proyeksi tahun 2017  
menunjukkan umur harapan  
hidup penduduk Indonesia  
sebesar 71,1 tahun**

<https://www.bps.go.id>

**Tabel 20.2**  
**Demografi Penduduk Indonesia, 2017**

Provinsi	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )	Rasio Jenis Kelamin	Rasio Ketergan- tungan	Pendudu k Lansia (%)	Umur Harapan Hidup
	2010	2017	2010-2017	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Aceh	4 523	5 189	1,98	90	99,8	54,2	6,6	69,8
2. Sumatera Utara	13 029	14 262	1,30	195	99,6	55,9	7,3	68,6
3. Sumatera Barat	4 865	5 321	1,29	127	99,2	55,1	9,3	69,0
4. Riau	5 575	6 658	2,57	77	105,4	50,7	5,3	71,3
5. Jambi	3 108	3 515	1,78	70	104,2	46,1	7,0	70,9
6. Sumatera Selatan	7 482	8 267	1,44	90	103,3	49,0	7,5	69,5
7. Bengkulu	1 722	1 934	1,67	97	104,0	47,0	6,9	68,9
8. Lampung	7 634	8 290	1,18	239	105,1	49,1	8,3	70,2
9. Kep. Bangka Belitung	1 230	1 431	2,18	87	108,3	45,4	7,3	70,2
10. Kepulauan Riau	1 693	2 083	3,01	254	104,2	48,8	4,3	69,8
<b>Sumatera</b>	<b>50 860</b>	<b>56 950</b>	<b>1,63</b>	<b>118</b>	<b>102,4</b>	<b>51,6</b>	<b>7,2</b>	
11. DKI Jakarta	9 640	10 374	1,05	15 624	100,6	40,7	7,2	72,5
12. Jawa Barat	43 227	48 038	1,52	1 358	102,7	47,0	8,7	72,9
13. Jawa Tengah	32 444	34 258	0,78	1 044	98,4	47,7	12,6	73,9
14. Yogyakarta	3 468	3 762	1,17	1 201	97,9	45,0	13,8	74,8
15. Jawa Timur	37 566	39 293	0,64	822	97,5	43,8	12,2	70,9
16. Banten	10 689	12 448	2,20	1 288	103,9	45,9	5,8	69,6
<b>Jawa</b>	<b>137 033</b>	<b>148 173</b>	<b>1,12</b>	<b>1 145</b>	<b>100,1</b>	<b>45,7</b>	<b>10,3</b>	
17. Bali	3 907	4 247	1,20	735	101,4	44,7	10,7	71,7
18. NTB	4 516	4 956	1,34	267	94,3	53,0	8,0	65,8
19. NTT	4 706	5 287	1,68	109	98,2	65,3	7,7	66,5
<b>Bali dan Nusa Tenggara</b>	<b>13 130</b>	<b>14 489</b>	<b>1,42</b>	<b>198</b>	<b>97,8</b>	<b>54,6</b>	<b>8,7</b>	
20. Kalimantan Barat	4 411	4 932	1,61	33	103,7	50,3	7,3	70,3
21. Kalimantan Tengah	2 221	2 605	2,31	17	109,5	44,9	5,6	67,8
22. Kalimantan Selatan	3 643	4 120	1,77	106	102,9	48,3	7,0	68,2
23. Kalimantan Timur	3 047	3 575	2,31	28	110,2	44,4	5,8	73,7*)
24. Kalimantan Utara	529	691	3,89	9	113,0	50,4	5,9	72,2*)
<b>Kalimantan</b>	<b>13 851</b>	<b>15 924</b>	<b>2,01</b>	<b>29</b>	<b>106,2</b>	<b>47,6</b>	<b>6,5</b>	
24. Sulawesi Utara	2 278	2 461	1,11	178	104,2	46,3	10,4	71,4
25. Sulawesi Tengah	2 646	2 966	1,65	48	104,3	50,0	7,7	68,1
26. Sulawesi Selatan	8 060	8 690	1,08	186	95,5	52,1	9,2	70,2
27. Sulawesi Tenggara	2 244	2 602	2,14	68	101,1	59,4	6,6	70,9
28. Gorontalo	1 045	1 168	1,61	104	100,4	47,9	7,6	67,6
29. Sulawesi Barat	1 165	1 331	1,93	79	100,7	54,8	6,5	64,3
<b>Sulawesi</b>	<b>17 437</b>	<b>19 219</b>	<b>1,40</b>	<b>102</b>	<b>99,3</b>	<b>51,9</b>	<b>8,5</b>	
30. Maluku	1 542	1 745	1,78	37	101,7	58,8	6,9	65,5
31. Maluku Utara	1 043	1 209	2,13	38	104,1	57,6	5,9	67,9
32. Papua Barat	765	915	2,59	9	111,2	48,6	4,3	65,6
33. Papua	2 857	3 265	1,93	10	111,1	45,7	3,2	65,4
<b>Maluku dan Papua</b>	<b>6 208</b>	<b>7 135</b>	<b>2,01</b>	<b>14</b>	<b>107,5</b>	<b>51,1</b>	<b>4,7</b>	
<b>Indonesia</b>	<b>238 519</b>	<b>261 891</b>	<b>1,34</b>	<b>137</b>	<b>101,0</b>	<b>48,1</b>	<b>9,0</b>	<b>71,1</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

\*) Angka Estimasi



21

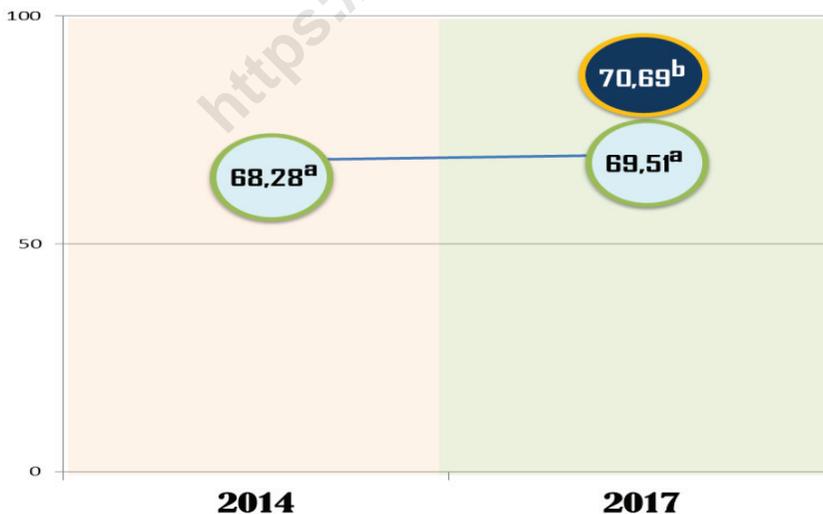
INDEKS  
KEBAHAGIAAN  
2017

## XXI. INDEKS KEBAHAGIAAN 2017

1. Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan karena terdapat penambahan cakupan dimensi dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup, sedangkan pada tahun 2017, Indeks Kebahagiaan ditambahkan Dimensi Perasaan (*Affect*) dan Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*). Perubahan lainnya pada tahun 2017, Dimensi Kepuasan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) subdimensi, yaitu: Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014 lebih tinggi dibanding tahun 2014. Indeks Kebahagiaan pada tahun 2017 sebesar 69,51, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 68,28. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan indeks sebesar 1,23 poin. Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2017 sebesar 70,69.

**Indeks Kebahagiaan  
Indonesia tahun 2017  
sebesar 70,69**

**Grafik 21.1**  
**Perkembangan Indeks Kebahagiaan Indonesia, 2014 dan 2017**

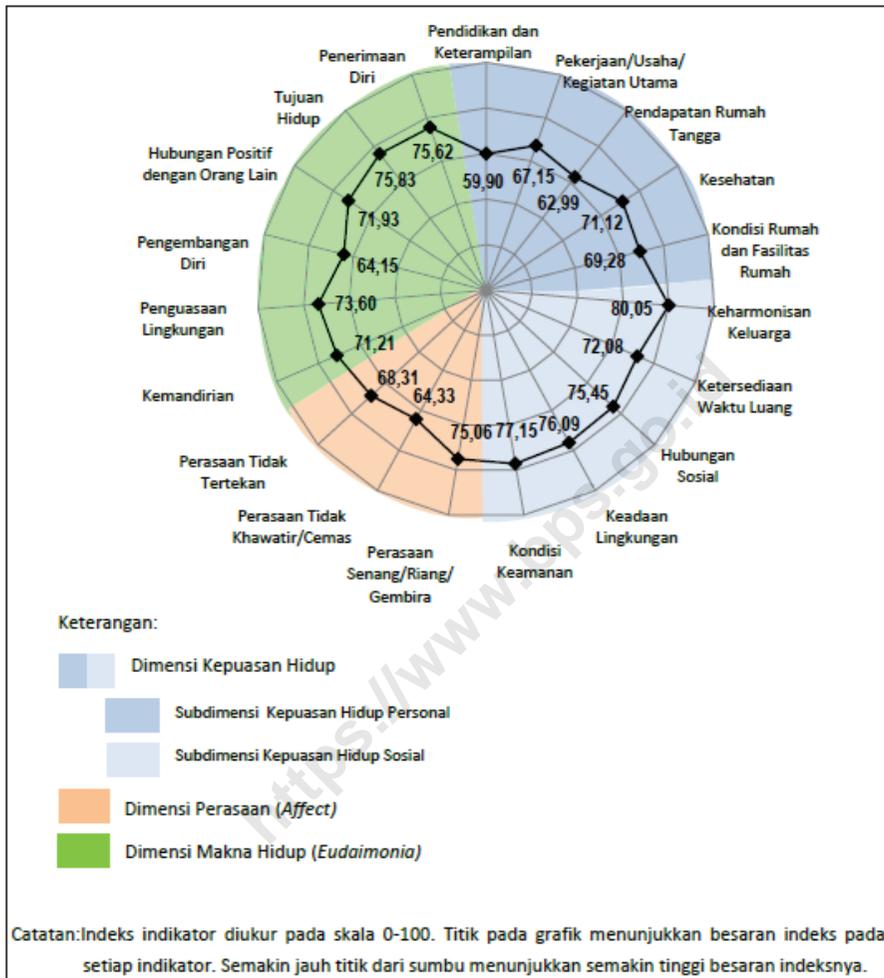


<sup>a</sup> Metode 2014: Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 1 (satu) dimensi, yaitu: Kepuasan Hidup.

<sup>b</sup> Metode 2017: Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu: Kepuasan Hidup, Perasaan (*Affect*), dan Makna Hidup (*Eudaimonia*).

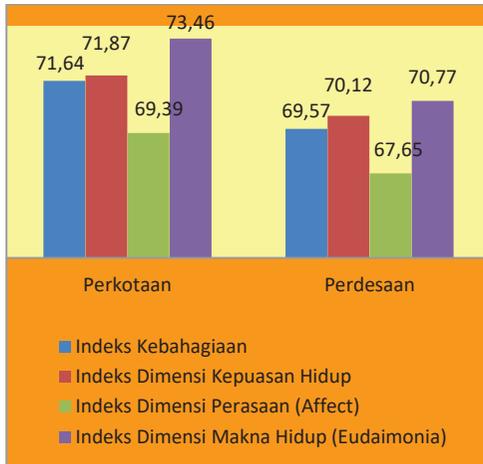
2. Berdasarkan Indeks Kebahagiaan Indonesia 2017 tersebut, masing-masing dimensi dan subdimensi memiliki kontribusi sebagai berikut: Kepuasan Hidup 34,80 persen, Perasaan (*Affect*) 31,18 persen, dan Makna Hidup (*Eudaimonia*) 34,02 persen. Khusus pada Dimensi Kepuasan Hidup dibagi menjadi 2 subdimensi, yakni Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Kepuasan Hidup Sosial, masing-masing memiliki kontribusi 50 persen terhadap Dimensi Kepuasan Hidup.
3. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 71,07; (2) Indeks Dimensi Perasaan (*Affect*) sebesar 68,59; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*) sebesar 72,23. Lebih lanjut, besarnya indeks masing-masing subdimensi penyusun Dimensi Kepuasan Hidup adalah Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 65,98 dan Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 76,16. Seluruh indeks diukur pada skala 0–100.
4. Indikator penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia yang memiliki nilai tertinggi adalah Keharmonisan Keluarga 80,05 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial (Gambar 2). Sementara itu, indeks indikator terendah adalah Pendidikan dan Keterampilan 59,90 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal. Pada Dimensi Perasaan (*Affect*), indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Perasaan Senang/Riang/Gembira dalam menjalani kehidupannya sehari-hari pada tingkatan 75,06, sedangkan yang terendah adalah Perasaan Tidak Khawatir/Cemas pada tingkatan 64,33. Pada Dimensi Makna Hidup (*Eudaimonia*), indikator yang memiliki indeks tertinggi adalah Tujuan Hidup (75,83), sebaliknya yang terendah adalah Pengembangan Diri (64,15).

Grafik 21.2  
Indeks Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2017

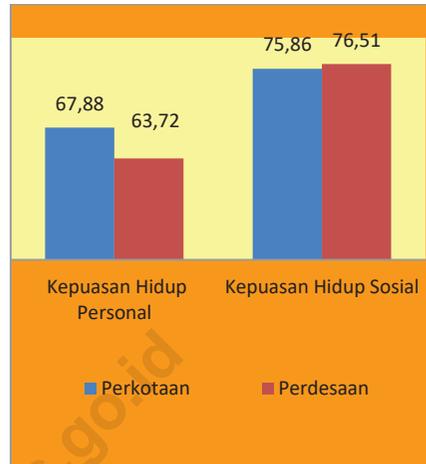


- Indeks Kebahagiaan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan (71,64) cenderung lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal di perdesaan (69,57). Dilihat dari ketiga dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan, penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan secara konsisten memiliki indeks yang lebih besar dibanding di wilayah perdesaan. Pola yang serupa terdapat pada Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perkotaan memiliki indeks yang lebih tinggi (67,88). Namun, pola yang berbeda ditunjukkan pada Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Pada subdimensi ini, penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan memiliki indeks yang lebih tinggi (76,51).

**Grafik 21.3**  
**Indeks Kebahagiaan Indonesia**  
**Menurut Klasifikasi Wilayah, 2017**

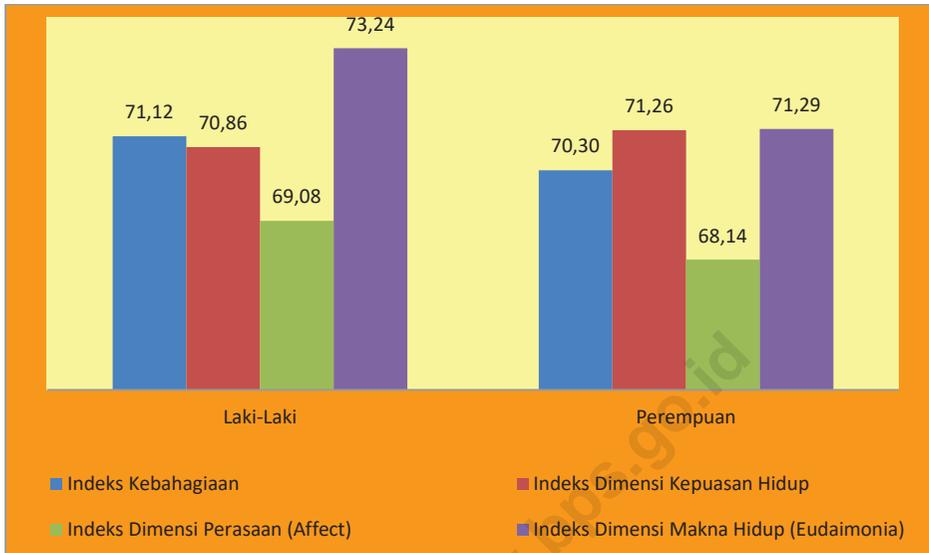


**Grafik 21.4**  
**Indeks Subdimensi**  
**Kepuasan Hidup Personal dan Sosial**  
**Menurut Klasifikasi Wilayah, 2017**



- Indeks Kebahagiaan penduduk laki-laki (71,12) lebih tinggi dibandingkan nilai indeks penduduk perempuan (70,30). Dilihat dari tiga dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan, terdapat pola yang serupa pada Indeks Dimensi Perasaan (Affect) dan Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Indeks Dimensi Perasaan (Affect) laki-laki (69,08) lebih tinggi dari perempuan (68,14). Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) laki-laki (73,24) lebih tinggi dari perempuan (71,29). Namun, pada Indeks Dimensi Kepuasan Hidup penduduk perempuan (71,26) mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki (70,86).

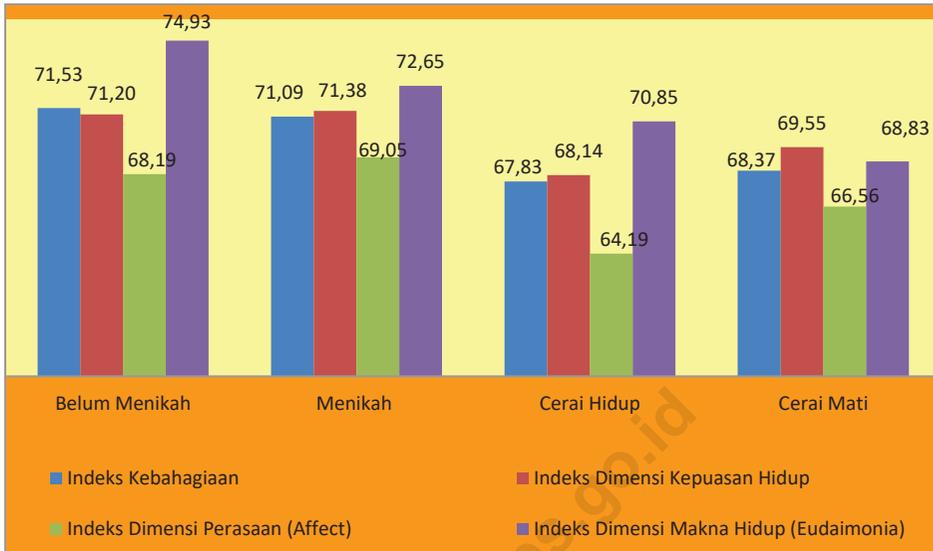
**Grafik 21.5**  
**Indeks Kebahagiaan Indonesia Menurut Jenis Kelamin, 2017**



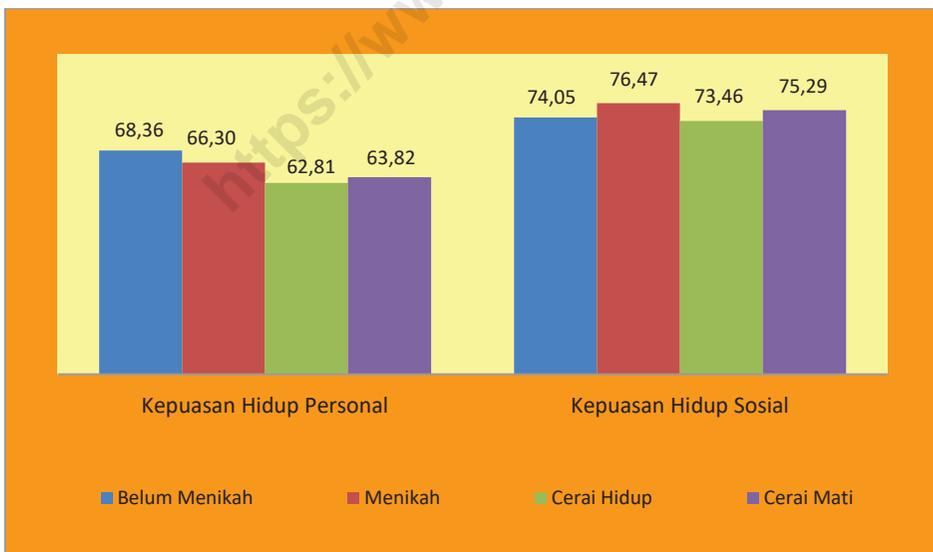
- Indeks Kebahagiaan penduduk yang belum menikah (71,53) cenderung lebih tinggi dibanding penduduk dengan status perkawinan yang lain. Dilihat dari ketiga dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan, masing-masing dimensi memiliki pola yang berbeda-beda. Pola yang sama terdapat pada Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia), yaitu penduduk yang belum menikah memiliki indeks yang tertinggi dibandingkan penduduk dengan status perkawinan yang lain. Sementara itu, pada Dimensi Kepuasan Hidup dan Dimensi Perasaan (Affect), indeks yang paling tinggi terdapat pada penduduk yang berstatus menikah.

Selanjutnya, dilihat dari Subdimensi Kepuasan Hidup Personal, penduduk yang belum menikah memiliki indeks tertinggi (68,36) dibandingkan penduduk dengan status perkawinan yang lain. Namun, pada Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial, indeks tertinggi terdapat pada penduduk yang sudah menikah (76,47).

**Grafik 21.6**  
**Indeks Kebahagiaan Indonesia Menurut Status Perkawinan, 2017**



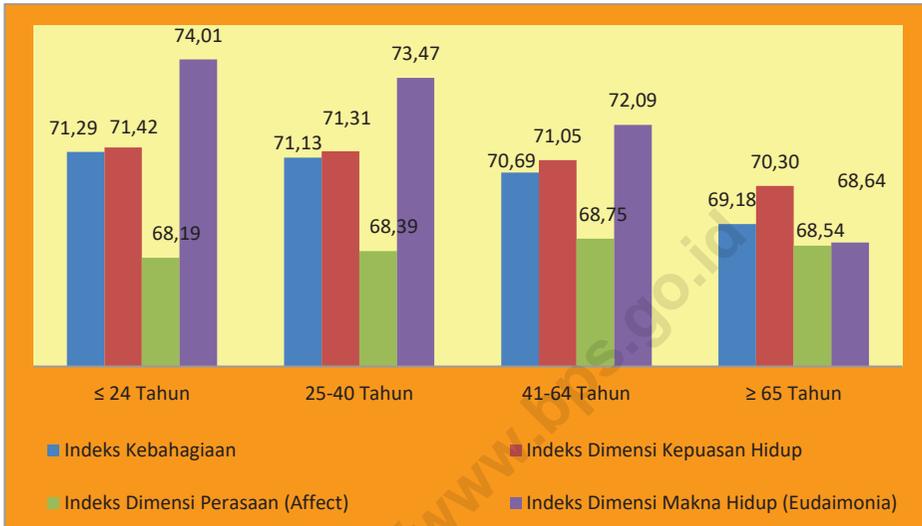
**Grafik 21.7**  
**Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial Menurut Status Perkawinan, 2017**



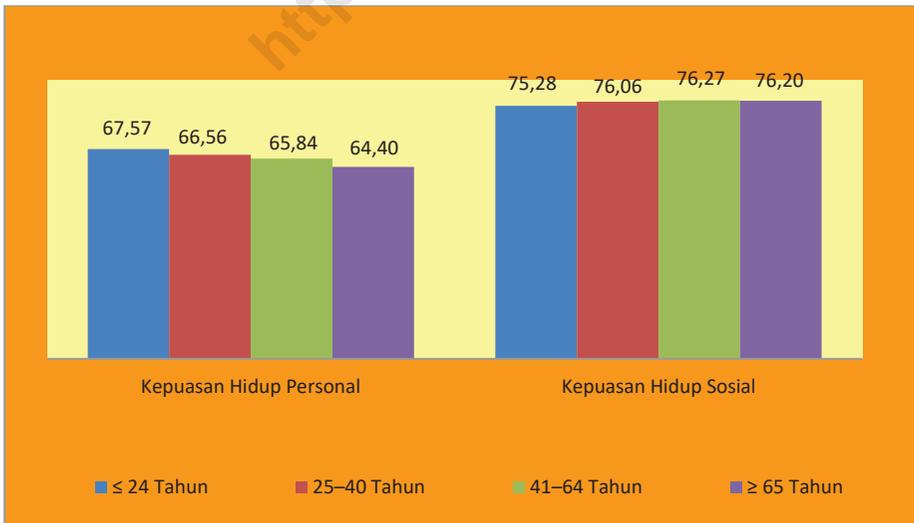
- Indeks Kebahagiaan penduduk cenderung mengalami penurunan dengan semakin bertambahnya umur. Penduduk dengan umur 24 tahun ke bawah memiliki Indeks Kebahagiaan tertinggi sebesar 71,29, hal yang sama terjadi pada Dimensi Kepuasan Hidup dan Dimensi Makna Hidup. Sementara itu, semakin bertambah umur maka semakin tinggi Indeks Dimensi Perasaan (*Affect*) hingga batas umur 64 tahun setelah itu mengalami penurunan.

Selanjutnya, pada Subdimensi Kepuasan Hidup Personal, nilai indeks semakin menurun seiring dengan bertambahnya umur. Sementara itu, pada Subdimensi Kepuasan Penduduk Sosial, nilai indeks cenderung semakin meningkat seiring bertambahnya umur sampai pada batas umur 64 tahun.

**Grafik 21.8**  
Indeks Kebahagiaan Indonesia Menurut Kelompok Umur, 2017



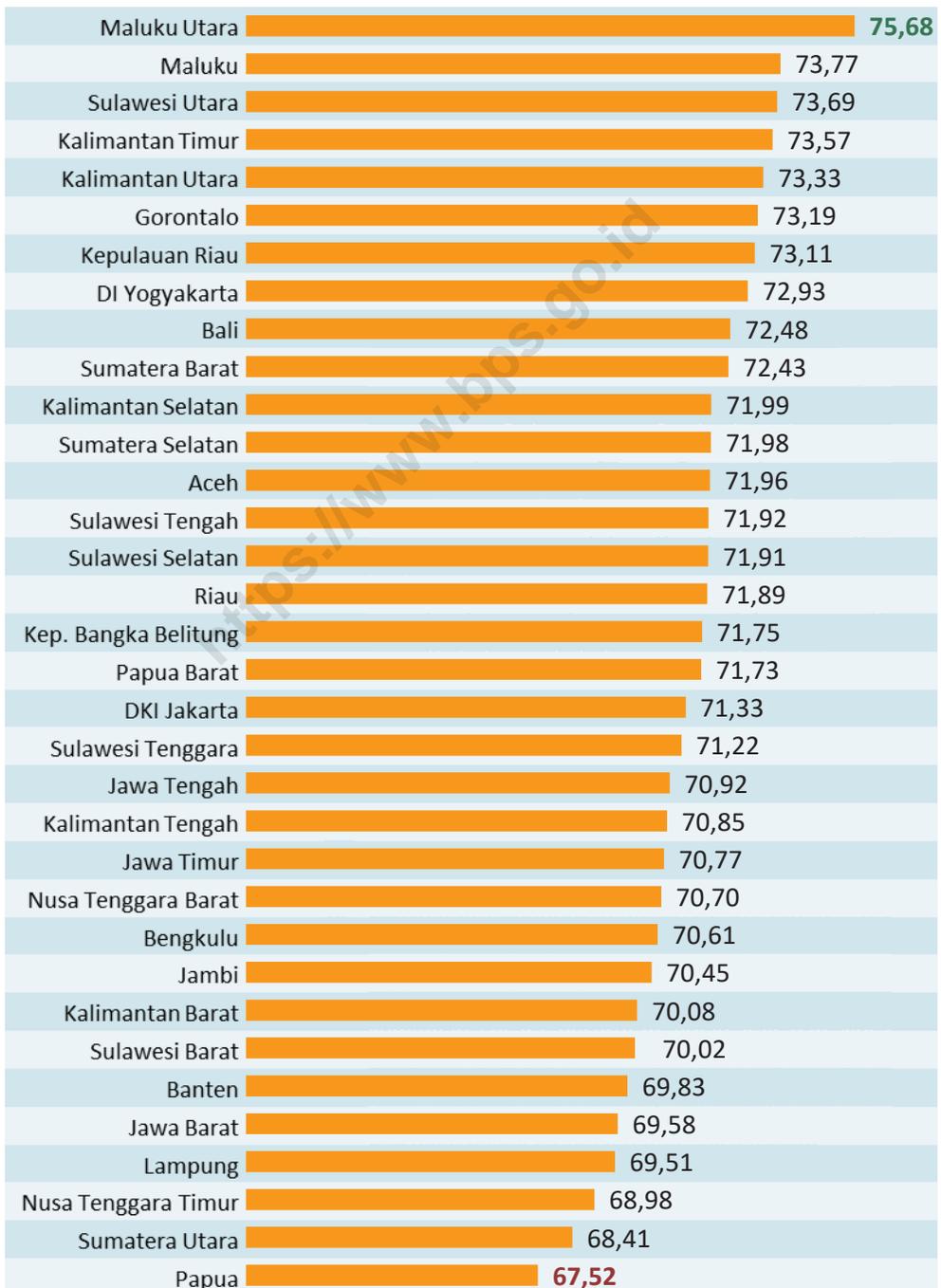
**Grafik 21.9**  
Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Sosial Menurut Kelompok Umur, 2017



9. Berdasarkan sebaran, nilai Indeks Kebahagiaan menurut provinsi yang cukup bervariasi dengan rentang antara 67,52 sampai 75,68, terdapat 24 provinsi yang memiliki nilai Indeks Kebahagiaan di atas angka nasional. Tiga provinsi yang

memiliki nilai Indeks Kebahagiaan tertinggi secara berturut-turut adalah Provinsi Maluku Utara (75,68), Maluku (73,77), dan Sulawesi Utara (73,69). Sementara itu, Provinsi Papua (67,52), Sumatera Utara (68,41), dan Nusa Tenggara Timur (68,98) merupakan tiga provinsi yang memiliki Indeks Kebahagiaan terendah.

**Grafik 21.10**  
**Indeks Kebahagiaan Penduduk Menurut Provinsi, 2017**



**Tabel 21.1**  
**Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Penyusunnya Menurut Provinsi, 2017**

Provinsi	Indeks Kebahagiaan	Dimensi Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
		Personal	Sosial			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	71,96	67,24	78,66	72,95	68,56	74,05
Sumatera Utara	68,41	62,89	74,18	68,54	64,75	71,62
Sumatera Barat	72,43	67,03	77,50	72,27	70,21	74,64
Riau	71,89	67,19	76,28	71,74	70,24	73,56
Jambi	70,45	65,93	76,12	71,02	68,56	71,61
Sumatera Selatan	71,98	67,01	77,03	72,02	70,61	73,18
Bengkulu	70,61	63,96	76,94	70,45	68,52	72,68
Lampung	69,51	63,54	75,84	69,69	67,43	71,24
Kep. Bangka Belitung	71,75	68,68	78,24	73,46	69,33	72,23
Kepulauan Riau	73,11	69,23	77,05	73,14	69,11	76,75
DKI Jakarta	71,33	68,64	74,56	71,60	68,06	74,04
Jawa Barat	69,58	65,48	74,96	70,22	66,83	71,43
Jawa Tengah	70,92	65,50	76,34	70,92	70,45	71,36
DI Yogyakarta	72,93	67,95	76,02	71,98	73,38	73,49
Jawa Timur	70,77	66,63	76,72	71,68	68,79	71,66
Banten	69,83	65,78	74,97	70,37	67,80	71,13
Bali	72,48	68,48	76,32	72,40	71,71	73,27
Nusa Tenggara Barat	70,70	65,25	77,93	71,59	67,50	72,72
Nusa Tenggara Timur	68,98	62,92	76,75	69,83	65,23	71,53
Kalimantan Barat	70,08	64,33	76,94	70,64	67,55	71,84
Kalimantan Tengah	70,85	67,11	74,93	71,02	69,52	71,89
Kalimantan Selatan	71,99	65,21	75,58	70,40	72,31	73,32
Kalimantan Timur	73,57	69,62	77,39	73,50	71,63	75,41
Kalimantan Utara	73,33	66,19	77,70	71,94	73,42	74,67
Sulawesi Utara	73,69	70,14	78,40	74,27	69,29	77,11
Sulawesi Tengah	71,92	63,86	78,42	71,14	70,08	74,40
Sulawesi Selatan	71,91	66,42	78,12	72,27	70,63	72,71
Sulawesi Tenggara	71,22	63,60	78,50	71,05	68,77	73,63
Gorontalo	73,19	69,59	79,57	74,58	69,21	75,41
Sulawesi Barat	70,02	61,59	77,75	69,67	67,89	72,33
Maluku	73,77	70,59	79,52	75,05	69,00	76,84
Maluku Utara	75,68	72,86	81,33	77,09	70,48	79,00
Papua Barat	71,73	68,24	76,64	72,44	67,95	74,46
Papua	67,52	63,04	73,80	68,42	63,82	69,98
<b>Indonesia</b>	<b>70,69</b>	<b>65,98</b>	<b>76,16</b>	<b>71,07</b>	<b>68,59</b>	<b>72,23</b>

**Tabel 21.2**  
**Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik, 2017**

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan ( <i>Affect</i> )	Indeks Dimensi Makna Hidup ( <i>Eudaimonia</i> )
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
		Personal	Sosial			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Klasifikasi Wilayah:</b>						
Perkotaan	71,64	67,88	75,86	71,87	69,39	73,46
Perdesaan	69,57	63,72	76,51	70,12	67,65	70,77
<b>Jenis Kelamin:</b>						
Laki-Laki	71,12	65,57	76,16	70,86	69,08	73,24
Perempuan	70,30	66,36	76,16	71,26	68,14	71,29
<b>Status Perkawinan:</b>						
Belum Menikah	71,53	68,36	74,05	71,20	68,19	74,93
Menikah	71,09	66,30	76,47	71,38	69,05	72,65
Cerai Hidup	67,83	62,81	73,46	68,14	64,19	70,85
Cerai Mati	68,37	63,82	75,29	69,55	66,56	68,83
<b>Kelompok Umur:</b>						
≤ 24 Tahun	71,29	67,57	75,28	71,42	68,19	74,01
25-40 Tahun	71,13	66,56	76,06	71,31	68,39	73,47
41-64 Tahun	70,69	65,84	76,27	71,05	68,75	72,09
≥ 65 Tahun	69,18	64,40	76,20	70,30	68,54	68,64
<b>Kedudukan Dalam Rumah Tangga:</b>						
Kepala Rumah Tangga	70,54	65,29	75,88	70,59	68,41	72,45
Pasangan Kepala Rumah Tangga	70,94	67,11	76,61	71,86	68,89	71,86
<b>Banyaknya Anggota Rumah Tangga:</b>						
1 Orang	69,10	65,10	73,84	69,47	67,13	70,52
2 Orang	70,12	65,51	76,03	70,77	68,40	71,03
3 Orang	70,83	65,89	76,34	71,11	68,77	72,43
4 Orang	71,20	66,53	76,43	71,48	69,09	72,84
5 Orang atau Lebih	70,79	65,99	76,39	71,19	68,44	72,53

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan ( <i>Affect</i> )	Indeks Dimensi Makna Hidup ( <i>Eudaimonia</i> )
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
		Personal	Sosial		(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan:</b>						
Tidak Pernah Sekolah	66,52	59,82	75,21	67,51	65,64	66,32
Tidak Tamat SD/Sederajat	67,86	61,68	76,01	68,84	66,18	68,39
SD Sederajat	69,20	63,96	76,21	70,08	67,10	70,23
SMP Sederajat	70,41	65,31	76,07	70,69	68,02	72,30
SMA Sederajat	72,51	68,73	76,01	72,37	70,13	74,83
Diploma I, II, III	75,48	72,73	76,93	74,83	73,19	78,23
Diploma IV/S1	76,86	75,08	77,21	76,15	74,69	79,58
S2, S3	79,55	78,71	77,72	78,22	77,12	83,14
<b>Pendapatan Rumah Tangga:</b>						
Hingga Rp1.800.000	66,87	59,68	75,14	67,41	64,82	68,19
Rp1.800.001–Rp3.000.000	70,11	64,92	76,21	70,56	67,90	71,68
Rp3.000.001–Rp4.800.000	72,34	68,87	76,40	72,63	70,35	73,87
Rp4.800.001–Rp7.200.000	74,23	72,12	76,94	74,53	72,06	75,90
Lebih dari Rp7.200.000	76,62	75,33	77,74	76,53	74,56	78,59
<b>Indonesia</b>	<b>70,69</b>	<b>65,98</b>	<b>76,16</b>	<b>71,07</b>	<b>68,59</b>	<b>72,23</b>



22

INDEKS  
DEMOKRASI  
INDONESIA  
2017

## XXII. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2017

### A. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Nasional 2016

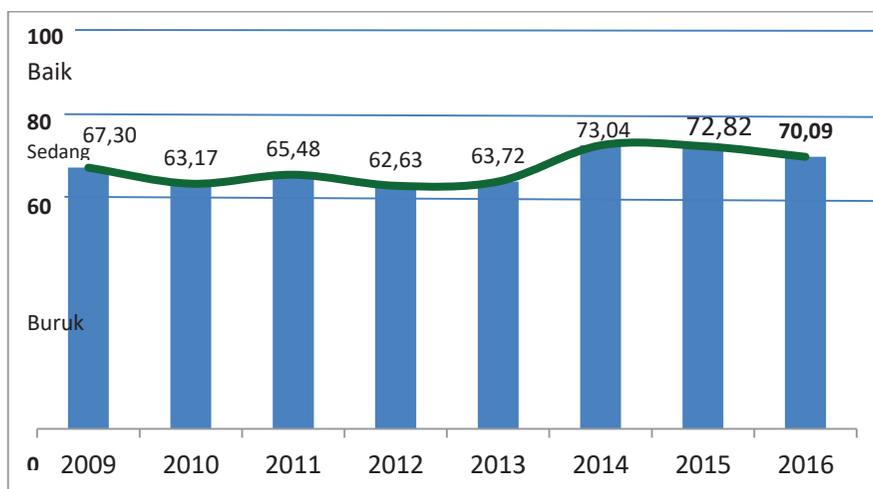
1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional tahun 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 72,82. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional tahun 2016 mencapai 70,09 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 72,82.**

Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 67,30. Angka ini terus berfluktuasi hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 73,04, sebelum akhirnya kembali turun menjadi 72,82 di tahun 2015 dan 70,09 di tahun 2016.

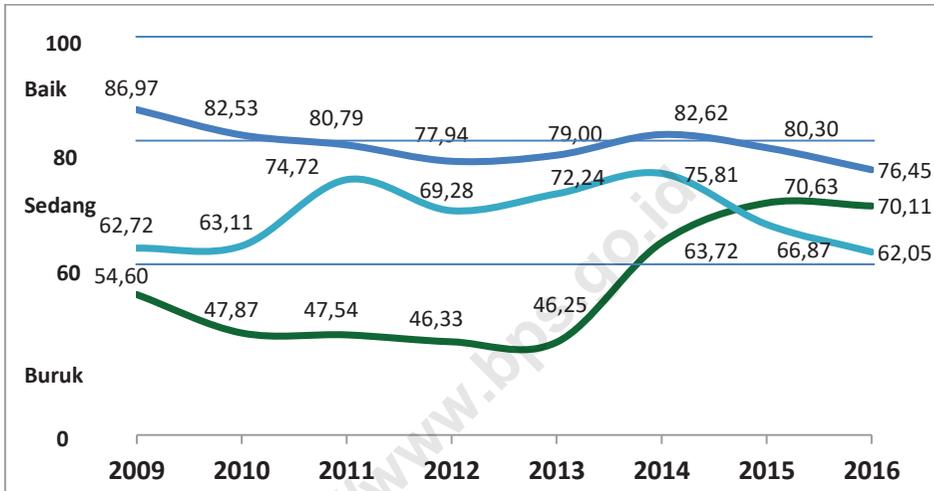
Fluktuasi angka IDI adalah cermin dinamika demokrasi Indonesia. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia dari 2009 - 2015 dapat dilihat pada Grafik 22.1.

**Grafik 22.1**  
Perkembangan IDI Nasional Tahun 2009 - 2016



2. Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2016 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 76,45; aspek Hak-hak Politik sebesar 70,11; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 62,05.

**Grafik 22.2**  
Perkembangan Indeks Aspek, 2009-2016



Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Namun, seluruh aspek mengalami penurunan.

Indeks aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2016 mengalami penurunan 3.85 poin dari 80.30 pada 2015 menjadi 76.45 pada 2016. Hal ini menyebabkan kategori aspek ini yang pada 2014, 2015 sudah mencapai kategori “baik”, tahun ini menjadi kategori sedang.

Sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2013 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014-2015, aspek ini menembus kategori “sedang”. Pada IDI 2016 aspek Hak-hak Politik tetap pada kategori “sedang”, meski sedikit mengalami penurunan sebesar 0.52 poin.

Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang secara kategori stabil. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2016 aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”. Namun, pada 2016 aspek ini mengalami penurunan terbesar dari 66.87 pada 2015 menjadi 62.05 pada 2016 atau turun sebesar 4.82 poin.

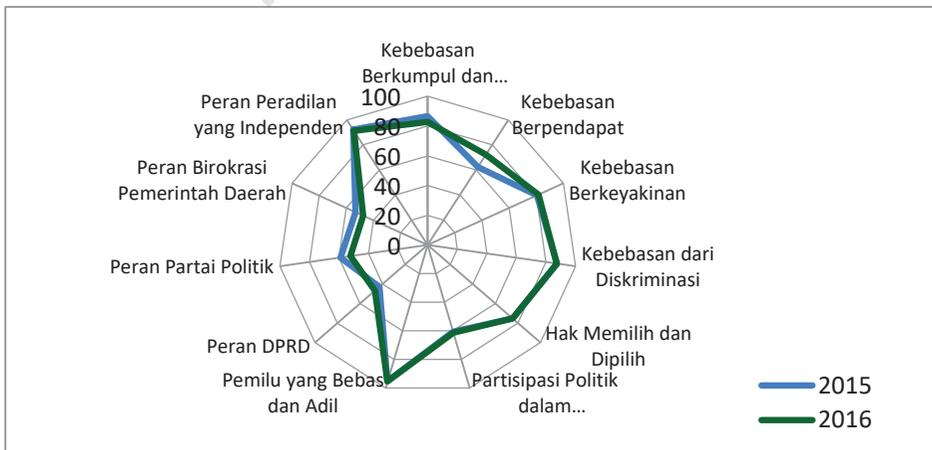
3. Pada tahun 2016 terdapat lima variabel yang mengalami penurunan indeks dan empat variabel yang mengalami peningkatan. Dari lima variabel yang mengalami penurunan, dua di antaranya menurun cukup tajam.

**Terdapat lima variabel yang mengalami penurunan pada IDI 2016**

Penurunan terbesar terjadi pada indeks variabel peran Partai Politik. Pada Grafik 22.3 terlihat lebarnya jarak plot tahun 2015 dengan plot tahun 2016, memperlihatkan variabel peran Partai Politik menurun paling besar, dari 59,09 pada 2015 menjadi 52,29 pada 2016 atau sebesar 6,80 poin. Penurunan tetap membuat variabel tersebut masih dalam kondisi buruk. Variabel lain yang juga menurun secara bermakna adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang menurun sebesar 5,60 poin dari 53,11 pada 2015 menjadi 47,51 pada 2015. Selebihnya menurun tidak terlalu tajam.

Pada Grafik 22.3 dapat diketahui dari lima variabel yang mengalami peningkatan terlihat variabel Kebebasan Berpendapat meningkat secara bermakna sebesar 9,96 poin dari 62,21 pada 2015 menjadi 72,17 pada 2016. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Peran DPRD. Variabel ini meningkat sebesar 3,86 poin dari 42,90 pada 2015 menjadi 46,76 pada 2016. Meskipun demikian, peningkatan nilai indeks tidak mengubah posisi variabel Peran DPRD yang masih berada di kategori “buruk”.

**Grafik 22.3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional, 2014-2015**



4. Pada IDI 2016 terdapat 13 dari 28 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 27, dan 28. Sedikit berbeda dengan IDI 2015 dimana terdapat 15 indikator mencapai kinerja kategori “baik” yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 27, dan 28.

**Pada IDI 2016 terdapat 13 dari 28 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 24, 27, dan 28**

Namun, pada tahun 2016 masih terlihat masalah kronis yakni terdapat kinerja indikator demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah indikator (4) Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, (15) Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi, (16) Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan, (21) Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD, (22) Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif, (23) Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Peserta Pemilu, dan (26) Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah. Indikator tersebut nampaknya memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik karena trendnya selalu buruk.

Menarik perhatian mengapa aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan terbesar dari 66.87 pada 2015 menjadi 62.05 pada 2016 atau turun sebesar 4.83 poin. Dari perubahan indikatornya dapat diketahui penurunan tersebut utamanya dipicu oleh indikator (22) Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang turun 8.19 poin dari 14.29 menjadi 6.09 pada 2016, (23) Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu juga turun 8.40 poin dari 56.30 menjadi 47.90 pada 2016, dan indikator (26) Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah yang turun 13.97 poin dari 44.85 menjadi 30.88 pada 2016.

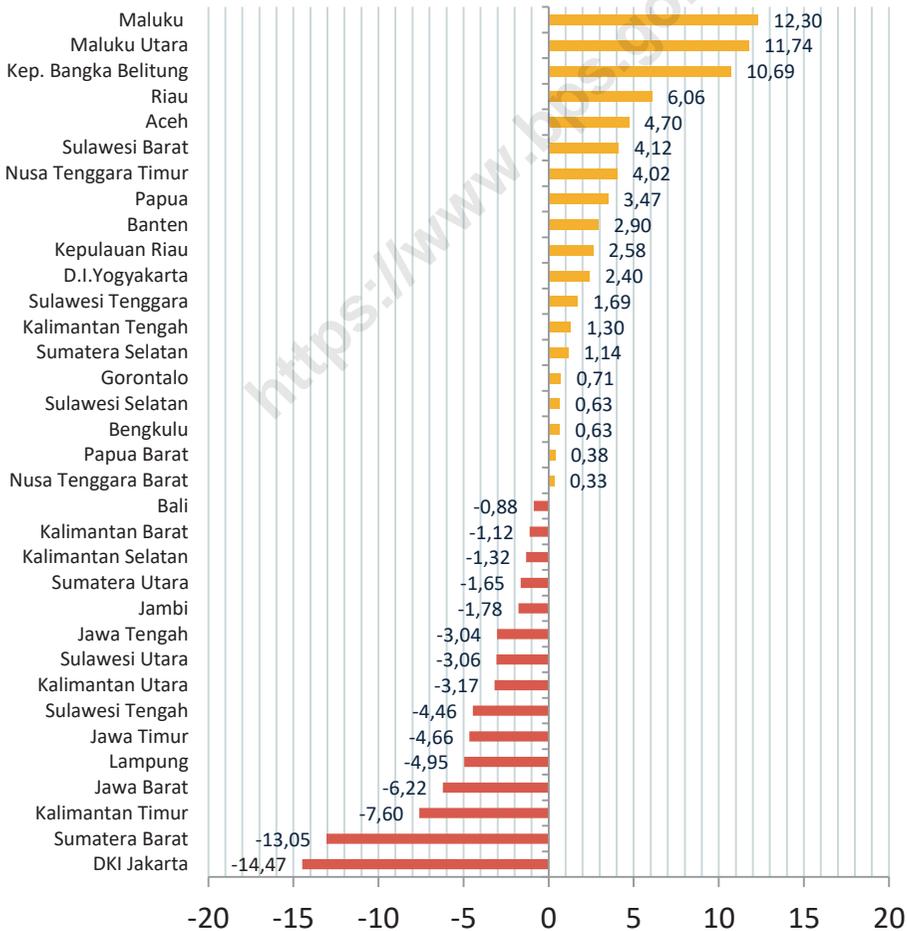
#### B. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi 2016

Jika dilihat menurut provinsi terdapat empat provinsi yang berada di level kinerja demokrasi kategori “baik”. Posisi pertama ditempati oleh DI Yogyakarta yang naik dari 83,19 pada 2015 menjadi 85,58 pada 2016. Tiga provinsi lainnya adalah Kepulauan Bangka-Belitung naik dari 72,31 pada 2015 menjadi 83,00 pada 2016, Nusa Tenggara Timur naik dari 78,47 pada 2015 menjadi 82,49

pada 2016, dan Sumatera Selatan yang naik dari 79,81 pada 2015 menjadi 80,95 pada 2016 (lihat Tabel 22.1). Sedangkan sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang”. Hal ini mengindikasikan kinerja demokrasi yang cukup merata di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, dibandingkan tahun 2015, nilai IDI di 15 provinsi mengalami penurunan. Penurunan IDI provinsi terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang turun 14,47 poin dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 pada 2016. Provinsi lainnya yang juga menurun cukup tajam adalah Provinsi Sumatera Barat yang turun 13,05 poin dari 67,46 pada 2015 menjadi 54,41 pada 2016. Penurunan ini menyebabkan Sumatera Barat menjadi satu-satunya provinsi pada tahun 2016 yang masuk dalam kategori “buruk”.

**Grafik 22.4**  
Perkembangan IDI Provinsi, 2015-2016



**Tabel 22.1**  
**Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi , 2015 - 2016**

Provinsi	IDI 2015				IDI 2016			
	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
Aceh	67.78	74.81	63.98	64.97	72,48	92,92	63,94	60,33
Sumatera Utara	69.01	82.02	62.17	63.52	67,37	82,71	62,29	56,13
Sumatera Barat	67.46	52.99	69.77	82.01	54,41	51,01	54,33	58,82
Riau	65.83	66.46	66.61	63.80	71,89	71,78	77,98	62,34
Jambi	70.68	75.89	62.12	77.72	68,89	84,39	65,63	54,58
Sumatera Selatan	79.81	96.06	78.79	61.00	80,95	91,17	81,94	66,53
Bengkulu	73.60	78.50	68.45	75.61	74,23	85,14	63,84	77,01
Lampung	65.95	71.99	63.19	62.74	61,00	60,49	59,32	64,31
Kep. Bangka Belitung	72.31	81.25	66.95	69.60	83,00	87,65	81,09	80,20
Kepulauan Riau	70.26	80.16	65.01	66.13	72,84	85,43	71,28	59,48
DKI Jakarta	85.32	89.64	83.19	83.26	70,85	81,11	67,54	63,19
Jawa Barat	73.04	79.10	81.89	51.37	66,82	73,37	72,34	49,79
Jawa Tengah	69.75	79.44	67.28	61.48	66,71	66,06	67,24	66,69
D.I.Yogyakarta	83.19	90.41	77.98	82.38	85,58	90,00	81,59	86,37
Jawa Timur	76.90	85.26	67.44	81.39	72,24	73,73	76,49	63,63
Banten	68.46	74.28	63.72	68.66	71,36	83,47	68,30	60,99
Bali	79.83	94.42	77.42	65.31	78,95	96,94	69,60	71,18
Nusa Tenggara Barat	65.08	51.59	61.11	88.36	65,41	65,06	62,08	71,13
Nusa Tenggara Timur	78.47	93.19	71.69	70.73	82,49	96,25	81,68	66,46
Kalimantan Barat	76.40	96.81	65.57	67.95	75,28	83,29	75,70	64,54
Kalimantan Tengah	73.46	85.07	68.31	67.05	74,77	84,98	70,66	68,43
Kalimantan Selatan	74.76	54.15	85.77	83.17	73,43	61,04	83,58	72,89
Kalimantan Timur	81.24	93.07	82.74	63.99	73,64	78,25	78,35	60,36
Kalimantan Utara	80.16	98.10	83.65	52.05	76,98	100,00	66,64	64,48
Sulawesi Utara	79.40	86.71	77.92	72.53	76,34	96,31	70,42	60,62
Sulawesi Tengah	76.67	94.60	68.85	66.53	72,20	80,39	67,89	68,76
Sulawesi Selatan	67.90	69.38	64.25	71.84	68,53	75,54	61,51	70,86
Sulawesi Tenggara	69.44	91.14	56.95	61.99	71,13	88,07	55,51	74,66
Gorontalo	76.77	81.35	69.97	81.81	77,48	82,35	75,54	74,42
Sulawesi Barat	68.25	81.88	61.16	62.37	72,37	82,89	69,02	64,47
Maluku	65.90	76.04	63.20	57.43	78,20	87,17	76,18	70,13
Maluku Utara	61.52	73.53	61.00	47.25	73,27	92,27	61,79	67,59
Papua Barat	59.97	92.33	39.48	51.81	60,35	93,67	38,05	53,85
Papua	57.55	82.72	41.81	50.87	61,02	92,15	41,13	53,45
<b>INDONESIA</b>	<b>72.82</b>	<b>80.30</b>	<b>70.63</b>	<b>66.87</b>	<b>70,09</b>	<b>76,45</b>	<b>70,11</b>	<b>62,05</b>



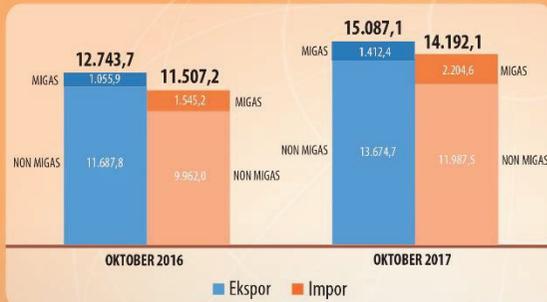
<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN



# PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA OKTOBER 2017

Berita Resmi Statistik No.104/11/XX, 15 November 2017



**EKSPOR**

Bila dibandingkan dengan Oktober 2016

**↑ 18,39%**

**IMPOR**

Bila dibandingkan dengan Oktober 2016

**↑ 23,33%**



**EKSPOR NON MIGA**

TINGKOK	2.341,2
AMERIKA SERIKAT	1.308,6
JEPANG	1.294,1
INDIA	1.246,5

**IMPOR NON MIGA**

TINGKOK	3.178,0
JEPANG	1.474,3
THAILAND	752,0
SINGAPURA	717,1

**BADAN PUSAT STATISTIK**  
<https://www.bps.go.id>

## PERKEMBANGAN UPAH PEKERJA/BURUH

Berita Resmi Statistik No. 105/11/Th.XX, 15 November 2017

### UPAH NOMINAL HARIAN BURUH TANI NASIONAL

Upah riil mengalami kenaikan 0,40 %



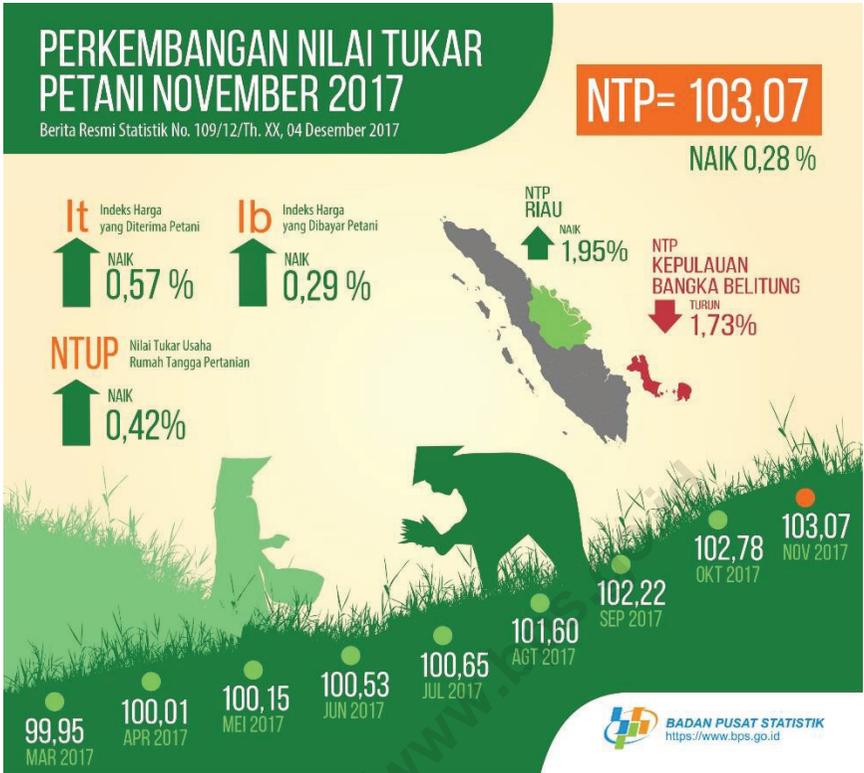
### UPAH NOMINAL HARIAN BURUH BANGUNAN

Upah riil mengalami kenaikan 0,04 %



Perubahan upah riil menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh seperti buruh tani dan buruh informal perkotaan, yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Semakin tinggi upah riil maka semakin tinggi daya beli upah buruh, atau sebaliknya.

**BADAN PUSAT STATISTIK**  
<https://www.bps.go.id>



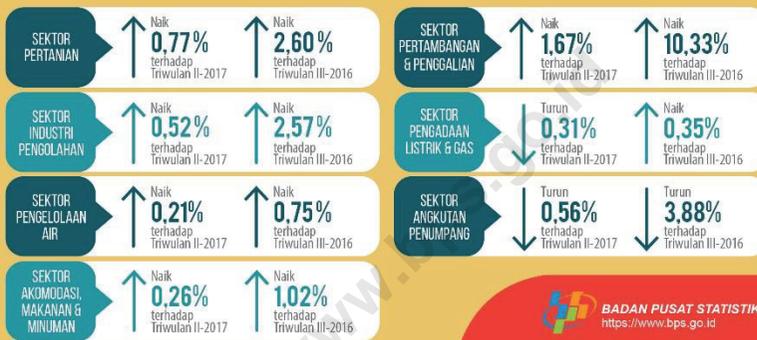
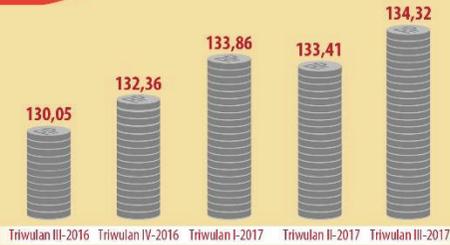
# PERKEMBANGAN INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN III-2017

Berita Resmi Statistik No. 99/11/Th. XX, 01 November 2017



TRIWULAN III-2017  
HARGA PRODUSEN

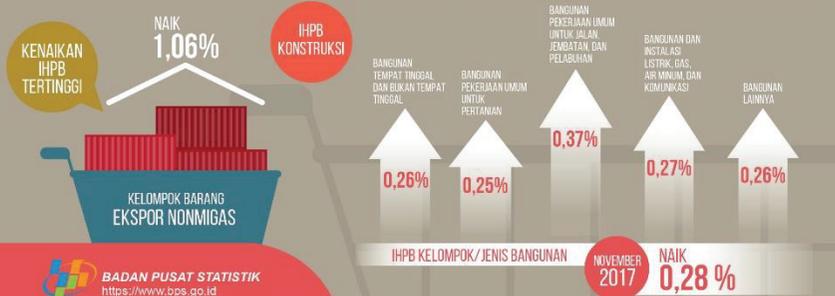
INFLASI  
**0,68%**



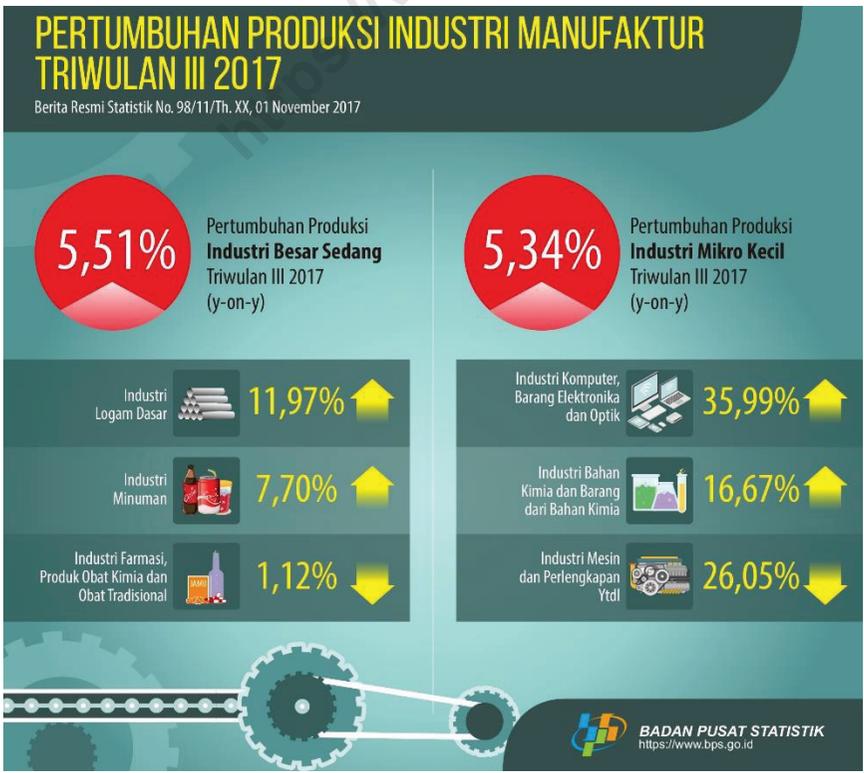
**BADAN PUSAT STATISTIK**  
<https://www.bps.go.id>

# PERKEMBANGAN IHPB (INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR)

Berita Resmi Statistik No. 108/12/Th. XX, 04 Desember 2017



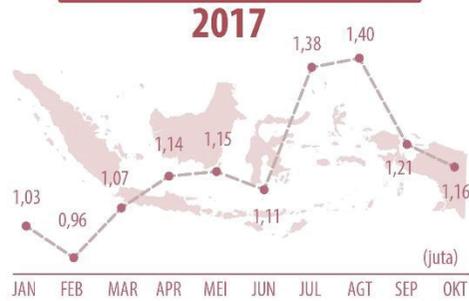
**BADAN PUSAT STATISTIK**  
<https://www.bps.go.id>



# PERKEMBANGAN PARIWISATA OKTOBER 2017

Berita Resmi Statistik No. 110/12/Th. XX, 04 Desember 2017

## Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara



## Kebangsaan Wisatawan Mancanegara Oktober 2017

Kebangsaan	Persentase (%)
Tiongkok	▲ 14,47
Singapura	▼ 9,82
Malaysia	▲ 9,78
Australia	▼ 8,73
Jepang	▼ 3,70

▲ 0,80  
**56,93%**

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia



▲ 0,11  
**1,92 hari**

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang di Indonesia

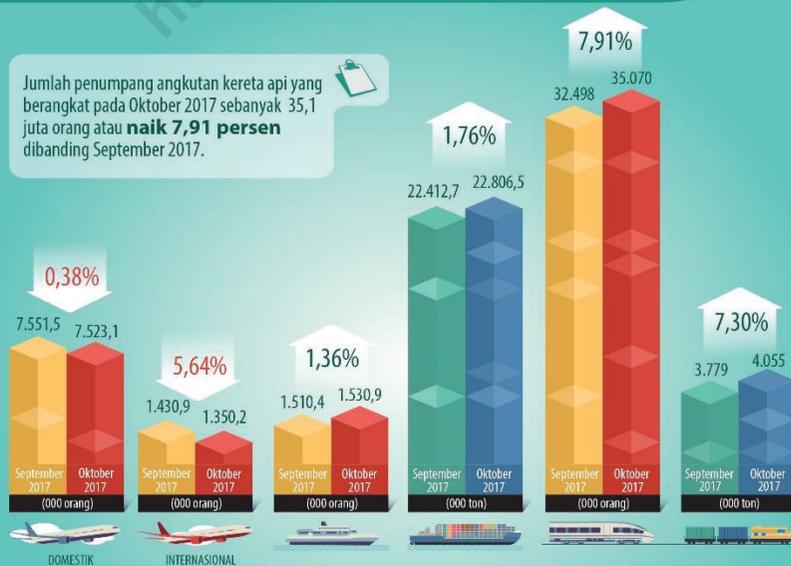


**BADAN PUSAT STATISTIK**  
<https://www.bps.go.id>

# PERKEMBANGAN TRANSPORTASI NASIONAL OKTOBER 2017

Berita Resmi Statistik No. 110/12/Th. XX, 04 Desember 2017

Jumlah penumpang angkutan kereta api yang berangkat pada Oktober 2017 sebanyak 35,1 juta orang atau **naik 7,91 persen** dibanding September 2017.



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
<https://www.bps.go.id>

# PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH OKTOBER 2017

Berita Resmi Statistik No. 106/11/Th. XX, 15 November 2017

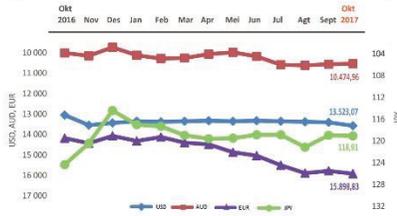
OKTOBER 2017

RUPIAH TERDEPRESIASI  
**1,27%**  
TERHADAP DOLAR AMERIKA



▲ Terapresiasi    ▼ Terdepresiasi

## Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Minggu Terakhir)



1,27%	Rp 13.523,07	USD
0,28%	Rp 10.474,96	AUD
0,05%	Rp 118,91	JPY
0,97%	Rp 15.898,83	EUR

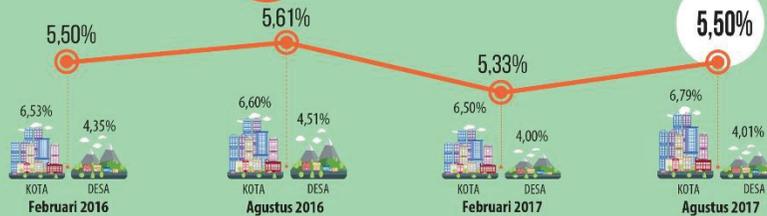
BADAN PUSAT STATISTIK  
<https://www.bps.go.id>

# KEADAAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA AGUSTUS 2017

Berita Resmi Statistik No. 103/11/Th. XX, 06 November 2017



## Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Februari 2016-Agustus 2017



### MENURUT JAM KERJA



### MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN



## Karakteristik Penduduk Bekerja

BADAN PUSAT STATISTIK  
<https://www.bps.go.id>

# INDEKS KEBAHAGIAAN INDONESIA TAHUN 2017

Berita Resmi Statistik No. 79/08/Th. XX, 15 Agustus 2017



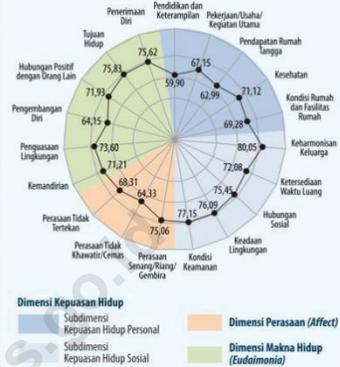
**a** Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 1 (satu) dimensi, yaitu: Kepuasan Hidup.

**b** Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu:  
 • Kepuasan Hidup,  
 • Perasaan (*Affect*),  
 • Makna Hidup (*Eudaimonia*).

- 71.07** INDEKS DIMENSI KEPUASAN HIDUP
- 68.59** INDEKS DIMENSI PERASAAN (AFFECT)
- 72.23** INDEKS DIMENSI MAKNA HIDUP (EUDAIMONIA)



## INDEKS INDIKATOR PENYUSUN INDEKS KEBAHAGIAAN INDONESIA TAHUN 2017



Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 merupakan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) pada skala 0-100. Titik pada grafik menunjukkan besaran indeks pada setiap indikator. Semakin jauh titik dari sumbu menunjukkan semakin tinggi besaran indeksnya.

**BADAN PUSAT STATISTIK**  
<https://www.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)

ISSN 2087-930X

